RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025 - 2029



AYO BANGUN NTT

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)
Provinsi Nusa Tenggara Timur

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
7. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
10. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

12. Indikator ...

12. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
13. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
14. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
15. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
16. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
20. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

(1) Maksud penyusunan RPJMD Provinsi Nusa Teggara Timur, terdiri dari:
   a. memberi arah pembangunan jangka menengah bagi Pemerintah Daerah dengan mempedomani arah pembangunan jangka menengah Nasional;
   b. sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral jangka menengah yang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
   c. secara politik menjadi acuan bagi Gubernur untuk menjalankan Visi dan Misi pembangunan Daerah;
   d. secara materiil menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD dan Renja PD; dan
   e. secara materil menjadi acuan bagi berbagai komponen masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka Menengah Derah.
(2) Tujuan RPJMD, terdiri dari:
   a. menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
   b. menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan prioritas pembangunan pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah Daerah;
   c. menetapkan sasaran pokok serta indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah dan target capaian pada setiap sasaran pokok sebagai dasar pengukuran tingkat perwujudan Visi pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029;

d. sebagai ...

d. sebagai landasan operasional bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan prioritas dan sasaran serta target capaiannya untuk setiap tahun; dan
e. sebagai landasan materiil bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan kewilayahan dan target dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

BAB II
SISTEMATIKA DAN ISI RPJMD
Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD terdiri dari:
a. Bab I Pendahuluan;
b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
c. Bab III Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah;
d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
e. Bab V Penutup.
(2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 4

(1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
(2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 5

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Agustus 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 22 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

KOSMAS D. LANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 006

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : (6-87/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 dirancang sebagai perwujudan komitmen daerah dalam melaksanakan pembangunan yang tidak hanya menjawab isu-isu strategis lokal, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dalam hal ini, perencanaan daerah harus mengacu pada kerangka RPJPD dan tetap terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029. Keterpaduan ini sangat penting agar pembangunan di Nusa Tenggara Timur dapat berjalan harmonis dalam skala regional maupun nasional dan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/SDGs)* yang telah menjadi komitmen global Indonesia.

Secara filosofis, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 didasarkan pada pertimbangan "bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum, kemakmuran dan keadilan sosial bagi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka penyelenggaraan pembangunan di daerah harus dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan dan sinergis". Disisi yang lain, Peraturan Daerah ini didasarkan pada landasan sosiologis "bahwa untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 sebagai arah dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah".

Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 juga memiliki landasan yuridis yang kuat yakni "bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta mengisi kekosongan hukum dalam penyelengaraan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu adanya regulasi yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029".

Walau demikian, sebagai peraturan yang dibentuk berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi, maka peraturan daerah ini disusun berdasarkan perintah dari ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Mengusung ...

Mengusung Visi *"NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan"*, Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025–2029 mengatur ketentuan mengenai definisi, batasan pengertian, singkatan, akronim, dan batang tubuh yang terdiri dari 11 (sebelas) Pasal, serta disertai lampiran yang memuat isi dan uraian RPJMD Tahun 2025–2029, terdiri dari:

a. Bab I Pendahuluan;
b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
c. Bab III Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah;
d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
e. Bab V Penutup.

Diundangkannya Peraturan Daerah ini akan menjadi dasar legitimasi yuridis dalam penyelenggaraan pembangunan di Nusa Tenggara Timur dalam periode 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup

jelas Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 0138

LAMPIRAN ...

DAFTAR ISI

Daftar Isi ..... **i**
Daftar Tabel ..... **iii**
Daftar Gambar ..... **vi**
BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1 LATAR BELAKANG I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN I-4
1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA I-7
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN I-9
1.4.1 Maksud I-9
1.4.2 Tujuan I-9
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN I-10

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH **II-1**
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
1) Posisi dan Peran Strategis Daerah II-1
2) Potensi Sumber Daya Alam II-7
3) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup II-23
4) Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan . II-26
5) Lingkungan Hidup Berkualitas II-28
6) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim .. II-30
7) Demografi II-32
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-34
1) Kesejahteraan Ekonomi II-34
2) Kesehatan Untuk Semua II-40
3) Pendidikan Berkualitas yang Merata II-42
4) Perlindungan Sosial yang Adaptif II-43
5) Beragam Maslahat dan Berkebudayaan Maju II-44
6) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif II-45
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah II-49
1) Daya Saing Sumber Daya Manusia II-49
2) Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi II-50
3) Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru II-52
4) Transformasi Digital II-53
5) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global II-54
6) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi II-55
7) Stabilitas Ekonomi Makro II-60
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II-60
1) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif II-60
2) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial II-62

3) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan II-62
4) Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah II-63
a. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar II-63
1) Urusan Pendidikan II-63
2) Urusan Kesehatan II-65
3) Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman ... II-67
4) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-70
5) Urusan Sosial II-70
b. Urusan Pemerintahan Wajib tidak Berkaitan Pelayanan Dasar II-72
1) Urusan Tenaga Kerja II-72
2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-78
3) Urusan Pertanahan II-80
4) Urusan Lingkungan Hidup..... II-80
5) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... II-81
6) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa . II-82
7) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..... II-83
8) Urusan Perhubungan II-83
9) Urusan Komunikasi dan Informatika II-85
10) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah II-86
11) Urusan Penanaman Modal II-88
12) Urusan Kepemudaan dan Olahraga II-89
13) Urusan Statistik..... II-89
c. Urusan Pilihan..... II-90
1) Urusan Kelautan dan Perikanan II-90
2) Urusan Pariwisata II-91
3) Urusan Pertanian II-92
4) Urusan Kehutanan II-102
5) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral II-103
6) Urusan Perdagangan II-104
7) Urusan Perindustrian II-105
8) Urusan Transmigrasi II-107
2.1.5 Standar Pelayanan Minimal..... II-109
2.1.6 Hasil Evaluasi RPJMD Periode Sebelumnya..... II-111
1) Kemiskinan II-111
2) Indeks Pembangunan Manusia II-112
3) Pertumbuhan Ekonomi II-112
4) PDRB per Kapita II-113
5) Inflasi II-113
6) Indeks Gini II-114
7) Indeks Pembangunan Gender. II-114

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH II-114
2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu (2019-2024) II-115
1) Kinerja Pelaksanaan APBD II-115
2.2.2 Neraca Daerah II-120
2.2.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu II-127
1) Proporsi Penggunaan Anggaran II-128
2) Analisis Pembiayaan II-134
2.2.4 Kerangka Pendanaan II-136
2.2.5 Proyeksi Pendapatan dan Belanja II-137
1) Proyeksi Pendapatan Daerah II-137
2) Proyeksi Belanja II-145
2.2.6 Proyeksi Pembiayaan Daerah II-154
2.2.7 Perhitungan Kerangka Pendanaan II-159
2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS II-160
2.3.1 Permasalahan Pembangunan II-161
Permasalahan Pembangunan berdasarkan Transformasi Pembangunan
1) Transformasi Sosial II-161
2) Transformasi Ekonomi II-164
3) Transformasi Tata Kelola II-169
4) Transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas Makro dan Kepemimpinan Daerah II-170
5) Transformasi Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi II-170
Permasalahan Pembangunan berdasarkan Aspek Pembangunan
2.3.2 Isu Strategis II-175
1) Isu Strategis Internasional / Global II-175
2) Isu Regional II-180
3) Isu Strategis Nasional II-180
4) Isu Strategis Daerah II-184

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1
3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN III-1
3.1.1 Visi dan Misi III-1
1) Keselarasan Visi Misi RPJMD dengan Visi Misi RPJPD III-2
2) Keselarasan Visi Misi RPJMD dengan Visi Misi RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III-7
3) Keselarasan Misi RPJMD dengan Tujuan SDGs Tahun 2015-2029 ..... III-8
3.1.2 Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 . III-13
3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-27
3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah III-27
3.2.2 Pentahapan Arah Kebijakan III-46
1) Pentahapan arah kebijakan pembangunan Provinsi NTT III-46
3.2.3 Arah Pembangunan III-56

1) Arah Pembangunan per Wilayah Pulau..... III-56
2) Lokus Pembangunan Wilayah di Provinsi NTT III-59
3.2.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah III-66
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.... IV-1
4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH IV-1
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..... IV-68
BAB V PENUTUP V-1
5.1 KAIDAH PELAKSANAAN..... V-1
5.2 PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN ... V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Distribusi Luasan Daya Dukung Daya Tampung Air Provinsi NTT	II-23
Tabel 2.2	Kondisi dan Proyeksi Luas Daya Dukung Lahan Pertanian Pangan Provinsi NTT Tahun 2022-2029	II-24
Tabel 2.3	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Provinsi NTT .... Tahun 2020 -2024	II-29
Tabel 2.4	Target dan Capaian pengurangan dan penanganan sampah Provinsi NTT Tahun 2022-2023	II-29
Tabel 2.5	Jumlah Timbulan Sampah Yang Didaur Ulang Provinsi NTT Tahun 2022-2023.....	II-30
Tabel 2.6	Penduduk Lansia dan Disabilitas menurut Jenis Kelamin di Provinsi NTT Tahun 2022	II-33
Tabel 2.7	Jumlah dan Persentase Balita Stunting per Kabupaten /Kota di Provinsi NTT Tahun 2021-2024	II-41
Tabel 2.8	Indeks Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2020-2025	II-52
Tabel 2.9	Indikator Kinerja Utama yang Mendukung Tiga Pilar Ekonomi Hijau Provinsi NTT Tahun 2024-2026	II-53
Tabel 2.10	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	II-57
Tabel 2.11	APS 16 –18 Tahun, APK dan APM SMA/sederajat menurut Jenis Kelamin dan Wilayah di Provinsi NTT Tahun 2023	II-64
Tabel 2.12	Jumlah Sekolah, Murid dan Rasio Murid Guru pada SMA APS 16-18 Provinsi NTT Tahun 2021-2023	II-65
Tabel 2.13	Perkembangan Fasilitas Kesehatan di Provinsi NTT Tahun 2020-2022	II-66
Tabel 2.14	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi NTT Tahun 2021-2023	II-68
Tabel 2.15	Intervensi DAU Pemerintah Provinsi NTT untuk Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2021-2024.....	II-68
Tabel 2.16	Data Besaran *Backlog* Perumahan di Provinsi NTT Tahun 2024	II-69
Tabel 2.17	Luasan Kawasan Kumuh Bidang Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTT Tahun 2023	II-69
Tabel 2.18	Persentase Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin (jiwa) Tahun 2022-2023 .	II-73
Tabel 2.19	Upah Buruh Perempuan dan Laki-laki berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021	II-78
Tabel 2.20	Rekapitulasi Tanah Terdaftar menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT sampai Tahun 2023.....	II-80
Tabel 2.21	Total Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif di Provinsi NTT Tahun 2019-2023	II-81
Tabel 2.22	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke atas yang Mempunyai Nomor Induk Kependudukan di Provinsi NTT Tahun 2018-2022	II-82
Tabel 2.23	Jumlah Kunjungan Kapal Laut dan Pesawat di Provinsi NTT Tahun 2020 - 2023	II-84

Tabel 2.24 Jumlah Penumpang Kapal Laut dan Pesawat di Provinsi NTT Tahun 2020 - 2023 ..... II-84
Tabel 2.25 Data Prasarana Terminal di Provinsi NTT II-84
Tabel 2.26 Data Prasarana Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi NTT II-84
Tabel 2.27 Data Kecelakaan Lalu Lintas di Provinsi NTT Tahun 2024 II-85
Tabel 2.28 Jumlah dan Sebaran Koperasi Aktif di Provinsi NTT Tahun 2023 ..... II-86
Tabel 2.29 Jumlah Modal Sendiri dan Modal Luar Koperasi di Provinsi NTT Tahun 2023 ..... II-87
Tabel 2.30 Realisasi Proyek dan Investasi PMDN menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022 - 2023 ..... II-88
Tabel 2.31 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2023 ..... II-90
Tabel 2.32 Penyebaran dan Nilai Produksi Perikanan Menurut Pulau/Daratan dan Jenis Produksi di Provinsi NTT Tahun 2021 ..... II-90
Tabel 2.33 Produksi Perikanan Tangkap di Laut menurut Pulau/Daratan di Provinsi NTT Tahun 2020 - 2021..... II-91
Tabel 2.34 Produksi Budidaya menurut Pulau/Daratan dan Jenis Komoditas di Provinsi NTT Tahun 2020 - 2021 ..... II-91
Tabel 2.35 Rata – rata Lama Menginap dan TPK di Provinsi NTT Tahun 2020-2022 ..... II-92
Tabel 2.36 Perkembangan Luas Panen, Rata – rata Produksi dan Produksi Padi Provinsi NTT Tahun 2018-2022 ..... II-93
Tabel 2.37 Luas Penggunaan Lahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2022 ..... II-94
Tabel 2.38 Perkembangan Luas Panen, Rata – rata Produksi dan Produksi Jagung di Provinsi NTT Tahun 2012-2022 ..... II-95
Tabel 2.39 Perkembangan Luas Panen, Rata – rata Produksi, dan Produksi Kacang Tanah di Provinsi NTT Tahun 2012-2022 II-96
Tabel 2.40 Perkembangan Luas Panen, Rata – rata Produksi, dan Produksi Kacang Hijau di Provinsi NTT Tahun 2012-2022 II-96
Tabel 2.41 Perkembangan Luas Panen, Rata – rata Produksi, dan Produksi Ubi Kayu di Provinsi NTT Tahun 2018-2022 ..... II-97
Tabel 2.42 Perkembangan Luas Panen, Rata – rata Produksi, dan Produksi Ubi Jalar di Provinsi NTT Tahun 2012-2022 ..... II-98
Tabel 2.43 Perkembangan Luas Panen, Rata – rata Produksi dan Produksi Sayur – sayuran di Provinsi NTT Tahun 2012-2022 ..... II- 99
Tabel 2.44 Perkembangan Luas Panen, Rata – rata Produksi, dan Produksi Buah - buahan di Provinsi NTT Tahun 2012-2022 ..... II-99
Tabel 2.45 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Provinsi NTT Tahun 2023 ..... II-100
Tabel 2.46 Perkembangan Populasi Ternak Besar di Provinsi NTTT Tahun 2023 ..... II-101

Tabel 2.47 Perkembangan Populasi Ternak Kecil di Provinsi NTT Tahun 2023 ..... II-101
Tabel 2.48 Perkembangan Produksi Kelapa di Provinsi NTT Tahun 2018-2022 ..... II-102
Tabel 2.49 Perkembangan Populasi Kopi di Provinsi NTT Tahun 2018 - 2022 ..... II-102
Tabel 2.50 Perkembangan Populasi Kakao di Provinsi NTT Tahun 2018 - 2022 ..... II-102
Tabel 2.51 Produksi Hasil Hutan Per Jenis Kayu di Provinsi NTT Tahun 2022-2023 ..... II-103
Tabel 2.52 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu di Provimsi NTT Tahun 2022-2023 ..... II-103
Tabel 2.53 Komponen dan Potensi Energi Terbarukan di Provinsi NTT II-103
Tabel 2.54 Nilai Ekspor Migas dan Non Migas Provinsi NTT Januari – Desember Tahun 2023 dan Perkembangan Ekspor Migas dan Non Migas Provinsi NTT Tahun 2022-2023 ..... II- 104
Tabel 2.55 Perkembangan Indeks Komposit Kawasan Transmigrasi Bajawa – Kabupaten Ngada Tahun 2022 ..... II-107
Tabel 2.56 Perkembangan Indeks Komposit Kawasan Transmigrasi Larantuka – Kabupaten Flores Tahun 2022 ..... II-108
Tabel 2.57 Perkembangan Indeks Komposit Kawasan Transmigrasi Mbay – Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 ..... II-108
Tabel 2.58 Perkembangan Indeks Komposit Kawasan Transmigrasi Sano Ngaong – Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 II-109
Tabel 2.59 Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2019 - 2024 ..... II-117
Tabel 2.60 Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2019-2024 ..... II-120
Tabel 2.61 Neraca Provinsi NTT Tahun 2019-2024 ..... II-122
Tabel 2.62 Kinerja Belanja Daerah Tahun 2019-2024 ..... II-129
Tabel 2.63 Struktur Belanja Daerah Tahun 2019-2024 ..... II-131
Tabel 2.64 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur II-132
Tabel 2.65 Defisit Riil Anggaran Provinsi NTT Tahun 2019-2024..... II-134
Tabel 2.66 Komposisi Penutup Defisit Riil APBD Anggaran Provinsi NTT Tahun 2019-2024 ..... II-135
Tabel 2.67 Rata-rata Pertumbuhan dan Proyeksi Pendapatan Daerah II-140
Tabel 2.68 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025-2030 ..... II-143
Tabel 2.69 Rata – rata Pertumbuhan Belanja Tahunan Daerah Tahun 2019-2024 dan Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2025-2029 ..... II-150
Tabel 2.70 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025-2030 ..... II-151
Tabel 2.71 Proyeksi Pembiayaan Daerah II-154
Tabel 2.72 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025-2030 ..... II-156
Tabel 2.73 Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2030 ..... II-159
Tabel 2.74 Gambaran Umum Kondisi Daerah dan Permasalahan..... II-173
Tabel 2.75 Persandingan Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.... II-188

Tabel 2.76	Persandingan Isu Strategis Daerah dan Visi, Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029	II-199
Tabel 3.1	Sasaran Visi dan Indikator Visi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 disandingkan dengan Sasaran Visi dan Indikator Visi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029	III-3
Tabel 3.2	Keselarasan Visi, Misi RPJMD Provinsi NTT 2025-2029 dengan Visi, Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045	III-5
Tabel 3.3	Keselarasan Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMN Tahun 2025-2029	III-7
Tabel 3.4	Keselarasan Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2015-2029	III-11
Tabel 3.5	Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah	III-16
Tabel 3.6	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Provinsi NTT	III-28
Tabel 3.7	Penahapan Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2026-2030	III-48
Tabel 3.8	Lokus Pembangunan Wilayah di Provinsi NTT Tahun 2025-2029	III-60
Tabel 3.9	Pemetaan Misi, Pilar Pembangunan dan Dasa Cita	III-66
Tabel 3.10	Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2029	III-72
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi NTT Tahun 2026-2030	IV-3
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama	IV-69
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah	IV-70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanan Pembangunan Lainnya I-8
Gambar 2.1 Peta Kedalaman Laut di Wilayah Provinsi NTT II-3
Gambar 2.2 Kondisi Tektonik di Wilayah NTT II-4
Gambar 2.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi NTT Tahun 2010 -2022 ..... II-6
Gambar 2.4 Peta Kawasan Hutan II-7
Gambar 2.5 Peta Daya Dukung Daya Tampung Air Provinsi NTT... II-24
Gambar 2.6 Peta Daya Dukung Pertanian II-25
Gambar 2.7 Rasio Elektrifikasi Provinsi NTT Tahun 2018-2023..... II-26
Gambar 2.8 Prevelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Provinsi NTT Tahun 2020-2024 ..... II-28
Gambar 2.9 Indeks Ketahanan Pangan Provinsi NTT II-28
Gambar 2.10 Indeks Resiko Bencana Provinsi NTT Tahun 2021-2024 ..... II-31
Gambar 2.11 Indeks Kapasitas Daerah Provinsi NTT Tahun 2021-2024 II-32
Gambar 2.12 Komposisi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis KelaminTahun 2023..... II-32
Gambar 2.13 Jumlah Penduduk Provinsi NTT menurut Kelompok Umur (jiwa) dan Jenis Kelamin Tahun 2024 ..... II-33
Gambar 2.14 Persen Penduduk Miskin Provinsi NTT Tahun 2020-2024 ..... II-34
Gambar 2.15 Tingkat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem II-35
Gambar 2.16 Sebaran Desil Penerima Program Kemiskinan/ Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 dari APBD Provinsi NTT Tahun 2024..... II-35
Gambar 2.17 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2020-2024 ..... II-37
Gambar 2.18 Tingkat Inflasi di Provinsi NTT Tahun 2020-2024 ..... II-37
Gambar 2.19 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT Tahun 2010-2024 ..... II-38
Gambar 2.20 Mata Pencaharian Penduduk Provinsi NTT Tahun 2023 II-38
Gambar 2.21 Sensitivitas Matapencaharian penduduk Provinsi NTT Tahun 2023 ..... II-39
Gambar 2.22 Peta Ketahanan Matapencaharian Penduduk Provinsi NTT Tahun 2023 ..... II-39
Gambar 2.23 Usia Harapan Hidup II-40
Gambar 2.24 Indeks Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2010-2018 ..... II-42
Gambar 2.25 Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja II-44
Gambar 2.26 Perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2018-2023..... II-44
Gambar 2.27 Komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2022..... II-45
Gambar 2.28 Komponen Indeks Kualitas Keluarga Provinsi NTT

Tahun 2020 -2022 ..... II-45
Gambar 2.29 Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pemenuhan Hak Anak dan Indeks Perlindungan Khusus Anak Provinsi NTT Tahun 2019-2022..... II-46
Gambar 2.30 Indeks Ketimpangan Gender Provinsi NTT Tahun 2018-2024 ..... II-47
Gambar 2.31 Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi NTT II-48
Gambar 2.32 Komponen Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi NTT Tahun 2022..... II-49
Gambar 2.33 Indeks Modal Manusia *(Human Capital Index)* Provinsi NTT Tahun 2023 ..... II-49
Gambar 2.34 Rasio Ketergantungan Hasil Proyeksi Penduduk Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2010-2035 ..... II-50
Gambar 2.35 Proporsi PDRB Industri Pengolahan Provinsi NTT Tahun 2020-2024 ..... II-50
Gambar 2.36 Sebaran Sub Sektor, Wilayah dan Pelaku Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2020 ..... II-51
Gambar 2.37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2012-2025 ..... II-52
Gambar 2.38 Komponen Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi NTT Tahun 2019-2022 ..... II-54
Gambar 2.39 Proporsi PMTB terhadap Total PDRB di Provinsi NTT Tahun 2020-2024 ..... II-54
Gambar 2.40 Nilai ICOR di Provinsi NTT Tahun 2020-2024 ..... II-54
Gambar 2.41 Proporsi Ekspor Barang dan Jasa terhadap Total PDRB di Provinsi NTT Tahun 2020-2024 ..... II-55
Gambar 2.42 Persentase Desa Mandiri di Provinsi NTT Tahun 2021-2023 ..... II-55
Gambar 2.43 Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat Provinsi NTT Tahun 2024-2043 ... II-58
Gambar 2.44 Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan Provinsi NTT Tahun 2024-2043 ..... II-59
Gambar 2.45 Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut Provinsi NTT Tahun 2024-2043.... II-59
Gambar 2.46 Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara Provinsi NTT Tahun 2024-2043.. II-59
Gambar 2.47 Rasio Penerimaan Pajak seluruh Pemerintah Daerah terhadap PDRB di Provinsi NTT Tahun 2020-2024..... II-60
Gambar 2.48 Indeks SPBE Provinsi NTT Tahun 2020-2023..... II-61
Gambar 2.49 Indeks SAKIP Provinsi NTT Tahun 2018-2023..... II-61
Gambar 2.50 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi NTT Tahun 2019-2023 ..... II-62
Gambar 2.51 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi NTT Tahun 2009-2023 ..... II-62
Gambar 2.52 Indeks Daya Saing Daerah Provinsi NTT Tahun 2019-2023 ..... II-63
Gambar 2.53 Komponen IDSD Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2023 II-63

Gambar 2.54 APS 16-18 Tahun, APK dan APM SMA/Sederajat Provinsi NTT Tahun 2019-2023 ..... II-64
Gambar 2.55 Persentase Penduduk yang mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di NTT Tahun 2023 ..... II-66
Gambar 2.56 Persentase Lansia Bekerja dan Penghasilan yang diperoleh Tahun 2023 ..... II-71
Gambar 2.57 Persentase Pekerja Anak di Provinsi NTT dibandingkan Nasional Tahun 2021-2023..... II-72
Gambar 2.58 Persentase Penduduk Perempuan yang Memiliki Usaha di Provinsi NTT berdasarkan Omzet..... II-74
Gambar 2.59 TPAK, TPT, dan Pekerja di NTT Tahun 2023 ..... II-75
Gambar 2.60 Tenaga Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin di NTT Tahun 2023... II-76
Gambar 2.61 Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan 5 (lima) Jenis Pekerjaan Terbanyak Tahun 2024..... II-76
Gambar 2.62 Persentase Pejabat Struktur Provinsi NTT Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021-2024..... II-79
Gambar 2.63 Luasan Lahan Suaka Alam dan Pelestarian Alam II-81
Gambar 2.64 Indeks Desa Membangun Provinsi NTT Tahun 2021-2023. II-83
Gambar 2.65 Total *Fertility Rate* (TFR) Provinsi NTT Tahun 2000-2020.. II-83
Gambar 2.66 Indeks SPBE Provinsi NTT Tahun 2020-2023..... II-86
Gambar 2.67 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi NTT Tahun 2019-2023 ..... II-89
Gambar 2.68 Persebaran Jumlah Rumah Makan/ Restauran Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022 ..... II-92
Gambar 2.69 TPK Hotel Berbintang di Provinsi NTT Januari – Desember Tahun 2020 ..... II-92
Gambar 2.70 Perkembangan Luas Panen Padi Nasional Tahun 2022 II-93
Gambar 2.71 Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Tahun 2022 II-104
Gambar 2.72 Persentase banyaknya Industri Mikro dan Kecil di Provinsi NTT Tahun 2022 ..... II-105
Gambar 2.73 Tenaga Kerja pada Industri Mikro dan Kecil menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022 ..... II-106
Gambar 2.74 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi NTT Tahun 2019-2024 ..... II-110
Gambar 2.75 Grafik Perbandingan Struktur Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024 ..... II-118
Gambar 2.76 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT Tahun 2019-2024..... II-120
Gambar 2.77 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi NTT Tahun 2019-2024..... II-133
Gambar 3.1 Arah Pembangunan Nasional dan Prioritas Tahunan Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 ..... III-47
Gambar 3.2 Pemetaan Misi, Pilar Pembangunan dan Dasa Cita III-70
Gambar 3.3 Visi, Misi dan Pilar Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025-2029 ..... III-71

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, diselenggarakan dengan menjunjung prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan kekhasan masing-masing daerah. Pendekatan ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan daya saing daerah. Seluruhnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan pembangunan daerah sebagai transformasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Pembangunan daerah ini harus merujuk pada Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Proses pembangunan daerah dimulai dengan perencanaan yang matang, sebagai fungsi manajerial yang krusial untuk menetapkan arah, prioritas, dan keberhasilan pembangunan, sehingga dapat menciptakan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Landasan Perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah wajib menyusun beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen-dokumen tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang memuat rencana pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang berisi rencana pembangunan untuk jangka waktu lima tahun; dan (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang disusun dengan jangka waktu satu tahun, sebagai pedoman dalam mengimplementasikan rencana pembangunan tahunan.

Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak di Indonesia yang dilaksanakan pada 27 November 2024, telah terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk periode 2025-2030, yaitu E. Melkiades Lakalena dan Johni Asadoma. Keduanya dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Sesuai dengan amanat undang-undang, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen tersebut harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan dalam bentuk Peraturan Daerah oleh DPRD. RPJMD tersebut merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan bersifat

indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Penyusunan RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Penyusunan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 akan mengikuti beberapa tahapan sesuai pentahapan di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Konsultasi Rancangan Awal;
4. Penyusunan Rancangan;
5. Musrenbang;
6. Perumusan Rancangan Akhir;
7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
8. Penyampaian Ranperda kepada DPRD;
9. Pembahasan Ranperda;
10. Evaluasi Ranperda; dan
11. Penetapan Ranperda.

Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan berbagai pendekatan yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain:

1. **Teknokratik**, yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. **Partisipatif**, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan rencana.
3. **Politis,** yang merumuskan dan menetapkan visi dan misi jangka panjang daerah bersama dengan DPRD, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD oleh setiap kepala daerah terpilih.
4. **Atas-bawah (*Top-Down*)** dan **bawah-atas (*Bottom-Up*),** dimana hasil perencanaan diselaraskan melalui musyawarah pembangunan yang dilakukan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Nasional.

Pendekatan-pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang lebih komprehensif dan inklusif, yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Sedangkan, pendekatan perencanaan pembangunan daerah secara substansi dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat :

1. ***Holistik-tematik***, mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

2. ***Integratif,*** menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3. ***Spasial,*** mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Kemudian, penyusunan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 memperhatikan:

1. Arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator pada RPJMN Tahun 2025-2029, sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.
2. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 yang disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMN Tahun 2025-2029.
3. RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan sebagai pedoman terutama pada arah kebijakan dan sasaran pokok di tahap 1 (satu) RPJPD Tahun 2025-2045.
4. Hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan evaluasi RPD 2024-2026 untuk penyusunan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.
5. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu – isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.
6. Berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043.
7. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, antara lain Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Induk Pariwisata, Rencana Induk percepatan pembangunan Pulau Sumba tahun 2023 - 2042 dan Dokumen Rencana Induk lainnya.

Selanjutnya, di dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, guna menjamin keberlanjutan pembangunan Daerah, maka telah dilakukan integrasi perencanaan pembangunan dengan prinsip – prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) yang tertuang di dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dimana dari 235 indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi kewenangan provinsi hanya 223 indikator yang relevan dengan Provinsi NTT, sedangkan 12 indikator lainnya tidak relevan dengan Provinsi NTT.

Secara umum, strategi pencapaian pembangunan berkelanjutan 5 (lima) Tahun ke depan berdasarkan pada hasil KLHS RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 meliputi analisis capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perumusan isu strategis, permasalahan, sasaran strategis daerah dan rekomendasi serta tindak lanjut berdasarkan target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada Tahun 2030 dan juga visi Indonesia Emas 2045.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum Penyusunan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 meliputi dasar peraturan perundang-undangan dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan dan dasar peraturan perundangan-undangan yang diakui sebagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Peraturan perundang-undangan dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan :
   a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
   b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
   c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perubahannya;
   d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
   e. Undang – Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
   f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
h. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
i. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
j. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
k. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
o. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
q. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
r. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
s. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
t. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
u. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
v. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
w. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
x. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132); dan
y. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0133).

2. Peraturan perundangan-undangan yang diakui sebagai peraturan perundang-undangan:
   a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturn Menteri Dalam Negeri Nompr 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); dan
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 845).

Selain itu, juga terdapat yang dipedomani dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Penyusunan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dilakukan dengan mempedomani dan memperhatikan dokumen lainnya sebagai berikut:

1. Penyusunan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dilakukan selaras dan berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029;

2. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 Provinsi NTT dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMN Tahun 2025-2029;
3. RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan sebagai pedoman terutama pada arah kebijakan dan sasaran pokok di tahap 1 (satu) RPJPD Tahun 2025-2045;
4. Penyusunan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 memperhatikan hasil evaluasi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 (periode sebelumnya) dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 digunakan sebagai masukan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029. Substansi Hasil Evaluasi RPJMD periode sebelumnya yang diperhatikan yaitu hasil capaian Pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 untuk penyusunan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029;
5. Penyusunan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 memperhatikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan/atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029. Substansi RPPLH yang diperhatikan yaitu kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Substansi KLHS yang diperhatikan yaitu kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati serta permasalahan dan isu – isu strategis;
6. Penyusunan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW. Substansi RTRW yang dipedomani yaitu arah pengembangan wilayah baik pada struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis serta rencana program dan kebijakan; dan
7. Penyusunan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 memperhatikan Rencana Induk Penguatan Jaringan Pengetahuan dan Inovasi Daerah (RIPJPID) yang mendukung pencapaian RPJMD melalui penguatan ekosistem pengetahuan dan inovasi di daerah. Melalui pendekatan kolaboratif *hexahelix*, RIPJPID memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah sekaligus memastikan pembangunan yang adaptif, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan lokal.

Keterkaitan penyusunan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 sebagaimana dijelaskan di atas dengan dokumen lainnya disajikan pada gambar berikut ini.

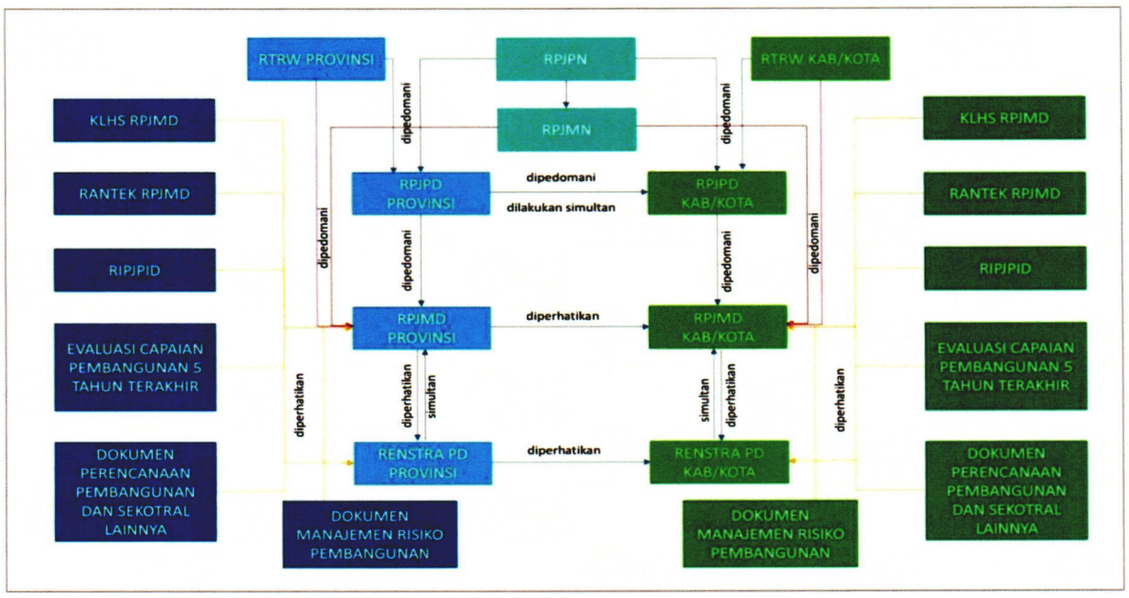

Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025 – 2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Memberi arah pembangunan jangka menengah bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mempedomani arah pembangunan jangka menengah Nasional;
2. Sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi NTT dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral jangka menengah yang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
3. Secara politik menjadi acuan bagi Kepala Daerah untuk menjalankan visi dan misi pembangunan daerah;
4. Secara materiil menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi NTT dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
5. Secara materiil menjadi acuan bagi berbagai komponen masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi NTT.

1.4.2. Tujuan

RPJMD Tahun 2025-2029 Provinsi NTT disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTT Tahun 2025-2029;
2. Menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dan prioritas pembangunan pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah daerah;

3. Menetapkan sasaran pokok serta indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah dan target capaian pada setiap sasaran pokok sebagai dasar pengukuran tingkat perwujudan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTT Tahun 2025 – 2029;
4. Sebagai landasan operasional bagi Pemerintah Provinsi NTT dalam menetapkan prioritas dan sasaran serta target capaiannya untuk setiap tahun; dan
5. Sebagai landasan materiil bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan kewilayahan dan target dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. Pendahuluan, berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Penyajian pada Bab Pendahuluan ini menjelaskan ringkasan substansi pada bab-bab berikutnya, sehingga dapat dipahami dengan baik.

BAB II. Gambaran Umum Daerah, menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis terkait gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum. Dilanjutkan dengan penjelasan terkait kondisi daerah tentang SPM, rencana pembangunan infrastruktur daerah oleh APBN atau APBD Provinsi di Kabupaten/Kota, gambaran keuangan daerah dengan penjelasan tentang realisasi Tahun 2019-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun 2025-2030. Dalam bab ini memuat tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah.

BAB III. Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah menjelaskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029. Memuat juga strategi, arah kebijakan dan program prioritas dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029.

BAB IV. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menguraikan daftar program perangkat daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah. Pada Bab ini juga memuat target keberhasilan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. Penutup menjelaskan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

1) Posisi dan Peran Strategis Daerah

Provinsi NTT terletak di sebelah selatan katulistiwa pada posisi 8°- 12° Lintang Selatan dan 118°–125° Bujur Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuthakiran Kode, Data Wilayah Adminstrasi Pemerintahan dan Pulau, Provinsi NTT terdiri dari 609 Pulau yang meliputi 21 Kabupaten dan 1 Kota Madya, 315 Kecamatan, 305 Kelurahan dan 3.137 Desa dengan total luas wilayah yaitu 46.446,644 km². Kabupaten Sumba Timur merupakan wilayah terluas yaitu sebesar 6.984 km² dan Kota Kupang merupakan wilayah paling kecil dengan luas 159 km². Perlu diketahui Provinsi NTT terdiri dari 82 persen desa/kelurahan di NTT terletak di daerah lereng dengan rincian, 20 desa/kelurahan berada di lembah, 2.849 desa/ kelurahan berada di lereng dan 581 desa/kelurahan berada di dataran (BPS, 2024).

Secara fisik batas wilayah Provinsi NTT, adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Samudera Hindia (Negara Australia);
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Laut Timor; dan
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Selat Sape (Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Kawasan Perbatasan, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Provinsi yang secara geografis berbatasan langsung dengan Negara RDTL dan Australia, jumlah Kabupaten, Kecamatan dan Desa berdasarkan Perpres No 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 yang berbatasan langsung dengan RDTL dan Australia adalah 7 Kabupaten, 38 Kecamatan dan 194 desa. Secara fisik batas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur di kawasan perbatasan berpotensi pada terjadinya bencana sosial dan rentan terhadap penyebaran wabah zoonosis yang mengancam keaneka ragaman hayati maupun manusia, dalam rangka mengatur dan mengawasi lalu lintas orang, barang serta menigkatkan keamanan dan keselamatan maka Pemerintah Pusat telah membangun empat PLBN di Napan, Wini, Motaain dan Motamasin, tiga PLBN direncananakan akan dibangun di Maritaing, Turiskain dan Haumeniana dan Oepoli.

Klimatologi, merupakan proyeksi perubahan panjang musim hujan wilayah Provinsi NTT periode 2020-2049 September, Oktober, November cukup bervariasi, sebagian besar wilayah di Provinsi NTT mengalami pengurangan dalam kategori rentang berkurang lebih dari 2 dasarian sampai cenderung tetap, dan sebagian kecil bertambah dalam rentang 1 sampai 2 dasarian. Untuk Suhu Udara, Perubahan iklim juga identik

dengan meningkatnya suhu udara yang berdampak pada perubahan musim dan peningkatan frekuensi kejadian cuaca ekstrim. Wilayah NTT secara umum merupakan wilayah yang dominan beriklim kering, dimana dalam setahun musim hujan berlangsung selama 5 bulan (November – Maret), dan musim kemarau berlangsung selama 7 bulan (April – Oktober) (Faqih, dkk, 2015). Keragaman iklim pada wilayah NTT erat kaitannya dengan pola *monsoonal* (musiman) yang dicirikan oleh bentuk pola hujan yang bersifat unimodal (satu puncak musim hujan, yaitu pada Januari atau Februari). Tipe hujan eratik yang erat kaitannya dengan pola monsoon ini menyebabkan hujan akan terkonsentrasi pada waktu yang singkat, namun sebaliknya musim kemarau akan terjadi lebih lama dibandingkan musim hujan (8 bulan) dalam satu tahun.

Peningkatan nilai suhu udara dapat terjadi akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) seperti CO2, CH2, N2O, HFC, PFC, dan SF6 di amosfer. Selin dari alam, emisi GRK dapat bersumber dari buatan manusia seperti sektor industri dan energi serta akibat dari adanya migrasi penduduk sehingga terjadi peningkatan konsentrasi jumlah penduduk pada suatu wilayah yang turut memberikan kontribusi salah satunya dalam penggunaan kendaraan bermotor. Peningkatan suhu udara permukaan memberikan respon baik buruk yang cukup signifikan terhadap kondisi alam dan pola hidup manusia. Berdasarkan analisis BMKG terkait laju perubahan suhu rata- rata tahunan periode 1981 sampai dengan 2022 untuk wilayah Provinsi NTT pada umumnya meningkat. Wilayah Timor, Flores dan Sumba berada dalam rentang 0,6-0,8°C/ 30 Tahun, wilayah Sabu Raijua berada dalam rentang 0,4-0,6°C/ 30 Tahun. Sedangkan untuk wilayah Alor berada dalam rentang 0,2-0,4°C/ 30 Tahun. Rincian selengkapnya terkait lanjut perubahan suhu rata-rata Tahunan Periode 1981-2022 (BMKG,2023).

Topografi, Kondisi topografis NTT sebagian besar berbukit-bukit dan bergunung. Kawasan yang tergolong datar hingga landai menyebar secara sporadis pada gugusan-gugusan yang sempit, di antara lekukan perbukitan atau memanjang mengikuti garis pantai. Lahan dengan kemiringan <40, yang cocok untuk kawasan budidaya mencapai 64,54 persen, sebagian besar di antaranya (38,07 persen dari total luas lahan) memiliki kemiringan 15–40 persen. Sisanya, 35,46 Persen merupakan lahan dengan kemiringan >40 persen, dan tidak dapat dikelola sebagai areal budidaya. Kondisi geomorfologis/bentang alam yang demikian menimbulkan potensi erosi yang sangat tinggi. Akibatnya, laju degradasi sumberdaya lahan yang tinggi (KLHS RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029). kondisi tanah yang kurang padat, batuan/geology yang kurang kuat dapat menjadi pemicu terjadinya bidang gelincir longsor. Perairan pesisir NTT sampai batas 12 mil memiliki kedalaman yang bervariasi, dari yang dangkal sampai kedalaman lebih dari 300 meter seperti perairan di selatan Lembata dan tenggara Alor. Mengacu kepada kriteria laut dalam (kedalaman lebih dari 200m), maka pada jarak sampai 4 mil diukur dari daratan, perairan yang berada di hadapan daratan sebagian besar kabupaten/kota di NTT merupakan perairan dangkal sampai perairan dalam.

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2019, panjang garis pantai Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat mencapai 5.934,624739 kilometer. Garis pantai ini merupakan batas pertemuan antara daratan dan laut pada saat pasang tertinggi, yang sifatnya dinamis karena dapat berubah akibat proses abrasi. Abrasi merupakan pengikisan daratan oleh gelombang laut yang terus-menerus menghantam pantai, sehingga menyebabkan berkurangnya luas daratan. Kondisi batimetri perairan NTT juga menunjukkan variasi kedalaman yang menarik. Kabupaten yang tidak memiliki perairan dalam pada jarak 4 mil dari garis pantai antara lain Sumba Barat Daya, Malaka, Timor Tengah Selatan (TTS), dan Kota Kupang. Pada jarak 4 hingga 12 mil dari pantai, umumnya perairan menjadi semakin dalam, kecuali di wilayah tertentu yang berdekatan dengan pulau lain atau bukit bawah laut, seperti yang banyak ditemukan di sekitar Flores. Sebaliknya, perairan dangkal umumnya berada di wilayah selat atau perairan pesisir yang berdampingan langsung dengan daratan. Secara umum, wilayah utara NTT, mulai dari Flores hingga Alor, memiliki batimetri yang lebih dalam dibandingkan dengan wilayah selatan seperti Sumba hingga Timor.

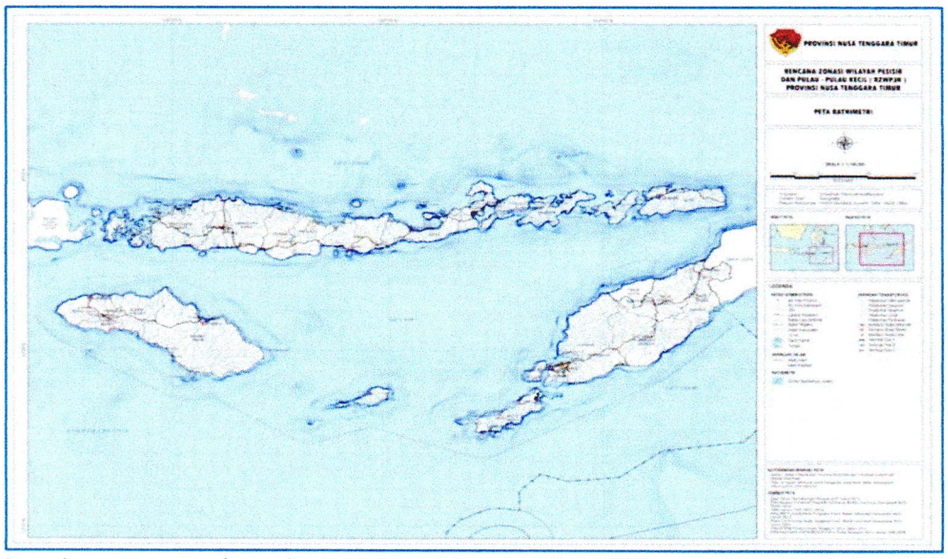

Sumber: Peta Batimetri, RZWP3K Tahun 2025-2029

Gambar 2. 1 Peta Kedalaman Laut di wilayah Provinsi NTT

Kondisi **Geologis** Nusa Tenggara Timur (NTT) mencerminkan salah satu wilayah paling kompleks dan dinamis secara tektonik di Indonesia. Terletak pada pertemuan tiga lempeng besar Indo Australia, Eurasia, dan mikro lempeng Laut Banda—wilayah ini mengalami interaksi tektonik berupa subduksi, kolisi benua, dan aktivitas vulkanik yang intensif. Zona transisi dari subduksi di bagian barat menuju kolisi di bagian timur menjadikan NTT sebagai lokasi deformasi aktif, ditandai oleh struktur geologi kompleks seperti sesar naik, *thrust faults*, dan sistem lipatan masif, khususnya di Timor. Litologi wilayah ini sangat beragam, mulai dari batuan vulkanik Kuarter di Flores, batuan sedimen Tersier di Timor dan Sumba, hingga kemunculan ofiolit dan batuan metamorf tekanan tinggi di Alor dan Timor. Formasi mélange dan olistostrom yang terbentuk akibat deformasi dan longsoran bawah laut memperkuat karakter geologi kolisional kawasan ini.

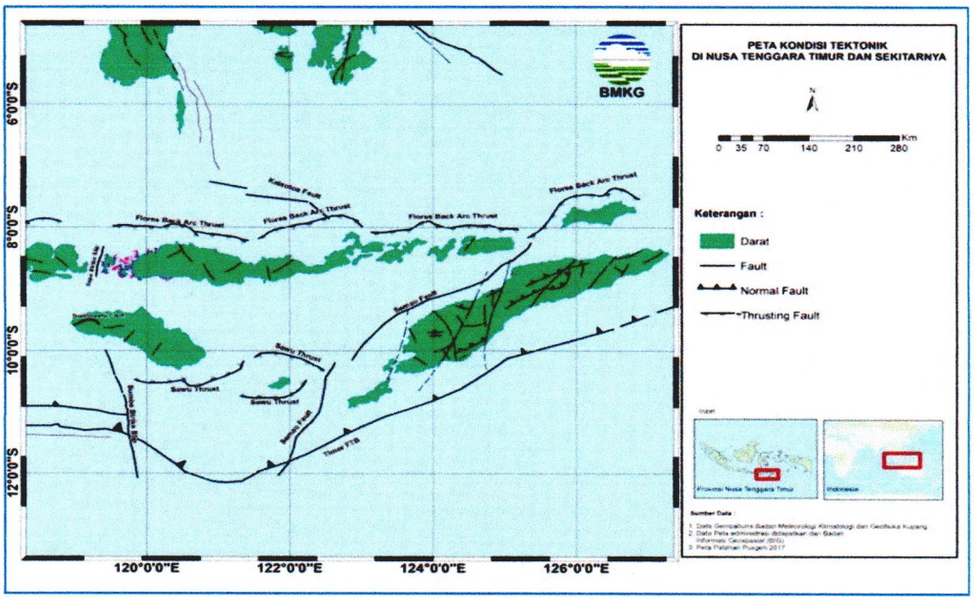

Sumber: BMKG, 2024

Gambar 2.2 Kondisi Tektonik di Wilayah NTT

Berdasarkan data BMKG, hasil monitoring gempabumi di wilayah NTT dari Tahun 1814 s/d November 2024 telah terjadi gempa bumi sebanyak 25.336 dengan didominasi oleh gempa bumi berkedalaman dangkal (D<70 Km) sebanyak 21.538 kejadian (lihat Gambar di atas). Kejadian gempa bumi di laut sebanyak 26.479 kejadian (84%) dan di darat sebanyak 5.080 kejadian (16%). Berdasarkan data Katalog Tsunami Indonesia Tahun 2024 BMKG dan NOAA tercatat pernah terjadi 21 kejadian tsunami yang terjadi wilayah NTT.

Selain sebagai laboratorium alam untuk studi tektonik dan dinamika kerak bumi, NTT juga menyimpan potensi geologi yang signifikan. Endapan mineral seperti mangan, batugamping, dan marmer menjadi komoditas bernilai ekonomi, sementara potensi panas bumi di Ulumbu dan Mataloko telah dikembangkan sebagai sumber energi terbarukan. Geowisata berbasis geologi juga berkembang pesat, dengan ikon seperti Danau Kelimutu dan lanskap lipatan Timor yang mencerminkan proses geologi aktif. Namun demikian, tingginya aktivitas vulkanik dan seismik, seperti yang terlihat pada letusan gunung api di Flores dan gempa bumi besar di Flores serta tsunami Larantuka, menunjukkan kerentanan bencana geologi yang tinggi. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap kondisi geologi NTT menjadi dasar yang krusial dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan serta mitigasi risiko bencana geologi di masa mendatang.

Gambaran kondisi **hidrologi** wilayah Provinsi NTT dapat dilihat dari potensi air permukaan dan air tanah. Secara umum, potensi hidrologi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama air permukaan, tergolong kecil. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya eksploitasi sumber air permukaan untuk kepentingan pembangunan. Potensi air tanah setiap Daerah di NTT, secara umum daerah potensi sumber daya air tinggi terletak di bagian barat pulau Flores. Daerah potensi sumber daya air paling rendah, terletak di bagian timur NTT yang meliputi rangkaian pulau-pulau Solor, Alor, dan

Wetar, sedangkan daerah lainnya bisa digolongkan berpotensi sedang. Daerah Aliran Sungai (DAS) berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air hujan melalui satu outlet sungai utama. Di wilayah NTT terdapat 3994 DAS yang tersebar pada 609 pulau di NTT. Jumlah DAS yang banyak ini diduga dipengaruhi oleh fakta wilayah NTT sebagai wilayah kepulauan yang dicirikan salah satunya yaitu pulau-pulau berukuran kecil dan tersebar.

Data pada Ditjen PDAS Kemenhut (2025) menunjukan bahwa luas area DAS di NTT yang terklasifikasi sebagai DAS yang diperlu dipulihkan (DAS yang dalam keadaan terdegradasi/rusak daya dukung) seluas 5.725.505 ha atau 78% dari total luas daratan di NTT. Sebaliknya DAS yang terklasifikasi sebagai DAS yang dipertahankan (DAS dalam keadaan baik daya dukungnya) meliputi 1.586.502 ha atau 22% dari total luas DAS di NTT. Salah satu alasan kecilnya daya dukung hidrologis Propinsi NTT adalah buruknya kondisi DAS yang mengendala fungsi hidrologisnya. Jika DAS adalah seluruh bentang lahan daratan maka perbaikan daya dukung DAS harus menjadi perhatian.

Untuk mendukung **Fungsional Ekologis** sungai di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan agar mendukung kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Sungai tidak hanya menjadi jalur alami aliran air, tetapi juga memainkan peran vital dalam sistem pertanian, penyediaan air bersih, pengendalian banjir, serta konservasi keanekaragaman hayati. NTT sebagai wilayah kepulauan dengan topografi bervariasi—dari dataran rendah hingga pegunungan—memiliki jaringan sungai yang tersebar tidak merata di setiap kabupaten/kota. Berdasarkan data dari Balai Wilayah Sungai NTT II, tercatat sekitar 60 sungai tersebar di 21 kabupaten dan 1 kota administratif (Kota Kupang). Kabupaten Kupang mencatat jumlah sungai terbanyak dengan delapan sungai, sedangkan wilayah-wilayah lain menonjol dari sisi panjang dan potensi sungai. Di Sumba Timur, Sungai Kambaniru tercatat sepanjang 1171 Km (yang perlu diverifikasi ulang karena nilainya tidak wajar), serta Sungai Baing sepanjang 301,4 Km yang menunjukkan tingginya potensi air permukaan di wilayah tersebut. Kabupaten Manggarai memiliki Sungai Wae Raho sepanjang 211,6 Km yang menjadi salah satu sungai besar di Flores bagian barat.

Kabupaten Belu mencatat Sungai Benanain sepanjang 132 Km yang juga mengalir ke Kabupaten Malaka, meskipun Malaka tidak mencatatkan data sungai secara resmi. Sementara itu, Kabupaten Sikka dan Ende memiliki sejumlah sungai dengan panjang antara 60 hingga 80 Km, yang menjadi sumber utama bagi irigasi pertanian dan pemenuhan air di kawasan pesisir. Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan juga memiliki banyak sungai menengah, seperti Noelmina, Noel Amabi, dan Noel Kapsali, yang memegang peran penting dalam sistem hidrologi Timor bagian barat. Di sisi lain, wilayah seperti Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya memiliki sungai pendek antara 6–18 Km, mencerminkan kondisi geografi

yang lebih kering dengan pola aliran musiman. Kota Kupang sendiri mencatat satu sungai besar, yaitu Sungai Manikin sepanjang 30 Km, yang rentan meluap saat musim hujan dan perlu pengelolaan terintegrasi. Empat wilayah lainnya—Kabupaten Nagekeo, Manggarai Timur, Sabu Raijua, dan Malaka—tidak mencatat keberadaan sungai besar dalam data, yang menunjukkan bahwa sumber air utama kemungkinan berupa mata air kecil atau aliran musiman.

Tutupan Lahan di Provinsi NTT terbagi menjadi 21 tipe tutupan lahan, yaitu Badan Air, Bandara/Pelabuhan, Awan, Belukar, Belukar Rawa, Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove Sekunder, Hutan Rawa Primer, Hutan Rawa Sekunder, Hutan Tanaman, Permukiman, Perkebunan, Pertanian Lahan Kering, Pertanian Lahan Kering Campur, Rawa, Savanna/Padang Rumput, Sawah, Tambak dan Tutupan lahan di Provinsi NTT dominan adalah hutan lahan kering sekunder yaitu seluas 1.603.390,22 ha (34,67 Persen), kemudian semak/belukar seluas 1.219.989,79 ha (26,38 Persen) serta savanna/padang rumput seluas 820.995,28 ha (17,75 Persen) Sedangkan tutupan lahan paling sempit adalah hutan rawa primer seluas 89,85 ha (0,002 Persen).

Sedangkan, untuk IKLH Provinsi NTT dalam kurun waktu sejak 2010 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada Tahun 2010 nilai IKLH Provinsi NTT senilai 50,72 yang naik menjadi 73,49 pada Tahun 2022 (lihat gambar 2.2).

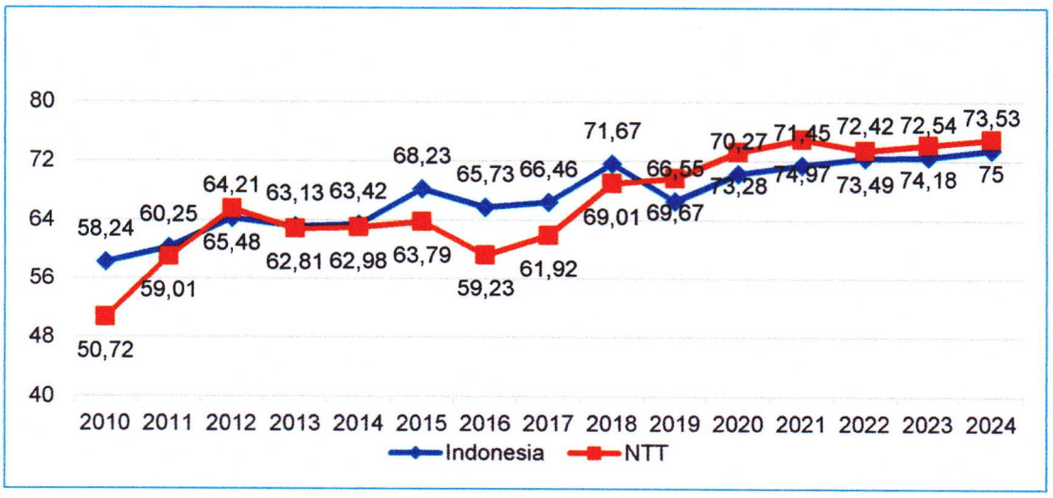

Sumber: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia, KLHK RI

Gambar 2.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi NTT Tahun 2010-2024

Khusus pada Kawasan Hutan, di Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa kawasan hutan dalam bentuk Area Penggunaan Lainnya, Cagar Alam, Hutan lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi Terbatas, Suaka Margasatwa, Suaka Margasatwa Laut, Taman Nasional, Taman Wisata Alam. Luas kawasan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6615/Menlhk/PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

tentang Kawasan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun luas kawasan hutan yang mendominasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Hutan Lindung seluas 670.604,50 Ha, Hutan Produksi seluas 287.602,95 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 169.234,22 Ha dan Taman Nasional 159.783,48 Ha.

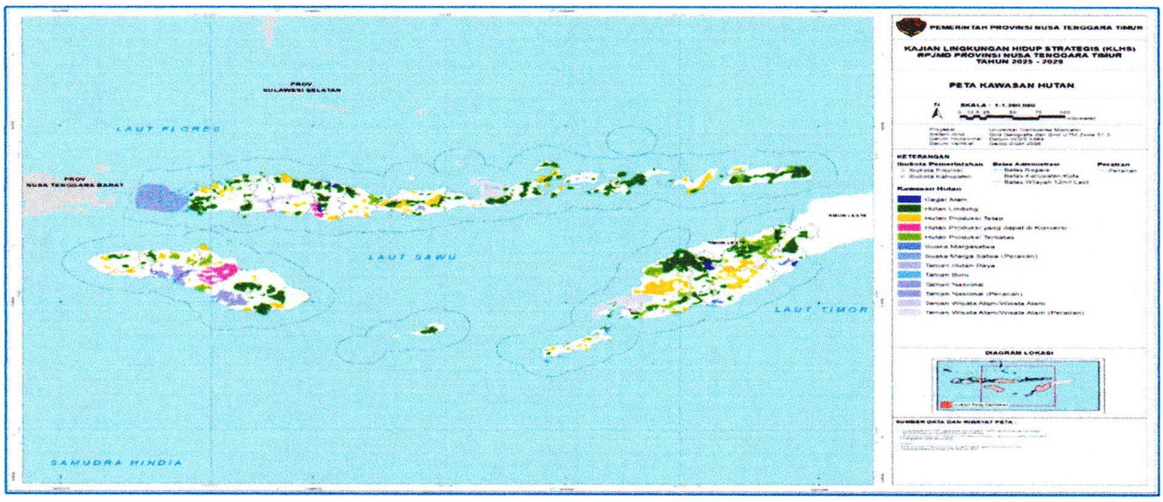

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029

Gambar 2.4 Peta Kawasan Hutan

2) Potensi Sumber Daya Alam

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi daerah yang beragam yang mengacu pada keadaan geografis dan demografi antara lain; sumber daya alam, budaya, ekonomi, dan sosial yang dimiliki. Potensi daerah berupa kekayaan alam dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat melalui proses pembangunan yang inklusif. Untuk itu, perlu diidentifikasi potensi-potensi daerah di Provinsi NTT guna memunculkan isu-isu strategis yang penting dalam perencanaan pembangunan. Adapun kondisi eksisting dan perencanaan untuk pola ruang di kawasana-kawasan strategis provinsi akan disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043. Potensi daerah-daerah di Provinsi NTT dapat diuraikan sebagai berikut:

a. POTENSI PARIWISATA

Potensi pariwisata di NTT menawarkan berbagai daya tarik yang dapat menarik wisatawan lokal dan internasional. NTT memiliki keindahan alam yang luar biasa, kekayaan budaya yang unik, dan berbagai destinasi untuk wisata minat khusus. Dengan 1.637 destinasi wisata, NTT memiliki 759 destinasi wisata alam, 762 destinasi wisata budaya, dan 116 destinasi wisata buatan. Keanekaragaman ini membuat NTT menjadi tujuan wisata yang menarik bagi berbagai jenis wisatawan.

1) Wisata Alam

Wisata alam adalah jenis pariwisata yang berfokus pada eksplorasi dan apresiasi keindahan alam. Wisata ini melibatkan aktivitas di luar ruangan yang memungkinkan wisatawan menikmati dan berinteraksi dengan lingkungan alami. Destinasi wisata alam di NTT menawarkan berbagai pengalaman otentik, seperti; Pantai dan Laut berupa pantai berpasir putih, terumbu karang, dan aktivitas seperti snorkeling, menyelam, dan selancar; pegunungan dan bukit, berupa Pemandangan pegunungan yang menakjubkan, trekking, dan pendakian gunung; hutan, berupa ekosistem hutan yang kaya dengan flora dan fauna, jalur hiking, dan pengamatan satwa liar; air terjun, berupa keindahan air terjun dengan kolam alami yang menyegarkan, dan danau dan sungai, berupa aktivitas seperti berperahu, memancing, dan menikmati keindahan danau atau sungai.

Sebagai provinsi kepulauan, NTT yang terdiri atas pulau-pulau besar seperti Flores, Sumba, dan Timor, serta ratusan pulau kecil lainnya, menawarkan lanskap alam yang sangat beragam. Dari Taman Nasional yang spektakuler seperti Komodo, hingga danau kawah yang eksotis seperti Danau Kelimutu, serta situs geologis dan arkeologis yang unik, kekayaan alam ini membuka peluang besar untuk pengembangan pariwisata berbasis konservasi dan inklusivitas.

Keindahan alam NTT menawarkan pengalaman yang kaya dan mendalam bagi para wisatawan. Dari taman nasional yang spektakuler, danau kawah yang misterius, pantai yang mempesona, situs arkeologi yang bersejarah, hingga pegunungan yang menantang, setiap sudut NTT memiliki pesona yang tak tertandingi. Dengan mengembangkan dan melestarikan potensi wisata alam ini, NTT dapat terus menarik wisatawan dari seluruh dunia dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Wisata bahari di NTT juga sangat potensial dikembangkan, mengingat kondisi geografis NTT sebagai daerah kepualuan dengan bentangan pesisir dan laut yang luas bagi kegiatan wisata yang berfokus pada eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir. Aktivitas ini mencakup berbagai kegiatan rekreasi yang dilakukan di atau di sekitar laut, pantai, dan ekosistem perairan lainnya.

Pembangunan pariwisata bahari di NTT telah dilakukan sebelumnya dengan mengembangkan Labuan Bajo. Pengembangan terhadap pariwisata bahari tersebut telah membawa banyak perubahan dan kemajuan bagi Labuan Bajo dan daerah sekitarnya. Untuk itu, pengembangan pariwisata di Labuan Bajo akan dituntaskan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Selain Labuan Bajo, masih terdapat banyak destinasi wisata bahari dan alam lainnya di wilayah NTT yang tersebar merata dan memiliki nilai strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata serta pembangunan ekonomi daerah secara lebih merata dan berkelanjutan.

2) Wisata Budaya

Wisata budaya merupakan salah satu bentuk pariwisata yang berfokus pada eksplorasi, pemahaman, dan apresiasi terhadap warisan budaya, tradisi, seni, serta sejarah suatu daerah. Jenis wisata ini

menawarkan pengalaman yang otentik melalui interaksi langsung dengan komunitas lokal, partisipasi dalam upacara adat, serta kunjungan ke situs-situs budaya dan sejarah. Bagi wisatawan, wisata budaya tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga memperluas wawasan dan pemahaman terhadap nilai-nilai lokal yang membentuk identitas suatu masyarakat.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki potensi wisata budaya yang sangat kaya dan beragam. Kekayaan ini tercermin dari keragaman tradisi, adat istiadat, bahasa, sistem sosial, serta artefak budaya yang tersebar di seluruh wilayah provinsi. Sebagai wilayah kepulauan di kawasan tenggara Indonesia, setiap pulau di NTT memiliki kekhasan budaya tersendiri yang berkembang secara unik dan mandiri, sehingga menjadikan NTT sebagai salah satu kawasan dengan kekayaan budaya paling otentik di Indonesia.

Wisata budaya di NTT memberikan pengalaman mendalam bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang kehidupan masyarakat lokal. Nilai-nilai budaya yang diwariskan lintas generasi, termasuk dalam bentuk tarian, musik tradisional, upacara adat, rumah adat, dan tenun ikat, menjadi aset penting dalam membangun daya tarik wisata berbasis budaya. Interaksi langsung dengan masyarakat lokal memperkaya dimensi pariwisata, menjadikannya bukan hanya sebagai perjalanan fisik, tetapi juga sebagai perjalanan spiritual dan edukatif.

Salah satu daya tarik utama wisata budaya di NTT adalah upacara adat dan festival tradisional yang hidup dan lestari di setiap kabupaten/kota. Upacara seperti Pasola di Sumba, Festival Tenun Ikat, dan berbagai perayaan adat lainnya menjadi magnet wisata karena keunikan ritus, kekayaan simbolik, dan atmosfer kultural yang kuat. Upacara-upacara ini tidak hanya menjadi atraksi, tetapi juga sarana pelestarian nilai dan identitas budaya lokal.

Dalam lima tahun ke depan, pembangunan sektor wisata budaya diarahkan untuk menjadikan Pulau Sumba sebagai ikon wisata budaya megalitik nasional. Sumba memiliki kekayaan warisan budaya berupa situs megalitik, rumah adat, serta sistem adat yang masih kuat. Strategi ini sejalan dengan upaya diversifikasi destinasi wisata unggulan di luar Labuan Bajo.

Selain Sumba, masih banyak potensi wisata budaya lain di seluruh wilayah NTT yang perlu dikembangkan secara strategis dan berkelanjutan, antara lain:

1. **Desa Adat**: seperti Desa Wae Rebo di Flores dan Desa Bena di Ngada, yang terkenal karena arsitektur tradisionalnya, tatanan sosial berbasis adat, dan praktik kehidupan berkomunitas yang lestari.
2. **Festival Tradisional**: seperti Pasola dan Festival Tenun Ikat, yang tidak hanya menampilkan atraksi budaya, tetapi juga menjadi media promosi kekayaan lokal.
3. **Museum dan Galeri Seni**: seperti Museum Tenun Ikat Kupang dan berbagai galeri seni tradisional yang menjadi pusat dokumentasi dan edukasi budaya lokal.
4. **Situs Sejarah dan Religi**: seperti Kampung Megalitik Liang Bua di Flores dan Katedral Reinha Rosari di Larantuka, yang menjadi tempat penting dalam narasi sejarah dan spiritual masyarakat NTT.

Pengembangan wisata budaya di NTT harus didukung dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, melibatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama, sekaligus menjaga integritas nilai-nilai budaya agar tidak terdistorsi oleh komersialisasi. Integrasi antara budaya dan pariwisata juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan (sustainability), sehingga nilai budaya tetap terpelihara dan memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi masyarakat lokal.

3) Wisata Minat Khusus

Wisata minat khusus merupakan segmen pariwisata yang berfokus pada aktivitas atau tema tertentu yang secara spesifik menarik minat wisatawan tertentu. Tidak seperti wisata massal yang bersifat umum, wisata minat khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi individu atau kelompok yang memiliki ketertarikan khusus terhadap aktivitas tertentu. Karakteristik utama dari wisata ini adalah kedalaman pengalaman, keterlibatan aktif wisatawan, serta keunikan destinasi dan kegiatan yang ditawarkan. Beberapa contoh wisata minat khusus meliputi; Wisata Petualangan, Wisata Ekologi (*Ecotourism*), Wisata Sejarah dan Arkeologi, Wisata Kuliner, Wisata Religi, Wisata Pendidikan, Wisata Kesehatan dan Kebugaran, Wisata Fotografi, dan Wisata Olahraga.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan wisata minat khusus. Kombinasi antara bentang alam yang spektakuler, keanekaragaman hayati darat dan laut yang tinggi, serta kekayaan budaya yang unik menjadikan NTT sebagai destinasi unggulan wisata minat khusus di Indonesia. Keunikan wilayah kepulauan dengan karakteristik geologis, ekosistem, dan sosial-budaya yang berbeda-beda di setiap pulau membuka peluang pengembangan ragam jenis wisata berbasis minat secara tematik dan terlokalisasi.

Adapun beberapa bentuk wisata minat khusus yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan di NTT meliputi:

1. Wisata Menyelam dan *Snorkeling*

NTT memiliki taman laut dan ekosistem terumbu karang yang sangat kaya, antara lain di Perairan Alor, Pulau Kepa, Pulau Kambing, Pulau Seraya, dan Perairan Komodo. Kejernihan air laut, keragaman biota laut, serta arus yang menantang menjadi daya tarik utama bagi penyelam profesional dan penggemar snorkeling.

2. Wisata Trekking dan *Hiking*

Berbagai jalur pendakian di NTT menawarkan pengalaman petualangan yang menantang sekaligus mempesona, seperti pendakian ke Gunung Mutis di Timor, Gunung Inerie di Bajawa, dan Taman Nasional Kelimutu di Ende dengan danau tiga warnanya yang legendaris. Trekking juga menjadi sarana untuk menikmati bentang alam, menjelajahi hutan adat, dan mengenal komunitas lokal.

3. Wisata Fotografi Alam dan Budaya

Lanskap alam NTT yang dramatis dan warna-warni kehidupan budaya lokal menjadi objek menarik bagi penggemar fotografi. Dari sabana luas di Pulau Sumba, pemandangan laut di Rote, hingga kegiatan tenun dan tarian adat di Flores, semua menjadi bahan eksplorasi visual yang kaya nilai artistik.

4. Wisata *Birdwatching* (Pengamatan Burung)

NTT merupakan habitat bagi banyak jenis burung endemik, seperti burung elang flores (*Nisaetus floris*) dan kakatua jambul kuning. Kawasan konservasi seperti Taman Nasional Gunung Mutis dan Taman Nasional Komodo menjadi lokasi strategis untuk kegiatan ini.

5. Wisata Budaya dan Tradisi

Meskipun sering dikategorikan sebagai wisata budaya, dalam konteks wisata minat khusus, kegiatan seperti berpartisipasi dalam ritus adat, belajar menenun, atau tinggal di desa adat dapat dirancang sebagai pengalaman imersif yang lebih mendalam dan bersifat edukatif.

6. Wisata Kuliner

Kuliner lokal NTT menyimpan kekayaan cita rasa berbasis bahan pangan lokal seperti jagung, ubi, kelor, daging sapi, dan ikan. Potensi pengembangan wisata kuliner dapat dilakukan dengan menyelenggarakan tur kuliner, kelas memasak, dan festival makanan tradisional, sekaligus mengangkat gastronomi lokal sebagai identitas budaya.

Secara strategis, pengembangan wisata minat khusus di NTT dapat menjadi pengungkit inovasi ekonomi kreatif, serta memperpanjang masa tinggal wisatawan. Untuk itu, dibutuhkan dukungan infrastruktur dasar, pelatihan pemandu wisata spesialis, digitalisasi promosi, serta kemitraan antara pemerintah daerah, komunitas lokal, dan pelaku industri pariwisata.

b. POTENSI EKONOMI KREATIF

Ekonomi kreatif merupakan sektor ekonomi yang bertumpu pada ide, kreativitas untuk peningkatan nilai ekonomi lokal secara langsung, mendorong, inovasi, dan kearifan lokal sebagai sumber daya utama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya, membuka lapangan kerja, dan mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, potensi ekonomi kreatif sangat besar karena ditopang oleh kekayaan budaya, tradisi, dan sumber daya manusia yang kreatif. Aktivitas ekonomi kreatif di NTT umumnya tumbuh secara organik di tengah-tengah komunitas lokal, dan banyak yang berbasis pada warisan budaya takbenda seperti tenun ikat, kerajinan tangan, kuliner tradisional, hingga ekspresi seni.

Pada tahun 2021, jumlah usaha ekonomi kreatif di NTT sebanyak 86.928 yang terdiri dari 17 sub sektor, antara lain; kuliner sebesar 64,62%, kriya sebesar 12,73%, fashion 16,82%, musik sebesar 0,45%, arsitektur sebesar 1,04%, seni pertunjukan 0,20%, App dan games sebesar 0,07%, desain produk sebsar 0,02%, TV dan radio sebesar 0,23%, periklanan sebesar 2,34%, seni rupa sebesar 0,29%, penerbitan sebesar 2,34%, fotografi 0,94%, film, animasi dan video sebesar 0,06%, DKV sebesar 0,00%, dan design interior sebesar 0,11%. Dari 17 sub sektor usaha ekonomi kreatif yang ada, terdapat 3 jenis potensi usaha ekonomi kreatif terbesar, yaitu: *Fashion*, Kriya, dan Kuliner.

1) Potensi Ekonomi Kreatif – *Fashion*

Sektor *fashion* dalam ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis budaya, inovasi, dan identitas lokal. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), potensi fashion sangat identik dengan tenun ikat tradisional yang telah lama menjadi simbol kekayaan budaya dan warisan leluhur. Tenun ikat NTT bukan sekadar produk tekstil, tetapi juga representasi nilai-nilai filosofis, spiritual, dan sosial dari setiap kelompok etnis yang ada di wilayah ini.

Setiap daerah di NTT memiliki motif dan teknik tenun ikat yang khas, seperti motif Patola dari Sikka, Kaif dari Timor, Hinggi dari Sumba, atau Lawo dari Flores. Motif-motif tersebut sering kali mengandung narasi kosmologis, mitologi, dan makna simbolik yang diturunkan secara turun-temurun. Kompleksitas teknik dan kekayaan simbolik inilah yang menjadi daya tarik utama tenun ikat NTT di mata dunia.

Proses pembuatan tenun ikat melibatkan keterampilan tinggi, mulai dari proses pemintalan benang, pewarnaan alami, pengikatan motif (ikat), hingga penenunan manual yang bisa memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Pewarna alami yang digunakan berasal dari tumbuhan lokal seperti indigo (tarum), mengkudu, daun lamtoro, dan kulit kayu, yang memperkuat nilai ekologis dan keberlanjutan produk tenun ikat.

Transformasi tenun ikat menjadi produk fashion kontemporer membuka peluang nilai tambah yang besar, seperti:

1. Busana modern berbasis etnik (*ready-to-wear* dan *haute couture*);
2. Aksesori (tas, sepatu, dompet, ikat pinggang);
3. Produk interior (taplak, bantal, tirai); dan
4. Cendera mata khas daerah.

Dengan meningkatnya permintaan global terhadap produk fashion berbasis budaya dan etnik, tenun ikat Provinsi NTT memiliki prospek besar untuk menembus pasar ekspor. Pemanfaatan platform digital, *e-commerce*, dan media sosial, serta partisipasi aktif dalam pameran nasional dan internasional merupakan strategi utama dalam mendorong penetrasi pasar.

Di sisi lain, pengembangan pariwisata budaya yang terintegrasi dengan pusat-pusat produksi tenun seperti Desa Bena, Wae Rebo, Maubesi, atau Prailiu dapat menciptakan rantai nilai kreatif yang menyeluruh. Wisatawan dapat menikmati pengalaman autentik melalui kunjungan ke desa tenun, mengikuti workshop, hingga membeli langsung produk dari para pengrajin.

Selain sebagai penggerak ekonomi, industri tenun ikat juga memiliki dimensi pemberdayaan sosial. Mayoritas pengrajin tenun adalah perempuan, sehingga pengembangan industri ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan perempuan, penguatan ekonomi rumah tangga, dan pelestarian budaya lokal.

Arah pengembangan fashion berbasis tenun ikat dalam lima tahun ke depan dapat difokuskan pada; Standardisasi kualitas dan inovasi desain; Peningkatan kapasitas SDM pengrajin melalui pelatihan dan inkubasi bisnis; Perluasan akses pasar dan integrasi ke dalam rantai pasok industri

kreatif nasional; Revitalisasi sentra-sentra tenun dan penguatan kelembagaan komunitas pengrajin, dan; Digitalisasi produksi dan pemasaran melalui platform *e-commerce* dan jejaring kreatif. Untuk itu, dengan dukungan regulasi, ekosistem usaha, dan promosi yang berkelanjutan, tenun ikat NTT akan tumbuh sebagai ikon fashion etnik nasional yang mendunia, sekaligus sebagai fondasi ekonomi kreatif yang inklusif dan berbasis kearifan lokal.

5. Potensi Ekonomi Kreatif – Kriya

Potensi ekonomi kreatif di sektor kriya (*craft*) mencakup berbagai aktivitas yang melibatkan pembuatan barang-barang dengan tangan atau proses manual yang memanfaatkan keterampilan dan keahlian tradisional. Potensi ekonomi kreatif untuk jenis Kriya Di NTT berupa anyaman dan seni pahat.

Potensi ekonomi kreatif dalam anyaman di NTT mencakup berbagai aspek yang melibatkan pengembangan kerajinan tangan tradisional menggunakan bahan-bahan lokal. Anyaman merupakan bagian integral dari budaya NTT dan memiliki nilai budaya yang tinggi. beragam tradisi anyaman yang diwariskan secara turun-temurun. Anyaman dari bambu, pandan, rotan, dan bahan alami lainnya digunakan untuk membuat keranjang, tikar, tas, topi, dan berbagai produk kerajinan tangan lainnya. Setiap daerah di NTT memiliki gaya anyaman yang khas dan motif-motif tradisional yang unik.

Pengembangan desain modern yang menggabungkan teknik anyaman tradisional dengan elemen-elemen kontemporer dapat meningkatkan daya tarik produk anyaman dari NTT. Desain-desain ini dapat menarik pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun internasional, dan meningkatkan nilai tambah bagi produk anyaman tradisional.

Sementara, potensi ekonomi kreatif seni pahat di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencakup berbagai aspek yang melibatkan pengembangan seni rupa, promosi kekayaan budaya lokal, serta pengembangan pasar seni untuk produk seni pahat. Seni pahat merupakan kekayaan dan warisan bdaya masyarakat NTT yang sudah berkembang lama.

Warisan seni pahat yang kaya di NTT, terutama dalam bentuk patung-patung tradisional yang menggambarkan mitologi, tokoh adat, dan cerita-cerita lokal. Pengembangan seni pahat yang mempertahankan nilai-nilai tradisional dapat menjadi daya tarik bagi kolektor seni dan wisatawan yang tertarik dengan kebudayaan lokal.

6. Potensi Ekonomi Kreatif - Kuliner

Potensi ekonomi kreatif dalam sektor kuliner mencakup berbagai aspek yang melibatkan inovasi dalam pengolahan makanan dan minuman, promosi kekayaan kuliner lokal, serta pengembangan pengalaman kuliner untuk wisatawan. Beberapa contoh potensi ekonomi kreatif kuliner di NTT, antara lain; kopi flores, cokelat, daging se'i, jagung titi dan kue rambut, serta gula semut.

Potensi produk kopi Flores menawarkan sejumlah keunggulan yang dapat menjadi basis ekonomi kreatif yang signifikan. Kopi Flores dikenal karena kualitasnya yang unggul, dengan cita rasa yang khas dan beragam. Potensi produk kopi Flores sebagai bagian dari ekonomi kreatif kuliner sangat menarik karena Flores dikenal dengan kopi arabikanya yang berkualitas tinggi.

Daerah pegunungan yang tinggi, tanah vulkanik yang subur, serta iklim tropis yang ideal memberikan kondisi optimal untuk pertumbuhan kopi Arabika yang berkualitas tinggi. Varietas kopi Flores termasuk Arabika Bajawa, Manggarai, dan Ende, yang masing-masing memiliki karakteristik rasa yang unik. Kopi Arabika Flores memiliki citarasa yang unik dengan sentuhan fruity, coklat, dan rempah-rempah yang khas. Kopi ini tumbuh di ketinggian yang ideal dan diproses secara tradisional, menjadikannya produk yang sangat dihargai oleh pecinta kopi di seluruh dunia.

Sebagai sebuah potensi ekonomi kreatif, pengembangan merek dan branding kopi Flores dapat membantu meningkatkan visibilitas dan daya tarik produk di pasar global. Promosi yang efektif melalui platform digital, partisipasi dalam festival kopi internasional, serta kolaborasi dengan barista dan pecinta kopi dapat meningkatkan pengakuan merek kopi Flores.

Selain itu, potensi produksi cokelat sebagai bagian dari ekonomi kreatif kuliner menawarkan berbagai peluang dalam pengembangan produk, inovasi, dan pengalaman kuliner yang berbeda. Penggunaan bahan baku lokal yang berkualitas tinggi, seperti biji kakao dari NTT memberikan cokelat karakteristik rasa yang unik. Mesikpun kakao bukanlah komoditas utama di NTT, pengembangan kakao lokal untuk cokelat premium dapat menghadirkan nilai tambah ekonomi yang signifikan.

Selanjutnya, daging se'i adalah hidangan tradisional NTT yang terkenal dengan proses pengasapannya yang unik. Daging babi atau sapi diolah dengan cara diasapi dengan menggunakan kayu khusus hingga menghasilkan rasa yang khas dan tekstur yang lembut. Keunikan ini menjadi nilai tambah yang signifikan dalam menarik wisatawan dan pecinta kuliner yang mencari pengalaman kuliner autentik.

Industri daging se'i dapat terus berkembang melalui inovasi dalam pengolahan dan pengemasan produk. Pengembangan variasi rasa, teknik pengasapan yang modern, serta peningkatan kualitas bahan baku dapat meningkatkan daya saing produk di pasar lokal maupun internasional. Strategi pemasaran yang efektif melalui platform digital, media sosial, dan partisipasi dalam acara kuliner dan festival makanan dapat meningkatkan visibilitas dan popularitas daging se'i. Kolaborasi dengan restoran, hotel, dan agen wisata lokal juga juga telah membantu memperluas jangkauan pasar dan memperkenalkan produk kepada audiens yang lebih luas.

Dengan memanfaatkan keunikan produk daging se'i, inovasi dalam pengolahan, dan strategi pemasaran yang efektif, Nusa Tenggara Timur memiliki potensi besar untuk mengembangkan daging se'i sebagai produk

kuliner kreatif yang terkenal secara nasional dan internasional. Dukungan dari pemerintah, industri, dan masyarakat lokal dalam mempromosikan dan melindungi produk ini akan menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi ekonomi kreatif daging se'i di NTT.

Selanjutnya, potensi produk jagung titi, kenari, dan kue rambut sebagai bagian dari ekonomi kreatif kuliner menawarkan berbagai peluang dalam pengembangan produk makanan yang unik, bernilai tambah tinggi, dan berbasis kearifan lokal. **Jagung Titi** adalah jagung khas Nusa Tenggara Timur yang diolah dengan cara yang khas, seperti dipanggang atau diolah menjadi camilan ringan. Potensi ekonomi kreatif dari jagung titi meliputi; Inovasi Produk, yakni pengembangan variasi rasa dan kemasan yang menarik untuk memperluas pasar, seperti jagung titi dengan bumbu lokal atau versi organik, dan; Promosi Lokal, yakni memperkenalkan jagung titi sebagai camilan sehat dan lezat dengan memanfaatkan kualitas jagung lokal yang baik.

Beriktunya adalah kenari sebagai salah satu dari berbagai jenis kacang yang tumbuh subur di Nusa Tenggara Timur. Potensi ekonomi kreatif kenari meliputi: produk olahan, yakni pengembangan berbagai produk olahan seperti kue, kacang panggang, mentega kenari, atau minyak kenari, dan; kemasan premium, yakni kenari sebagai bahan utama dalam makanan ringan premium yang dikemas dengan estetika yang menarik.

Sementara, kue rambut adalah kue tradisional dari Nusa Tenggara Timur yang terbuat dari sagu atau tepung ketela yang dibentuk menyerupai rambut. Potensi ekonomi kreatif kue rambut meliputi; pengembangan variasi; inovasi dalam rasa dan bentuk untuk menarik pasar yang lebih luas, termasuk kue rambut dengan tambahan bahan lokal atau bumbu tradisional, dan; pengemasan kreatif, yakni kemasan yang menarik dan ramah lingkungan untuk meningkatkan daya tarik produk di pasar lokal dan wisatawan.

Selain kue rambut, potensi produk gula semut juga merupakan bagian dari ekonomi kreatif kuliner menjanjikan berbagai manfaat ekonomi dan budaya. Gula semut, atau biasa disebut juga dengan gula merah, adalah produk alami yang dihasilkan dari nira aren atau nira kelapa. Dengan jumlah populasi aren dan kelapa yang besar di NTT telah berkontribusi terhadap potensi kuliener gula semut. Gula semut telah lama menjadi bagian dari tradisi kuliner di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT). Penggunaan gula semut dalam makanan dan minuman tradisional mencerminkan kekayaan budaya lokal dan warisan kuliner yang perlu dilestarikan dan dipromosikan.

Dalam konteks ekonomi kreatif, gula semut dapat dijadikan bahan baku utama atau tambahan dalam berbagai produk kuliner modern. Penggunaan gula semut dalam kue tradisional, minuman, atau sebagai

pemanis alami dalam produk makanan organik semakin diminati oleh konsumen yang mengutamakan produk alami dan sehat.

Peningkatan kesadaran akan pentingnya makanan sehat dan alami telah meningkatkan permintaan terhadap produk gula semut di pasar domestik maupun internasional. Produk gula semut dengan kualitas tinggi dan sertifikasi organik memiliki potensi besar untuk memasuki pasar ekspor dan menarik minat konsumen global.

c. POTENSI SEKTOR PRODUKTIF

Beberapa komoditas berbasis *Core Competence* Komoditas Unggulan Wilayah yang mendukung pembangan pariwista, antara lain; padi, mete, kopi, kakao, jagung, babi, sapi, rumput laut, perikanan tangkap, dan garam. Komoditas-komoditas tersebut merupakan hasil potensi sektor produktif NTT, yang terdiri dari Potensi Sektor Pertanian, Perkebunan, dan kehutanan, Potensi Sektor Peternakan, dan Potensi Sektor Perikanan dan Kelautan.

1) Potensi Sektor Pertanian dan Perkebunan

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pertanian sebagai sektor yang memberikan kontribusi PDRB terbesar terhadap perekonomian daerah jelas menunjukan bahhwa sektor pertanian di NTT memiliki potensi yang sangat besar dalam proses pembangunan daerah. Meskipun tantangan seperti kondisi geografis dan iklim sering menjadi hambatan, dengan strategi yang tepat, sektor ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat NTT.

Sektor pertanian memiliki komoditas yang menjadi *Core Competence* Komoditas Unggulan Wilayah yang mendukung pembangan pariwisata, yaitu, jagung, padi dan tanaman holtikultura. Sedangkan *Core Competence* Komoditas pada sektor perkebunan, antara lain; kopi, kakao. Selain itu, masih banyak jenis komoditas pertanian dan perkebunan yang mendukung pengambangan industry dan investasi daerah untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Produksi jagung di NTT Tahun 2021 adalah sebesar 751.209 ton. Pada tahun yang sama, total produksi padi pada tahun yang sama adalah sebesar 724.387 ton, total produksi mete sebesar 49.922 ton dan masuk peringkat 1 (satu) nasional, total produksi kopi sebesar 25.896 ton dan masuk peringkat 9 (sembilan) nasional, dan total produksi kako sebesar 20.619 ton dan masuk peringkat 10 (sepuluh) nasional.

2) Potensi Sektor Peternakan

Provinsi NTT juga memiliki potensi yang besar pada sektor peternakan. Beberapa komoditas yang menjadi *Core Competence* Komoditas

Unggulan Wilayah yang mendukung pembangan pariwista, antara lain: sapi dan babi. Selain itu, sektor peternakan juga memiliki banyak komditas yang dapat diandalkan untuk dikembangkan, antara lain; kambing, kuda, kerbau, ayam kampung, ayam pedaging, dan ayam petelur. Untuk jenis komoditas unggulan, total produksi sapi di NTT tahun 2021 adalah sebanyak 1.248.930 ekor dan masuk pringkat 5 (lima) nasional. Pada tahun yang sama, total produksi babi sebanyak 2.598.370 ekor dan masuk peringkat 1 (satu) nasional.

3) Potensi Sektor Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Provinsi NTT yang menyimpan potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Keunggulan geografis sebagai wilayah kepulauan dengan panjang garis pantai sekitar 5.934,624739 km, menjadikan Provinsi NTT kaya akan sumber daya laut yang belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal. Tiga komoditas utama dalam sektor ini adalah rumput laut, garam, dan perikanan tangkap dan budidaya, yang dapat dikembangkan lebih jauh sebagai pilar utama ekonomi biru di Provinsi NTT.

a. Potensi Rumput Laut

Rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi biru, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta pengembangan industri berbasis sumber daya alam laut. Provinsi NTT memiliki potensi budidaya rumput laut yang sangat besar, terutama di wilayah-wilayah prioritas seperti Rote, Sabu, dan Sumba Timur, yang memiliki kondisi lingkungan laut yang ideal, bibit unggul lokal, dan kearifan masyarakat dalam budidaya.

Potensi rumput laut di Provinsi NTT dipetakan berdasarkan klaster dengan total produksi terbesar pada Tahun 2021 berada di klaster II, yaitu Pulau Timur. Pada tahun tersebut, pengembangan rumput laut pada klaster 1, Pulau Sumba memiliki potensi areal sebesar 13.800,45 Ha dan total produksi sebanyak 35.961,08 ton. Pengembangan rumput laut pada klaster II, Pulau Timor memiliki potensi areal sebesar 19.494,10 Ha dan total produksi sebesar 1.219.002,96 ton. Pengembangan rumput laut pada klaster III, pada area Sabu dan Rote memiliki potensi areal sebesar 3.056,34 Ha dan total produksi sebesar 70.958,13 ton. Pengembangan rumput laut pada klaster IV, Pulau Alor dan sekitar memiliki potensi areal sebesar 20.876,45 Ha dan total produksi sebesar 73.830,08 ton. Pengembangan rumput laut pada klaster V, Pulau Flores memiliki potensi area sebanyak 4.874,38 Ha dan total produksi sebesar 455,76 ton.

Salah satu keunggulan utama NTT adalah bahwa bibit unggul rumput laut secara genetik berasal dari wilayah ini. Namun, dalam praktiknya, bibit tersebut seringkali diambil dan dimanfaatkan oleh

wilayah lain, seperti Sulawesi Selatan, tanpa pengakuan dan penguatan rantai nilai lokal. Ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan dan tata kelola berbasis keadilan ekonomi di tingkat lokal.

Lebih lanjut, pengembangan rumput laut di NTT dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang kompleks dan saling berkaitan, antara lain:

1. Ketidakadilan harga pasar;
2. Minimnya data akurat;
3. Ketidakjelasan konsumen dan bentuk konsumsi, baik dalam konteks pasar domestik maupun ekspor;
4. Konflik ruang antara rumput laut dan komoditas lain di tingkat desa;
5. Skema tata kelola yang sangat privat, tanpa pelibatan publik dan komunitas lokal secara bermakna;
6. Ketiadaan pusat riset rumput laut di NTT, menyebabkan lemahnya basis ilmiah dan kelembagaan;
7. Minimnya akses petani terhadap pembiayaan dan perlindungan kebijakan, menjadikan mereka sebagai pihak paling rentan dalam sistem nilai rumput laut;
8. Komoditas yang tidak berdiri sendiri, karena rumput laut perlu dilihat sebagai bagian dari sistem produksi yang saling terkait dengan ekosistem sosial, budaya, dan komoditas lain; dan
9. Belum adanya mitigasi terhadap daya rusak budidaya rumput laut terhadap lingkungan dan komoditas lain.

Untuk menjawab berbagai tantangan sebeagaimana dijelaskan sebelumnya dan memaksimalkan potensi yang ada, arah strategis pengembangan rumput laut di NTT perlu diarahkan pada pendekatan sistemik, inklusif, dan berbasis wilayah. Adapun strategi utama yang disarankan adalah sebagai berikut; 1) Penguatan ekosistem daya dukung melalui peningkatan kapasitas bibit unggul lokal, pengembangan infrastruktur produksi dan pascapanen, serta akses petani terhadap pembiayaan mikro dan lembaga keuangan inklusif; 2) Pembentukan kelembagaan lintas sektor, seperti Satgas Rumput Laut, yang dapat menyinergikan kebijakan dari pusat hingga daerah secara konsisten dan responsif terhadap kondisi lapangan; 3) Pendekatan holistik lintas komoditas, yang memperhatikan hubungan dan potensi konflik dengan sektor lain seperti perikanan, garam, dan pariwisata; 4) Keterlibatan sektor swasta melalui skema inti-plasma, untuk menjamin keberlanjutan akses pasar, teknologi, dan transfer pengetahuan; 5) Pendirian pusat riset rumput laut berbasis ekosistem dan sosial budaya lokal, guna mendukung inovasi teknologi, pengawasan kualitas, dan pengambilan kebijakan berbasis data ilmiah; 6) Penguatan kelembagaan petani rumput laut, termasuk koperasi dan kelompok usaha, serta pengarusutamaan dalam program pelatihan, pendataan, dan promosi pasar, dan; 7) penguatan regulasi dan kebijakan harga melalui peraturan daerah/pergub yang adil dan

transparan, guna melindungi posisi tawar petani di dalam rantai nilai produksi.

Dengan pendekatan strategis yang menyeluruh, penguatan kelembagaan lokal, serta dukungan regulasi dan riset yang memadai, rumput laut dapat menjadi komoditas unggulan yang tidak hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan sumber daya pesisir NTT. Pembangunan berbasis rumput laut akan bermakna bila berakar dari komunitas dan menyentuh semua dimensi: ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan.

b. Potensi Garam

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki potensi luar biasa dalam sektor produksi garam, baik dari sisi luas lahan potensial, kondisi geografis, maupun karakteristik iklim yang sangat mendukung. Sebagai wilayah yang didominasi oleh musim kemarau panjang dengan intensitas hujan yang relatif rendah, banyak wilayah pesisir di NTT sangat cocok untuk pengembangan usaha tambak garam rakyat maupun industri. Garam menjadi salah satu komoditas strategis karena selain sebagai kebutuhan pokok masyarakat, juga digunakan dalam industri pangan, peternakan, dan kimia.

Potensi garam NTT dipetakan berdasarkan daerah kabupaten/kota. Pada tahun 2021 Kabupaten Manggarai Timur memiliki potensi areal sebesar 3.500 Ha dan pemanfaatanya seluas 1Ha. Kabupaten Manggarai memiliki potensi areal sebesar 5.000 Ha dan pemanfaatanya seluas 19 Ha. Kabupaten Nagekeo memiliki potensi areal sebesar 2.457 Ha dan pemanfaatanya seluas 156 Ha.

Sementara itu, Kabupaten Ende memiliki potensi areal sebesar 5.000 Ha dan pemanfaatanya seluas 122Ha. Kabupaten Flores Timur memiliki potensi areal sebesar 2.000 Ha dan pemanfaatanya seluas 1 Ha. Kabupaten Lembata memiliki potensi areal sebesar 1.320 Ha dan pemanfaatanya seluas 2 Ha. Kabupaten Alor memiliki potensi areal sebesar 2.000 Ha dan pemanfaatanya seluas 17 Ha.

Selanjutnya, Kabupaten Malaka memiliki potensi areal sebesar 30.000 Ha dan belum dimanfaatkan. Kabupaten TTU memiliki potensi areal sebesar 1.070 Ha dan pemanfaatanya seluas 12 Ha. Kabupaten TTS memiliki potensi areal sebesar 250 Ha dan pemanfaatanya seluas 2 Ha. Kabupaten Kupang memiliki potensi areal sebesar 6.363 Ha dan pemanfaatanya seluas 518 Ha. Kabupaten Rote Ndao memiliki potensi areal sebesar 1.000 Ha dan belum ada pemanfaatan. Kabupaten Sabu Raijua memiliki potensi areal sebesar 700 Ha dan pemanfaatanya seluas 10 Ha. Kabupaten Sumba Timur memiliki potensi areal sebesar 3.014 Ha dan pemanfaatanya seluas 17 Ha.

Secara total, NTT memiliki potensi lebih dari 60.000 Ha lahan garam, namun baru sekitar 4,5% yang termanfaatkan secara aktif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara potensi dan realisasi, yang menjadi tantangan sekaligus peluang strategis bagi pembangunan daerah.

Faktor Pendukung Pengembangan Garam, antara lain;1) Kondisi alam yang ideal, ditandai dengan curah hujan rendah, tingkat penyinaran tinggi, dan angin stabil menjadikan NTT salah satu wilayah terbaik di Indonesia untuk produksi garam dengan kadar NaCl tinggi; 2) Tingkat kebutuhan nasional dimana, produksi garam nasional masih defisit dan mengandalkan impor, terutama untuk kebutuhan industri. NTT dapat berperan sebagai pemasok utama garam nasional; 3) Tenaga kerja lokal yang tersedia, dimana, Kegiatan produksi garam cenderung padat karya, sehingga berpotensi besar menyerap tenaga kerja dari masyarakat pesisir, dan 4) Kebutuhan untuk diversifikasi ekonomi pesisir, yakni, Produksi garam dapat menjadi sumber pendapatan alternatif selain perikanan, pertanian, atau pariwisata.

Walaupun memiliki potensi besar, pengembangan garam di NTT masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis, antara lain:

1. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan produksi, sistem irigasi tambak, gudang penyimpanan, dan fasilitas pascapanen;
2. Minimnya investasi sektor swasta dan industri pengolahan yang mampu meningkatkan nilai tambah garam lokal;
3. Kualitas garam rakyat yang belum stabil, karena teknologi produksi masih sederhana dan tergantung pada cuaca;
4. Belum adanya sistem tata kelola berbasis kelembagaan lokal seperti koperasi petani garam yang professional; dan
5. Kurangnya skema insentif dan perlindungan harga dari pemerintah, yang membuat petani garam rentan terhadap fluktuasi pasar.

Dalam kerangka pembangunan menengah dan jangka panjang, pengembangan sektor garam di NTT perlu diarahkan pada strategi transformasi ekonomi pesisir berbasis industri garam yang efisien, berkelanjutan, dan terintegrasi. Arah strategis tersebut meliputi:

1. Revitalisasi dan perluasan tambak garam rakyat melalui program padat karya, swadaya masyarakat, dan dukungan APBD/APBN;
2. Modernisasi sistem produksi dengan penerapan teknologi kristalisasi tertutup, geomembran, sistem pemipaan irigasi tambak, dan pengeringan berbasis tenaga surya;
3. Penguatan koperasi petani garam sebagai lembaga ekonomi rakyat yang bertugas mengelola produksi, distribusi, dan pemasaran secara kolektif;
4. Peningkatan mutu dan sertifikasi garam untuk standar konsumsi maupun industri, melalui pelatihan dan kemitraan dengan lembaga litbang;
5. Pembangunan sentra industri pengolahan garam untuk diversifikasi produk (garam konsumsi, industri, kosmetik, spa, dan kesehatan);
6. Penguatan promosi dan branding garam khas NTT (misalnya garam tradisional dari Sabu, Rote, dan Malaka) sebagai produk unggulan daerah; dan
7. Kolaborasi multipihak antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas (*pentahelix*) untuk membangun ekosistem industri garam daerah yang inklusif.

Potensi pengembangan garam di NTT bukan hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai strategi kemandirian daerah dan penguatan ekonomi lokal pesisir. Dengan tata kelola yang adaptif, partisipatif, dan berbasis pemberdayaan masyarakat, NTT dapat menjadi provinsi mandiri garam nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor garam industri.

c. Potensi Perikanan

a) Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap di Nusa Tenggara Timur memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung ekonomi lokal dan nasional. Jenis produksi perikanan tangkap yang menjadi *Core Competence* Komoditas Unggulan Wilayah yang mendukung pembangan pariwista adalah tuna, cakalang dan tongkol. NTT memiliki kekayaan sumber daya lautnya yang melimpah, termasuk berbagai jenis ikan, udang, cumi-cumi, dan hasil laut lainnya. Lautan di sekitar NTT, yang meliputi Laut Flores, Laut Sawu, dan Samudera Hindia, menyediakan habitat yang ideal bagi banyak spesies ikan yang bernilai ekonomi tinggi. Keberagaman hayati ini memberikan peluang besar bagi pengembangan perikanan tangkap yang berkelanjutan.

Perikanan tangkap merupakan mata pencaharian utama bagi banyak masyarakat pesisir di NTT. Aktivitas perikanan tidak hanya menyediakan sumber pendapatan tetapi juga menjadi bagian integral dari budaya dan tradisi lokal. Pengelolaan perikanan yang baik dan berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Hasil tangkapan ikan dari NTT memiliki pasar yang luas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Produk-produk perikanan seperti ikan tuna, cakalang, dan udang memiliki permintaan yang tinggi di pasar ekspor. Pengembangan industri pengolahan ikan, termasuk pengalengan, pembekuan, dan pembuatan produk olahan lainnya, dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perikanan dari NTT. Dengan memanfaatkan potensi perikanan tangkap yang besar dan menerapkan pengelolaan yang berkelanjutan, Nusa Tenggara Timur dapat menjadi pusat perikanan yang kuat dan berdaya saing di Indonesia.

b) Perikanan Budidaya Air Tawar

Potensi perikanan budidaya di NTT mencakup berbagai aspek yang melibatkan pengembangan teknologi budidaya, peningkatan kapasitas produksi, serta penguatan ekonomi lokal. NTT memiliki kondisi geografis yang sangat mendukung untuk pengembangan perikanan budidaya. Dengan garis pantai yang panjang, perairan yang bersih, dan beragam ekosistem laut yang kaya, NTT menawarkan lingkungan yang ideal untuk budidaya berbagai jenis ikan, kerang, dan rumput laut. Daerah-daerah seperti Kupang, Flores, dan Alor memiliki potensi besar untuk pengembangan budidaya laut.

Potensi perikanan budidaya di NTT tidak terbatas pada satu jenis spesies. Budidaya ikan seperti kerapu, kakap, dan bandeng, serta budidaya kerang mutiara dan rumput laut, merupakan beberapa contoh spesies yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan permintaan pasar yang besar. Diversifikasi spesies budidaya ini dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan keberlanjutan ekonomi. Potensi perikanan budidaya di NTT, antara lain:

1. Potensi Perikanan Budidaya Air Tawar;
2. Potensi Perikanan Budidaya Air Payau; dan
3. Potensi Perikanan Budidaya Air Laut.

Penggunaan teknologi modern dalam budidaya perikanan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Sistem budidaya berbasis teknologi seperti keramba jaring apung, bioflok, dan sistem akuakultur berkelanjutan dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil produksi. Inovasi dalam pakan, manajemen kesehatan ikan, dan teknik budidaya lainnya juga penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.

d. POTENSI ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)

Arah pengembangan Wilayah NTT melalui pengembangan Ekonomi Hijau yang mengacu pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi paling besar pada PDRB Provinsi NTT, dan Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ditunjang dengan pembangunan infrastruktur, transportasi dan telekomunikasi serta konektivitas wilayah. Upaya percepatan pembangunan di Provinsi NTT dapat dilakukan melalui upaya transisi ke sumber energi terbarukan (EBT), peningkatan efisiensi energi, penegakan penuh moratorium pertambangan, mematuhi target komitmen terkait sumber daya air, perikanan, dan keanekaragaman hayati dan peningkatan produktivitas lahan sebesar 4% per tahun, target penurunan emisi GRK dari sektor lahan sebesar 23,47% pada Tahun 2045, pengenalan mekanisme untuk menetapkan harga karbon, target reforestasi yang lebih tinggi, kebijakan untuk meningkatkan efisiensi energi serta pengurangan sampah lebih tinggi terutama di wilayah perkotaan.

Potensi Sumber Daya Alam Terbarukan seperti Pembangkit Listrik EBT dan Pertambangan; Industri produksi dan pengolahan, teknologi bersih dan daur ulang limbah dan Telekomunikasi, transportasi, infrastruktur dan konstruksi dapat mendukung pengembangan Ekonomi Hijau di Provinsi NTT. Sesuai arah pengembangan energi khususnya EBT difokuskan pada 3 (tiga) wilayah besar yaitu Sumba Iconic Island di wilayah Sumba dengan pengembangan EBT Tenaga Surya, Timor Biomassa di Wilayah Timor dengan Pengembangan EBT Biomassa dan Flores *Geothermal* di Wilayah Flores untuk pengembangan EBT *Geothermal* (Panas Bumi). Potensi lainnya yaitu pengembangan hydrogen hijau yang potensial dilaksanakan pada hampir semua daerah di NTT. Secara potensi, wilayah Sumba dan Flores akan berkontribusi besar di dalam pengembangan EBT di dalam wilayah Nusa Tenggara maupun ke wilayah Jawa dan Bali termasuk pada penurunan emisi GRK yang mengarah pada subtitusi energi fossil.

Harapannya bahwa peralihan menuju penggunaan sumber-sumber energi rendah karbon dan model-model ekstraksi mampu memberikan nilai tambah yang dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang signifikan, yang menguntungkan masyarakat dan berpotensi untuk mensuplly EBT ke wilayah lain di sekitar Provinsi NTT.

Selanjutnya, potensi pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur energi dapat memberikan peluang besar antara lain jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa depo, Jaringan minyak dan gas bumi termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut, Jaringan infrastruktur ketenaga listrikan yang meliputi PLTD, PLTMH, PLTA, PLTP, PLTS, PLTU, PLTMG, PLTB serta Gardu Induk/IBT dan Rencana Pengembangan Gardu Induk/IBT di Provinsi NTT dengan lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Potensi ini perlu dikaji / evaluasi lebih mendalam mencakup evaluasi biaya, manfaat, dan kelayakan pembayaran tarif *feed-in* guna menarik sektor swasta untuk berinvestasi dalam energi panas bumi dan memanfaatkan keunggulan komparatif dari adanya fasilitas pengolahan mineral di dekat lokasi sumber-sumber daya tambahan, seperti air dan energi rendah karbon.

3) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Untuk **Daya Dukung Air** air di suatu wilayah bisa dalam keadaan surplus atau defisit ditentukan oleh perbandingan antara kesediaan dan kebutuhan air. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air di suatu wilayah tercukupi, sedangkan keadaan defisit menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan akan air. Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 146 / MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional diketahui daya dukung air di Provinsi NTT secara keseluruhan mayoritas area di Provinsi NTT masih memiliki kapasitas dan daya tampung air yang belum terlampaui, mencakup sekitar 68,91% dari total luas wilayah, yaitu sebesar 3.200.914,46 Ha. Secara umum, ketersediaan air Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini masih mencukupi kebutuhan air domestik dan lahan. Namun apabila mengkaji hasil selisih ketersediaan dan kebutuhan air, maka akan terlihat pada beberapa wilayah sudah dalam status melampaui daya dukung air yaitu Kabupaten Belu, Malaka, Nagekeo, Rote, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan dan Kota Kupang sehingga diperlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan krisis dan kelangkaan air.

Tabel 2.1 Distribusi Luasan Daya Dukung Daya Tampung Air Provinsi NTT

Kabupaten/ Kota	Belum Terlampaui		Terlampaui		Total
	Luas (Ha)	Persentasi (%)	Luas (Ha)	Persentasi (%)	
Alor	233.636,27	76,78	56.216,61	20,22	262.855,88
Belu	70.284,52	62,24	42.642,67	37,76	112.627,46
Ende	156.414,45	75,06	51.656,64	24,64	208.374,06
Flores Tinur	110.747,87	63,34	64.104,20	36,66	174.852,07
Kota Kupang	1.616,66	10,66	13.548,83	86,34	15.165,46
Kupang	361.365,08	70,26	152.758,21	26,71	514.123,26
Lembata	84.321,48	66,46	42.486,01	33,51	126.810,46
Malaka	47.660,58	42,83	63.668,44	57,17	111.356,03

Kabupaten/ Kota	Belum Terlampaui		Terlampaui		Total
	Luas (Ha)	Persentasi (%)	Luas (Ha)	Persentasi (%)	
Manggarai	68.666,26	73,53	35.528,86	26,47	134.225,18
Manggarai Barat	226.426,85	72,34	86.567,05	27,66	312.666,61
Manggarai Timur	174.518,61	72,68	64.604,82	27,02	236.123,74
Nagekeo	66.178,87	68,87	43.466,24	31,13	136.648,11
Ngada	125.643,10	72,66	47.380,08	27,34	173.323,16
Rote Ndao	61.503,06	47,80	67.167,56	52,20	128.670,65
Sabu Raijua	8.765,26	16,02	37.325,76	80,68	46.061,07
Sikka	113.425,58	67,68	54.175,25	32,32	167.600,83
Sumba Barat	44.268,61	61,16	28.082,63	38,81	72.351,53
Sumba Barat Daya	64.657,14	46,50	74.376,75	53,50	136.033,86
Sumba Tengah	158.567,56	87,53	22.562,76	12,47	181.160,32
Sumba Tinur	567.682,47	81,21	131.305,75	18,76	668.688,22
Timor Tengah Selatan	216.363,36	55,76	174.060,45	44,24	363.423,82
Timor Tengah Utara	174.807,15	66,75	87.064,47	33,25	261.871,62
Total	**3.200.G14 ,46**	**68,G1**	**1.444.0G2, 44**	**31,0G**	**4.645.006, G0**

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi NTT 2025-2029, diolah

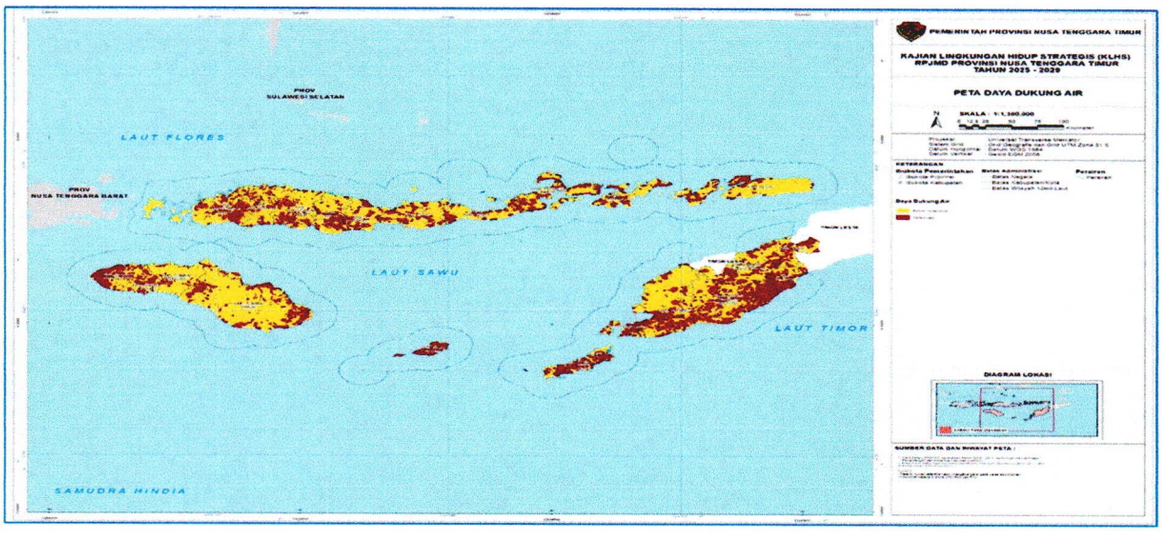

Sumber : SKMenLHK Nomor 146/Men/LHK/Setjen/KUM.1/2/2023

Gambar 2.5 Peta Daya Dukung Daya Tampung Air Provinsi NTT

Untuk **Daya Dukung Pangan** dapat dilihat melalui daya dukung lahan pertanian yang merupakan ukuran kemampuan produksi tananam pangan/ padi dan atau tanaman pangan yang lain dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk di suatu wilayah. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa keseluruhan wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam lahan yang sesuai untuk swasembada pangan dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. Hal ini terbukti pada tabel luas daya dukung lahan pada tahun 2023 - 2043 mengalami penurunan.

Tabel 2.2 Kondisi dan Proyeksi Luas Daya Dukung Lahan Pertanian Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2029

No	Kabupaten/Kota	Daya Dukung Lahan Pertanian T					
		2022	2025	2026	2027	2028	2029
MAMPU SWASEMBADA							
1	Sumba Barat	18,0463	16,6670	16,2661	15,8522	15,446	15,0502

No	Kabupaten/Kota	Daya Dukung Lahan Pertanian T					
		2022	2025	2026	2027	2028	2029
2	Sumba Tinur	24,1667	23,6662	23,5047	23,3413	23,176	23,0176
3	Kupang	18,3223	17,3675	17,0604	16,7587	16,4624	16,1713
4	Timor Tengah Selatan	52,3407	51,8570	51,6667	51,5366	51,3777	51,2186
5	Timor Tengah Utara	47,6307	46,2458	45,6675	45,1556	44,6202	44,0611
6	Belu	47,6152	45,6166	44,8761	44,1506	43,4336	42,7286
7	Alor	32,3165	31,3102	30,6818	30,6566	30,3353	30,0171
8	Lembata	46,3668	44,5415	43,6482	43,3628	42,7852	42,2153
6	Flores Timur	38,6161	36,7118	36,0681	35,4647	34,6014	34,318
10	Sikka	36,4536	35,7202	35,476	35,2363	35,0013	34,7646
11	Ende	37,5456	37,1322	36,6653	36,8586	36,7231	36,5877
12	Ngada	36,0864	37,4343	36,8662	36,3718	35,852	35,3365
13	Manggarai	11,2141	10,6682	10,6272	10,8566	10,7865	10,7166
14	Rote Ndao	23,2561	22,0637	21,6766	21,3026	20,6324	20,5683
15	Manggarai Barat	48,1561	46,1753	45,5332	44,6001	44,2756	43,6602
16	Sumba Tengah	36,828	33,6244	32,6167	31,645	30,6665	26,7822
17	Sumba Barat Daya	60,8033	56,6863	56,3185	58,653	58,5867	58,2287
18	Nagekeo	14,8527	13,6661	13,7216	13,4526	13,1888	12,6302
19	Manggarai Tinur	21,7268	21,1883	21,0118	20,8368	20,6632	20,4611
20	Sabu Raijua	12,8166	12,0847	11,8501	11,62	11,3644	11,1732
21	Malaka	57,2802	55,0542	54,3316	53,6185	52,6147	52,2202
BELUM MAMPU SWASEMBADA							
22	Kota Kupang	0,16231	0,1764	0,1714	0,16654	0,16181	0,15722
MAMPU SWASEMBADA							
Nusa Tenggara Timur		**32,1186**	**30,8743**	**30,4653**	**30,05GG**	**2G,6581**	**2G,25GG**

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi NTT 2025-2029, diolah

Selain daya dukung lahan pertanian rasio kemampuan daya dukung (CCR/ *Carrying Capacity Ratio*) suatu wilayah untuk mendukung kebutuhan pokok penduduk yang dihitung dari ketersediaan kebutuhan beras, maka secara kumulatif di Provinsi NTT CCR-nya sangat baik untuk 21 Kabupaten kecuali Kota Kupang yang CCR-nya sangat rendah.

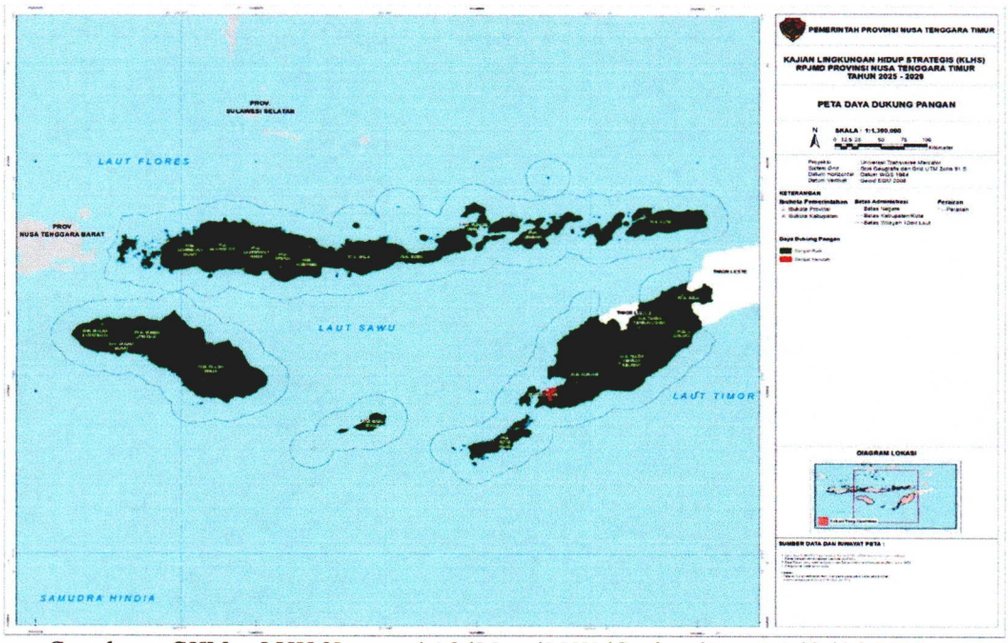

Sumber : SKMenLHK Nomor 146/Men/LHK/Setjen/KUM.1/2/2023

Gambar 2.6 Peta Daya Dukung Pertanian

4) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Lebih jauh lagi untuk **Ketahanan Energi** juga menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah kepulauan seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Dalam konteks ini, program elektrifikasi menjadi strategi kunci untuk memastikan pemerataan akses energi hingga ke pelosok. Sepanjang periode 2018 hingga 2023, NTT menunjukkan kemajuan signifikan dalam dua indikator utama: rasio elektrifikasi rumah tangga dan rasio desa berlistrik. Pada Tahun 2018, hanya 62,88% rumah tangga yang telah menikmati aliran listrik (731.268 dari 1.163.007 rumah tangga). Namun, melalui berbagai upaya percepatan dan perluasan infrastruktur, rasio ini melonjak menjadi 86,33% pada 2019 dan terus meningkat secara bertahap hingga mencapai 94,89% pada November 2023 (1.210.442 dari 1.275.609 rumah tangga). Di sisi lain, rasio desa berlistrik juga mengalami peningkatan yang konsisten. Dari 76,20% pada tahun 2018 (2.555 desa dari total 3.442 desa), capaian ini naik menjadi 90,19% pada 2021, lalu menjadi 92,25% di Tahun 2022, hingga mencapai 94,60% pada Desember 2023 atau setara dengan 3.256 desa yang telah teraliri listrik. Tren positif ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan akses energi sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat. Meski demikian, sekitar 5% rumah tangga dan desa yang belum terjangkau listrik tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan guna mewujudkan ketahanan energi yang menyeluruh dan inklusif di seluruh wilayah NTT.

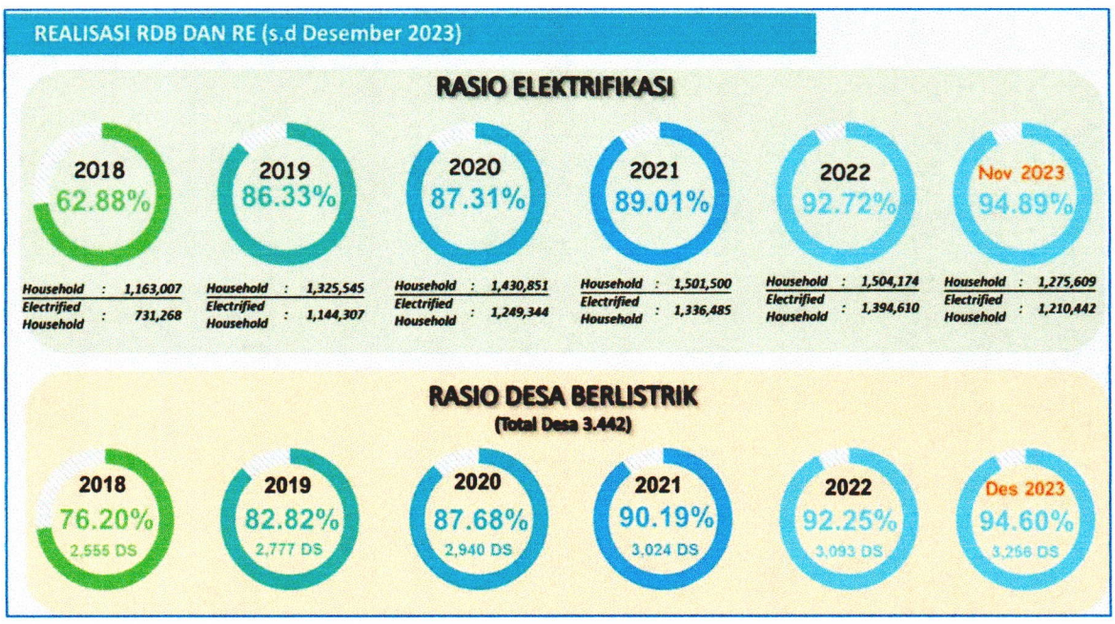

Sumber: Dinas ESDM Prov. NTT, 2024.

Gambar 2.7 Rasio Elektrifikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023

Ketahanan Air untuk *region* Bali dan NTT pada Tahun 2022 yaitu 89 persen kategori parah, 0,3 persen kategori tinggi, 0,1 kategori Sedang dan 0,7 persen tidak memiliki kelangkaan air di wilayah sungai. Sedangkan untuk status pemanfaatan region bali dan NTT terdapat 92 persen rumah

tangga dengan akses ke air yang lebih baik, 28 persen rumah tangga dengan akses ke air perpipaan, 88 persen rumah tangga dengan akses ke sanitasi yang lebih baik, 0,6 persen daerah irigasi dari total daerah irigasi nasional, 0,3 persen memilik penyimpanan air dari total penyimpanan air nasional serta terdapat 12 persen memiliki Stasiun pemantauan air permukaan sangat tercemar (*World Bank*, 2022). Meskipun sumber daya air pada umumnya melimpah di Indonesia, namun penyebarannya tidak merata. Kini, setengah dari total PDB dihasilkan dari wilayah sungai yang mengalami kelangkaan air 'tinggi' atau 'parah' di musim kemarau. Jika tidak ada perubahan, diperkirakan dua pertiga (67 persen) dari PDB akan dihasilkan dari wilayah sungai yang mengalami kelangkaan air yang sangat tinggi atau sangat parah pada Tahun 2045.

Bendungan merupakan infrastruktur vital yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan air, baik untuk pertanian, konsumsi, maupun sektor lainnya. Secara umum, tujuan pembangunan bendungan terbagi menjadi dua: *single purpose* dan *multi purpose*. *Single purpose dam* adalah bendungan yang dirancang untuk satu fungsi khusus, seperti penyediaan air irigasi atau pengendalian banjir. Sementara itu, *multi purpose dam* berperan lebih luas—selain menyediakan air irigasi dan air minum, juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air serta destinasi wisata yang menarik. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini memiliki 21 (dua puluh satu) bendungan, sebagai langkah strategis dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Dari total tersebut, 16 (enam belas) bendungan telah beroperasi, 2 (dua) bendungan belum berfungsi, dan 3 (tiga) bendungan lainnya—Mbay, Manikin, dan Temef—masih dalam tahap konstruksi atau persiapan operasional hingga Tahun 2023. Keberadaan bendungan-bendungan ini tidak hanya memperkuat ketahanan air dan energi di wilayah NTT, tetapi juga membuka berbagai peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Kemandirian Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan.

Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PoU) di NTT menurun selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, nilai PoU sebesar 13,12 persen dan kemudian menurun menjadi 12,49 di tahun 2024. Hasil menunjukan bahwa PoU NTT berada pada kategori sedang (moderate: 5%-15%). Meskipun demikian, dapat diartikan bahwa 12-13 dari 100 orang, atau 1 dari 10 orang di NTT belum memperoleh asupan energi minimum harian yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan sehat dan aktif. Permasalahan ini berkaitan erat dengan keterbatasan akses pangan, rendahnya daya beli rumah tangga, distribusi pangan yang belum merata, serta kerentanan terhadap guncangan produksi dan iklim.

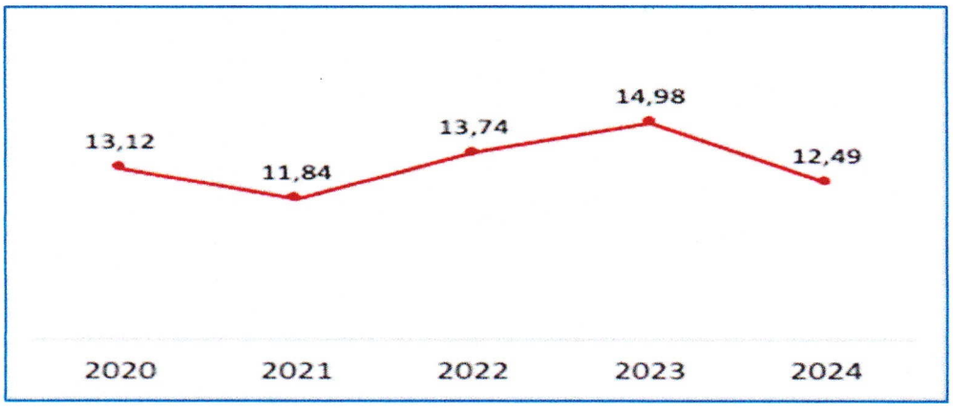

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029

Gambar 2.8 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Provinsi NTT Tahun 2020-2024

Pada Tahun 2022, nilai Indeks Ketahanan Pangan NTT mencapai 68,42, yakni mengalami peningkatan dari nilai IKP pada Tahun 2019 senilai 50,69 dan pada akhir Tahun 2024 senilai 70,91. Meski telah mengalami peningkatan yang baik, rata-rata nilai IKP per kabupaten/kota di NTT dan indikator pembentuknya masih jauh lebih rendah daripada rata-rata nasional. Beberapa komponen pembentuk IKP yang nilainya di NTT masih jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional, meliputi tingginya proporsi masyarakat dengan pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% dari total pengeluaran, tingginya masyarakat yang hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, tingginya proporsi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, rendahnya angka harapan hidup, lama sekolah perempuan, rasio tenaga kesehatan dan tingginya prevalensi stunting.

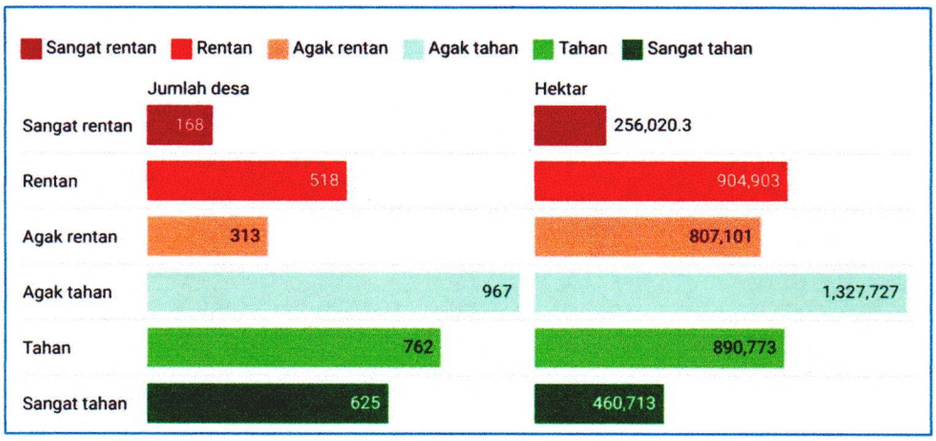

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029

Gambar 2.9 Indeks Ketahanan Pangan Provinsi NTT

5) Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Sanitasi

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangka septik atau

sistem pengolahan air limbah (SPAL) Sistem Terpusat. Capaian akses sanitasi layak berdasarkan "NTT dalam Angka 2025" untuk Tahun 2020-2024 ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Provinsi NTT Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Sumba Barat	46,56	54,33	52,84	58,83	60,76
Sumba Timur	53,31	69,06	59,76	61,81	65,88
Kupang	75,73	74,92	78,15	76,42	73,34
Timor Tengah Selatan	49,81	50,15	60,52	67,93	70,72
Timor Tengah Utara	79,30	70,03	81,98	80,56	80,84
Belu	76,62	71,80	83,96	83,95	85,78
Alor	77,32	83 ,16	81,59	81,57	85,78
Lembata	90,19	91,88	88,41	87,36	88,61
Flores Timur	88,51	93,06	88,00	93,03	96,98
Sikka	77,70	83,14	79,16	80,66	85,35
Ende	89,59	86,63	88,09	88,45	92,69
Ngada	88,69	91,40	86,66	87,08	86,56
Manggarai	61,53	72,84	62,10	62,76	66,26
Rote Ndao	80,19	87,53	88,82	84,92	85,16
Manggarai Barat	65,54	72,81	78,09	80,81	82,03
Sumba Tengah	36,74	50,54	54,29	48,22	52,51
Sumba Barat Daya	33,02	42,15	45,83	49,82	52,60
Nagekeo	85,09	89,07	88,30	80,06	83,52
Manggarai Timur	35,53	46,98	51,83	54,82	55,72
Sabu Raijua	77,16	81,28	69,60	75,21	83,51
Malaka	63,51	71,08	70,88	71,32	73,70
Kota Kupang	89,96	89,86	82,74	89,47	91,69
Nusa Tenggara Timur	**69,70**	**73,36**	**73,70**	**75,76**	**77,66**

Sumber : NTT Dalam Angka 2025

b. Mengurangi Timbulan Limbah

Program penanganan sampah di Provinsi NTT dilaksanakan melalui pengurangan dan penanganan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Target dan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Provinsi NTT Tahun 2022-2023

Tahun	Timbulan Sampah/ Ton/ Tahun)	Indikator							
		Pengurangan Sampah				Penanganan Sampah			
		Target		Capaian		Target		Capaian	
		Ton	%	Ton	%	Ton	%	Ton	%
2022	784,454,00	174,027,77	26	3,471,692	2,04	485,126,03	73	0	0
2023	802,707,24	217,642,04	27	178,73	1,06	568,971,02	72	3,699,06	11,12

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, 2024

Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, target pengurangan timbulan limbah dapat diukur melalui jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.

Tabel 2.5 Jumlah Timbulan Sampah yang di daur ulang Provinsi NTT Tahun 2022-2023

Jumlah Timbulan Sampah yang di daur ulang						
Indikator	**Satuan**	**Baseline 2021**	**Target**		**Realisasi**	
			2022	**2023**	**2022**	**2023**
Jumlah Timbunan Sampah yang dikurangi dan ditangani sesuai UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Ton/ Tahun	-	659.153,80	786.613,08	3.471,692	3.877,79

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, 2024

Pada tahun pada Tahun 2022 jumlah timbunan sampah yang diolah adalah sebesar 3.471,692 ton/tahun atau senilai 0,52% dari target dan 0,44% dari jumlah timbunan sampah 784.454 ton. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah timbunan sampah yang diolah adalah sebesar 3.877,79 ton/tahun atau sebesar 0,49% dari target dan 0,48% dari timbunan sampah 802.707,24 ton. Dalam dua tahun tersebut realisasi capaian pengelolaan sampah ini tidak berdampak secara signifikan terhadap pengurangan jumlah timbunan sampah.

6) Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Berdasarkan kajian kerentanan pada tingkat Kabupaten/ Kota, terdapat dua belas jenis ancaman yang ada di Provinsi NTT di kategorikan dalam kelas tinggi dengan potensi penduduk terpapar terbanyak pada jenis bencana gempa bumi dan kekeringan, catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut catatan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB, sejak tahun 1950 hingga 2024, telah mengalami berbagai jenis bencana alam yang berdampak signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dari data yang tercatat, total terdapat 49.764 kejadian bencana di wilayah ini, dengan korban meninggal dunia mencapai 260.815 jiwa, 51.135 orang hilang, 426.069 orang terluka, serta jutaan orang yang terdampak atau harus mengungsi. Bencana yang paling sering terjadi adalah banjir dengan 17.110 kejadian, Tanah longsor dengan 9.709 kejadian, gelombang ekstrem dan abrasi dengan 11 kejadian, cuaca ekstrem dengan 13.400 kejadian,

kekeringan yang terjadi sebanyak 3.211 kali, kebakaran hutan dan lahan dengan 5.533 kejadian, gempa bumi dengan 537 kejadian, tsunami dengan kejadian 23 kali, erupsi gunung api dengan kejadian 230 kali.

Kerugian akibat bencana di Provinsi NTT terdiri dari kerugian fisik dan ekonomi dan kerusakan lingkungan. Nilai kerugian terbesar disebabkan oleh ancaman gempa bumi dengan total kerugian mencapai 13.892.270,97 juta rupiah, kerugian fisik yaitu sebesar 13.834.001,97 juta rupiah dan kerugian ekonomi sebesar 58.269,00 juta rupiah, kerusakan lingkungan paling tinggi disebabkan oleh banjir dengan total kerusakan seluas 1.798.514,00 ha. Bencana dengan tingkat bahaya dan kerentanan yang tinggi serta kapasitas mitigasi yang rendah adalah banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan likuefaksi, sedangkan bencana dengan tingkat kerentanan sedang adalah kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan.

Berdasarkan **kajian RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043 Kawasan Rawan Bencana Alam** terdiri atas Kawasan rawan bencana di Provinsi NTT, terdiri atas **Kawasan rawan longsor** dan gerakan tanah terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat. **Kawasan rawan banjir** terdapat di Takari dan Noelmina di Kabupaten Kupang, Benanain di Kabupaten Belu, Dataran Bena dan Naemeto di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Ndona di Kabupaten Ende. **Kawasan rawan bencana gunung berapi** meliputi Gunung Inelika, Gunung Illi Lewotolo, Gunung Illi Boleng, Gunung Lereboleng, Gunung Lewotobi Laki-laki dan Gunung Lewotobi Perempuan di Kabupaten Flores Timur, Kawasan Gunung Anak Ranakah di Kabupaten Manggarai, Kawasan Gunung Iya dan Gunung Kelimutu di Kabupaten Ende, Kawasan Gunung Inerie di Kabupaten Ngada, Kawasan Gunung Ebulobo di Kabupaten Nagekeo, Kawasan Gunung Rokatenda dan Gunung Egon di Kabupaten Sikka, Kawasan Gunung Sirung di Kabupaten Alor; dan Kawasan Gunung Batutara dan Gunung Ile Ape di Kabupaten Lembata. **Kawasan rawan bencana gempa** terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Alor, **Kawasan rawan bencana gelombang pasang dan tsunami** terdapat di Maumere Kabupaten Sikka, Daerah Atapupu/Pantai Utara Belu, Pantai Selatan Pulau Sumba, Pantai Utara Ende, Pantai Utara Flores Timur, Pantai Selatan Lembata, dan Pantai Selatan Pulau Timor, Pantai Selatan Pulau Sabu dan Pantai Selatan Pulau Rote;

Sejak Tahun 2015 nilai **Indeks Risiko Bencana** Provinsi NTT memiliki indeks risiko senilai 157,16 dengan kategori tinggi kemudian turun menjadi 139,23 pada Tahun 2022 dengan kategori sedang. Ancaman Bencana pada wilayah ini meliputi: Gempa Bumi, Tsunami, Gunung Api, Banjir, Tanah Longsor, Kekeringan, Gelombang Ekstrim/ Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan serta Cuaca Ekstrim. Rincian perkembangan nilai Indeks Resiko Bencana Provinsi NTT Tahun 2015-2022 selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

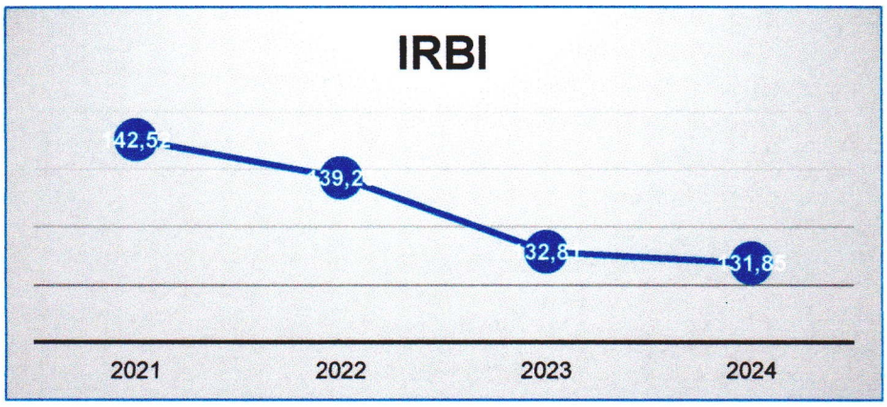

Sumber: Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI 2025, BNPB)

Gambar 2.10 Indeks Resiko Bencana Provinsi NTT Tahun 2021-2024

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai proksi dari kapasitas penanggulangan bencana wilayah meningkat selama periode 2019-2024 di NTT dalam konteks perbandingan *before-after*. Pada Tahun 2019, nilai IKD Provinsi NTT sebesar 0,37 dengan kategori rendah dan meningkat menjadi 0,41 di Tahun 2024 atau berkategori rendah. Nilai IKD masing-masing kabupaten/kota juga mengalami peningkatan secara umum baik nilai ataupun kategori, meskipun beberapa di antaranya mengalami penurunan (TTS, Lembata, Sikka, Ende, Manggarai, Manggarai Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Kabupaten Kupang, Alor, Sabu Raijua dan SBD). Nilai IKD kabupaten/kota tertinggi di Tahun 2024 ialah Alor sebesar 0,53 (kategori rendah) dan terendah ialah Sumba Tengah sebesar 0,25 (kategori rendah).

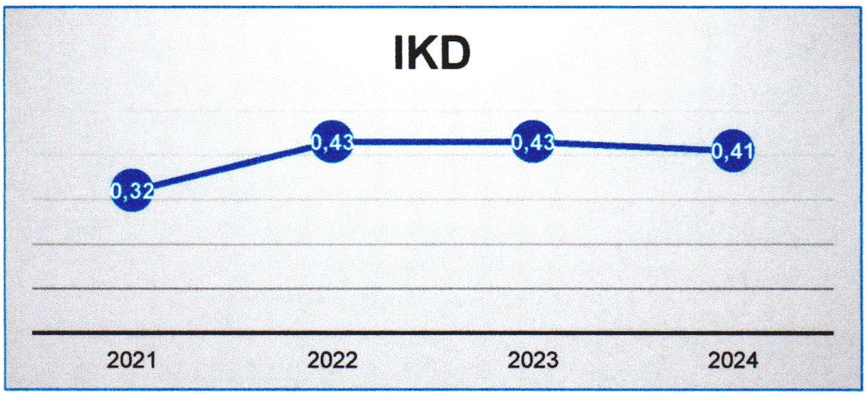

Sumber: Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI 2025, BNPB

Gambar 2.11 Indeks Kapasitas Daerah Provinsi NTT Tahun 2021-2024

7) Demografi

Proyeksi Laju pertumbuhan penduduk Preovinsi NTT Tahun sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2023 cenderung menurun. Pada Tahun 2011 diproyeksikan laju pertumbuhan penduduk NTT sebesar 1,75% yang terus menurun hingga Tahun 2023 sebesar 1,64%. Komposisi penduduk Provinsi NTT Tahun 2023 berdasarkan kelompok umur didominasi oleh penduduk dengan rentang usia 0-4 Tahun diikuti oleh 5-9 Tahun dan terus berkurang sampai kategori usia 75 Tahun ke atas. Sebagian besar penduduk NTT merupakan kelompok usia produktif (15-64 Tahun) yaitu mencapai lebih dari 60 persen. Sedangkan menurut jenis kelamin, proporsi penduduk laki-laki sedikit lebih besar daripada penduduk perempuan.

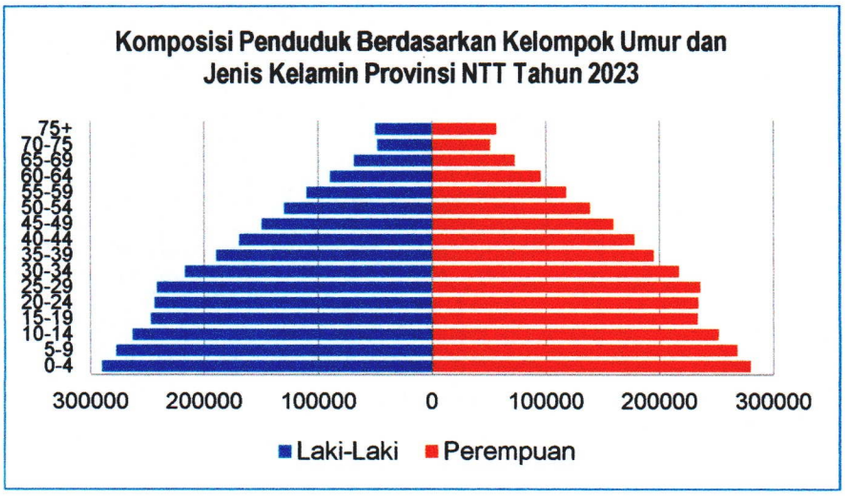

Sumber : BPS NTT, 2024

Gambar 2.12 Komposisi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Kepadatan penduduk Provinsi NTT dalam kurun waktu 10 tahun terakhir cenderung meningkat. Pada Tahun 2013 kepadatan penduduk Provinsi NTT 78 jiwa/km^2 yang mengalami peningkatan sampai Tahun 2020 menjadi 111 jiwa/km^2 dan terus meningkat hingga Tahun 2023 senilai 120 jiwa/km^2. kepadatan penduduk Provinsi NTT pada Tahun 2024 naik menjadi 122 Jiwa/Km^2 dan kondisi pada Tahun 2025 menjadi 124 Jiwa/Km^2.

Berdasarkan Proyeksi Penduduk 2020–2050, jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2024 mencapai 5.656.039 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk NTT terdiri dari 2.828.186 laki-laki dan 2.827.853 perempuan; dengan rasio jenis kelamin 100,01 dan laju pertumbuhan 1,62 persen dibanding Tahun 2020.

Berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin, gambar di bawah menunjukkan bahwa kelompok usia termuda (0-4 tahun dan 5-9 tahun) merupakan jumlah penduduk terbesar, dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Seiring dengan bertambahnya usia, jumlah penduduk secara bertahap menurun terutama pada kelompok usia yang lebih tua. Pada kelompok usia yang lebih tua (65+), jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki, yang menunjukkan harapan hidup yang lebih tinggi bagi penduduk perempuan.

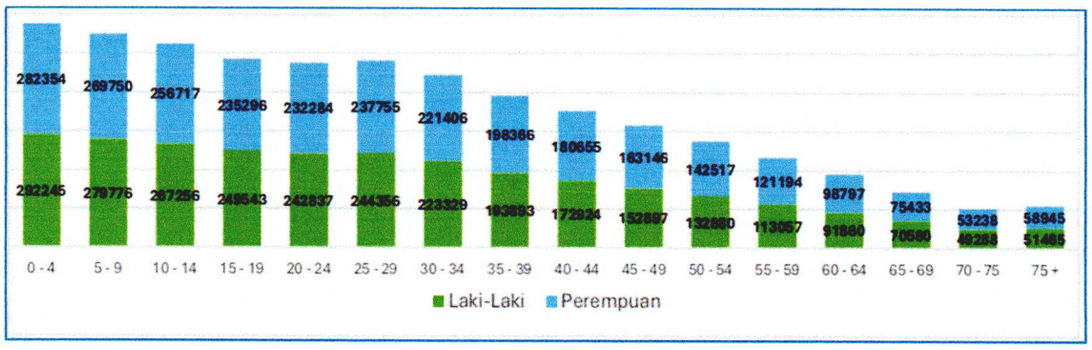

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025

Gambar 2.13 Jumlah Penduduk NTT Menurut Kelompok Umur (Jiwa) dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Jumlah penduduk dengan lansia dan disabilitas di NTT pada Tahun 2022 seperti terlihat dalam Tabel 2.4 Penduduk Lanjut Usia (Lansia) berusia 60 tahun keatas jumlah 464.833 jiwa atau 10,16% dari total jumlah penduduk NTT. Mayoritas lansia tinggal di pedesaan 77,14% sementara perkotaan 22,96%.

Tabel 2.6 Penduduk Lansia dan Disabilitas menurut Jenis Kelamin di NTT Tahun 2022

Rincian	Laki- Laki		Perempuan		Total	
	Jml	%	Jml	%	Jmlh	%
Disabilitas	292.912	55,90	231.187	44,10	524,099	100
Lansia	222.887	47,59	24.194	52,05	464.833	100

Sumber: Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) November 2022

Berdasarkan data kependudukan diatas maka perlu diantisipasi kesesuaian pemanfaatan ruang dalam pembangunan dengan jumlah penduduk, karena keterbatasan ruang dapat berdampak pada keterbatasan lahan permukiman sehingga warga membangun di daerah lereng, bantaran sungai dan ruang lain yang tidak diperuntukan untuk pemukiman.

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1) Kesejahteraan Ekonomi

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan menurun dari 21,03 persen keadaan September 2018 menjadi 20,62 persen keadaan September 2019 dan mengalami kenaikan menjadi 21,21 persen pada September Tahun 2020 dan Tahun 2021 masih mengalami kenaikan menjadi 20,44%, sedangkan pada Tahun 2022 kondisi bulan September mengalami penurunan sebesar 0,21% atau menjadi 20,23%. Pada Tahun 2023 turun menjadi 19,96%. Angka kemiskinan di NTT mengalami tren penurunan menjadi 19,02% pada September 2024, dibandingkan 19,96% pada Tahun 2023. Upaya pemerintah daerah dalam program pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial, peningkatan lapangan kerja, dan program pemberdayaan masyarakat menunjukkan hasil yang positif.

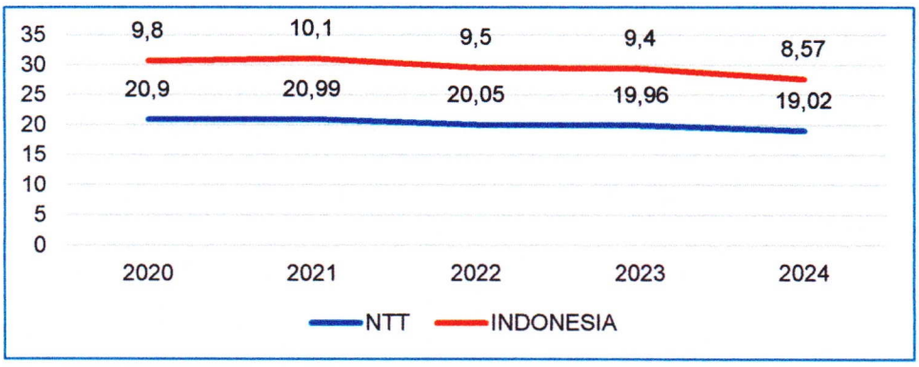

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025 (diolah)

Gambar 2.14 Persen Penduduk Miskin Provinsi NTT Tahun 2020-2024

Penurunan tingkat kemiskinan reguler selama 2021-2024 (Gambar 2.13) tidak se-progresif penurunan tingkat kemiskinan ekstrem. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ekstrem telah melampui Garis Kemiskinan Ekstrem (Rp. 362.692/kapita/bulan) namun masih berada di bawah Garis Kemiskinan (Rp.527.275/ kapita/bulan).

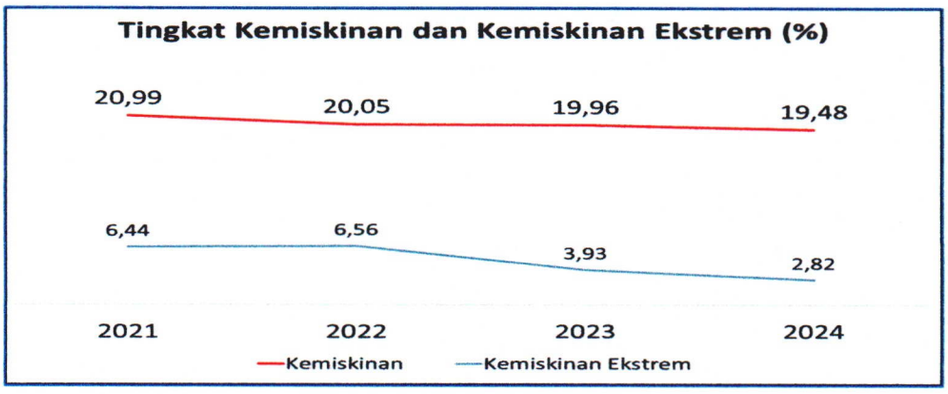

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025 (diolah)

Gambar 2.15 Tingkat kemiskinan dan kemiskinan Ekstrem

Lambatnya penurunan kemiskinan di NTT dipengaruhi beberapa hal: *Pertama*, masih tingginya tingkat *exclusion* dan *inclusion error*. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk NTT yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), 2024 sebanyak 3,6 juta atau sekitar 65% yang berarti penduduk tersebut terindikasi miskin dan layak memperoleh perlindungan sosial. Hal ini jauh berbeda dengan estimasi penduduk miskin oleh BPS yaitu sekitar 1,1 juta sehingga mengindikasikan tingginya *inclusion error* yang terdaftar dalam DTKS. Selanjutnya, uji Petik Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Kabupaten Kupang pada Tahun 2023 menemukan bahwa 6 dari 20 penerima bansos tidak tergolong kelompok masyarakat yang layak sebagai penerima bantuan jika mengacu pada pendapatan per bulan dan kondisi rumah. Analisis yang dilakukan BAPPERIDA melalui sekretariat TKPK juga menunjukan hal yang sama yakni hanya bantuan beras yang 86% berasal dari Data P3KE walaupun penerima masih tersebar di desil 2-4, sedangkan program lainnya seperti KUBE, pemberdayaan UMKM, dan lain lain mayoritas penerimanya berada diluar data P3KE.

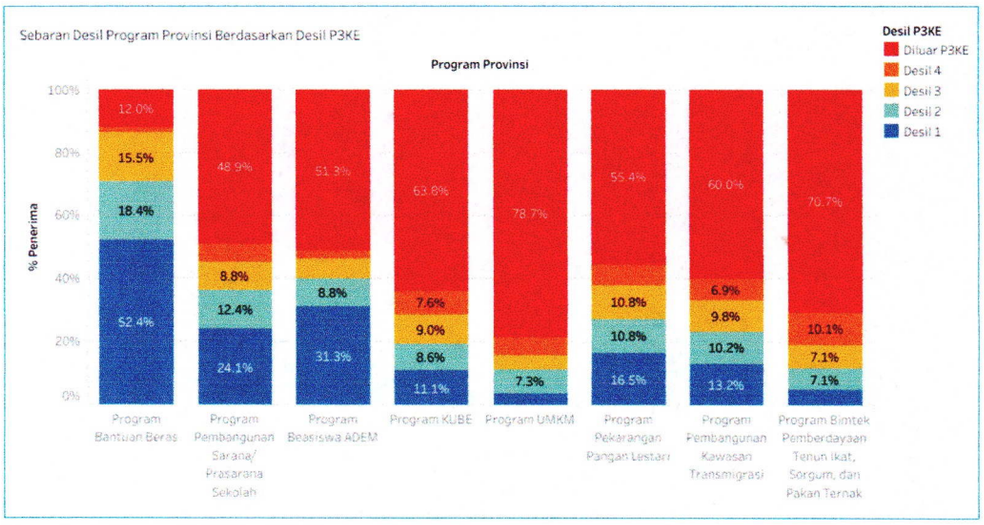

Sumber: Data P3KE, 2024

Gambar 2.16 Sebaran Desil Penerima Program Kemiskinan/Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 dari APBD Provinsi NTT Tahun 2024

Kedua, konvergensi program pengentasan kemiskinan yang belum optimal. Analisis TNP2K (2023) menunjukan hanya 0,7% penduduk desil 1 yang menerima manfaat program penanggulangan kemiskinan senilai 1,1 Juta Rupiah berdasarkan data SUSENAS 2022. Selanjutnya, analisis TKPK provinsi NTT melalui platform Padu Padan Basis Data Kemiskinan (PAPADANKE) menunjukan hal yang sama yaitu hanya 1,1% penduduk desil 1-4 yang menerima program pusat dan provinsi berdasarkan data P3KE Tahun 2024.

Ketiga, rendahnya tingkat pendidikan dimana mayoritas tingkat pendidikan terakhir penduduk desil 1 dan 2 adalah SD/Sederajat (Data P3KE, 2024) menjadi tantangan penanggulangan kemiskinan karena dapat menyebabkan terbatasnya pilihan pekerjaan dan rendahnya produktivitas. *Keempat,* tanggungan anggota keluarga yang tinggi. Analisis Data P3KE Tahun 2024 menunjukan semakin rendah status kesejahteraan seseorang semakin tinggi jumlah anggota keluarganya. Pada standart tiap desil dinyatakan dengan jumlah anggota keluarga sebagai berikut:

a. Desil 1 dengan jumlah anggota keluarga mencapai 5,84 orang.
b. Desil 2 dengan jumlah anggota keluarga mencapai 5,08 orang.
c. Desil 3 dengan jumlah anggota keluarga mencapai 4,75 orang.
d. Desil 4 dengan jumlah anggota keluarga mencapai 4,47 orang.

Semakin banyak anggota keluarga, semakin besar pula kebutuhan akan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Ini dapat membebani keuangan keluarga, terutama bagi mereka yang berada di desil 1-4. *Kelima,* rendahnya produktivitas dan nilai tukar petani dengan 80% penduduk miskin (desil 1 dan 2) bekerja sebagai petani (Data P3KE, 2024).

Untuk **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2022. Jika diamati secara kumulatif, IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat sebesar 6,69 Poin atau 59,21 pada Tahun 2010 yang menjadi 66,68 di Tahun 2023. Peningkatan kumulatif ini masih berada diatas nasional untuk periode yang sama, yaitu sebesar 6,38 poin dari Tahun 2020 senilai 66,53 menjadi 74,39 pada Tahun 2023. Rincian pertumbuhan IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional selama periode 2010 sampai dengan 2023.

Selain itu juga kondisi kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurun dikarenakan selama periode 2020-2024, **Pertumbuhan Ekonomi** Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara umum mengalami kenaikan. Capaian pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 sebesar -0,84 persen terus mengalami peningkatan, dan mengalami penurunan sedikit pada Tahun 2023 sebesar 2,08 persen yang kemudian meningkat perlahan menjadi 3,73 persen pada Tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 mengalami konstraksi ke level -0,84 persen, sangat menurun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2018 sebesar 5,11 persen dan di tahun 2019 5,24 persen. Pertumbuhan ekonomi NTT Tahun 2020 yang mengalami konstraksi tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang juga mengalami konstraksi hingga -2,07 persen. Tingginya tingkat konstraksi pertumbuhan ekonomi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19. Pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan ke level 2,52 persen dan terus meningkat di Tahun 2022 yaitu menjadi 3,45 persen dan mengalami perlambatan pada Tahun 2023 menjadi 2,08 persen mengalami peningkatan pada Tahun 2024 sebesar 3,73 persen. Pada Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 3,73 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2,08 persen pada Tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang lebih stabil pascapandemi COVID-19, dengan kontribusi sektor pertanian dan pariwisata sebagai pendorong utama pertumbuhan.

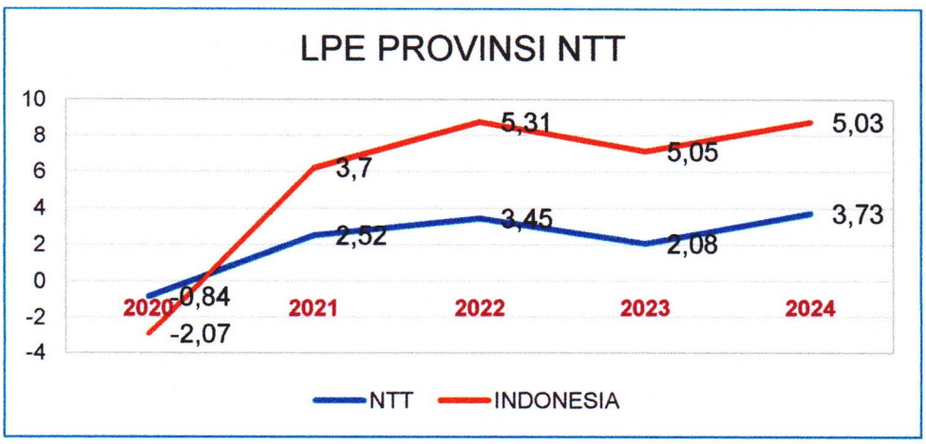

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025 (diolah)

Gambar 2.17 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2020-2024

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara umum, capaian inflasi selama periode 2020-2024 di NTT belum memenuhi rentang target **inflasi** yaitu 3%±1(2%-4%) di Tahun 2020-2023 dan 2,5%±1 (1,5%-3,5%) di Tahun 2024. Satu-satunya periode dengan pencapaian inflasi terkendali dan terjaga sesuai rentang target ialah Tahun 2023 yaitu sebesar 2,42%. Selain itu, tingkat inflasi selama periode ini cenderung berfluktuasi. Kedua kondisi ini menggambarkan bahwa kecenderungan harga-harga barang dan jasa pokok di tingkat lokal yang belum stabil yang dapat disebabkan oleh ketergantungan pada komoditas tertentu, ketimpangan distribusi, kebutuhan pada kegiatan musiman seperti hari besar keagamaan, maupun kebijakan pengendalian yang belum efektif.

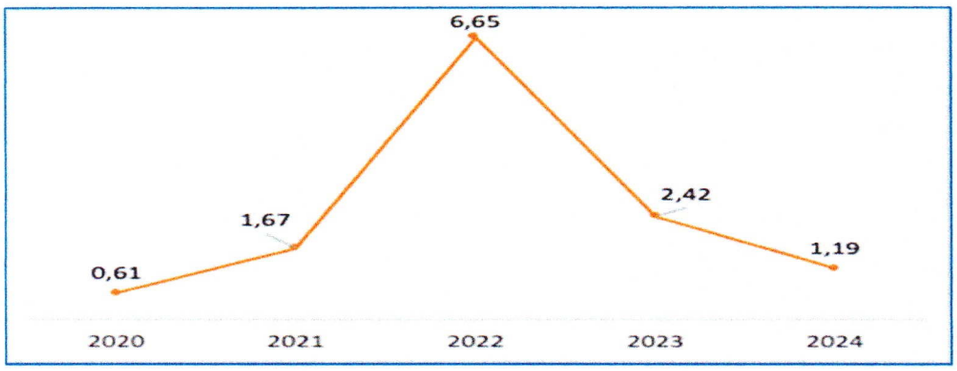

Sumber: BPS, 2025 diolah

Gambar 2.18 Tingkat Inflasi di Provinsi NTT Tahun 2020-2024

Lebih lanjut, **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan tren penurunan sejak Tahun 2005 hingga 2024, dengan nilai sebesar 3,37% pada Tahun 2008 yang menurun menjadi 3,14% pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi 3,02% pada Tahun 2024. Angka ini secara konsisten berada di bawah TPT nasional yang mencapai 5,32% pada Tahun 2023. Secara ekonomi, rendahnya TPT di NTT tidak serta merta mencerminkan kondisi ketenagakerjaan yang ideal, melainkan lebih menggambarkan karakteristik struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor-sektor padat karya seperti pertanian dan perikanan, yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, namun cenderung informal dan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, meskipun TPT rendah, tantangan utama NTT justru terletak pada kualitas pekerjaan, tingginya tingkat setengah pengangguran, serta perlunya transformasi struktural untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih produktif dan berkelanjutan.

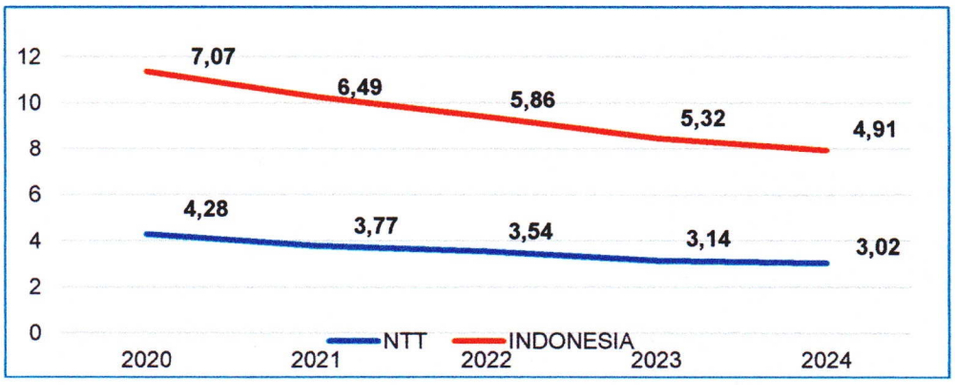

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025 (diolah)

Gambar 2.19 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT Tahun 2020-2024

Mata Pencaharian Penduduk menggambarkan tentang rata-rata mata pencaharian utama di Provinsi NTT menyumbang sebesar 40 persen pendapatan rumah tangga. Mata pencaharian di wilayah Flores lebih beragam apabila dibandingkan dengan di wilayah Timor dan Sumba yang kemungkinan disebabkan karena akses, ketersediaan infrastruktur dan kondisi tanah serta iklim yang lebih baik sehingga memberikan peluang yang lebih baik bagi perkembangan berbagai mata pencaharian.

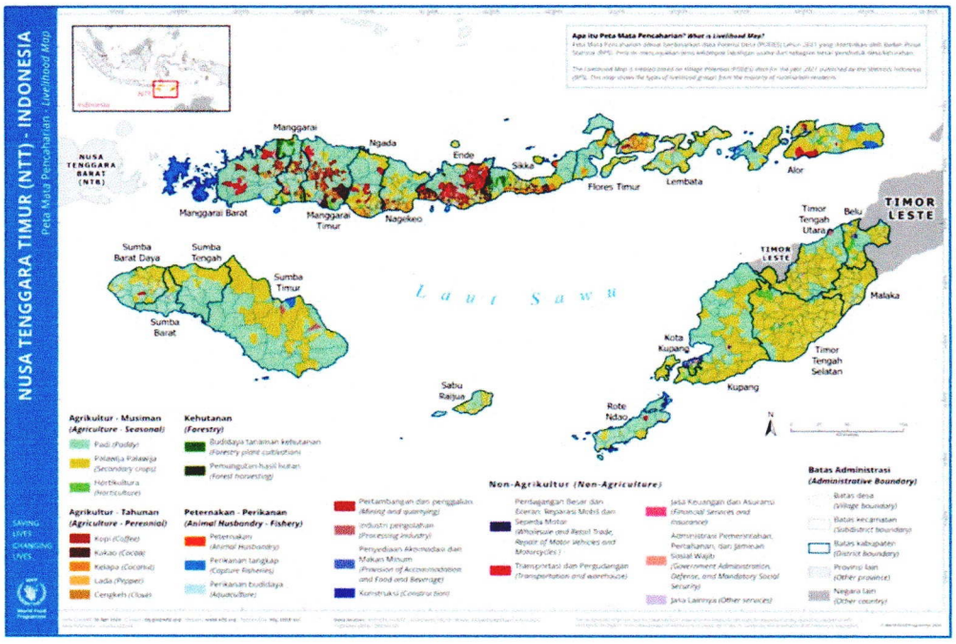

Sumber: WFP Indonesia, 2024

Gambar 2.20 Mata Pencaharian Penduduk Provinsi NTT Tahun 2023

Pulau Sumba dan Pulau Timor mempunyai sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Flores, dimana terlihat sebagian besar Pulau Sumba dan Pulau Timor didominasi oleh warna orange. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik unik dari masing-masing kelompok pulau di NTT (yaitu Pulau Flores, Sumba, dan Timor) berdampak pada sensitivitas mata pencaharian. Sensitivitas sektor pertanian di NTT lebih tinggi dibandingkan non-pertanian dengan mata pencaharian pada pertanian musiman dan perikanan menjadi kategori mata pencaharian paling sensitif. Kondisi ini dianggap wajar karena sektor pertanian pada umumnya rentan terhadap bencana, variabilitas cuaca, dan iklim. Sedangkan mata pencaharian Non-pertanian walaupun sensitivitasnya lebih rendah dibandingkan mata pencaharian lain, namun secara keseluruhan sensitivitasnya masih tinggi. Kemudian, kelompok masyarakat yang memiliki lebih banyak alternatif mata pencaharian juga lebih sensitif. Sehingga baik pertanian maupun non pertanian dan yang memiliki alternatif mata pencaharian pun tetap memiliki sensivitas terhadap perubahan iklim.

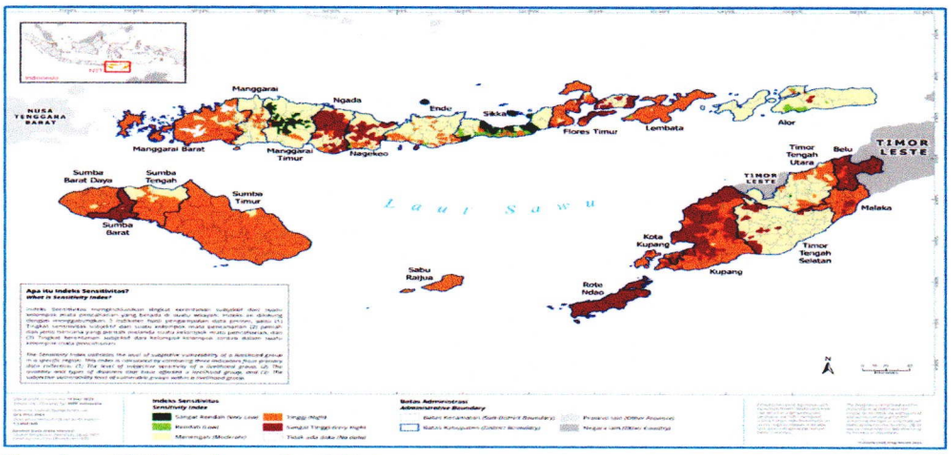

Sumber: WFP Indonesia, 2024

Gambar 2. 21 Sensitivitas Mata Pencaharian Penduduk Provinsi NTT Tahun 2023



Sumber: WFP Indonesia, 2024

Gambar 2.22 Peta Ketahanan Mata Pencaharian Penduduk Provinsi NTT Tahun 2023

2) Kesehatan untuk Semua

Salah satu indikator pembentuk IPM adalah **UHH,** pada Tahun 2023 UHH indonesia sebesar 73,93 tahun, hal ini berarti bayi yang baru lahir diperkirakan akan dapat bertahan hidup hingga usia 73,93 tahun. Capaian UHH NTT selama periode 2021-2023 terus mengalami peningkatan di Tahun 2023 UHH NTT sebesar 71,57, jika dilihat per jenis kelamin UHH perempuan sebsar 69,80 tahun dan UHH laki-laki 65,82 tahun.

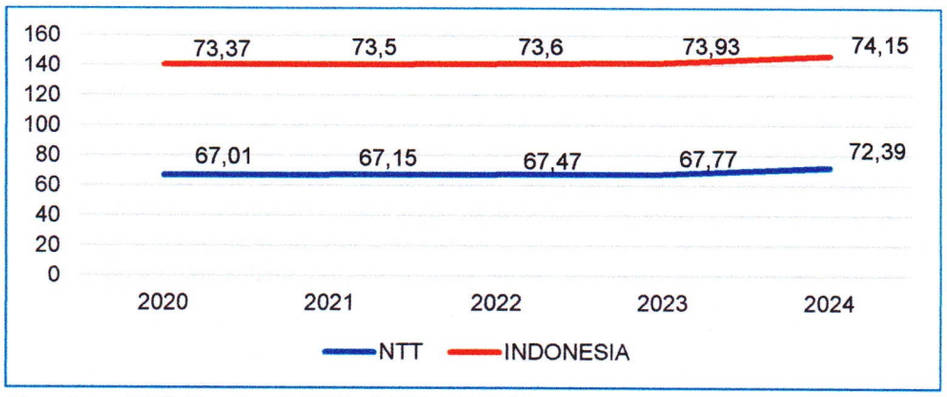

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2024 (diolah)

Gambar 2.23 Usia Harapan Hidup

Dalam kajian kesehatan masyarakat, permasalahan kurang gizi pada anak balita merupakan isu krusial yang mencerminkan ketimpangan pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas layanan kesehatan, terutama di wilayah dengan tantangan pembangunan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif dan produktivitas jangka panjang. **Kurang gizi** adalah dampak dari tidak terpenuhinya kebutuahn gizi anak yang telah berlangsung sejak lama. Bahkan kondisi ini dapat dimulai ketika atau masih berada di dalam kandungan. Tidak hanya sampai di situ saja, setelah bayi lahir pun pemenuhan gizi untuk anak masih perlu diperhatikan. Kurang gizi dapat diperparah bila anak sering mengalami penyakit infeksi. Secara garis besar anak kurang gizi umumnya mempunyai berat badan kurang (*underweight)*, kurus (*wasting*), pendek (*Stunting*) serta

kekurangan vitamin dan mineral. Berikut disajikan kondisi Balita gizi buruk dan Balita gizi kurang di NTT pada tabel di bawah ini.

Jumlah Balita gizi buruk di NTT sejak Tahun 2021-2024 terlihat cenderung menurun dimana pada 2021 berjumlah 3.912, turun di Tahun 2024 menjadi 3.628 sedangkan pada balita gizi kurang di Tahun 2021 27.335 naik di Tahun 2024 menjadi 30.197. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, terdapat beberapa daerah yang mengalami peningkatan Balita gizi buruk selama perode tahun tersebut, yakni Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Barat Daya, Sikka. Sedangkan pada Balita gizi kurang pada setiap tahun selalu mengalami peningkatan jumlah seperti terlihat pada tabel di atas. Beberapa kabupaten dengan jumlah Balita gizi kurang tertinggi di NTT Tahun 2023 adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sikka dan Kota Kupang.

Kematian Ibu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai derajat kesehatan masyarakat dan efektivitas sistem pelayanan kesehatan, khususnya layanan kesehatan ibu dan anak. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), meskipun telah terjadi penurunan jumlah kematian ibu dalam dua tahun terakhir, tantangan masih terlihat nyata di beberapa kabupaten dengan angka kematian yang relatif tinggi. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut disajikan data jumlah kematian ibu menurut kabupaten di NTT pada Tahun 2021 dan 2022. Jumlah kematian ibu di Provinsi NTT mengalami penurunan sebanyak 10 kasus dalam 2 tahun yaitu 181 kasus tahun 2021 turun menjadi 171 kasus Tahun 2022. Kabupaten dengan jumlah kematian ibu tertinggi dalam dua tahun terakhir adalah Timor Tengah Selatan, Kupang, Manggarai Timur, Manggarai, Sumba Barat Daya dan Sumba Timur, dan Kabupaten Manggarai Barat, seperti disajikan pada tabel di bawah ini.

Sedangkan untuk bayi dan balita Jumlah **Kematian Bayi** di NTT masih terus meningkat, terjadi peningkatan sebanyak 184 kasus yaitu 955 kasus kematian bayi Tahun 2021 naik menjadi 1.139 kasus Tahun 2022. Penyebab Utama Kematian Bayi adalah karena Asfiksia (27%), BBLR (18%), kelainan bawaan (8%), Pneumonia (7%), gangguan lainnya (6%), masalah sosial, budaya dan ekonomi masyarakat (34%). Kabupaten dengan jumlah kematian bayi tertinggi (selalu muncul dalam lima tahun terakhir): Timor Tengah Selatan, Manggarai, Manggarai Barat, Kupang, Sikka, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Berikut disajikan kasus kematian bayi dan balita di NTT selama periode Tahun 2021-2023 pada tabel di bawah ini.

Stunting merupakan manifestasi dari gangguan pertumbuhan kronis yang ditandai dengan tinggi badan anak yang berada di bawah standar usianya, sebagai akibat dari kekurangan asupan gizi yang berlangsung dalam jangka waktu lama serta dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional, seperti pola asuh, kesehatan ibu, dan akses terhadap layanan kesehatan dasar. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga berimplikasi terhadap perkembangan kognitif dan potensi produktivitas di masa depan. Untuk menggambarkan sejauh mana persoalan stunting terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), berikut disajikan data jumlah dan persentase balita yang mengalami stunting.

Tabel 2.7 Jumlah dan Persentase Balita Stunting per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, Tahun 2021-2024

Wilayah	Jumlah dan Persentase Balita Stunting Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)							
	Stunting				Persentase Stunting			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Sumba Barat	2.079	2.611	1.291	1.787	24	23	12	23,6
Sumba Timur	3.774	3.478	2.677	3.365	19	15	12	15,1
Kupang	6.674	6.118	3.872	3.902	22	20	13	14
Timor Tengah Selatan	13.123	11.642	8.924	9.251	32	28	22	24,2
Timor Tengah Utara	5.204	5.280	4.555	4.802	25	24	23	25,9
Belu	3.171	2.473	1.984	2.351	18	14	11	13,9
Alor	3.149	2.119	1.773	2.260	19	12	10	13,1
Lembata	1.804	1.398	1.045	673	22	16	12	7,9
Flores Timur	3.696	3.412	3.184	3.265	21	19	18	20
Sikka	3.947	3.174	3.318	3.375	18	14	15	19,3
Ende	2.775	1.749	1.241	1.796	14	9	7	10,5
Ngada	1.222	1.027	902	997	12	9	8	9,8
Manggarai	4.841	4.313	3.481	2.882	19	16	13	11,5
Rote Ndao	3.103	3.011	2.764	2.359	23	22	20	18,4
Manggarai Barat	3.495	3.675	1.901	2.608	15	16	8	11,8
Sumba Tengah	559	659	549	1.036	8	9	7	15,3
Sumba Barat Daya	6.360	8.270	9.762	6.730	31	24	32	39,2
Nagekeo	991	946	728	928	9	8	7	9,6
Manggarai Timur	3.052	2.408	2.195	1.992	14	10	9	8,3
Sabu Raijua	2.037	1.496	1.230	1.626	25	18	15	20,8
Malaka	3.230	2.582	2.409	2.289	21	16	16	15,4
Kota Kupang	3.068	5.497	4.019	4.233	26	22	17	18,8
Nusa Tenggara Timur	**81.354**	**77.338**	**63.804**	**64.507**	**21**	**18**	**15**	**16,9**

Sumber: BPS Provinsi NTT, Februari 2025

3) Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pencapaian **Indeks Pendidikan** Provinsi NTT sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2018 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2010 nilai indeks pendidikan Provinsi NTT sebesar 51,81 dan meningkat menjadi 60,72 pada Tahun 2018. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

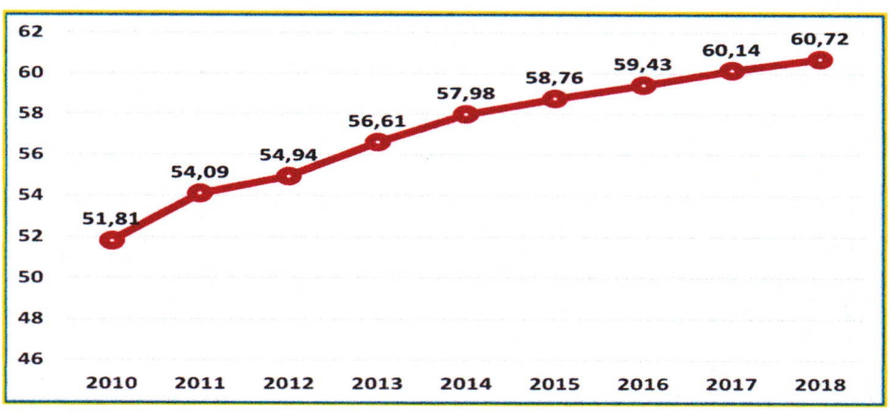

Sumber: BPS 2023

Gambar 2.24 Indeks Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2010-2018

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengindikasi berapa lama tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan pada pendidikan formal. Tingginya angka RLS menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang, semakin tinggi angka RLS, maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan. RLS berguna untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Faktor yang mempengaruhi besaran RLS adalah jumlah SMP dan pendapatan per kapita. selama periode Tahun 2021-2024 angka RLS NTT menunjukkan trend meningkat, dimana pada Tahun 2021 sebesar 7.69 tahun dan menjadi 8,02 tahun pada 2024 dengan peningkatan sebesar 0,33 tahun. Capaian RLS NTT selama periode ini masih di bawah capaian nasional yang sebesar 8.54 pada Tahun 2021, 8.69 untuk Tahun 2022 dan 8.77 di Tahun 2023. Terhadap capaian provinsi terdapat beberapa kabupaten dan kota dengan angka RLS di atas capaian provinsi, kabupaten/kota dimaksud adalah Kota Kupang, Kabupaten Nagekeo, Manggarai Barat, Rote Ndao, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Sedangkan capaian kabupaten lainnya masih di bawah capaian provinsi.

Lebih lanjut pemerintah Provinsi NTT pada periode sebelumnya juga memfokuskan pada literasi masyarakat dengan melihat data **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)** merupakan hasil agregasi 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu: Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi, dan Anggota perpustakaan. Capaian IPLM berdasarkan Kabupaten/Kota tertinggi Tahun 2023 yakni Kabupaten Sumba Timur dengan nilai 94,48 diikuti oleh Kabupaten Malaka dengan nilai 87,51. Sedangkan capaian terendah Tahun 2023 yaitu Kabupaten Manggarai dengan nilai 25,53, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan nilai 43,31 serta Kabupaten Ende dengan nilai 45,31.

Untuk **Literasi Digital** dilihat dalam Laporan Status Literasi Digital di Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Kominfo RI, dijelaskan bahwa pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia mengacu kepada kerangka kerja dalam Road Map Literasi Digital 2020-2024. Kerangka kerja ini digunakan sebagai basis untuk merancang program dan kurikulum Program Gerakan Nasional Literasi Digital Indonesia 2020-2024. Pada Tahun 2020, Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,76, dimana lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, yakni 3,47. Pada tahun selanjutnya, Indeks Literasi Digital Provinsi ini mengalami penurunan menjadi 3,6. Sementara itu, IPLM nasional sedikit mengalami peningkatan menjadi 3,49. Pada Tahun 2022, Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan kembali menjadi 3,39 dan berada di bawah rata-rata nasional, yang terus mengalami peningkatan menjadi 3,54.

4) Perlindungan Sosial yang Adaptif

Upaya penanggulangan kemiskinan melalui **Perlindungan Sosial** dapat dilihat dari cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menunjukkan tantangan serius dalam perluasan perlindungan sosial tenaga kerja. Dari total angkatan kerja sebanyak 1.654.526 orang, hanya 668.415 orang atau 40,4 persen yang

telah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, masih terdapat sekitar 986.111 orang atau hampir 60 persen angkatan kerja yang belum terlindungi oleh skema jaminan sosial ketenagakerjaan. Secara historis, capaian ini menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, dimulai dari 23,4 persen pada Tahun 2021, naik menjadi 33,65 persen di Tahun 2022, kemudian 36,11 persen pada Tahun 2023, dan mencapai 40,4 persen di Tahun 2024. Meskipun mengalami kemajuan, angka ini masih belum mencapai target nasional yang ditetapkan sebesar 64,82 persen pada Tahun 2025.

Distribusi kepesertaan berdasarkan segmen, sebagian besar peserta aktif berasal dari kategori Penerima Upah (PU) dengan jumlah 472.870 orang atau 94,8 persen dari total pekerja PU. Sementara itu, kepesertaan dari kategori Bukan Penerima Upah (BPU), seperti pekerja informal dan mandiri, masih rendah, yakni hanya 144.873 orang atau 14,24 persen dari total segmen tersebut. Adapun dari sektor Jasa Konstruksi (Jakon), jumlah peserta aktif mencapai 50.672 orang atau setara dengan 36,63 persen. Rendahnya cakupan di sektor informal dan konstruksi menandakan masih kuatnya kesenjangan akses terhadap jaminan sosial tenaga kerja, terutama di kalangan pekerja sektor nonformal yang justru mendominasi struktur ketenagakerjaan di NTT. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi intervensi yang komprehensif dan kontekstual untuk meningkatkan kepesertaan, termasuk melalui pendekatan edukasi sosial, kemudahan pendaftaran, serta sinergi kelembagaan di tingkat daerah.

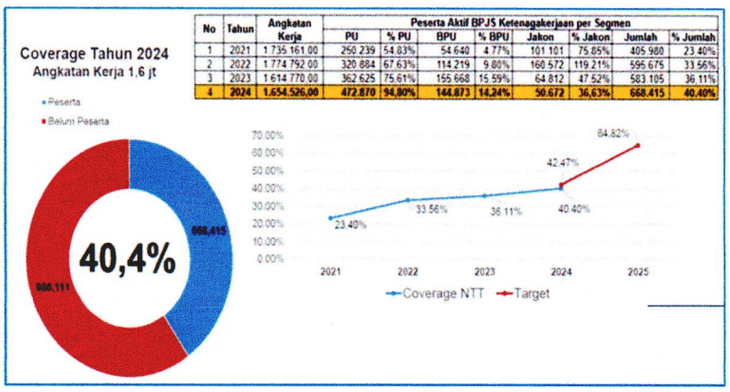

No	Tahun	Angkatan Kerja	Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan per Segmen							
			PU	% PU	BPU	% BPU	Jakon	% Jakon	Jumlah	% Jumlah
1	2021	1.735.161,00	250.239	54,83%	54.640	4,77%	101.101	75,85%	405.980	23,40%
2	2022	1.774.792,00	320.884	67,63%	114.219	9,80%	160.572	119,21%	595.675	33,56%
3	2023	1.614.770,00	362.625	75,61%	155.668	15,59%	64.812	47,52%	583.105	36,11%
4	2024	1.654.526,00	472.870	94,80%	144.873	14,24%	50.672	36,63%	668.415	40,40%

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2024

Gambar 2.25 Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

5) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen dalam memberikan gambaran terkait kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 nilai IPK Provinsi NTT mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dimana pada Tahun 2018 IPK Provinsi NTT dari 49,13 naik menjadi 50,70 pada Tahun 2022 dan kemudian meningkat menjadi 54,04 pada Tahun 2023. 53,04 senilai .

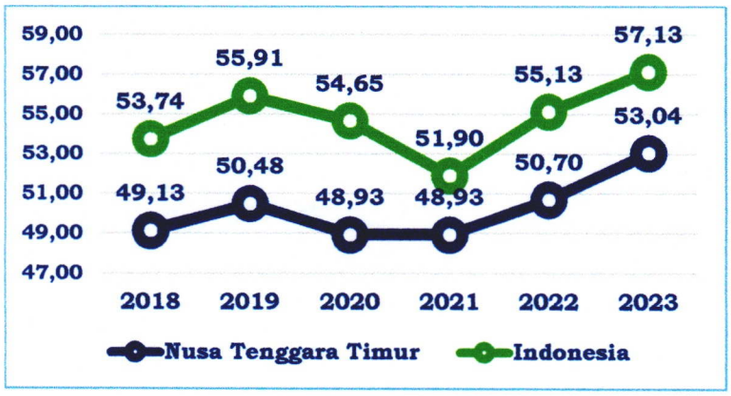

Sumber: Kemendikbudristek

Gambar 2.26 Perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2018-2023

Komponen IPK terdiri dari komponen ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi serta gender. Nilai komponen IPK di Provinsi NTT Tahun 2022 yang masih tergolong rendah yaitu komponen ekonomi budaya, warisan budaya serta ekspresi budaya sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

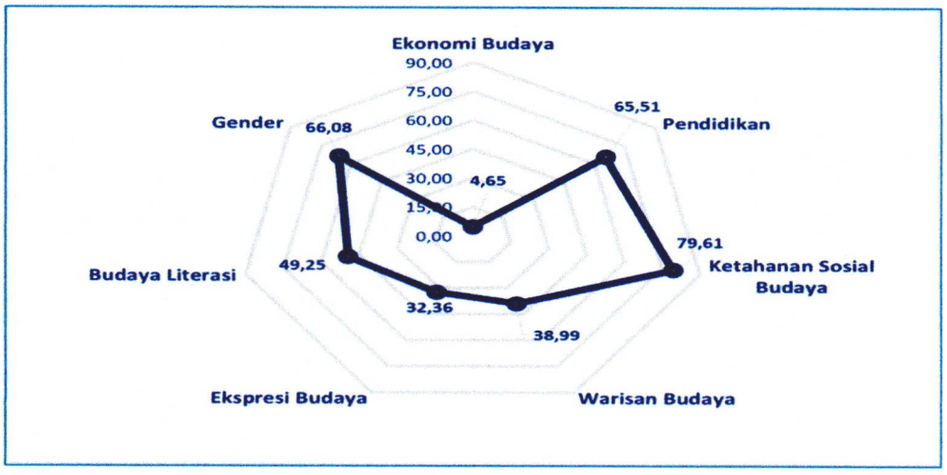

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Gambar 2.27 Komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2022

6) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Perwujudan nilai dan karakter masyarakat dimulai dari usia dini melalui keluarga maupun pendidikan formal. Dalam melihat **Ketahanan Dan Kualitas Keluarga** bisa dilihat dengan mengggunakan indikator-indikator kualitas keluarga mencakup kecukupan akses terhadap ekonomi, pendidikan, kesehatan, aspek legalitas, serta relasi setara gender, hingga ketahanan terhadap rasa peduli dan keeratan sosial. Pekembangan nilai Indeks Kualitas Keluarga Provinsi NTT sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang positif walaupun masih berada dibawah capaian nasional untuk periode yang sama. Secara umum, komponen pembentuk Indeks Kualitas Keluarga Provinsi NTT Tahun 2020 dan 2021 cenderung membaik. Komponen yang mengalami peningkatan cukup tinggi yaitu komponen Ketahanan Fisik dan komponen Kualitas Ketahanan Sosial Budaya sebagaimana dapat dilihat pada dibawah ini.

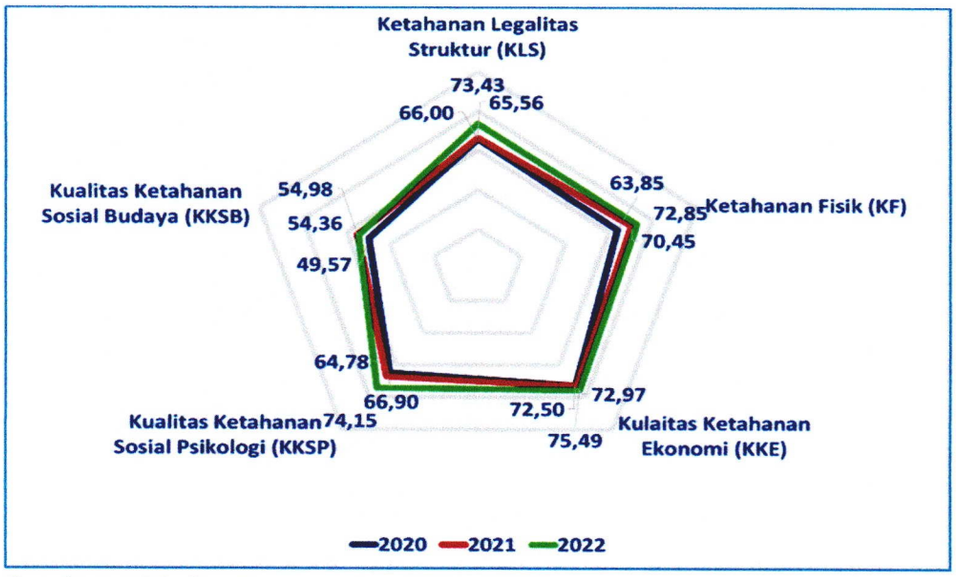

Sumber: BPS dan Kementerian PPPA, 2023

Gambar 2.28 Komponen Indeks Kualitas Keluarga Provinsi NTT Tahun 2020-2022

Sedangkan untuk **Indeks Perlindungan Anak (IPA)** dalam 3 tahun terakhir nilai IPA Provinsi NTT terjadi penurunan. Pada Tahun 2019 nilai IPA Provinsi NTT senilai 51,15 yang turun menjadi 48,12 pada Tahun 2021 dan kemudian naik menjadi 52,35 pada Tahun 2023. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) menunjukkan tingkat realisasi pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Pada Tahun 2019 nilai IPHA Provinsi NTT senilai 49,26 yang meningkat menjadi 50,14 pada Tahun 2020 dan terus meningkat menjadi 52,03 pada Tahun 2022.

Indeks Pemenuhan Hak Khusus Anak (IPKA) merupakan indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar. Nilai IPKA Provinsi NTT juga mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir, dimana pada Tahun 2019 nilai IPKA Provinsi NTT yaitu 57,84 yang turun menjadi 44,90 pada Tahun 2020 dan turun menjadi 48,23 pada Tahun 2022.

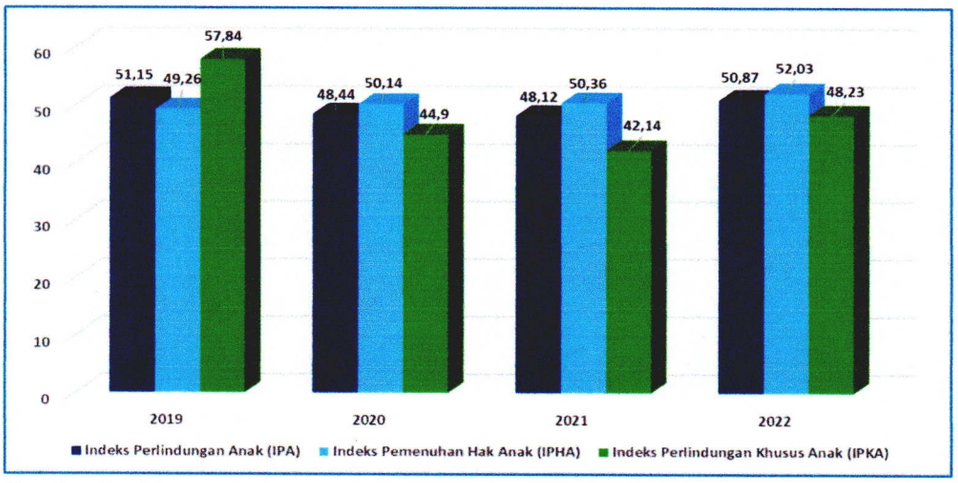

Sumber: Indeks Perlindungan Anak Indonesia 2022, Kementerian PPPA & BPS 2022

Gambar 2.29 Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pemenuhan Hak Anak dan Indeks Perlindungan Khusus Anak Provinsi NTT Tahun 2019-2022

Kemudian **Kesetaraan Gender** dalam pembangunan manusia adalah terpenuhinya hak dasar yang setara bagi laki-laki maupun Perempuan. Hak dasar yang dimaksud di antaranya terpenuhinya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan dan lingkungan sosial yang layak. Dengan hak dasar yang setara ini, laki-laki dan Perempuan memiliki hak yang sama dalam meningkatkan kapabilitasnya dalam menciptakan pembangunan sosial ekonomi suatu negara. Data menunjukan periode (2010) capaian IDG Provinsi NTT sebesar 57,98 poin, sementara di tingkat nasional sebesar 68,15 poin. IDG NTT terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 73,37 poin pada 2019, sedikit di bawah capaian nasional sebesar 75,24 poin di tahun yang sama. Selanjutnya perkembangan IDG NTT maupun nasional mengalami peningkatan secara stagnan dengan kondisi di akhir periode (2023) masing-masing sebesar 76,9 poin dan 75,1 poin.

Ketimpangan Gender juga terjadi hal ini dapat dilihat dari Indeks ketimpangan gender yang menggambarkan kerugian/kegagalan (*loss*) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Ketimpangan gender Provinsi NTT sejak Tahun 2018 hingga 2023 secara konsisten menurun. Sejak Tahun 2018, IKG berkurang sebesar 0,075 poin, rata-rata turun 0,019 poin per tahun. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik. Ketimpangan gender Provinsi NTT sejak Tahun 2018 hingga 2024 secara konsisten menurun. Pada Tahun 2024, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,402, turun sebanyak 0,026 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,428. Penurunan sebesar 0,026 poin tahun ini lebih kecil dibandingkan penurunan IKG pada Tahun 2021 yaitu sebesar 0,034 poin. Selain itu, penurunan IKG pada Tahun 2024 ini melanjutkan perbaikan yang telah dicapai sejak Tahun 2018, selama enam tahun terakhir IKG Provinsi Nusa Tenggara Timur secara konsisten mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan. Sejak Tahun 2018, IKG Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan rata-rata per tahun sebesar 0,109 poin per tahun sehingga totalnya mencapai 0,452 poin selama tujuh tahun terakhir.

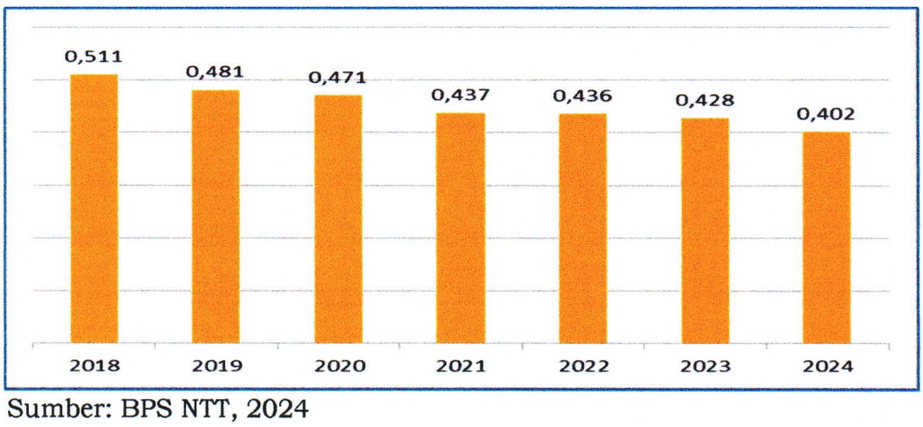

Sumber: BPS NTT, 2024

Gambar 2.30 Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2024

Terakhir untuk pembangunan Pemuda dan Olahraga khususnya pada pembangunan olahraga dalam rentang waktu Tahun 2021 hingga 2024, Indeks Pembangunan Olahraga mengalami fluktuasi yang mencerminkan dinamika dalam perkembangan sektor olahraga nasional. Tercatat, indeks tersebut mengalami penurunan sebesar 0,04 poin pada periode 2021–2022, disusul peningkatan yang sangat tipis sebesar 0,003 poin pada 2022–2023, dan kembali mengalami penurunan sebesar 0,012 poin pada periode 2023–2024. Penurunan indeks ini sebagian besar disumbang oleh penurunan pada beberapa dimensi kunci, yakni dimensi Sumber Daya Manusia (SDM) olahraga, yang mencakup pelatih, guru pendidikan jasmani, instruktur, dan relawan olahraga sebagai elemen penting dalam sistem pembinaan dan pengembangan olahraga. Selain itu, penurunan juga terjadi pada dimensi ruang terbuka olahraga, yang merujuk pada ketersediaan fasilitas pendukung aktivitas fisik, serta dimensi literasi fisik yang mencerminkan tingkat pengetahuan, keterampilan, keterlibatan, dan tanggung jawab individu dalam beraktivitas fisik. Dimensi kebugaran, yang menunjukkan kemampuan fisik individu untuk melakukan aktivitas tanpa kelelahan yang berarti, serta dimensi performa, yang mengukur capaian atlet termasuk penyandang disabilitas, juga menunjukkan tren penurunan.

Namun demikian, terdapat pula dimensi-dimensi yang mengalami peningkatan selama periode yang sama. Dimensi partisipasi mencatatkan kenaikan sebesar 0,018 poin, yang menunjukkan peningkatan keterlibatan individu dalam aktivitas olahraga fisik, khususnya dalam kurun waktu satu minggu terakhir sebelum pengukuran. Peningkatan ini turut didukung oleh tren positif pada aspek kesehatan fisik dan psikis masyarakat. Lebih lanjut, dimensi perkembangan personal mengalami peningkatan sebesar 0,033 poin, mengindikasikan adanya kemajuan dalam pembentukan kepribadian yang konstruktif melalui aktivitas olahraga. Dimensi ekonomi mencatatkan peningkatan paling signifikan, yakni sebesar 0,102 poin, yang menggambarkan bertambahnya pengeluaran individu untuk mendukung aktivitas olahraga, baik dalam bentuk pembelian perlengkapan, biaya keanggotaan, maupun layanan terkait lainnya. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan pada aspek-aspek struktural dan kualitas, terdapat peningkatan pada aspek partisipatif dan ekonomi yang dapat menjadi pijakan untuk perumusan kebijakan pembangunan olahraga ke depan.

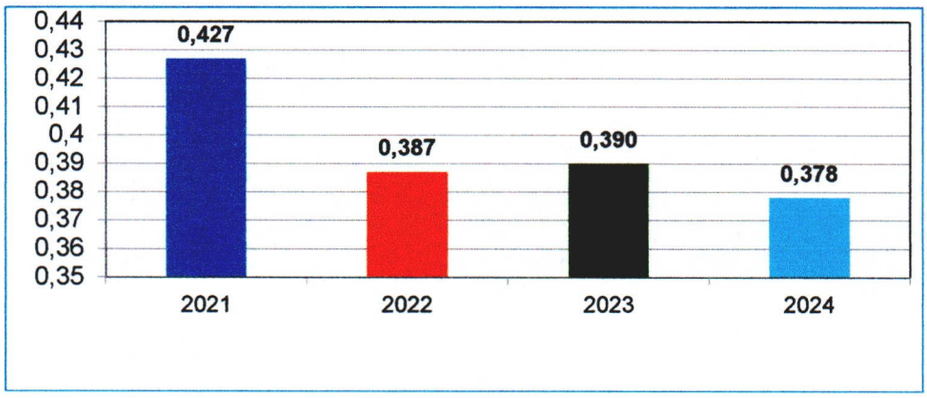

Sumber : Kementerian Pemuda dan Olahraga

Gambar 2.31 Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi NTT

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pemuda di Indonesia. IPP terdiri dari komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi. Perkembangan (IPP) Provinsi NTT sejak Tahun 2015 sampai dengan 2022 mengalami pertumbuhan positif dengan nilai IPP pada Tahun 2015 sebesar 46,83 yang terus meningkat sampai dengan Tahun 2022 senilai 52,83 dan mengalami peningkatan pada akhir Tahun 2024 menjadi 55,86. Komponen pembentuk IPP di Provinsi NTT Tahun 2022 antara lain komponen pendidikan senilai 67, komponen kesehatan dan kesejahteraan senilai 53, komponen lapangan dan kesempatan kerja senilai 45, komponen partisipasi dan kepemimpinan senilai 50, serta komponen gender dan diskriminasi senilai 50 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

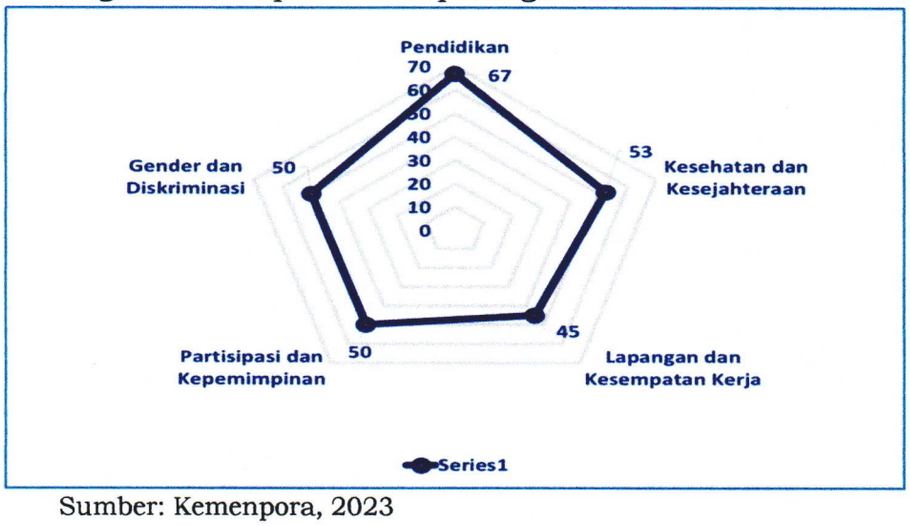

Sumber: Kemenpora, 2023

Gambar 2.32 Komponen Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi NTT Tahun 2022

2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

1) Daya Saing Sumber Daya Manusia

Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) merupakan indeks yang mengukur sumber daya manusia yang dapat dicapai oleh seorang anak yang dilahirkan saat ini pada usia 18 tahun, mengingat resiko terhadap pendidikan dan kesehatan yang buruk di negara tempat ia tinggal. Nilai indeks modal modal manusia Provinsi NTT masih berada di bawah capaian nasional. Pada Tahun 2023, IMM NTT sebesar 0,46. Artinya setiap anak yang lahir di Provinsi NTT pada Tahun 2018 akan menjadi lebih produktif 46 persen ketika ia tumbuh dewasa, dengan catatan mereka menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan akses kesehatan yang baik, sedangkan *baseline* Tahun 2024 sebesar 0,48. Sementara itu, komponen IMM NTT menghasilkan nilai yang cukup baik pada aspek *survival* dan kesehatan. Keduanya secara berturut-turut berada pada nilai 0,97 dan 0,89. Sedangkan aspek pendidikan mendapatkan skor yang cukup rendah—menjadi faktor utama capaian IMM yang masih rendah—yaitu sebesar 0,53. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi modal manusia di NTT masih rendah terutama dari aspek pendidikan.

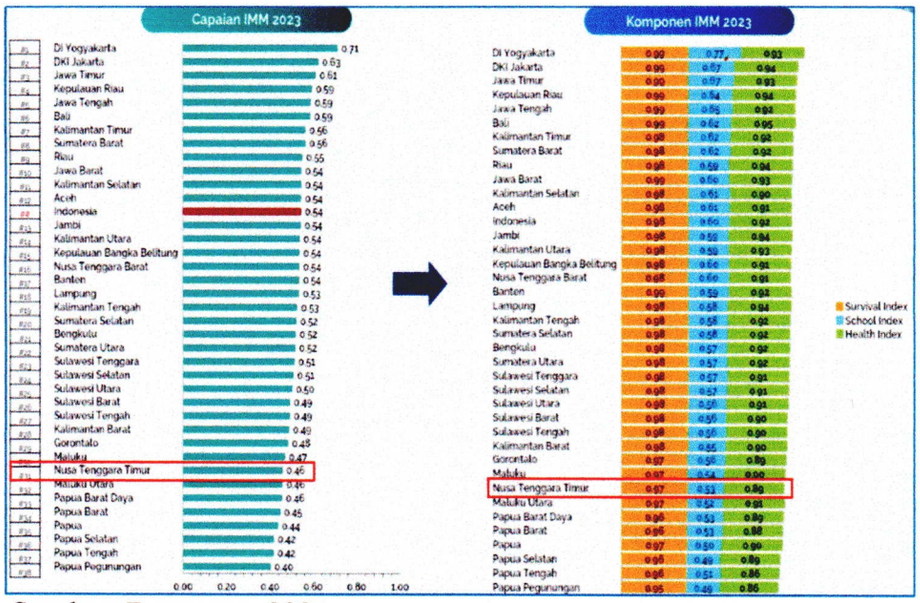

Sumber: Bappenas, 2024

Gambar 2.23 Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) dan Komponennya di Provinsi NTT Tahun 2023

Rasio Ketergantungan merupakan indikator ekonomi demografi yang krusial dalam menilai beban penduduk usia produktif dalam menopang kelompok usia non-produktif, serta mencerminkan potensi pembangunan suatu wilayah. Pada Tahun 2010, Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat rasio ketergantungan sebesar 70,6, jauh lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 50,5, yang menunjukkan tingginya tekanan ekonomi terhadap penduduk usia kerja di wilayah tersebut. Meskipun demikian, tren penurunan yang terjadi pada Tahun 2015 menjadi 66,7 dan diproyeksikan terus menurun hingga mencapai 61,6 pada Tahun 2035 merupakan sinyal positif menuju struktur demografi yang lebih seimbang. Di sisi lain, Indonesia secara nasional mengalami penurunan rasio ketergantungan menjadi 48,6 pada Tahun 2015, yang menandakan awal dari periode bonus demografi—suatu fase strategis yang, jika dimanfaatkan secara optimal melalui kebijakan pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja produktif, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

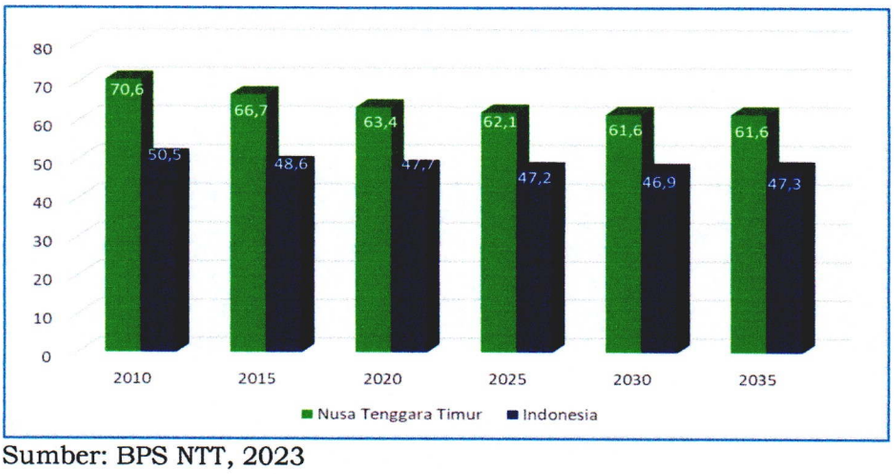

Sumber: BPS NTT, 2023

Gambar 2.34 Rasio Ketergantungan Hasil Proyeksi Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia, 2010-2035

2) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Proporsi lapangan usaha industri pengolahan di Provinsi NTT mengalami tren kenaikan selama 5 tahun terakhir (2020-2024). Dari sisi ADHB, proporsi sektor ini meningkat dari 1,28% menjadi 1,40%. Sedangkan

pada sisi ADHK, proporsinya hanya mengalami sedikit peningkatan dari 1,26% menjadi 1,28%. Meskipun demikian, kontribusi ini tergolong kecil yang menandakan bahwa pergeseran proporsi PDRB dari sektor pertanian ke industri/manufaktur di NTT belum berjalan optimal.

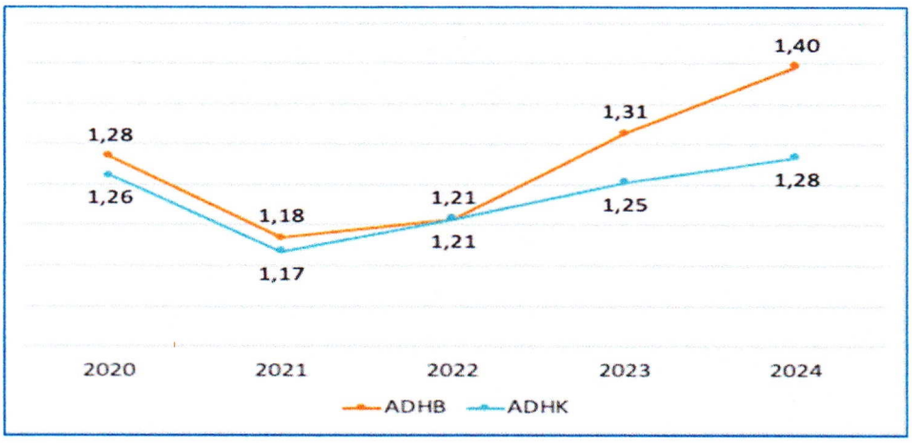

Sumber: BPS NTT, 2025

Gambar 2.35 Proporsi PDRB Industri Pengolahan Provinsi NTT Tahun 2020-2024

Untuk **Proporsi PDRB dari Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum** dalam konteks perekonomian dapat dijadikan sebagai salah satu proksi untuk memotret hasil dari pengembangan pariwisata di suatu wilayah. Meskipun proporsi sektor ini meningkat selama periode 2020-2024 di Provinsi NTT, namun nilainya tergolong kecil mengingat potensi pariwisata yang besar. Pada sisi ADHB, proporsi ini meningkat dari 0,55% menjadi 0,75%. Sedangkan pada sisi ADHK, proporsinya meningkat dari 0,56% menjadi 0,71%. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa hasil pembangunan pariwisata belum berdampak signifikan pada optimalisasi penggunaan hasil sektor primer dalam daerah ke sektor tersier, khususnya penyediaan akomodasi dan makan minum. Ekonomi kreatif (ekraf) tergolong sebagai salah satu basis baru untuk penerapan langsung iptek dan inovasi dalam mendukung produktivitas ekonomi. Di Provinsi NTT, sub sektor ekraf yang terbesar ialah fesyen (15,36%), musik (10,86%), dan film animasi & video (10,86%) di Tahun 2020. Pada tahun yang sama, Kota Kupang menjadi daerah dengan kontribusi ekraf terbesar di NTT, diikuti oleh Manggarai Barat dan Kabupaten Kupang. Secara proporsi, pelaku ekraf laki-laki mendominasi sektor ini sebesar 61,73% dibandingkan perempuan sebesar 38,27%.

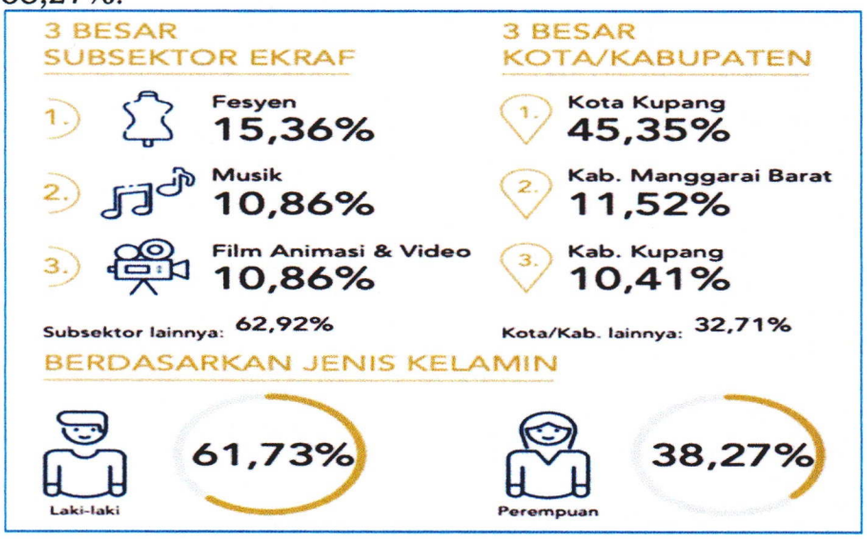

Sumber: Kemenparekraf, 2020

Gambar 2.36 Sebaran Sub Sektor, Wilayah, dan Pelaku Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2020

Lebih lanjut, **Proporsi Wirausaha** menurut data BPS, 2025 cenderung mengalami penurunan selama periode 2019-2023 di Provinsi NTT dari 2,03% menjadi 1,34%. Lebih lanjut, proporsi wirausaha laki-laki cenderung terus meningkat dan lebih banyak daripada perempuan. Pada Tahun 2019, proporsi wirausaha laki-laki sebesar 85,36% dan perempuan sebesar 14,64%. Sementara itu, pada Tahun 2023 komposisi berubah dengan proporsi laki-laki meningkat menjadi 87,08% dan perempuan menurun menjadi 12,92%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa rasio kewirausahaan di NTT masih rendah terutama wirausaha perempuan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada awal periode Tahun 2021 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 73,29 berada diatas target nasional yaitu 68,08. Pada tahun-tahun selanjutnya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Indonesia sama-sama mengalami peningkatan dengan kondisi Provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung berada di atas rata-rata nasional. Dimana, pada Tahun 2024, TPAK Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 76,77, namun sedikit menurun pada Tahun 2025 menjadi 75,81 seperti Grafik di bawah ini.

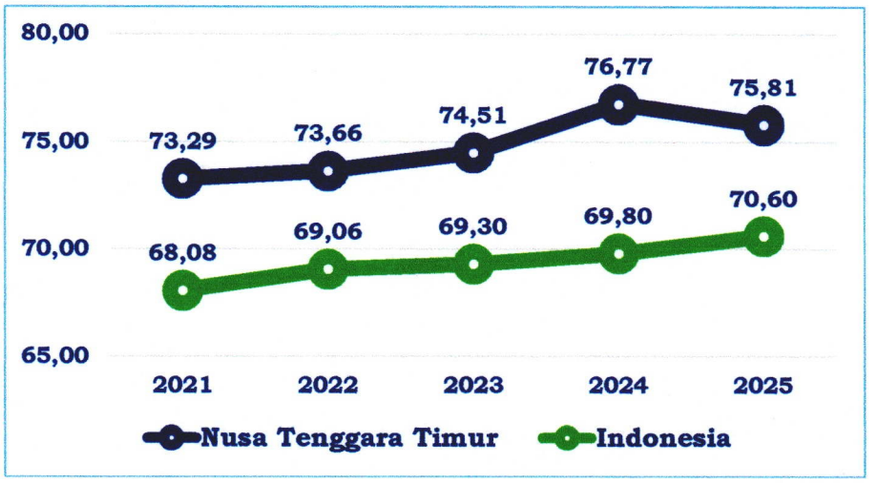

Sumber: BPS NTT, 2023

Gambar 2.37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia, 2021-2025

Indeks Inovasi Daerah menunjukan data bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2020 – 2025 mengindikasikan berada pada posisi inovatif dan sangat inovatif dari 34 Provinsi se-Indonesia dengan penjelasan pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Indeks Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2020-2025

Tahun	Urutan	Skor Indeks	Kategori
2020	10/34	38,31	Sangat Inovatif
2021	12/34	53,38	Inovatif
2022	10/34	59,76	Inovatif
2023	9/38	62,53	Sangat Inovatif
2025	26/38	50,10	Inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

3) Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru *(Green Economy dan Blue Economy)*

Indeks Ekonomi Hijau (*Green Economy Index*/GEI) merupakan salah satu alat untuk mengukur transformasi ekonomi guna menilai interaksi sosial ekonomi lingkungan dalam lingkup ekonomi hijau serta mengidentifikasi potensi risiko dan peluang untuk merancang kebijakan ekonomi hijau yang lebih baik pada masa yang akan datang. Indeks ekonomi hijau terdiri dari 15 (lima belas) indikator terpilih yang memiliki 3 (tiga) pilar *sustainable development* yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

Tabel 2.9 Indikator Kinerja Utama Yang Mendukung Tiga Pilar Ekonomi Hijau Provinsi NTT Tahun 2024-2026

PILAR	INDIKATOR	Target Nusa Tenggara Timur		
		2024	2025	2026
SOSIAL	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	2,66%-3,37%	2,51%-2,35%	2,25% -2,05%
	TINGKAT KEMISKINAN	20,00%-19,63%	19,35% - 18,85%	18,50% - 17,03%
	ANGKA HARAPAN HIDUP	67,5 tahun	68 tahun	69 tahun
	RATA-RATA LAMA SEKOLAH	7,75 tahun	7,93 tahun	8,2 tahun
EKONOMI	PERTUMBUHAN EKONOMI	4,55%-5,35%	4,75%-5,65%	5.15%-6,01%
	SKOR POLA PANGAN HARAPAN (SPPH)	68 Poin	68,25 Poin	68,5 Poin
	PENGELUARAN PERKAPITA	Rp7.598.000,00	Rp7.762.000,00	Rp7.954.000,00
	KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN DALAM PDRB	31	32	33
LINGKUNGAN	RASIO ELEKTRIFIKASI	93%	94%	95%
	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	73,62 Poin	73,95 poin	74,28 poin
	INDEKS RISIKO BENCANA	140 Poin	138 Poin	135 Poin

Sumber : RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045

Sedangkan **Indeks Ekonomi Biru Indonesia (*Blue Economy Index* / IBEI)** merupakan alat untuk mengukur kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam sektor ekonomi biru. Indeks ekonomi biru terdiri dari 35 (tiga puluh lima) indikator yang mewakili 3 (tiga) pilar yaitu pilar ekonomi yang menekankan pada analisis rantai nilai produksi dan perdagangan antar daerah, pilar sosial yang menekankan pada potensi perempuan dan kelompok marginal untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap sektor ekonomi biru, serta pilar lingkungan yang menekankan pada pengelolaan sampah khususnya sampah laut.

4) Transformasi Digital

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan suatu wilayah menuju masyarakat informasi. Dalam 10 Tahun terakhir, perkembangan IPTIK Provinsi NTT mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dimana pada Tahun 2012 nilai IPTIK Provinsi NTT sebesar 2,83 yang sempat turun menjadi 2,75 pada Tahun 2016 kemudian meningkat menjadi 5,33 pada Tahun 2023. IPTIK terdiri dari 3 (tiga) komponen sub indeks yaitu akses dan infrastruktur TIK, Penggunaan TIK dan Keahlian TIK. Komponen sub indeks akses dan infrastruktur TIK di Provinsi NTT sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 mengalami penurunan, dimana nilai sub indeks akses dan infrastruktur TIK Provinsi NTT Tahun 2019 senilai 91,35 yang turun menjadi 85,26 dan mengalami pertumbuhan menjadi 86,25 pada Tahun 2022. Komponen sub indeks penggunaan TIK di Provinsi NTT

cenderung mengalami peningkatan yang konsisten dimana pada Tahun 2019 nilai sub indeks penggunaan TIK senilai 29,96 yang naik menjadi 57,27 pada Tahun 2020 dan terus naik menjadi 61,62 pada Tahun 2022. Demikian juga sub indeks keahlian TIK Provinsi NTT juga mengalami pertumbuhan sejak Tahun 2019 senilai 38 (tiga puluh delapan) dan pada Tahun 2022 menjadi 60,35. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

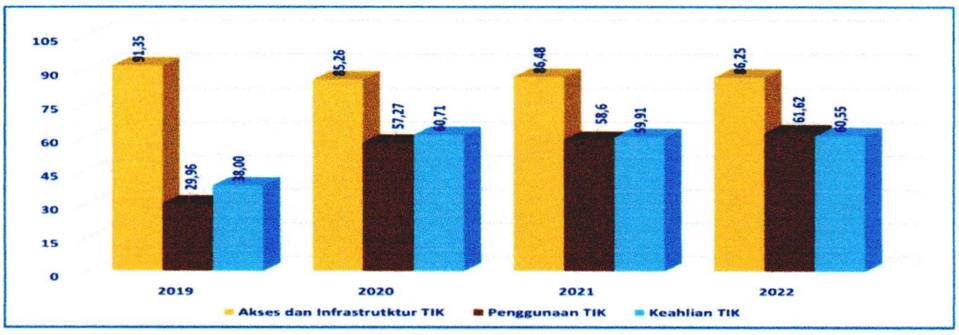

Sumber: BPS,2023

Gambar 2.38 Komponen Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi NTT Tahun 2019-2022

5) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Komposisi **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** dalam **PDRB** sisi pengeluaran di Provinsi NTT jika dilihat dari capaian sebelum-sesudah selama 5 tahun terakhir (2020-2024) mengalami kecenderungan stagnasi yaitu pada angka 44%-45%. Namun, jika diamati lebih detail, komponen pengeluaran ini mengalami penurunan, baik menurut ADHB maupun ADHK. Dari sisi ADHB, proporsi PMTB sedikit menurun dari 44,69% menjadi 44,21%. Sedangkan menurut ADHK, proporsinya menurun dari 45,04% menjadi 44,53%. Meskipun proporsi PMTB cukup besar, kondisi ini mengindikasikan bahwa proporsi investasi cenderung stagnan di Provinsi NTT. Selain itu, investasi yang dilaksanakan di NTT dapat dikatakan belum efisien tergambar dari nilai ICOR yang tinggi yaitu sebesar 12% lebih di Tahun 2024. Hal ini dapat dikaitkan dengan beberapa penyebab utama, yaitu 1) investasi yang belum mengarah ke proyek atau sektor-sektor produktif; 2) investasi belum optimal menggerakkan komponen pengeluaran lain terutamanya ekspor; 3) ketergantungan pada sektor dengan pertumbuhan *output* lambat seperti pertanian; 4) konektivitas antar sektor yang lemah; 5) ketergantungan pada barang modal luar daerah; dan 6) biaya logistik yang tinggi.



Sumber: BPS, 2025 diolah

Gambar 2.39 Proporsi PMTB terhadap Total PDRB di Provinsi NTT Tahun 2020-2024

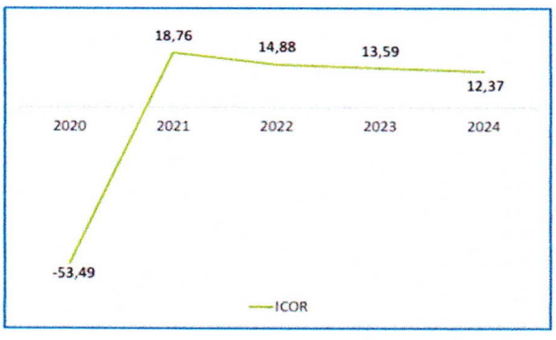

Sumber: BPS, 2025 diolah

Gambar 2.40 Nilai ICOR di Provinsi NTT Tahun 2020-2024

Jika dilihat dari **Proporsi ekspor** dalam PDRB sisi pengeluaran di Provinsi NTT jika dilihat dari capaian sebelum-sesudah selama 5 tahun terakhir (2020-2024) cenderung mengalami penurunan, baik menurut ADHB maupun ADHK. Dari sisi ADHB, proporsi komponen pengeluaran ini menurun dari 6,50% menjadi 5,78%. Sedangkan menurut ADHK, proporsinya menurun dari 45,04% menjadi 44,53%. Meskipun proporsi PMTB cukup besar, kondisi ini mengindikasikan bahwa proporsi investasi cenderung stagnan di Provinsi NTT.

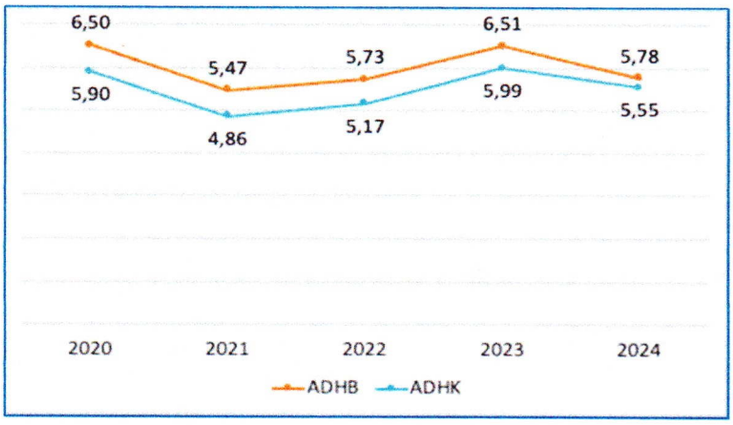

Sumber: BPS, 2025 diolah

Gambar 2.41 Proporsi Ekspor Barang dan Jasa terhadap Total PDRB di Provinsi NTT Tahun 2020-2024

6) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Apabila dilihat **Rumah Tangga (RT)** dengan Akses Hunian Layak dari Proporsi RT dengan akses hunian layak di NTT meningkat selama periode 2020-2024. Proporsi RT dengan hunian layak meningkat dari 36,34% menjadi 46,88% pada akhir periode (BPS, 2025). Meskipun demikian, kondisi ini secara langsung menggambarkan bahwa masih banyak penduduk di NTT yang memiliki akses hunian tidak layak, atau secara proporsi lebih dari setengah komposisi RT.

Sedangkan Cakupan **Desa Mandiri** di NTT meningkat dari selama periode 2021-2023 dari 0,10% menjadi 0,86%. Secara kuantitas, jumlah desa mandiri ini meningkat dari 3 (tiga) di Tahun 2021 menjadi 27 (dua puluh tujuh) desa di Tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa proporsi desa mandiri di NTT masih sangat kecil.

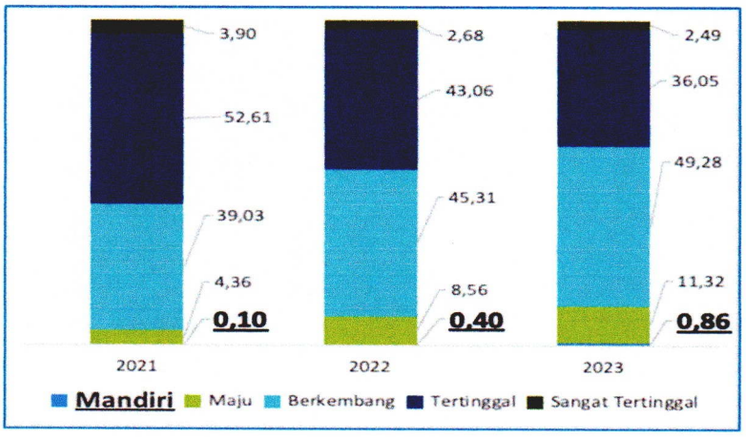

Sumber: BPS, 2025 diolah

Gambar 2.42 Persentase Desa Mandiri di Provinsi NTT Tahun 2021-2023

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasaan masyarakat terhadap pembangunan dan penyediaan layanan infrastruktur oleh pemerintah. Variabel kualitas ini akan menilai infrastruktur mulai dari infrastruktur transportasi, penyediaan air baku hingga air dan sanitasi. Adapun unsur yang dinilai dalam kualitas layanan infrastruktur antara lain ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian dengan harapan dan efektivitas pemanfaatan, dimana Indeks kesesuaian dengan harapan dan efektivitas pemanfaatan melalui survey masyarakat belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Berdasarkan data yang diperoleh, harapan masyarakat terhadap layanan infrastruktur penyediaan air baku diberbagai daerah cukup tinggi. Hal ini ditunjukan dengan capaian nilai indeks sebesar 15,92. Ekspektasi ini mencerminkan pentingnya infrastruktur penyediaan air baku dalam mendukung ketahanan air dan pelayanan dasar masyarakat, termasuk untuk kebutuhan air minum, pertanian dan industri.

Dalam beberapa tahun terakhir, Dinas PUPR Provinsi NTT telah melakukan berbagai upaya strategis dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas air baku melalui pembangunan dan operasi pemeliharaan bangunan penyedia air baku seperti Daerah Irigasi, Embung dan Sumur Bor. Sampai dengan Tahun 2024, melalui Dinas PUPR telah terbangun embung sebanyak 182 unit dengan 59 Unit embung beroperasi, 57 unit sumur bor dan 42 unit DI Kewenangan Provinsi yang tersebar di 22 kabupaten/kota dengan luasan mencapai 60.328 Ha.

Selain itu, kolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai turut mendukung pencapaian target pelayanan. Namun demikian, tantangan seperti perubahan iklim, degradasi kualitas sumber air terus menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, Dinas PUPR secara berkelanjutan melakukan perencanaan terpadu, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, layanan Infrastruktur transportasi memiliki nilai indeks sebesar 11,85 dimana parameternya dinilai dari kondisi fisik jalan berupa geometri jalan & fasilitas pendukung jalan serta data kondisi jalan berdasarkan SK Gubernur NTT Nomor 403 Tahun 2023 tentang Ruas Jalan Provinsi dan hasil data survey terakhir.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi secara konsisten menjalankan berbagai program pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jalan provinsi. Fokus diarahkan pada peningkatan persentase jalan dalam kondisi mantap, perbaikan ruas jalan strategis, serta peningkatan akses ke kawasan pertanian, pariwisata dan pelayanan publik lainnya. Sampai dengan Tahun 2024, kondisi jalan mantap mencapai 67,99% atau 1.827,07 Km dari total panjang jalan kewenangan Provinsi yakni 2.687,31 Km. Dinas PUPR terus berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan infrastruktur jalan, sebagai tulang punggung penggerak pembangunan wilayah dan pelayanan publik.

Indeks Layanan Infrastruktur Air dan Sanitasi merupakan indikator penting yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelayanan air bersih dan sanitasi dasar telah tersedia, terjangkau, dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Indeks ini mengukur efektivitas penyediaan infrastruktur air

minum dan sistem sanitasi yang mendukung kesehatan masyarakat, lingkungan yang bersih, serta pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs) yakni air bersih dan sanitasi layak. Hasil indeks kepuasan Layanan Infrastruktur Air dan Sanitasi mencapai 2,81 yang diukur dari indeks ketersediaan fisik berupa Panjang Jaringan Air Minum Lintas Terbangun dan Jumlah Volume Air terlayani setiap tahun. Khusus untuk sanitasi, Dinas PUPR sampai dengan saat ini belum pernah melakukan kegiatan pembangunan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik karena kemampuan fiskal daerah yang kurang memadai.

Tabel 2.10 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

No	Komponen	Satuan	Bobot	Data Dasar TA. 2024	Nilai Indeks (Data Dasar x bobot/100)	Total Nilai Indeks
1	**Penyediaan Infrastruktur Transportasi**	**%**	**30**		**39,50**	
	Indeks Ketersediaan Fisik		25	90	22,50	
	Indeks Kualitas Fisik		25	67,99	17	**11,85**
	Indeks Kesesuaian dengan Harapan		25	0	0	
	Indeks Efektifitas Pemanfaatan		25	0	0	
2	**Infrastruktur Penyediaan Air Baku**	**%**	**45**			
	A) Layanan Embung		**20**		**33,83**	
	Indeks Ketersediaan Fisik		25	100	25	
	Indeks Kualitas Fisik		25	35,33	8,83	
	Indeks Kesesuaian dengan Harapan		25	0	0	
	Indeks Efektifitas Pemanfaatan		25	0	0	
	B) Layanan Sumur Bor		**30**		**50**	
	Indeks Ketersediaan Fisik		25	100	25	
	Indeks Kualitas Fisik		25	100	25	**15,92**
	Indeks Kesesuaian dengan Harapan		25	0	0	
	Indeks Efektifitas Pemanfaatan		25	0	0	
	C) Layanan Irigasi		**50**		**27,22**	
	Indeks Ketersediaan Fisik		25	74,82	18,71	
	Indeks Kualitas Fisik		25	34,06	8,52	
	Indeks Kesesuaian dengan Harapan		25	0	0	
	Indeks Efektifitas Pemanfaatan		25	0	0	
3	**Infrastruktur Air dan Sanitasi**	**%**	**25**			
	A) Akses terhadap Air Bersih Lintas Kab/ Kota		**50**		**22,50**	
	Indeks Ketersediaan Fisik		25	30	7,5	
	Indeks Kualitas Fisik		25	60	15	**2,81**
	Indeks Kesesuaian dengan Harapan		25	0	0	
	Indeks Efektifitas Pemanfaatan		25	0	0	

No	Komponen	Satuan	Bobot	Data Dasar TA. 2024	Nilai Indeks (Data Dasar x bobot/100)	Total Nilai Indeks
	B) Akses Terhadap Sanitasi Layak Lintas Kab/ Kota		**50**		**0**	
	Indeks Ketersediaan Fisik		25	0	0	
	Indeks Kualitas Fisik		25	0	0	
	Indeks Kesesuaian dengan Harapan		25	0	0	
	Indeks Efektifitas Pemanfaatan		25	0	0	

Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTT, 2024

Indeks Konektivitas Transportasi merupakan alat ukur untuk menilai seberapa baik jaringan trasnportasi menghubungkan berbagai wilayah atau daerah yang dibangun pemerintah. Variabel dihitung dari berbagai jenis transportasi yakni jalan (darat), sungai dan penyeberangan, laut dan udara. Indeks ini mencerminkan seberapa mudah orang, barang dan informasi bergerak antar lokasi. Indikator yang dipakai adalah rasio konektivitas.

Dengan kondisi geografis bentang yang relatif luas dan yang terdiri dari relatif banyak pulau, Provinsi NTT membutuhkan infrastruktur transportasi yang memadai untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, arus informasi dan distribusi barang. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung jalan, pelabuhan, maupun peningkatan layanan transportasi udara sangat vital untuk pembanguan Nusa Tenggara Timur. Pengembangan sistem jaringan transportasi di Provinsi NTT meliputi: a. Sistem jaringan jalan (darat); b. Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; c. Sistem jaringan transportasi laut; d. Bandar udara umum dan bandar udara khusus.



Sumber: Buku Rencana RTRW Prov. NTT 2024-2043

Gambar 2.43 Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat Provinsi NTT Tahun 2024-2043

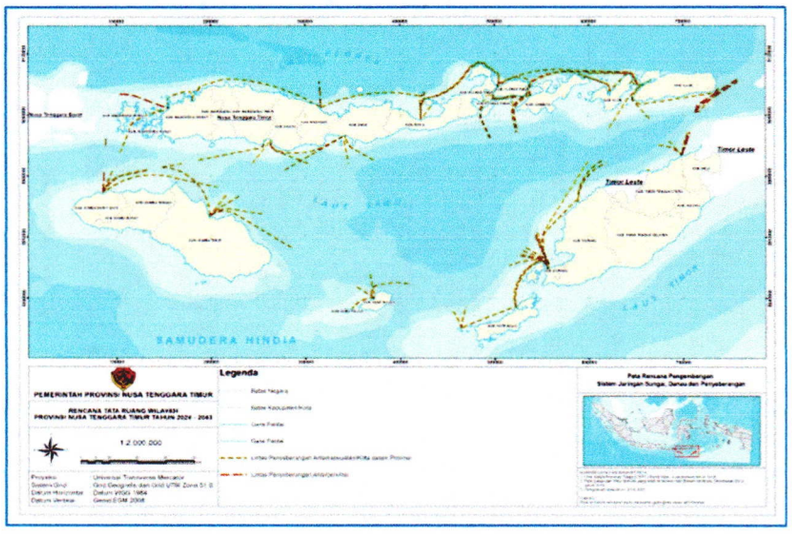

Sumber: Buku Rencana RTRW Prov. NTT 2023-2043

Gambar 2.44 Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan Provinsi NTT Tahun 2023-2043

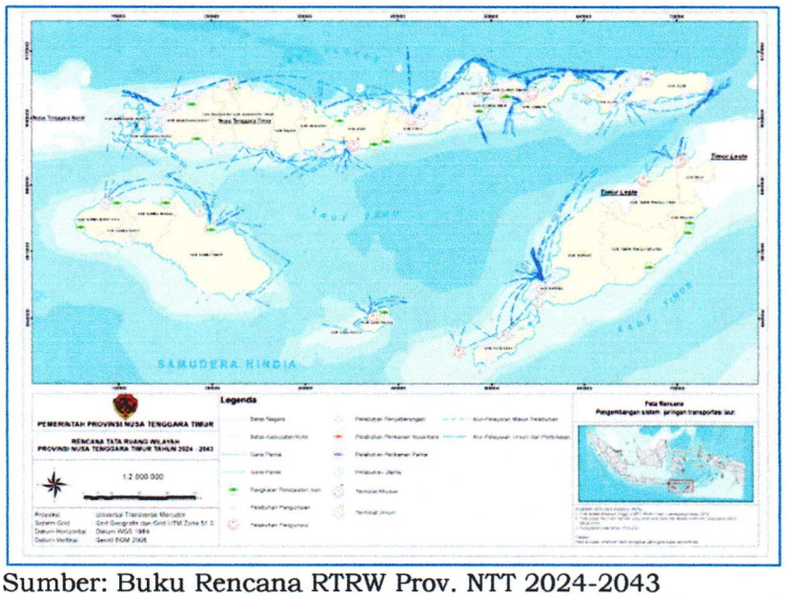

Sumber: Buku Rencana RTRW Prov. NTT 2024-2043

Gambar 2.45 Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut Provinsi NTT Tahun 2023-2043



Sumber: Buku Rencana RTRW Prov. NTT 2024-2043

Gambar 2.46 Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara Provinsi NTT Tahun 2024-2043

7) Stabilitas Ekonomi Makro

Rasio Penerimaan Pajak seluruh pemerintah daerah baik 22 kabupaten/kota dan provinsi di NTT terhadap PDRB ADHB meningkat selama periode 2020-2024. Pada Tahun 2020, besar rasio pajak ialah 1,22%, kemudian meningkat menjadi 1,33% di Tahun 2024. Dalam angka absolut, nilai penerimaan pajak ini meningkat dari 1.301 miliar rupiah menjadi 1.825 miliar rupiah. Rasio dan nilai penerimaan pajak ini masih tergolong kecil, mengingat jumlah objek pajak yang besar dan terus meningkat setiap tahun.

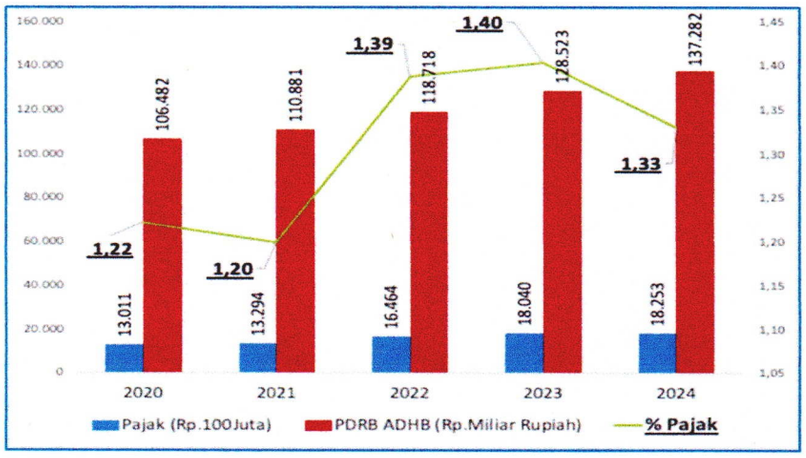

Sumber: BPS dan Kemenkeu, 2025 diolah

Gambar 2.47 Rasio Penerimaan Pajak Seluruh Pemerintah Daerah terhadap PDRB di NTT Tahun 2020-2024

Secara umum, capaian **Inflasi** selama periode 2020-2024 di Provinsi NTT belum memenuhi rentang target inflasi yaitu 3%±1 (2%-4%) di Tahun 2020-2023 dan 2,5%±1 (1,5%-3,5%) di Tahun 2024. Satu-satunya periode dengan pencapaian inflasi terkendali dan terjaga sesuai rentang target ialah Tahun 2023 yaitu sebesar 2,42%. Selain itu, tingkat inflasi selama periode ini cenderung berfluktuasi. Kedua kondisi ini menggambarkan bahwa kecenderungan harga-harga barang dan jasa pokok di tingkat lokal yang belum stabil yang dapat disebabkan oleh ketergantungan pada komoditas tertentu, ketimpangan distribusi, kebutuhan pada kegiatan musiman seperti hari besar keagamaan, maupun kebijakan pengendalian yang belum efektif.

Inklusi keuangan dan literasi keuangan disurvei dalam periode 3 tahunan. Di Provinsi NTT, **Tingkat Inklusi** keuangan meningkat pada Tahun 2022 dibandingkan pada periode survei sebelumnya di Tahun 2019. Pada Tahun 2022, tingkat inklusi keuangan di NTT sebesar 85,97%, meningkat dari Tahun 2019 sebesar 60,63%. Namun demikian, tingkat literasi keuangan di NTT masih cukup rendah, yaitu hanya sebesar 51,95% di tahun 2022.

2.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

1) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Indeks Pelayanan Publik merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek

sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Provinsi NTT pada Tahun 2021 mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik dengan kategori Cukup.

Sistem Pemerintahan Berbasis Eklekronik (SPBE) merupakan suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan. Nilai Indeks SPBE Provinsi NTT pada Tahun 2020 sebesar 3,26 yang turun menjadi 2,28 pada Tahun 2021 dan naik menjadi 3,83 pada Tahun 2023 dengan predikat Sangat Baik.

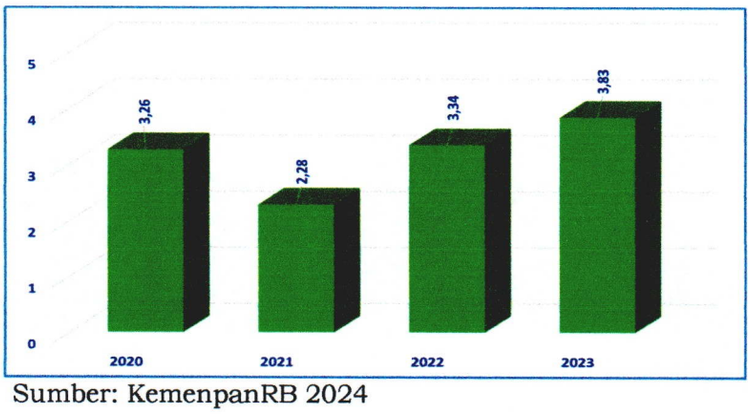

Sumber: KemenpanRB 2024

Gambar 2.48 Indeks SPBE Provinsi NTT Tahun 2020-2023

Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan alat ukur penting dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Provinsi NTT dalam 5 Tahun terakhir memiliki nilai Indeks SAKIP senilai 63 atau berada dalam rentang >60-70 dengan predikat Baik.

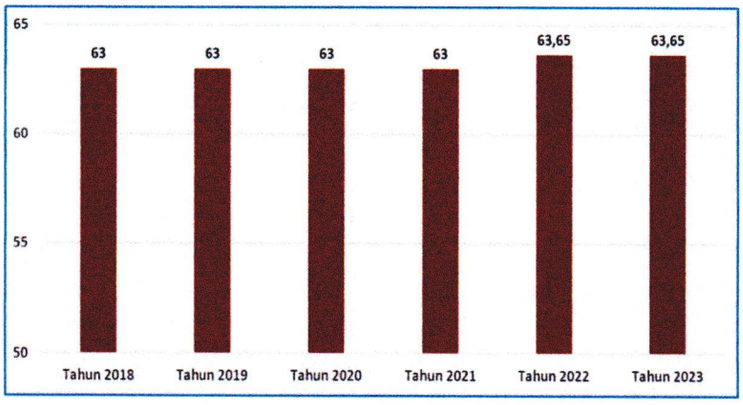

Sumber: KemenpanRB 2024

Gambar 2.49 Indeks SAKIP Provinsi NTT Tahun 2018-2023

Indeks Reformasi Birokrasi digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Reformasi Birokrasi merupakan proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya

manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir serta budaya kerja. Pada Tahun 2019 nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi NTT senilai 60 dan terus mengalami peninkatan sampai dengan Tahun 2023 dengan capaian 66,18 kategori Baik.

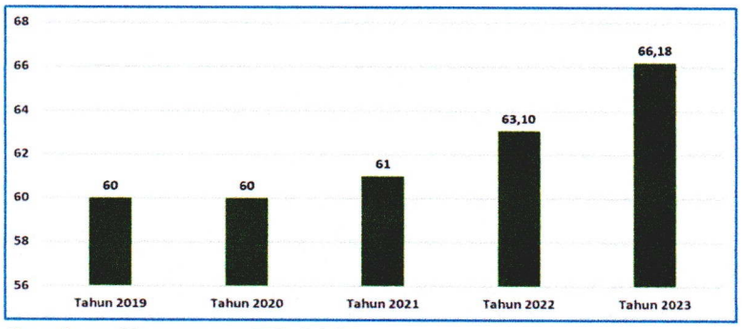

Sumber: KemenpanRB 2024

Gambar 2.50 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi NTT Tahun 2019-2023

2) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengeavluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi baik di nasional maupun di tingkat daerah. Perkembangan IDI di Provinsi NTT sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2022 mengalami fluktuasi dimana pada Tahun 2009, nilai IDI Provinsi NTT sebesar 71,64 yang meningkat menjadi 82,49 pada Tahun 2016 dan kemudian mengalami penurunan menjadi 77,83 pada Tahun 2022, namun menurun pada Tahun 2023 menjadi 77,39 persen. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

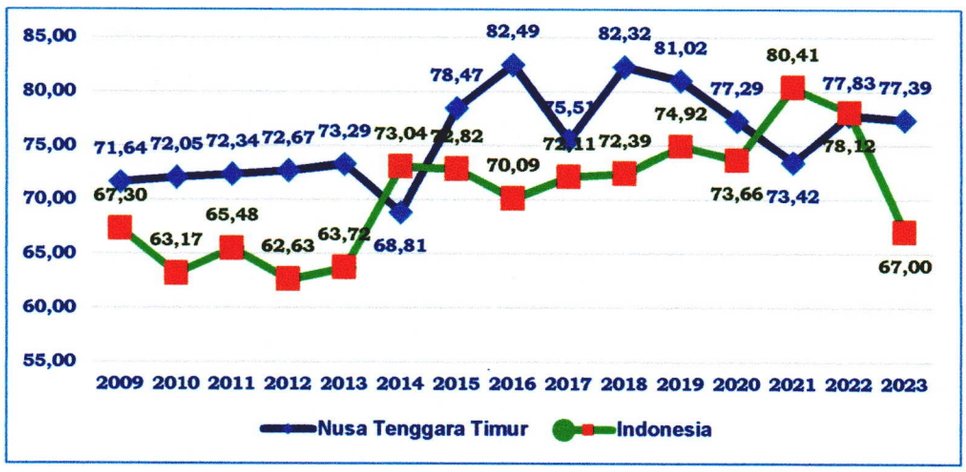

Sumber: BPS,2023

Gambar 2.51 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi NTT Tahun 2009-2023

3) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, **Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)** merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui lebih spesifik kondisi suatu daerah. Model pengukuran IDSD ini dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi-BRIN untuk mengukur potensi dan kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan. IDSD menggambarkan bagaimana produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah.

Capaian IDSD Provinsi NTT sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami penurunan dimana nilai IDSD Provinsi NTT Tahun 2019 senilai 3,91 yang turun menjadi 3,20 pada Tahun 2022 dan turun menjadi 3,42 pada Tahun 2023. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

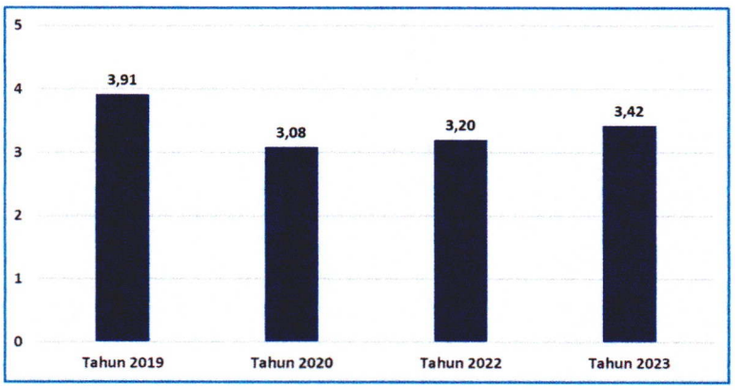

Sumber: BRIN, 2024

Gambar 2.52 Indeks Daya Saing Daerah Provinsi NTT Tahun 2019-2023

Komponen IDSD meliputi 12 komponen diantaranya Institusi, Infrastruktur, Adopsi TIK, Stabilitas Ekonomi Makro, Kesehatan, Keterampilan, Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan, Ukuran Pasar, Dinamisme Bisnis serta Kapabilitas Inovasi. Komponen IDSD Provinsi NTT Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

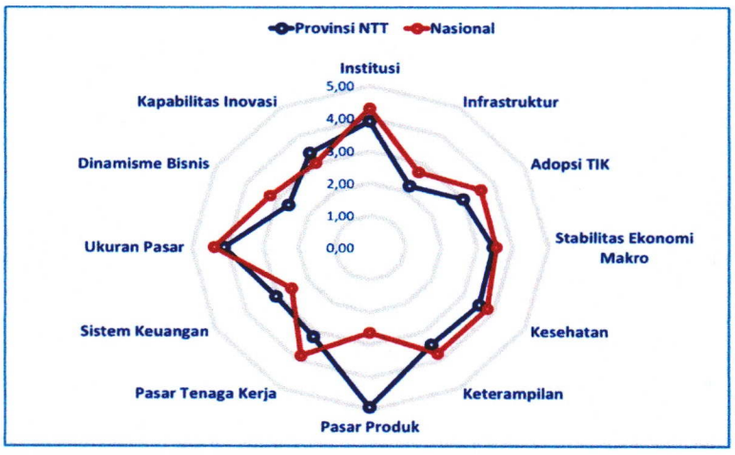

Sumber: BRIN 2024

Gambar 2.53 Komponen IDSD Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2023

4) Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

A. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1) Urusan Pendidikan

a) APS, APK, dan APM SMA/sederajat

Tingkat partisipasi pendidikan yang diukur dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) memberikan gambaran yang luas tentang akses dan keterlibatan penduduk dalam pendidikan formal.

Tabel 2.11 APS 16–18 Tahun, APK dan APM SMA/sederajat Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah di Provinsi NTT Tahun 2023

Angka Partisipasi *Enrollment Rate*	Jenis Kelamin *Sex*		Wilayah *Residence*		Total
	Laki-laki *Boys*	Perempuan *Girls*	Perkotaan *Urban*	Perdesaan *Rural*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
APS/*SER*	75,24	76,61	79,91	74,32	75,93
APK/*GER*	86,94	90,37	101,63	83,43	88,66
APM/*NER*	56,55	59,74	64,62	55,53	58,15

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Hasil perhitungan Susenas Maret 2023 menujukkan bahwa nilai APS 16–18 tahun NTT sebesar 75,93, APK SMA/sederajat sebesar 86,66 dan APM SMA/sederajat sebesar 58,15. Dinamika nilai APS, APK dan APM ini menggambarkan kondisi tertentu. Yang pertama, dari perhitungan APS didapati bahwa sekitar tiga perempat penduduk usia 16–18 tahun masih status bersekolah terlepas dari jenjang apapun. Selanjutnya, hasil APM menunjukkan bahwa dari 100 anak usia 16–18 tahun, hanya ada 58 siswa yang bersekolah pada jenjang SMA/sederajat.

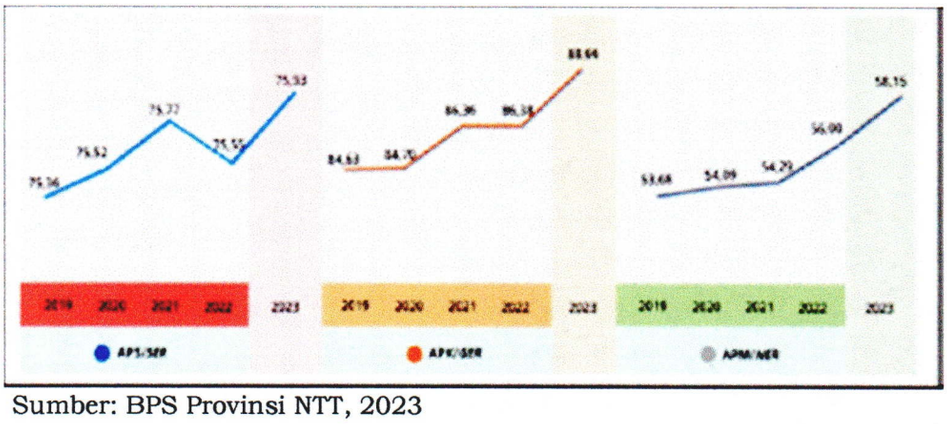

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Gambar 2.54 APS 16-18 Tahun, APK dan APM SMA/Sederajat Provinsi NTT Tahun 2019 – 2023

Walaupun dari tahun ke tahun, nilai APK jenjang SMA/sederajat terus mengalami peningkatan seperti terlihat pada gambar di atas, angka ini masih jauh dibawah harapan pemerintah yang menargetkan APK SMA/sederajat tahun 2023 sebesar 92,80. Melihat pencapaian ukuran angka partisipasi ini, diperkirakan NTT tidak termasuk dalam skema wajib belajar yang dicanangkan dalam RUU Sidiknas Agustus 2022. Nilai APK, APM, dan APS ini pun jika diurutkan secara nasional menunjukkan bahwa posisi partisipasi NTT pada pendidikan menengah masih tergolong rendah.

b) Jumlah Sekolah, Murid, dan Rasio Murid Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)

Ketersediaan jumlah sekolah yang memadai memiliki pangaruh yang signifikan terhadap besarnya APS, APK serta APM.

Tabel di bawah memperlihatkan jumlah SMA di NTT selama periode tahun 2021-2023 menunjukkan trend peningkatan dengan penambahan SMA selama periode tersebut sebanyak 18 SMA. Sampai tahun 2023 terdapat 5 kabupaten dengan jumlah SMA terendah, yakni Kabupaten Sabu Raijua 11 SMA, Nagekeo 15 SMA, Sumba Tengah 5 SMA, Rote Ndao 14 SMA, Lembata 14 SMA, dan Kabupaten Sumba Barat 11 SMA.

Hal yang sama juga terjadi pada ketersediaan guru dengan jumlah yang meningkat selama tahun 2021-2023, kondisi ini berdampak pada rasio guru murid dengan kecenderungan menurun pula di setiap kabupaten/kota.

Tabel 2.12 Jumlah Sekolah, Murid, dan Rasio Murid Guru Pada SMA APS 16-18 Provinsi NTT Tahun 2021 – 2023

Wilayah	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)											
	Sekolah			Murid			Guru			Ratio Murid Guru		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Sumba Barat	9	9	11	5410	5447	6032	306	333	383	18	16	16
Sumba Timur	23	24	24	12530	13078	13158	668	744	791	19	18	17
Kupang	62	62	62	15850	15845	15819	1355	1491	1533	12	11	10
Timor Tengah Selatan	47	55	56	17057	16953	17104	1033	1179	1274	17	14	13
Timor Tengah Utara	30	30	30	10254	10149	10028	718	782	793	14	13	13
Belu	25	26	25	9430	9132	8493	659	714	717	14	13	12
Alor	36	38	40	7160	7078	7337	822	935	1022	9	8	7
Lembata	14	14	14	4409	4478	4431	338	383	402	13	12	11
Flores Timur	24	23	23	8154	8057	7998	658	719	745	12	11	11
Sikka	24	24	24	9014	8976	9130	658	725	722	14	12	13
Ende	21	21	22	7496	7504	7676	647	661	682	12	11	11
Ngada	18	19	20	6309	6377	6676	447	546	529	14	12	13
Manggarai	27	27	27	15055	14468	14399	857	913	1004	18	16	14
Rote Ndao	14	14	14	6687	6957	7204	392	429	463	17	16	16
Manggarai Barat	31	30	30	8820	8928	9018	746	863	919	12	10	10
Sumba Tengah	4	5	5	2932	2913	3005	129	164	179	23	18	17
Sumba Barat Daya	26	29	35	11596	12211	13379	618	751	861	19	16	16
Nagekeo	15	15	15	5487	5543	5787	432	447	457	13	12	13
Manggarai Timur	46	46	46	9960	10062	10245	1030	1097	1187	10	9	9
Sabu Raijua	8	10	11	5535	5427	5448	257	329	363	22	16	15
Malaka	34	35	35	8720	8812	8596	746	908	949	12	10	9
Kota Kupang	42	42	42	15768	15843	16076	1182	1302	1318	13	12	12
Nusa Tenggara Timur	580	598	611	203633	204238	207039	14698	16415	17293	14	12	12

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

2) Urusan Kesehatan

a) Fasilitas Kesehatan

Pada tahun 2022 jumlah fasilitas kesehatan berupa rumah sakit umum di NTT sebanyak 56 rumah sakit, jumlah ini tidak mengalami peningkatan sejak tahun 2021. Puskesmas sebagai ujung tombak penyediaan fasilitas kesehatan di tingkat kecamatan Tahun 2022 berjumlah 436 unit di NTT. Sementara itu, posyandu sebagai ujung tombak pencegahan stunting tersedia sebanyak 10.561.

Berikut disajikan perkembangan fasilitas kesehatan di NTT selama Tahun 2020-2022 pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13 Perkembangan Fasilitas Kesehatan di Provinsi NTT Tahun 2020-2022

Uraian	2020	2021	2022
Jumlah fasilitas Kesehatan di NTT Menurut Jenisnya			
Rumah Sakit umum	47	56	57
Rumah Sakit Khusus	3	3	2
Puskesmas	417	424	436
Klinek/Balai Kesehatan	118	174	174
Posyandu	10.494	10.561	10.561
Poskesdes	685	1.227	1.227

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang diakses oleh penduduk dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu fasilitas kesehatan (rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, praktek dokter/poliklinik, puskesmas/pustu, dan praktek tenaga kesehatan), dan fasilitas non kesehatan (praktek pengobatan tradisional, dukun bersalin, atau tempat sejenis lainnya).

Masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam mengatasi permasalahan kesehatannya sudah dapat dikatakan memiliki pola pikir modern. Hal ini tercermin dari data Susenas Maret 2023 dimana penduduk yang memiliki gangguan kesehatan cenderung lebih memilih tempat pelayanan kesehatan yang relatif lengkap dan modern sebagai tujuan memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan. Secara berurut, dua fasilitas pelayanan kesehatan yang paling banyak diminati oleh penduduk Nusa Tenggara Timur adalah puskesmas/pustu sebesar 63,71 persen dan praktek dokter/bidan sebesar 11,48 persen. Kondisi ini digambarakan pada gambar di bawah ini.

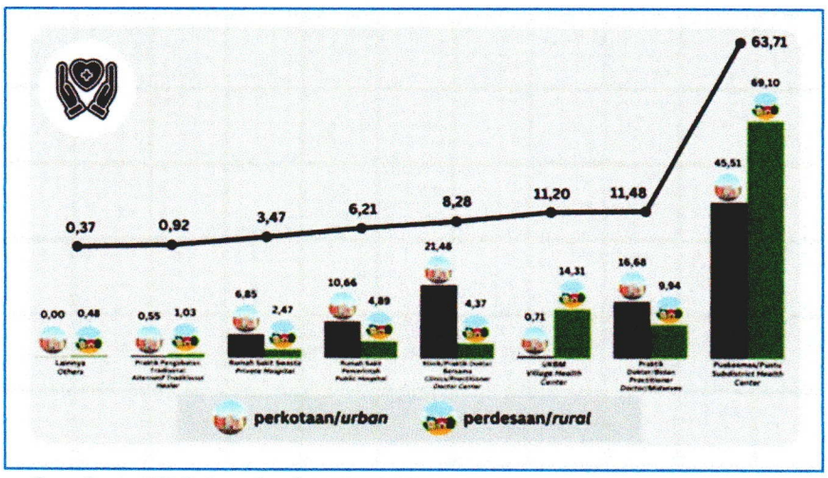

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Gambar 2.55 Persentase Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan menurut tempat berobat di Provinsi NTT Tahun 2023

b) Kesehatan dan Produksi Perempuan

Kehamilan dan melahirkan pada usia muda dikategorikan sebagai kehamilan berisiko tinggi. Dari perspektif kesehatan, kehamilan usia muda dapat berakibat kematian ibu dan janin, kelainan pada bayi, pra eklamsia, anemia saat hamil, dan berat badan lahir rendah. Kehamilan pertama di NTT dengan usia ibu hamil dibawah 19 tahun adalah 16%. Namun demikian, disparitas antara wilayah cukup tinggi, dimana Tahun 2023 angka tertinggi di Kabupaten Manggarai Barat (25,05%) dan terendah di Kabupaten Nagekeo (7,92%).

Kebijakan pemerintah di bidang kesehatan antara lain mewajibkan semua persalinan ibu melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan. Kebijakan ini untuk mengurangi terjadinya risiko tinggi persalinan. Namun, persalinan yang tidak ditolong oleh dukun masih terjadi di NTT. Pada tahun 2023, persalinan yang ditolong oleh dukun 7,3%, secara kumulatif persentase NTT cukup rendah, namun disparitas antara kabupaten/kota cukup tinggi dimana terdapat 5 (lima) kabupaten yang tinggi penolong persalinannya oleh dukun, diatas 10%-20% yaitu Alor, Kabupaten Kupang, Sabu Raijua, Manggarai Timur dan Sumba Barat Daya.

c) Orang yang Hidup HIV/AIDS (ODHIV)

ODHIV merupakan salah satu kelompok rentan dalam masyarakat. Mereka sering mengalami diskriminasi, pelabelan negatif dan penolakan akibat penyakit yang diderita. Kurun waktu 2017-2022 terdapat 6.453 ODHIV yang tersebar di 22 kabupaten/kota di NTT, 63% di antaranya berjenis kelamin laki-laki, sementara perempuan 37%33. Penting dicatat bahwa data yang terlapor hanya sebagian kecil dari situasi sesungguhnya. Kondisi ini digambarkan sebagai fenomena gunung es, dimana hanya sebagian kecil yang terlapor, karena takut dan malu akibat penolakan, stigma negatif dan rendahnya dukungan terhadap ODHIV.

Tahun 2022 tercatat 218 ODHIV baru, dengan persentase perempuan lebih tinggi dibandingkan laki- laki. Perempuan yang menjadi ODHIV, mayoritas dengan status ibu rumah tangga, yang umumnya beraktivitas di dalam rumah. Situasi ini mengindikasikan bahwa ibu rumah tangga rentan tertular dari suami mereka.

Masalah yang dihadapi oleh ODHIV yaitu masih terbatasnya akses terhadap pengobatan. Saat ini obat ARV telah tersedia pada hampir semua Puskesmas, namun jarak tempat tinggal yang jauh memerlukan biaya transportasi dan pengeluaran tambahan. Kondisi ini menggambarkan bahwa ODHIV yang miskin akan semakin terpuruk dalam mengakses layanan kesehatan. Masalah kesehatan lainnya yaitu kesehatan mental karena kuatnya stigma negatif, dikriminasi dan penolakan terhadap ODHIV, sehingga mereka sering menarik diri dari pergaulan di masyarakat.

3) Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Rumah Tidak Layak Huni yang biasa disebut RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan Kesehatan penghuni. Perkembangan jumlah RTLH Provinsi NTT hingga per status Tahun 2025 sebanyak 447.713 unit yang

tersebar di 22 wilayah administratif kabupaten dan kota. Jumlah RTLH Provinsi NTT dan sebarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14 Status Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTT Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Sebaran Kecamatan	Sebaran Desa/Kelurahan	Jumlah RTLH
1	Ngada	12	149	9.037
2	Kota Kupang	6	51	10.342
3	Timor Tengah Utara	24	190	25.101
4	Timor Tengah Selatan	32	270	64.480
5	Sumba Timur	22	154	23.487
6	Sumba Tengah	5	65	8.950
7	Sumba Barat Daya	11	101	27.296
8	Sumba Barat	6	65	11.018
9	Sikka	21	160	25.829
10	Sabu Raijua	6	62	14.340
11	Rote Ndao	10	91	7.370
12	Alor	17	175	17.333
13	Nagekeo	7	93	7.409
14	Manggarai Timur	9	136	17.720
15	Manggarai Barat	12	154	24.109
16	Manggarai	12	163	28.819
17	Malaka	12	127	21.469
18	Lembata	9	150	10.688
19	Kupang	24	175	25.157
20	Flores Timur	19	247	28.440
21	Ende	21	274	20.859
22	Belu	12	78	18.460
			TOTAL	**447.713**

Sumber: Aplikasi e-RTLH per tanggal 7 Feb 2025

Penanganan RTLH Provinsi NTT yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Provinsi NTT cenderung tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena keterbatasan anggaran sejak Tahun 2021 dari target 19 unit rumah hanya terbangun 10 unit rumah dengan pola bantuan bahan bangunan seperti pada tabel di bawah.

Tabel 2.15 Intervensi DAU Pemerintah Provinsi NTT untuk Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2021-2024

No	Jenis Pembangunan	Anggaran		Perencanan	Realisasi		Lokasi Kabupaten /Kota
		Tahun Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target (Unit)	Jumlah (Unit)	%	
1	Rumah Layak Huni	2021	DAU	562	-		22 Kab/Kota
2	Rumah Layak Huni	2022	DAU	572	-		22 Kab/Kota
3	Rumah Layak Huni	2023	DAU	572	-		22 Kab/Kota
4	Rumah Layak Huni	2024	DID	19	10	100	Sumba Timur

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. NTT, 2024.

Sedangkan Data besaran *backlog* perumahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 40.858 dan tersebar di 21 (dua puluh satu) Kabupaten dan 1 (satu) Kota dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.16 Data Besaran *Backlog* Perumahan di Provinsi NTT Tahun 2024

No	Kab/Kota	Rumah Tangga	Kepala Keluarga	Penghuni (Jiwa)	Backlog (KK)
1	Alor	1.519	3.168	10.003	1.568
2	Belu	1.184	2.484	7.873	1.211
3	Ende	2.334	4.865	15.147	2.436
4	Flores Timur	4.327	9.309	28.614	4.505
5	Kupang	1.634	3.397	10.082	1.510
6	Lembata	1.385	4.753	8.042	825
7	Malaka	1.160	2.427	7.475	1.209
8	Manggarai Barat	1.864	4.044	11.424	1.834
9	Manggarai Timur	3.880	7.983	25.358	4.033
10	Manggarai	3.202	6.581	20.899	3.337
11	Nagekeo	1.206	2.546	8.717	1.299
12	Ngada	662	1.377	4.530	705
13	Rote Ndao	460	948	2.894	458
14	Sabu Raijua	736	1.531	4.669	713
15	Sikka	4.508	9.411	30.618	4.834
16	Sumba Barat Daya	4.714	16.571	21.268	3.607
17	Sumba Barat	952	1.975	7.260	988
18	Sumba Tengah	875	1.816	6.624	923
19	Sumba Timur	1.681	3.566	12.229	1.845
20	Timor Tengah Selatan	1.551	3.474	9.164	1.395
21	Timor Tengah Utara	1.339	2.992	8.137	1.224
22	Kota Kupang	370	779	2.605	399
	Jumlah	**41.543**	**95.997**	**263.632**	**40.858**

Sumber: e-RTLH, 2024

Luasan Kawasan kumuh di wilayah Provinsi NTT pada Tahun 2023 sebesar 1.422,63 Ha dengan kategori kumuh ringan yang tersebar di 15 kabupaten dan 1 Kota. Dari total luasan Kawasan kumuh tersebut terdapat 251,08 Ha merupakan kewenangan pemerintah Provinsi. Rincian selengkapnya mengenai luasan dan sebaran kawasan kumuh di Provinsi NTT Tahun 2023 selengkapnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17 Luasan Kawasan Kumuh Bidang Perumahan dan Permukiman Provinsi NTT Tahun 2023

No	Nama Wilayah	Luasan Keseluruhan (Ha)	Kewenangan Provinsi		
			Kecamatan	Luasan (Ha)	Tingkat Kekumuhan
1	Sikka	145,66	Alok Barat	10,72	Kumuh Ringan
2	Timor Tengah Selatan	44,70	-	-	-
3	Sumba Timur	78,72	Kota Waingapu	10,72	Kumuh Ringan
4	Sumba Barat	15,75	-	-	-
5	Kota Kupang	123,95	Kelapa Lima	34,38	Kumuh Ringan

No	Nama Wilayah	Luasan Keseluruhan (Ha)	Kewenangan Provinsi		
			Kecamatan	Luasan (Ha)	Tingkat Kekumuhan
			Oebobo	11,86	Kumuh Ringan
6	Manggarai	102,38	-	-	-
7	Belu	25,45	-	-	-
8	Ngada	31,88	-	-	-
9	Sumba Tengah	44,53	-	-	-
10	Sumba Barat Daya	156,57	Kota Tambolaka	43,5	Kumuh Ringan
11	Sabu Raijua	108,63	Sabu Barat	11,2	Kumuh Ringan
12	Manggarai Timur	219,21	Borong	12,61	Kumuh Sedang
			Kota Komba	10,24	Kumuh Ringan
13	Flores Timur	138,98			
14	Rote Ndao	342,79	Lobalain	57,54	Kumuh Ringan
15	Manggarai Barat	120,43	Komodo	11,98	
16	Kupang		Amarasi Barat	11,51	Kumuh Ringan
			Amarasi Selatan	11,34	Kumuh Ringan
			Kupang Timur	13,48	Kumuh Ringan
Total		**1.422,63**		**251,08**	

Sumber: Balai Pelaksana Perumahan Nusa Tenggara II (BP2P NT II)

Menindaklanjuti amanat Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan implementasi dari Keputusan Menteri PKP Nomor 23 Tahun 2025 tentang Delineasi Perkotaan, Perdesaan, dan Pesisir, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2021 baru melakukan intervensi pada daerah lintas batas antara Kabupaten/Kota pada kawasan PSU dengan peningkatan kapasitas jalan pada Kawasan Nasipanaf, dan Daerah Destinasi Wisata pada Kawasan Wae Rebo. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih membutuhkan tambahan anggaran untuk melakukan intervensi pada kawasan permukiman pada daerah lintas batas.

4) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, risiko penduduk terkena tindak pidana di Provinsi NTT mencapai 176 per 100.000 penduduk pada Tahun 2023. Rasio terbesar risiko ini ialah pada Kabupaten Alor yaitu sebesar 331 per 100.000 penduduk pada Tahun 2023 (BPS, 2024).

5) Urusan Sosial

a. Perempuan Kepala Rumah Tangga (PKRT)

PKRT merupakan isu gender yang harus diperhatikan secara serius. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKRT merupakan salah satu penyumbang terjadinya kemiskinan ekstrem di NTT.

Umumnya, PKRT adalah perempuan berpendidikan rendah dimana pendidikan yang rendah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi

status pekerjaan. Semakin rendah pendidikan maka status pekerjaan pun rendah. Dalam konteks masyarakat patriarkhi, kepemilikan aset oleh perempuan berpengaruh terhadap lebih baiknya posisi tawar perempuan dalam aspek sosial, ekonomi dan pengambilan keputusan. Kepemilikan PKRT di Provinsi NTT atas aset transportasi terendah nomor dua di Indonesia setelah Papua.

Permasalahan yang dihadapi oleh PKRT perempuan yang ingin menjalankan usaha yaitu terbatasnya akses pada permodalan. PKRT yang tidak menerima jaminan sosial sangat tinggi dibandingkan dengan yang menerima jaminan sosial. PKRT penerima jaminan sosial yang bertempat tinggal di desa prosentasenya lebih tinggi dibandingkan PKRT yang bertempat tinggal di kota. Dengan berbagai keterbatasan secara ekonomi PKRT masih harus menanggung pembiayaan hidup beberapa anggota keluarga, dengan prosentasi terbesar antara 2- 5 anggota keluarga.

b. Lansia

Isu lansia di Indonesia sangat penting diberikan perhatian karena Indonesia sedang mengalami percepatan penuaan populasi yang signifikan dengan jumlah lansia yang terus meningkat. Terhitung satu dekade terakhir (2015-2024) terjadi peningkatan persentase lansia Indonesia mencapai hampir 4 persen sehingga menjadi 12 persen. Umur harapan hidup menunjukkan tren peningkatan dari 70,78 tahun di Tahun 2015 menjadi 72,39 tahun di Tahun 2024. BPS memproyeksikan pada Tahun 2045 penduduk lansia akan mencapai 65,82 juta atau 20,31 persen dari total penduduk (BPS 2023). Bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia dapat memberikan dampak positif jika penduduk lanjut usia berada dalam keadaan sehat, aktif, dan produktif.

Menurut pendataan Regsosek Tahun 2022, sejumlah 296.529 atau 63,79% dari total populasi lansia di Provinsi NTT tahun tersebut yang masih aktif bekerja. Dari 22 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTT, jumlah lansia yang masih aktif bekerja terbesar berada di Kabupaten TTS (78,82% dari total populasi lansia di TTS), dan yang terkecil ada pada Kabupaten Sumba Tengah (64,41% dari total populasi lansia di Sumba Tengah). Lansia perempuan yang bekerja sebanyak 45 % sedangkan lansia laki-laki lebih yang bekerja sebanyak 55%. Umumnya, lansia bekerja di sektor informal, dan didominasi oleh sektor pertanian.

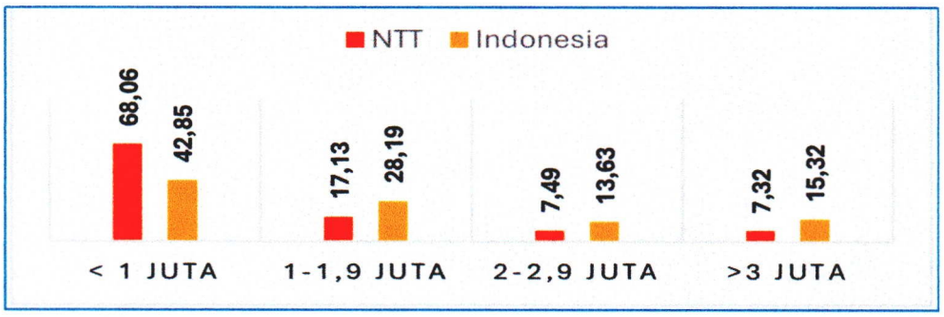

Sumber : Data Regsosek NTT

Gambar 2.56 Persentase Lansia Bekerja dan Penghasilan yang diperoleh, Tahun 2023

Dari seluruh lansia yang bekerja, sebagian besar atau 68,06% berpenghasilan dibawah 1 juta rupiah per bulan. Kondisi ini menempatkan mayoritas sebagai lansia miskin. Dari total populasi lansia di Provinsi NTT, 116.121 orang atau sejumlah 25,15% diantaranya masuk dalam desil 1 dan desil 2 atau termasuk dalam 20% kelompok orang termiskin di Provinsi NTT, artinya setiap 1 dari 4 lansia di NTT adalah lansia miskin, seperti gambar di atas.

c. Pekerja Anak

Bersekolah dan bermain merupakan hak anak, mereka tidak dianjurkan untuk bekerja. Gambar dibawah memperlihatkan masih terdapat pekerja anak di NTT lebih tinggi dibandingkan Nasional. NTT termasuk provinsi dengan prosentase pekerja anak tertinggi nomor 3 di Indonesia pada tahun 2023. Kondisi pekerja anak berkorelasi dengan rendahnya rata- rata lama sekolah di NTT.

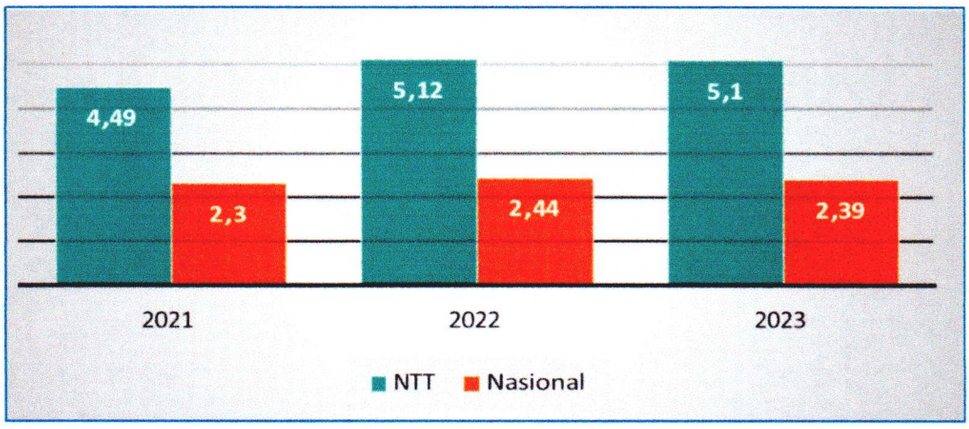

Sumber: BPS 2023

Gambar 2.57 Persentase Pekerja Anak di Provinsi NTT dibandingkan Nasional Tahun 2021-2023

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

1) Urusan Tenaga Kerja

Konsep dan defenisi yang digunakan dalam ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik yang didasarkan pada *International Labour Organization (ILO).* Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja, atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran, sedangkan bukan angkatan kerja adalah Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja. BAK mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya.

a) Penduduk Menurut Jenis Kegiatan, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal

Total penduduk usia kerja 15 tahun ke atas sebesar 3,95 juta penduduk dengan jumlah penduduk usia kerja perempuan lebih banyak dari laki-laki. Angkatan Kerja (AK) penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan AK penduduk perempuan, sedangkan AK di perdesaan lebih besar hampir 3,5 kali dibanding perkotaan. BAK umumnya didominasi oleh perempuan dan terbanyak di perdesaan. Berikut disajikan Persentase Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin.

Tabel 2.18 Persentase Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin (jiwa) Tahun 2020 – 2023

Jenis Kelamin / Tahun	Status Pekerjaan						
	Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	Berusaha dibantu buruh tetap	Buruh/ Karyawan /Pegawai	Pekerja bebas	Pekerja keluarga /tak dibayar	Jumlah
Laki-laki							
2020	27.623	32.069	6.713	68.261	37.114	15.050	186.830
2021	37.126	29.938	8.915	75.962	40.032	12.608	204.581
2022	43.547	36.513	11.022	92.214	25.211	8.923	217.430
2023	33.917	35.482	14.384	97.349	28.720	12.192	222.044
Perempuan							
2020	27.649	14.310	2.601	34.393	10.236	38.778	127.967
2021	34.303	15.883	2.823	48.411	7.768	34.958	144.146
2022	39.031	13.644	5.602	45.331	8.785	45.791	158.184
2023	33.434	20.047	2.633	42.756	10.281	39.074	148.225
Laki-laki + Perempuan							
2020	55.272	46.379	9.314	102.654	47.350	53.828	314.797
2021	71.429	45.821	11.738	124.373	47.800	47.566	348.727
2022	82.578	50.157	16.624	137.545	33.996	54.714	375.614
2023	67.351	55.529	17.017	140.105	39.001	51.266	370.269

Sumber : https://rembangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzIzIzI=/penduduk-bekerja-menurut-statuspekerjaan-dan-jenis-kelamin.html

Tabel di atas menunjukan status pekerjaan penduduk berusia diatas 15 tahun memperlihatkan *gap* yang cukup besar dalam beberapa aspek usaha penting. Ada perbedaan hampir 50% diantara laki- laki dan perempuan dalam hal: 1) jenis usaha yang dibantu oleh oleh buruh, jumlah laki- laki jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan; 2) berdasarkan status jenis usaha, laki- laki mempunyai jenis usaha yang nilai ekonomisnya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan; dan 3) jenis pekerjaan tak berbayar, dimana jumlah perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kondisi ini mengindikasikan masih kuatnya kontruksi gender yang menempatkan laki- laki sebagai pencari nafkah utama. Pembagian kerja berdasarkan gender pun masih sangat kuat, dimana pekerjaan rumah tangga yang dikategorikan dalam pekerjaan tidak berbayar didominasi oleh perempuan.

Data Regsosek Provinsi NTT Tahun 2022 memperlihatkan penduduk berusia diatas 15 tahun yang bekerja dan memilki usaha sendiri, perempuan lebih tinggi 47,65% dibandingkan dengan laki- laki 42,55%.

Namun pada bagian lain, Perempuan yang berusaha sendiri 13,96% omsetnya diatas 5 juta rupiah, 33,69% omsetnya tergolong ultra mikro/sangat kecil yaitu di bawah 5 juta rupiah seperti tergambar dalam Grafik dibawah

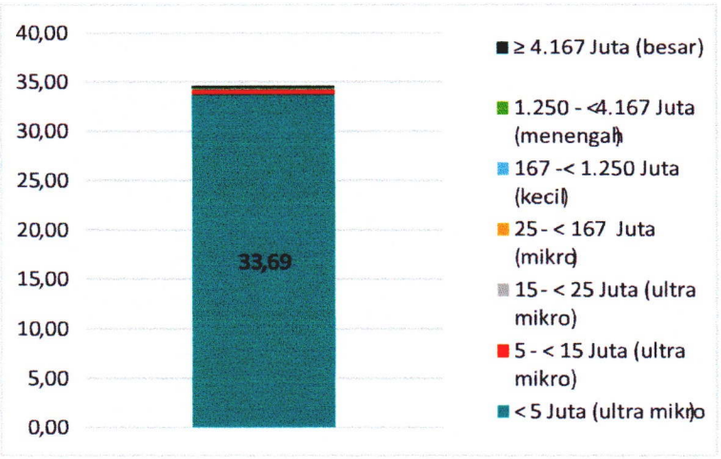

Sumber: Data Regsosek 2022

Gambar 2.58 Persentase Penduduk Perempuan yang Memiliki Usaha di Provinsi NTT berdasarkan omzet

b) Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin

Bukan Angkatan Kerja (BAK) perempuan didominasi oleh yang mengurus rumah tangga. Proporsi Angkatan Kerja (AK) laki-laki menganggur lebih tinggi dibandingkan AK perempuan yang menganggur. Berikut disajikan penduduk usia kerja menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin di Provinsi NTT Tahun 2023 (BPS, 2023).

c) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Nilai TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pengangguran Terbuka (PT) adalah kategori penduduk Indonesia yang terdiri dari : Penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan; Penduduk yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; Penduduk yang tidak memiliki usaha dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan; dan Penduduk yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah angkatan kerja yang tidak atau masih belum bekerja.

Kategori penduduk lain selain pengangguran terbuka adalah sebagai berikut: Penduduk Usia Kerja: penduduk yang telah berusia 15 tahun ke atas. Penduduk Angkatan Kerja: penduduk dengan usia kerja 15 tahun atau lebih yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi untuk sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pekerja Tidak Penuh: penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal yakni kurang dari 35 jam dalam satu minggu. Pekerja Tidak Penuh Setengah Penganggur: pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia

menerima pekerjaan. Pekerja Tidak Penuh Pekerja Paruh Waktu: pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan maupun tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Buruh/Karyawan /Pegawai: seseorang yang bekerja kepada orang lain atau instansi/ perusahaan/kantor dengan tetap dan meneripa upah atau gaji berupa uang maupun barang. Pekerja Tak Dibayar: seseorang yang membantu orang lain yang berusaha tetapi tidak memperoleh gaji atau upah baik berupa barang maupun orang. Contohnya: anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya seperti suami, istri, atau anak, maupun bukan anggota rumah tangga tapi keluarga dari orang yang dibantunya seperti famili lain. Bukan Angkatan Kerja : penduduk yang usianya 15 tahun ke atas tetapi masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Berikut disajikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Pekerja di Provinsi NTT menurut jenis kelamin pada gambar di bawah ini.

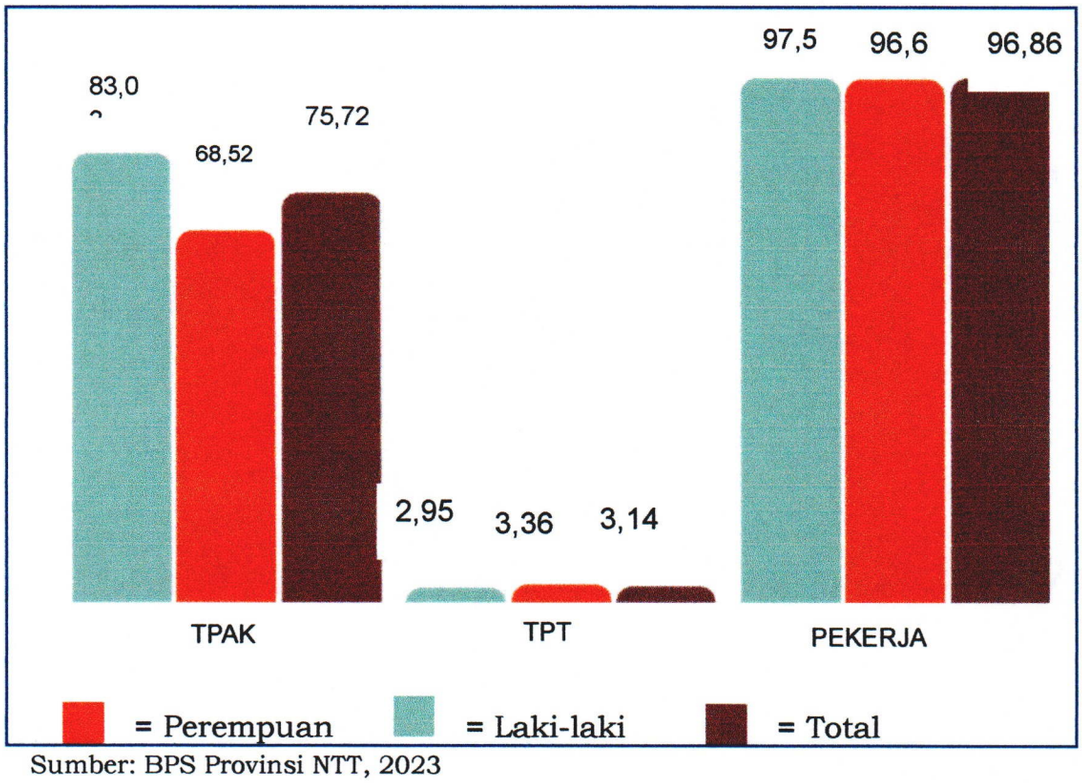

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Gambar 2.59 TPAK, TPT, dan Pekerja di Provinsi NTT Tahun 2023

Pada gambar di atas, terlihat bahwa proporsi pekerja laki-laki terhadap AK laki-laki lebih tinggi dibanding dengan pekerja perempuan terhadap AK perempuan, yakni 97,05 persen berbanding 96,64 persen. Proporsi AK laki-laki menganggur lebih tinggi dibandingkan AK perempuan yang menganggur.

d) Tenaga Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Dengan jumlah tenaga kerja yang cukup besar, arus migrasi yang selalu berkembang serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan, membuat permasalahan tenaga kerja perlu mendapat solusi terbaik. Pengangguran tidak terlepas dari dunia pendidikan yang tidak mampu

menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas sesuai tuntutan pasar kerja. Berikut disajikan tenaga kerja di NTT menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin pada gambar di bawah ini.

Pada gambar di bawah terlihat bahwa mayoritas pekerja di Provinsi NTT berpendidikan rendah (SD ke bawah) dengan besaran 44,56% untuk tenaga kerja laki-laki dan 48,37% untuk tenaga kerja permpuan. Tenaga kerja dengan pendidikan SMP untuk perempuan sebanyak 12,64% dan laki-laki 13,82%. Sedangkan untuk tamatan SMA/SMK untuk tenaga kerja laki-laki 28,73% dan tenaga kerja perempuan 22,46%, dan sisanya merupakan tenaga kerja denganpendidikan perguruan tinggi dimana untuk laki-laki 12,89% dan perempuan 16,53%. Pekerja berpendidikan rendah di daerah perdesaan jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.

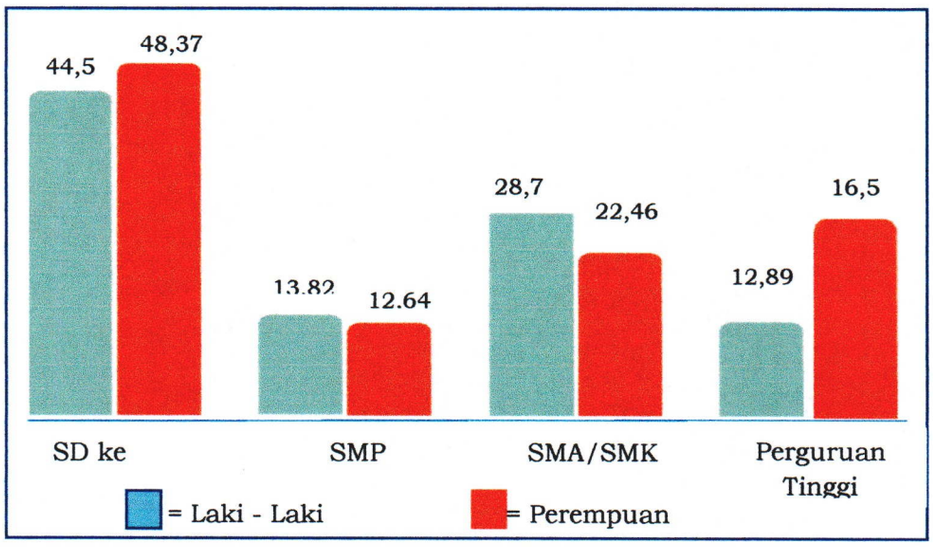

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Gambar 2.60 Tenaga kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin di Provinsi NTT Tahun 2023

e) Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Provinsi NTT

Berdasarkan data Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi NTT bahwa pada Tahun 2024, jumlah penempatan PMI ke luar negeri berjumlah 1.401 orang. Tahun 2024 yang bersumber dari 7.233 PMI yaitu Rp 19.704.045.136. Sesuai gambar dibawah terdapat jenis pekerjaan seperti Pekerja Rumah Tangga, Pengasuh Lansia, Pengasuh Bayi, Pembantu Rumah Tangga maka dapat disimpulkan bahwa jumlah mayoritas PMI adalah perempuan.

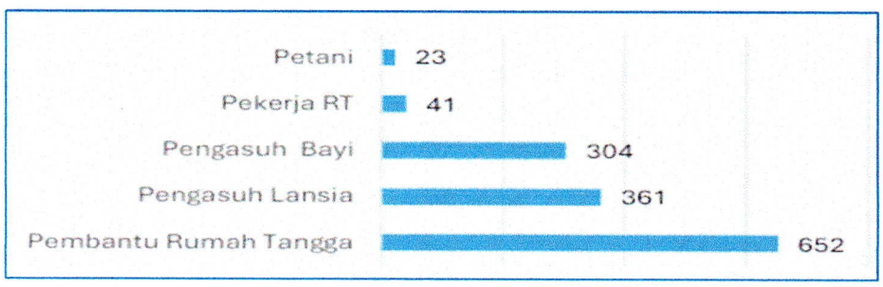

Sumber : Infografis Capaian Layanan Publik BP3MI-NTT, 2024

Gambar 2.61 Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan 5 (lima) Jenis Pekerjaan Terbanyak Tahun 2024

Kondisi ini juga disebabkan karena mayoritas perempuan yang bekerja berpendidikan rendah yaitu pada jenjang Sekolah Dasar.

Sepanjang Tahun 2024, PMI yang terdata kembali dari luar negeri sejumlah 1.095 orang terdiri dari laki- laki 437 (40%) orang dan perempuan 659 (60%) orang. Dari jumlah tersebut PMI yang kembali karena bermasalah sejumlah 399 (36,44%) orang. Mayoritas PMI yang kembali ke Provinsi NTT berasal dari Malaysia 998 orang (91,14%).

BP3MI mencatat sepanjang Tahun 2024 telah menangani 533 kasus PMI bermasalah. Berdasarkan prosedur bekerja diluar negeri, 97% adalah kasus PMI yang bekerja non prosedural, hanya 3% PMI yang bekerja secara prosedural. Angka ini mengindikasikan tingginya kasus perdagangan orang yang berasal dari Provinsi NTT dan perempuan merupakan kelompok mayoritas. Provinsi NTT tidak termasuk dalam Provinsi di Indonesia yang mengirimkan PMI ke luar negeri, namun merupakan Provinsi dengan permasalahan perdagangan orang paling tinggi di Indonesia. Kondisi "*undocumented*" pada sebagian besar PMI asal Provinsi NTT di luar negeri seperti di Malaysia menyebabkan kerentanan mereka tinggi karena bekerja di bawah tangan dan tak terlindungi baik secara hukum dan perlindungan sosial (misalnya tidak memiliki asuransi kerja dan kesehatan).

Provinsi NTT juga diperhadapkan dengan permasalahan PMI yang kembali dalam kondisi meninggal dunia. Tahun 2024, BP3MI NTT melaporkan terdapat 125 orang PMI yang kembali dalam kondisi meninggal dunia, dimana laki- laki- lebih banyak dibandingkan perempuan. Sebagian besar PMI laki- laki yang meninggal disebabkan kecelakaan kerja di perkebunan dan sakit. Namun banyak kasus kematian PMI yang tidak diketahui penyebabnya. Mayoritas PMI yang meninggal adalah PMI non prosedural (97,54%). Kondisi ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap PMI asal NTT di luar negeri.

Laporan Pendampingan kasus TPPO dan penjemputan jenazah PMI yang dilakukan oleh gereja dan Jaringan Masyarakat Sipil yang aktif melakukan pendampingan isu migran NTT menyebutkan bahwa penyebab tingginya PMI asal NTT yang berangkat ke luar negeri disebabkan oleh sejumlah kelemahan, antara lain: (1) Terbatasnya pelayanan terpadu satu pintu; (2) Pusat pelatihan kerja (balai latihan kerja) khusus bagi calon pekerja migran yang terbatas dan tata kelola penempatan yang lambat; (3) Terbatasnya wilayah cakupan kantor; (4) Calon PMI prosedural harus mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk mengikuti pelatihan karena keterbatasan yang dimaksud dalam poin (2) dan (3) di atas, dan (5) Ketidakmampuan instansi berwewenang dalam memberikan layanan yang bersaing dengan penyedia layanan ilegal yang umumnya telah memiliki jaringan pemalsuan dokumen kependudukan (KTP-DEWASA dan KK) dan juga didukung oleh banyaknya mitra/agen penempatan di negara tujuan.

f) Upah Buruh

Upah kerja merupakan salah satu faktor yang turut menentukan layak tidaknya hidup seseorang. Tabel 3 memperlihatkan upah buruh di NTT jauh lebih rendah dibandingkan nasional. Diskriminasi berbasis gender dalam pembayaran upah buruh masih terjadi di Indonesia umumnya dan NTT secara khusus. Perbedaan upah buruh prempuan dan

laki- laki terjadi pada semua jenjang pendidikan, dimana buruh laki- laki upahnya lebih tinggi dibandingkan buruh perempuan. Kondisi ini menggambarkan bahwa, perempuan merupakan kelompok yang rentan terhadap diskriminasi upah. Bila membandingkan upah buruh perempuan dan laki- laki di Provinsi NTT dengan nasional, NTT lebih rendah dan termasuk dalam sepuluh Provinsi dengan upah terendah di Indonesia.

Tabel 2.19 Upah Buruh Perempuan dan Laki-Laki berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021

Uraian		Upah Buruh Laki-laki	Upah Buruh Perempuan
Maksimal Tamat SD	NTT	1.220. 677	929.965
	Indonesia	1.876.951	1.143.808
Tamat SLTP	NTT	768.335	768.335
	Indonesia	2.164.000	1.563.5355
Tamat SLTA	NTT	2.154.664	1.454.957
	Indonesia	2.901.579	2.093.265
Tamat PT	NTT	3.018.113	2.249.127
	Indonesia	4.739.246	3.313.442

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2021, dalam Profil Perempuan Indonesia, Kementerian PPRI, Tahun 2022

Perubahan paradigma pembangunan menekankan pentingnya pembangunan masyarakat yang inklusif, dimana penyandang disabilitas dilibatkan penuh dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk dunia kerja. Data memperlihatkan bahwa penduduk disabilitas yang tidak bekerja masih tinggi yaitu 53% dibandingkan dengan yang bekerja 47%. Disabilitas yang bekerja di Provinsi NTT tersebar pada beragam disabilitas dengan didominasi oleh mereka yang kesulitan penglihatan, gangguan berjalan dan depresi. Kondisi disabilitas yang tidak bekerja menempatkan mereka pada kelompok rentan karena kondisi disabilitas dan rentan karena tidak bekerja.

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Menelaah dinamika pembangunan manusia berbasis gender dan perlindungan anak, penting untuk menyoroti bahwa kesetaraan gender bukan sekadar isu keadilan, melainkan fondasi bagi pertumbuhan sosial-ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan tren yang relatif positif selama periode 2010–2023, dengan peningkatan dari 90,06 poin menjadi 93,38 poin. Meskipun terjadi stagnansi dalam rentang 2015–2022, nilai IPG NTT tetap berada di atas rata-rata nasional, mencerminkan capaian pembangunan gender yang relatif progresif. Sejalan dengan itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) NTT juga memperlihatkan perbaikan signifikan dari 57,98 poin pada 2010 menjadi 76,9 poin pada 2023, mendekati capaian nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di NTT semakin mendapatkan akses dan peran dalam ranah ekonomi, politik, serta pengambilan keputusan. Penurunan konsisten pada Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sejak 2018 pun menandakan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan manusia semakin mengecil, memberikan sinyal positif terhadap efektivitas kebijakan afirmatif dan pemberdayaan yang telah diimplementasikan.

Namun, capaian pembangunan manusia yang berperspektif gender perlu dikaji secara holistik dengan melihat juga pada dimensi perlindungan anak, yang merupakan refleksi dari keberlanjutan pembangunan generasi masa depan. Data menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, nilai Indeks Perlindungan Anak (IPA) di NTT mengalami fluktuasi dengan tren menurun dari 51,15 pada 2019 menjadi 48,12 pada 2021, meskipun kembali meningkat menjadi 50,87 pada 2022. Di sisi lain, Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) menunjukkan kemajuan secara konsisten, naik dari 49,26 pada 2019 menjadi 52,03 pada 2022, mengindikasikan perbaikan dalam pemenuhan hak dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan. Sebaliknya, Indeks Pemenuhan Hak Khusus Anak (IPKA) mengalami penurunan tajam dari 57,84 pada 2019 menjadi 48,23 pada 2022, mencerminkan bahwa kelompok anak yang paling rentan—seperti anak dengan disabilitas atau pekerja anak—masih belum mendapatkan perlindungan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam aspek kesetaraan gender secara umum, kebijakan perlindungan anak di NTT masih menghadapi tantangan serius yang membutuhkan perhatian lintas sektor dan pendekatan berbasis inklusi sosial.

Melihat aspek **Kepemimpinan Perempuan** Hasil Pemilu Legislatif 2024 memperlihatkan posisi perempuan di legislatif masih sangat rendah. Dari 22 kabupaten/kota di NTT, persentasi perempuan sekitar 8%. Masih terdapat kabupaten yang tidak ada anggota legislatif perempuan, yaitu kabupaten Ngada, Flores Timur, Lembata, Rote Ndao dan Alor. Persentasi tertinggi 20% di Kabupaten Sabu Raijua dan Sumba Tengah. Pada tingkat provinsi jumlah perempuan 14 orang (21,53%) dari 65 orang, jauh lebih baik dibandingkan kabupaten kota. Kondisi ini tidak berbeda dengan Pemilu Legislatif periode sebelumnya. Gambar dibawah memperlihatkan pejabat struktural Provinsi NTT berdasarkan jenis kelamin periode 2021-2024. Secara keselurahan, memperlihatkan jumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural pada Eselon II, III dan IV lebih sedikit jumlahnya dibandingkan laki - laki. Jumlah perempuan dalam jabatan struktural menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya.

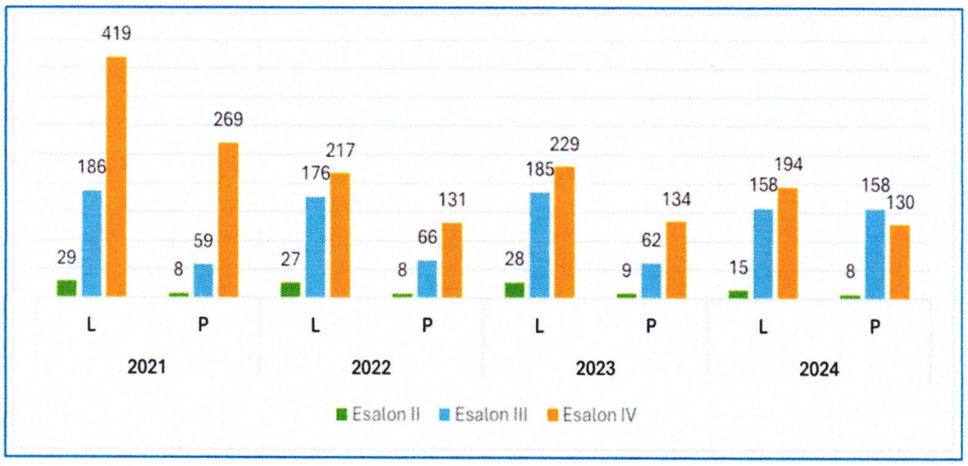

Sumber: Data Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, 2025

Gambar 2.62 Persentase Pejabat Struktur Provinsi NTT berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021-2024

3) Urusan Pertanahan

Di bidang pertanahan, total bidang tanah yang telah terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ialah sebanyak 1.568.126 bidang dengan total luasan 5.586,99 juta m^2. Dari total tersebut, jumlah bidang terbanyak tersebar di Kabupaten Kupang yaitu 131.074 bidang. Sedangkan luasan yang terbanyak ialah Kabupaten Sumba Timur sebesar 1.064,79 juta m^2. Sementara itu, estimasi total bidang tanah di Provinsi NTT yang belum terdaftar sebanyak 2.637.479 bidang, dengan jumlah terbesar ialah di Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 490.084 bidang.

Tabel 2.20 Rekapitulasi Tanah Terdaftar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT sampai Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Bidang Tanah Terdaftar		Estimasi Bidang Tanah yang Belum Terdaftar
	Bidang	Luas (m2)	
Sumba Barat	61.377	267.794.866	67.620
Sumba Timur	115.106	1.064.787.157	90.256
Kupang	131.074	458.083.316	138.116
Timor Tengah Selatan	95.714	316.531.184	359.531
Timor Tengah Utara	113.219	336.863.081	36.573
Belu	87.178	288.991.825	127.415
Alor	73.262	150.856.305	171.955
Lembata	61.055	151.575.220	99.915
Flores Timur	64.643	195.290.878	68.918
Sikka	93.713	312.847.432	48.547
Ende	44.949	123.186.321	61.273
Ngada	66.267	204.874.740	23.262
Manggarai	73.598	109.323.483	120.610
Rote Ndao	65.478	184.358.128	69.581
Manggarai Barat	60.401	216.549.605	490.084
Sumba Tengah	39.268	267.928.984	46.830
Sumba Barat Daya	60.563	381.434.548	120.706
Nagekeo	35.345	119.218.842	167.999
Manggarai Timur	48.684	104.379.967	97.061
Sabu Raijua	21.462	55.426.075	52.095
Malaka	54.201	186.802.830	67.132
Kota Kupang	101.569	89.892.482	112.000
Jumlah	**1.568.126**	**5.586.997.269**	**2.637.479**

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2024

4) Urusan Lingkungan Hidup

Dari sisi pelestarian lingkungan hidup, progres capaian suaka alam dan pelestarian alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan selama periode 2017-2020. Di Tahun 2017, luas lahan suaka alam dan pelestarian alam sebesar 508,09 ribu hektar, meningkat menjadi 512,78 ribu hektar di Tahun 2020.

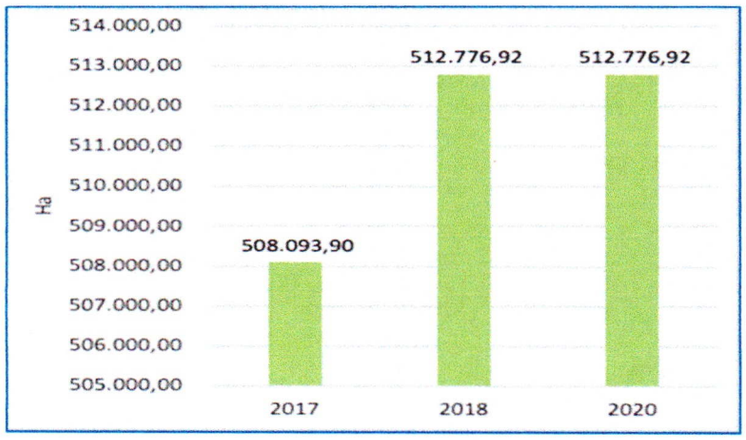

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2024

Gambar 2.63 Luasan Lahan Suaka Alam dan Pelestarian Alam

Lebih lanjut, total rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan selama 5 tahun terakhir mencapai 10.183 hektar. Total luasan tersebut terbagi ke dalam 22 kabupaten/kota dengan jumlah luasan pada Tahun 2019 sebanyak 6.515 hektar, Tahun 2021 sebanyak 1.816 hektar, Tahun 2022 sebanyak 1.445 hektar dan Tahun 2023 sebanyak 407 hektar.

Tabel 2.21 Total Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif di Provinsi NTT Tahun 2019-2023

	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sumba Barat	5	-	-	-	7
2	Sumba Timur	530	-	426	400	-
3	Kupang	555	-	-	200	-
4	Timor Tengah Selatan	700	-	75	600	-
5	Timor Tengah Utara	155	-	50	95	300
6	Belu	425	-	-	-	-
7	Alor	50	-	437,50	-	-
8	Lembata	250	-	10	-	-
9	Flores Timur	630	-	75	100	-
10	Sikka	120	-	75	-	-
11	Ende	5	-	-	-	-
12	Ngada	400	-	-	-	-
13	Manggarai	285	-	-	-	-
14	Rote Ndao	415	-	-	-	-
15	Manggarai Barat	335	-	75	-	-
16	Sumba Tengah	415	-	80	-	100
17	Sumba Barat Daya	370	-	75	-	-
18	Nagekeo	140	-		-	-
19	Manggarai Timur	455	-	75	-	-
20	Sabu Raijua	5	-	75	-	-
21	Malaka	255	-	75	50	-
22	Kota Kupang	15	-	212,50	-	-
Nusa Tenggara Timur		**6.515**	**-**	**1.816**	**1.445**	**407**

Sumber: DLHK Provinsi NTT, 2024

5) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kepemilikan NIK di Provinsi NTT mencapai 96, 52 persen di Tahun 2022. Kondisi ini meningkat dari Tahun 2018 yang masih mencakup sebanyak 87,63 persen penduduk. Dari 22 kabupaten/kota,

cakupan kepemilikan NIK yang tertinggi ialah Kabupaten Manggarai Barat sebesar 99,58 persen di Tahun 2022 dan terendah ialah Kabupaten Kupang sebesar 89,45 persen di tahun yang sama.

Tabel 2.22 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke atas yang mempunyai NIK di Provinsi NTT Tahun 2018-2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Sumba Barat	90,31	97,6	98,01	98,46	98,98
Sumba Timur	84,6	98,34	97,87	98,85	97,06
Kupang	83,59	85,52	83,73	79,94	89,45
Timor Tengah Selatan	81,4	86,07	81,97	90,94	94,76
Timor Tengah Utara	89,47	91,22	92,91	93,69	97,02
Belu	88,65	91,97	94,3	93,92	94,91
Alor	89,27	93,52	92,46	94,1	97,3
Lembata	89,85	94,35	95,6	96,22	98,45
Flores Timur	88,93	94,43	96,79	95,34	97,7
Sikka	92,21	94,51	98,34	97,64	99,29
Ende	88,17	90,89	89,64	95,13	96,71
Ngada	94,36	98,77	94,78	94,17	92,98
Manggarai	82,57	88,9	89,7	94,69	97,32
Rote Ndao	92,51	98,07	92,3	97,03	97,37
Manggarai Barat	97,73	99,4	98,56	99,13	99,58
Sumba Tengah	90,31	96,09	98,21	98,87	99,11
Sumba Barat Daya	77,43	90,92	94,94	95,13	97,17
Nagekeo	91,23	93,38	93,54	96,6	97,88
Manggarai Timur	86,96	89,12	87,2	92,09	95,15
Sabu Raijua	90,79	92,53	95,37	95,74	98,94
Malaka	86,06	96,63	95,96	94,25	96,57
Kota Kupang	90,99	97	97,34	97,69	97,99
Nusa Tenggara Timur	**87,63**	**92,75**	**92,63**	**94,31**	**96,52**

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2024

6) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga sub indeks yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. Perangkat indikator yang dalam IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja Pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam kurun waktu antara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, secara umum komposisi desa di Provinsi NTT yang terbanyak masih didominasi oleh kategori desa berkembang dan tertinggal. Sedangkan desa dengan kategori maju dan mandiri masih sangat sedikit. Rincian kategori IDM Provinsi NTT Tahun 2021-2023 selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

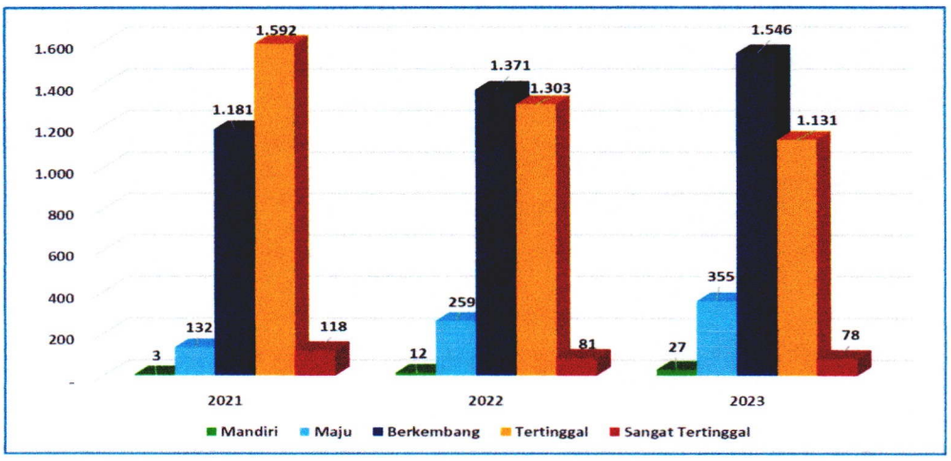

Sumber: KemenDesPDT dan Transmigrasi

Gambar 2.64 Indeks Desa Membangun Provinsi NTT Tahun 2021-2023

7) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pergerakan TFR Provinsi NTT secara umum mengalami fluktuatif ke arah penurunan selama periode 2000-2020. Meskipun demikian, nilai yang dicapai masih dalam kategori tinggi di atas rekomendasi 2,1, yaitu sebesar 2,79 di Tahun 2020. Capaian tersebut menjelaskan bahwa secara rata-rata, angka kelahiran oleh wanita usia subur ialah sebanyak 3 (tiga) anak.

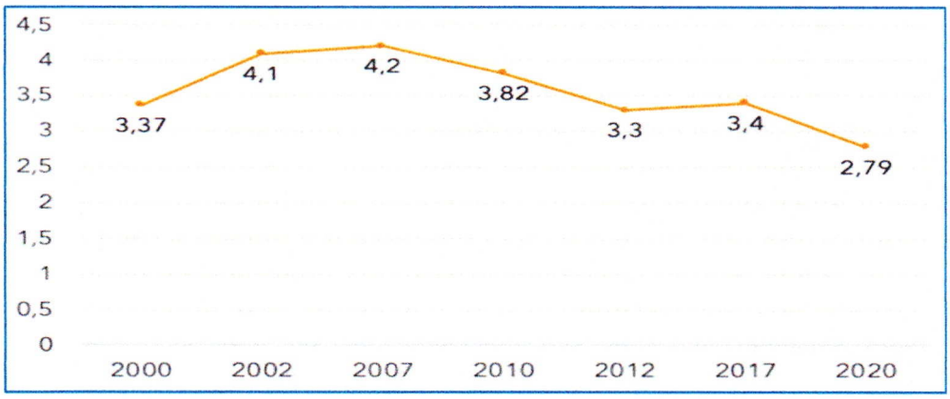

Sumber: BPS & SDKI, 2024

Gambar 2.65 *Total Fertility Rate* (TFR) Provinsi NTT Tahun 2000-2020

8) Urusan Perhubungan

Di bidang transportasi, jumlah kunjungan kapal laut di Tahun 2023 sebanyak 62.248 kunjungan. Kondisi ini meningkat drastis dari Tahun 2020 sebanyak 17.846 kunjungan, Tahun 2021 sebanyak 47.063 kunjungan, dan tahun 2022 sebanyak 48.861 kunjungan. Kontribusi kunjungan terbanyak ialah dari dalam negeri, yaitu sebanyak 62.216 kunjungan.

Sementara itu, kunjungan pesawat di Provinsi NTT mencapai 20.275 di tahun 2023. Kondisi ini meningkat dari Tahun 2020 sebanyak 19.612 kunjungan.

Tabel 2.23 Jumlah Kunjungan Kapal Laut dan Pesawat di Provinsi NTT Tahun 2020-2023

Kategori	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kunjungan Kapal Laut Menurut Jenis Pelayaran	17.846	47.063	48.861	62.248
Luar Negeri	269	23	30	32
Dalam Negeri	17.577	47.040	48.831	62.216
Jumlah Pesawat Datang Menurut Bulan	19.612	18.591	19.020	20.275

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2024

Lebih lanjut, jumlah kunjungan penumpang kapal laut di Tahun 2023 mencapai 4.201.024 penumpang dengan kontribusi terbanyak ialah dari dalam negeri sebanyak 4.197.691 penumpang. Selain itu, jumlah penumpang pesawat yang datang di Provinsi NTT mencapai 1.424.401 penumpang dan yang berangkat sebanyak 1.371.347 penumpang pada Tahun 2023.

Tabel 2.24 Jumlah Penumpang Kapal Laut dan Pesawat di Provinsi NTT Tahun 2020-2023

Kategori	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penumpang Kapal Laut Menurut Jenis Pelayaran	783.142	2.002.097	3.385.713	4.201.024
Luar Negeri	3.509	276	386	3.333
Dalam Negeri	779.633	2.001.821	3.385.327	4.197.691
Jumlah Penumpang Pesawat	1.971.899	1.890.706	2.499.761	2.795.748
Datang	1.022.060	967.675	1.273.476	1.424.401
Berangkat	949.839	923.031	1.226.285	1.371.347

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2024

Terminal sebagai salah satu simpul transportasi memegang peran penting dalam perpindahan orang maupun barang. Terminal tipe B yang dikelola Pemerintah Provinsi NTT pada Tahun 2024 sebanyak 9 (sembilan) Terminal. Di Provinsi NTT juga terdapat 2 (dua) Terminal Tipe A dan 3 (tiga) Terminal Barang Internasional yang dikelola oleh BPTD NTT.

Tabel 2.25 Data Prasarana Terminal di Provinsi NTT

No	Prasarana	Pengelola	Jumlah
1	Terminal Tipe B	Pemprov NTT	9 Terminal
2	Terminal Tipe A	BPTD NTT	2 Terminal
3	Terminal Barang Internasional	BPTD NTT	3 Terminal

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTT, 2024

Provinsi NTT sebagai provinsi kepulauan sangat bergantung pada transportasi penyeberangan guna mendukung perpindahan orang dan barang antar pulau. Terdapat 23 pelabuhan penyeberangan di Provinsi NTT yaitu 4 (empat) pelabuhan dikelola PT. ASDP, 5 (lima) Pelabuhan dikelola Kemenhub, 2 (dua) Pelabuhan dikelola Pemprov NTT dan 12 (dua belas) Pelabuhan dikelola Pemerintah Kabupaten.

Tabel 2.26 Data Prasarana Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi NTT

No	Prasarana	Pengelola	Jumlah
1	Pelabuhan Penyeberangan	PT. ASDP	4 Pelabuhan
2	Pelabuhan Penyeberangan	Kemenhub	5 Pelabuhan
3	Pelabuhan Penyeberangan	Pemprov NTT	2 Pelabuhan
4	Pelabuhan Penyeberangan	Pemerintah Kabupaten	12 Pelabuhan

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTT, 2024

Berdasarkan data kecelakaan Tahun 2024 yang dikeluarkan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), sebanyak 414 orang di Provinsi NTT tewas karena kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sepanjang Tahun 2024 dari total 1593 kecelakaan lalu lintas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Provinsi NTT, antara lain melampaui batas kecepatan, lalai, tak mematuhi rambu lalu lintas, hingga tak menjaga jarak aman, lakalantas yang terjadi diakibatkan oleh faktor human error, yaitu mengendarai dalam kondisi mabuk minuman keras (miras). Kemudian minimnya pengetahuan tentang berlalu lintas, termasuk kondisi jalan dan fasilitas keselamatan yang kurang baik dan kurang memadai.

Tabel 2.27 Data Kecelakaan Lalu Lintas di Provinsi NTT Tahun 2024

No	Polres	Jumlah Celaka	Mati	Luka Berat	Luka Ringan	Total Korban
1	Timor Tengah Selatan	55	29	11	49	89
2	Timor Tengah Utara	44	25	27	18	70
3	Belu	80	27	53	74	154
4	Sumba Timur	94	39	32	137	208
5	Sumba Barat	32	16	15	26	57
6	Ende	52	11	37	52	100
7	Sikka	87	34	59	92	185
8	Flores Timur	36	18	23	22	63
9	Ngada	57	14	17	61	92
10	Manggarai	35	13	21	36	70
11	Alor	104	16	60	110	186
12	Lembata	45	11	15	47	73
13	Manggarai Barat	47	11	26	21	58
14	Rote Ndao	50	11	36	34	81
15	Kota Kupang Kota	314	37	39	490	566
16	Kupang	203	44	72	260	376
17	Malaka	48	9	11	59	79
18	Sabu Raijua	53	9	28	72	109
19	Sumba Barat Daya	59	27	8	69	104
20	Manggarai Timur	55	8	10	84	102
21	Nagekeo	43	5	20	54	79
Total		**1593**	**414**	**620**	**1867**	**2901**

Sumber: Kepolisian Daerah NTT, 2024

9) Urusan Komunikasi dan Informatika

Sistem Pemerintahan Berbasis Eklekronik (SPBE) merupakan suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan. Nilai Indeks SPBE Provinsi NTT pada Tahun 2020 sebesar 3,26 yang turun menjadi 2,28 pada Tahun 2021 dan naik menjadi 3,83 pada Tahun 2023 dengan predikat Sangat Baik.

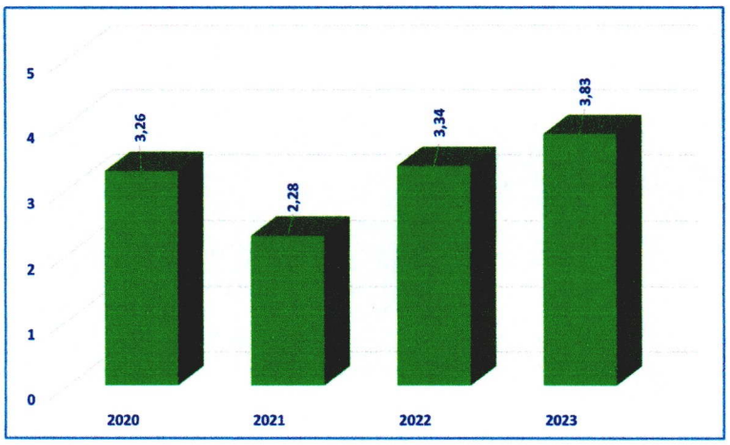

Sumber: KemenpanRB 2024

Gambar 2.66 Indeks SPBE Provinsi NTT Tahun 2020-2023

10) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dimana perekonomiannya banyak ditopang oleh koperasi dan UMKM. Sektor dimana sebagian besar pelakunya menjalankan usaha secara informal tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB Provinsi NTT. Dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan awal Juni 2023, penyaluran pembiayaan UMi di Provinsi NTT mencapai Rp 408,11 miliar untuk 17.986 Debitur dengan Penyalur UMi terbesar di NTT adalah PT. PNM dengan 5.503 debitur dan nominal sebesar Rp300,65 miliar. Penyaluran UMi di Provinsi NTT menunjukkan pertumbuhan yang semakin tahun semakin meningkat. Berikut disajikan jumlah dan sebaran koperasi aktif di Provinsi NTT pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.28 Jumlah dan Sebaran Koperasi Aktif di Provinsi NTT Tahun 2023

No	Kabupaten / Kota	Koperasi (Unit)		
		Aktif	Tdk Aktif	Jumlah
1	Kota Kupang	376	257	633
2	Kabupaten Kupang	371	24	395
3	T T S	152	14	166
4	T T U	68	36	104
5	Belu	71	108	179
6	Malaka	78	11	89
7	Alor	164	23	187
8	Lembata	95	21	116
9	Flores Timur	176	30	206
10	Sikka	133	57	190
11	Ende	100	87	187
12	Ngada	115	7	122
13	Nagekeo	104	11	115
14	Manggarai	169	4	173
15	Manggarai Timur	91	27	118
16	Manggarai Barat	140	7	147
17	Sumba Timur	122	27	149
18	Sumba Tengah	41	12	53
19	Sumba Barat	82	53	135

No	Kabupaten / Kota	Koperasi (Unit)		
		Aktif	Tdk Aktif	Jumlah
20	Sumba Barat Daya	65	87	152
21	Rote Ndao	184	19	203
22	Sabu Raijua	38	11	49
23	Provinsi	404	19	423
JUMLAH		**3.339**	**952**	**4.291**

Sumber: Diskop UMKM Provinsi NTT, 2023

Jika dibandingkan dengan kondisi pada Tahun 2021 terjadi peningkatan pada jumlah koperasi dimana di Tahun 2021 jumlah koperasi di Provinsi NTT berjumlah 4.282 unit meningkat menjadi 4.291 unit Tahun 2023. Penambahan jumlah koperasi ini juga sejalan dengan jumlah koperasi aktif yang meningkat pula, Tahun 2021 berjumlah 3.330 unit koperasi aktif dan meningkat menjadi 3.339 unit. Trend peningkatan pada jumlah koperasi dan koperasi aktif ini tidak sejalan dengan jumlah koperasi yang tidak aktif dengan jumlah yang sama dari Tahun 2021 maupun pada Tahun 2023 yakni sebanyak 952 unit koperasi tidak aktif.

Tabel 2.29 Jumlah Modal Sendiri dan Modal Luar Koperasi di Provinsi NTT, Tahun 2023

No	Kabupaten / Kota	Modal Sendiri (Rp)	Modal Luar (Rp)
1	Kota Kupang	66.962.288.248	46.042.197.463
2	Kabupaten Kupang	29.822.926.464	20.350.065.436
3	T T S	55.409.768.909	27.919.240.295
4	T T U	16.024.887.056	11.318.205.620
5	Belu	23.635.766.883	16.368.840.386
6	Malaka	10.352.710.100	5.000.876.523
7	Alor	12.790.704.192	9.502.986.000
8	Lembata	109.687.708.740	129.932.364.062
9	Flores Timur	180.526.390.963	377.070.145.923
10	Sikka	1.025.905.147.846	1.328.441.830.412
11	Ende	54.727.324.494	108.255.907.246
12	Ngada	318.708.703.507	1.078.007.055.640
13	Nagekeo	279.090.571.944	202.098.878.647
14	Manggarai	45.244.698.475	49.876.757.456
15	Manggarai Timur	74.198.461.273	40.587.459.940
16	Manggarai Barat	96.902.697.890	41.960.291.353
17	Sumba Timur	43.589.244.895	29.458.497.737
18	Sumba Tengah	2.083.701.533	10.796.202.059
19	Sumba Barat	12.685.643.244	9.047.918.809
20	Sumba Barat Daya	66.276.918.953	34.123.799.562
21	Rote Ndao	25.312.498.962	4.333.401.240
22	Sabu Raijua	34.498.709.246	18.083.783.433
23	Provinsi	2.860.995.165.600	3.455.887.567.676
JUMLAH		**5.445.432.639.417**	**7.054.464.272.918**

Sumber: Diskop UMKM Provinsi NTT, 2023.

Sejak tahun 2021 sampai 2023, tidak terdapat kenaikan pada jumlah modal sendiri maupun modal luar pada semua koperasi yang ada di Provinsi NTT, tabel di atas memperlihatkan pada tahun 2023 jumlah modal sendiri koperasi sebesar Rp. 5.445.432.639,417 dan modal luar sebesar Rp. 7.054.464.272,918 yang mana kondisi ini sama seperti pada Tahun 2021.

11) Urusan Penanaman Modal

Nilai investasi di Provinsi NTT hingga tri wulan 2023 ketiga mencapai Rp. 4,3 trilun lebih dan ekonomi regional Provinsi NTT mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,08%. Realisasi investasi ini telah 81,46% dari target yang ditetapkan nasional yakni Rp. 5,3 triliun. Dibandingkan dengan realisasi investasi nasional yang mencapai Rp. 1.053 triliun, sumbangsih investasi dari provinsi berbasis kepulauan ini hanya sebesar 0,42 persen. Provinsi NTT memiliki banyak sumber daya alam pariwisata yang dapat menjadi daya tarik bagi investor, saat ini Kabupaten Labuan Bajo masih menempati urutan teratas nilai investasi di Provinsi NTT. Berikut disajikan realisai proyek dan investasi PMDN menurut kabupaten/kota pada tabel di bawah. Pada tabel di bawah terlihat bahwa total proyek investasi di Provinsi NTT Tahun 2022 berjumlah 1.747 dengan nilai investasi 3,39 triliun rupiah, proyek investasi terbanyak ada di Kabupaten Manggarai Barat yakni 173 proyek dengan investasi sebesar 3,11 triliun rupiah. Untuk penanaman modal asing terbanyak ada di Kabupaten Manggarai Barat dengan 310 proyek dengan jumlah investasi 105 miliar rupiah.

Tabel 2.30 Realisasi Proyek dan Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2022-2023

Wilayah	Realisasi Proyek dan Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)					
	Tenaga Kerja		Investasi (US $)		Investasi (Rp)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Sumba Barat	174	2328885	2503000000	34467500000	9	37
Sumba Timur	65198	38939209	935592000000	576300300000	48	50
Kupang	71042	30185514	1019453000000	446745600000	54	74
Timor Tengah Selatan	2041	2808088	29295000000	41559700000	146	125
Timor Tengah Utara	5273	4790554	15671000000	70900200000	53	61
Belu	1127	3124054	16175000000	46236000000	20	346
Alor	49	544101	700000000	8052700000	5	22
Lembata	2752	709959	39491000000	10507400000	67	91
Flores Timur	688	252007	9863000000	3729700000	140	17
Sikka	1627	1307642	23341000000	19353100000	125	85
Ende	311	696304	4456000000	10305300000	16	31
Ngada	2250	1323122	32283000000	19582200000	65	88
Manggarai	6199	5726061	88954000000	84745700000	101	193
Rote Ndao	1872	2031115	26872000000	30060500000	41	22
Manggarai Barat	21680	66236291	311103000000	980297100000	173	408
Sumba Tengah	1407	-	20185000000	-	36	-
Sumba Barat Daya	5807	768831	83334000000	11378700000	79	34
Nagekeo	4175	-	59907000000	-	24	-
Manggarai Timur	1039	1076014	14905000000	15925000000	30	18
Sabu Raijua	76	682784	1097000000	10105200000	6	10

Wilayah	Realisasi Proyek dan Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)					
	Tenaga Kerja		Investasi (US $)		Investasi (Rp)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Malaka	578	1875054	8297000000	27750800000	6	17
Kota Kupang	45705	64808061	655870400000	959159300000	503	621
Nusa Tenggara Timur	**241070**	**230213649**	**3399347400000**	**3407162000000**	**1747**	**2350**

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2024

12) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pemuda di Indonesia. IPP terdiri dari komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi. Perkembangan IPP Provinsi NTT sejak Tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami pertumbuhan positif dengan nilai IPP pada Tahun 2019 sebesar 51,67 yang terus meningkat sampai dengan Tahun 2023 senilai 55,33.



Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga

Gambar 2.67 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi NTT Tahun 2019-2023

13) Urusan Statistik

Perkembangan penyelenggaraan statistik sectoral yang dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah tingkat nasional maupun tingkat provinsi dan kabupaten/kota ditandai dengan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPPS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS). EPPS sendiri mengadopsi konsep *capability maturity model* (CMM) yang mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah.

Pada Tahun 2023 Provinsi NTT memiliki nilai IPS sebesar 1,75 atau masuk dalam kategori **"Kurang".** Sedangkan kabupaten/kota dengan kategori **"Cukup"** meliputi Kabupaten TTS, Sikka, Manggarai, Sumba Tengah, Nagekeo dan Manggarai Timur. Rincian nilai dan kategori IPS Provinsi NTT dan 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2023 selengkapnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31 Hasil Evaluasi Penyelengaraan Statistik Sektoral Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Nilai	Kategori
1	Sumba Barat	1,57	Kurang
2	Sumba Timur	1,16	Kurang
3	Kabupaten Kupang	1,15	Kurang
4	TTS	2,21	Cukup
5	TTU	1,41	Kurang
6	Belu	1,26	Kurang
7	Alor	1,34	Kurang
8	Lembata	1,79	Kurang
9	Flores Timur	1,18	Kurang
10	Sikka	2,17	Cukup
11	Ende	1,67	Kurang
12	Ngada	1,39	Kurang
13	Manggarai	2,20	Cukup
14	Rote Ndao	1,18	Kurang
15	Manggarai Barat	1,61	Kurang
16	Sumba Tengah	2,12	Cukup
17	Sumba Barat Daya	1,12	Kurang
18	Nagekeo	1,91	Cukup
19	Manggarai Timur	2,06	Cukup
20	Sabu Raijua	1,09	Kurang
21	Malaka	1,03	Kurang
22	Kota Kupang	1,00	Kurang
Nusa Tenggara Timur		**1,75**	**Kurang**

Sumber: Keputusan Kepala BPS Nomor 741 Tahun 2023 tentang Hasil EPPS Tahun 2023

C. URUSAN PILIHAN

1) Urusan Kelautan dan Perikanan

Daerah NTT merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya kelautan cukup banyak dan bervariasi. Namun selama ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi ini Nampak dari kontribusi subsektor perikanan terhadap perekonomian masyarakat dan juga penyerapan tenaga kerjanya. Berikut disajikan penyebaran dan nilai produksi perikanan menurut pulau/daratan dan jenis produksi di Provinsi NTT Tahun 2021 pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32 Penyebaran dan Nilai Produksi Perikanan menurut Pulau/Daratan di Provinsi NTT Tahun 2021

Pulau/Daratan	Perikanan Tangkap		Perikanan Budidaya	
	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)
Sumba	13.637	374.751.670	35.340	112.307.500
Timor	36.284	1.079.688.612	1.285.186	3.495.830.052
Alor	16.883	271.966.553	2.006	5.661.893
Flores	123.790	2.662.489.487	73.747	224.353.154
Jumlah	**190.594**	**4.388.896.322**	**1.397.279**	**3.838.152.599**

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Pada Tahun 2020 produksi perikanan laut tercatat sebesar 182.349 ton naik menjadi 190.594 ton pada Tahun 2021 atau mengalami peningkatan produksi sebesar 4,52 persen. Berikut disajikan produksi perikanan tangkap di laut menurut pulau/daratan Tahun 2020-2021 pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.33 Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Pulau/Daratan dan Jenis Produksi di Provinsi NTT Tahun 2020-2021

Pulau/Daratan	Cakalang (Ton)	Tongkol (Ton)	Tuna (Ton)	Udang (Ton)	Lainnya (Ton)
Sumba	356	1.672	22	1	11.586
Timor	1.533	1.338	1.412	0	32.001
Alor	54	4.284	562	0	11.983
Flores	19.373	17.056	4.908	49	82.404
Jumlah	**21.316**	**24.350**	**6.904**	**50**	**137.974**

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Sementara untuk perikanan budidaya, jenis komoditas yang paling banyak dibudidayakan adalah rumput laut, dengan bobot produksi hingga 1.392.539 ton. Memang rumput laut sangat cocok untuk wilayah perairan NTT yang terdiri atas pulau-pulau dengan garis pantai yang cukup panjang. Berikut disajikan produksi perikanan budidaya menurut pulau/daratan dan jenis komoditas Tahun 2021 di Provinsi NTT pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.34 Produksi Budidaya Menurut Pulau/Daratan dan Jenis Komoditas di Provinsi NTT Tahun 2020-2021

Jenis Ikan (Ton)	Sumba	Timor	Alor	Flores	Jumlah (Ton)
Gurame	0	0	0	0	**0**
Patin	163.450	160.385	0	115.880	**439.715**
Lele	7	377	11	139	**534**
Nila	223	514	0	624	**1.361**
Ikan Mas	139	212	0	51	**402**
Kakap	0	0	0	0	**0**
Bandeng	3	2.032	1	207	**2.243**
Rumput Laut	35.963	1.281.956	1.994	72.626	**1.392.539**
Kerapu	0	0	0	0	**0**
Udang	0	38	0	32	**70**
Ikan lainnya	2	53	0	62	**117**

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

2) Urusan Pariwisata

Pengembangan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari jasa penyediaan akomodasi yang memadai. Pada Tahun 2022, rata-rata lama menginap tamu asing menurun dibanding tahun sebelumnya sementara untuk tamu domestik meningkat. Di sisi lain Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Tahun 2022 meningkat. Persentase TPK bintang mengalami kondisi paling rendah pada Februari 2022, yaitu 28,46%, sedangkan pada Juli 2022 mengalami puncak tertingginya yaitu 48,44%.

Sekitar 43 persen rumah makan/resturant yang berada di Provinsi NTT terdapat di Kota Kupang. Berikut disajikan persebaran jumlah rumah makan/restauran menurut kabupaten/kota Tahun 2022 pada gambar di bawah ini.

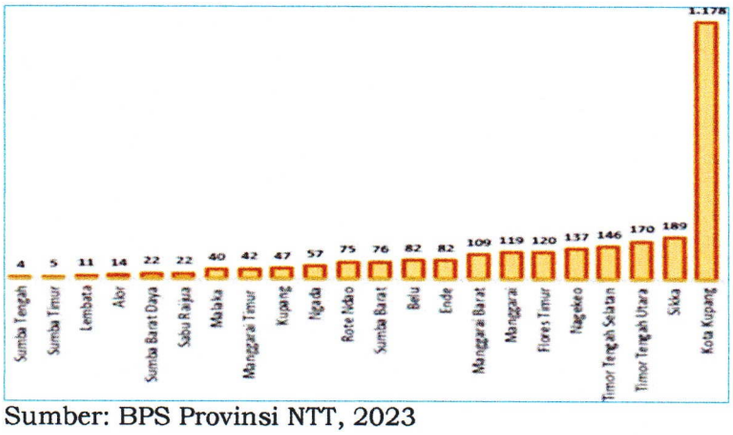

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Gambar 2.68 Persebaran Jumlah Rumah Makan/ Restauran Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

Tabel 2.35 Rata-rata Lama Menginap dan TPK di Provinsi NTT Tahun 2020-2022

Uraian	2020	2021	2022
Rata-rata Lama Menginap (hari)			
Tamu Asing	3,33	2,42	2,22
Tamu Domestik	1,59	1,65	1,69
TPK Hotel Bintang (Persen)	29,64	33,97	39,83

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

TPK hotel bintang pada Tahun 2020 menurun sangat tajam dibandingkan tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19, namun kondisi tersebut berangsur-angsur membaik pada Tahun 2021-2022. Berikut disajikan TPK hotel berbintang Januari-Desember Tahun 2022, pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Gambar 2.69 TPK Hotel Berbintang di Provinsi NTT Januari-Desember Tahun 2022

3) Urusan Pertanian

Sub Urusan Pertanian

a) Tanaman Pangan (Padi)

Pada akhir Tahun 2022 jumlah penduduk NTT sekitar 5.466.285 jiwa, apabila kemampuan produksi beras domestik tidak dapat mengikuti peningkatan kebutuhan akan bahan pangan maka pada waktu yang akan datang NTT akan semakin bergantung pada impor. Ini berarti ketahanan pangan daerah NTT akan semakin rentan. Berikut disajikan pada tabel di bawah ini perkembangan luas panen, rata-rata produksi dan produksi padi selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel. 2.36 Perkembangan Luas Panen, Rata-rata Produksi, dan Produksi Padi di Provinsi NTT Tahun 2018-2022

Tahun	Luas Panen		Rata-Rata Produksi		Produksi	
	Hektar	Perkembangan (%)	Kuintal/Ha	Perkembangan (%)	GKG	Perkembangan (%)
2018	218.233	-	41,24	-	899.936	-
2019	198.867	-8,87	40,82	-1,02	811.724	-9,80
2020	181.691	-8,64	39,90	-2,25	725.024	-10,68
2021	174.900	-3,74	41,85	4,89	731.878	0,95
2022	183.092	4,68	41,29	-1,34	756.050	3,30
Rata-rata Petumbuhan Per Tahun		**-4,14**		**0,07**		**-4,06**

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Secara nasional Tahun 2022 luas panen tanaman padi sebesar 10.452.672 dengan rat-rata nasional 307.431.50, dengan demikian capaian luas tanam di Provinsi NTT masih di bawah rata-rata nasional dan berada di urutan ke 20. Untuk produksi padi capaian nasional Tahun 2022 sebesar 45,43 juta ton dengan rata-rata 1.323.542 ton, sedangkan Provinsi NTT sebesar 756.050 ton dengan demikian capaian produksi padi di Provinsi NTT masih di bawah rata-rata nasional di Tahun 2022. Perkembangan luas panen dan produksi padi nasional disajikan pada gambar di bawah ini.

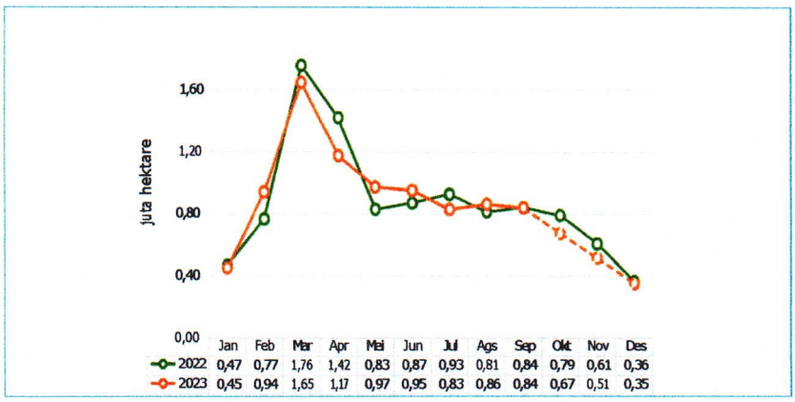

Sumber: BPS Nasional, 2023

Gambar 2.70 Perkembangan Luas Panen Padi Nasional Tahun 2022

Selama lima tahun terakhir produksi padi di Provinsi NTT cenderung menurun sebesar 4,06 persen per tahun. Hal ini diakibatkan menurunnya luas panen sebesar 4,14 persen per tahun meskipun produktivitas meningkat sebesar 0,07 persen dari tahun ke tahun, namun peningkatan tersebut tidak sebanding dengan penurunan luas panen. Pada Tahun 2022, produksi padi di NTT sebesar 756.050 ton gabah kering giling dengan luas panen sebesar 183.092 ha dan produktivitas sebesar 41,29 ku/ha. Dibandingkan tahun sebelumnya produksi padi Tahun 2022 naik sebesar 3,30 persen disertai dengan peningkatan luas panen seluas 8.192 ha atau 4,68 persen.

Produksi beras yang dihasilkan pada Tahun 2022 mencapai 442.842 ton. Jika dibandingkan antara produksi beras dengan besaran konsumsi masyarakat terhadap beras, maka neraca antara konsumsi dengan produksi beras di NTT secara khusus mengalami defisit sebesar 217.305 ton beras. Jumlah ini cukup besar mengingat kemampuan produksi padi di NTT cukup kecil. Hal ini akan

berakibat pada perilaku perdagangan yang dilakukan di NTT, dimana pemerintah akan dihadapkan pada pilihan untuk memenuhi kebutuhan beras. Jumlah produksi padi di NTT tentunya ditentukan juga oleh persebaran penggunaan lahan pada masing-masing kabupaten/kota, luas lahan yang ditanami padi dan tidak ditanami padi menurut kabupaten/kota disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.37 Luas Penggunaan Lahan menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTT Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Lahan Sawah			
	Ditanami Padi Setahun		Tidak Ditanami Padi	Jumlah
	1 Kali	2-3 Kali		
Sumba Barat	7.728	1.862	0	9.590
Sumba Timur	10.772	8.030	0	18.802
Kupang	14.907	1.426	4.177	20.510
Timor Tengah Selatan	4.999	351	4.989	10.339
Timor Tengah Utara	8.671	1.925	2.519	13.115
Belu	5.227	975	1	6.203
Alor	621	202	2.533	3.356
Lembata	21	36	8	65
Flores Timur	653	151	177	981
Sikka	598	1.456	5	2.059
Ende	1.703	2.561	0	4.264
Ngada	3.112	4.194	0	7.306
Manggarai	3.465	8.128	0	11.594
Rote Ndao	12.192	4.137	0	16.329
Manggarai Barat	5.230	11.663	0	16.892
Sumba Tengah	6.515	1.086	0	7.601
Sumba Barat Daya	4.958	2.407	1.139	8.504
Nagekeo	4.482	1.471	1.273	7.226
Manggarai Timur	6.400	8.943	354	15.697
Sabu Raijua	2.019	89	123	2.231
Malaka	2.637	2.168	280	5.085
Kota Kupang	367	44	5	416
Nusa Tenggara Timur	**107 277**	**64 305**	**17 583**	**188 164**

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Dilihat dari penggunaan lahan sawah yang ditanami padi dalam setahun menurut kabupaten/kota di Provinsi NTT Tahun 2022, terdapat beberapa kabupaten dengan lahan sawah terluas yakni: Kabupaten Sumba Timur, Kupang, Rote Ndao, Timor Tengah Utara, Sumba Barat, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, dan Kabupaten Manggarai Timur. Selain itu terdapat kabupaten yang masih memiliki lahan sawah yang cukup luas namun tidak dimanfaatkan yakni: Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya dan Kabupaten Nagekeo dengan kisaran luas lahan sawah yang tidak dimanfaatkan 1000 Ha-5000 Ha.

b) Tanaman Palawija

Jagung

Jenis tanaman palawija golongan serealia (biji-bijian) yang banyak diusahakan di NTT adalah jagung, karena jagung cocok dengan iklim dan kondisi tanah NTT. Dengan demikian jagung memiliki peranan penting dan strategis dalam menunjang ketahanan pangan dan perbaikan perekonomian penduduk. Berikut disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.38 Perkembangan Luas Panen, Rata-rata Produksi, dan Produksi Jagung Provinsi NTT Tahun 2012-2022

Tahun	Luas Panen		Rata-Rata Produksi		Produksi (Ton)	
	Hektar	Perkembangan (%)	Kuintal/ Ha	Perkembangan (%)	Pipilan Kering	Perkembangan (%)
2012	245.323	-0,64	25,66	20,75	629.386	19,97
2013	270.394	10,22	26,17	1,99	707.643	12,43
2014	257.025	-4,94	25,18	-3,78	647.108	-8,55
2015	273.194	6,29	25,08	-0,40	685.081	5,87
2016	265.318	-2,88	25,95	3,47	688.432	0,49
2017	313.150	18,03	25,86	-0,35	809.830	17,63
2018	336.208	7,36	25,25	-2,36	848.998	4,84
2019	335.901	-0,09	26,33	4,28	884.326	4,16
2020	311.875	-7,15	22,22	-15,61	693.081	-21,62
2021	290.664	-6,80	25,81	6,15	750.166	8,24
2022	280.502	-3,50	24,88	-3,58	698.023	-6,95
Rata-Rata Pertumbuhan (% per tahun)		**1,45**		**0,96**		**3,32**

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Pada Tahun 2022 produksi jagung sebanyak 698.023 ton pipilan kering dari area panen seluas 290.664 hektar dengan rata-rata produksi per hektar sebesar 24,88 kuintal. Dibanding Tahun 2021, produksi jagung mengalami penurunan sebesar 52.143 ton atau 6,95 persen. Penurunan produksi jagung.

Ini disebabkan oleh penurunan produktivitas jagung sebesar 0,93 ku/ha atau 3,58 persen serta luas panennya juga menurun sebesar 10.162 hektar atau 3,50 persen dibandingkan dengan Tahun 2021. Selama sepuluh tahun terakhir produksi jagung di NTT cenderung berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,32 persen per tahun.

Secara nasional Tahun 2022 Luas panen tanaman jagung sebesar 2.764.368 Ha dengan rata-rata nasional 81.304.94, sedangkan luas tanam jagung di Provinsi NTT Tahun 2022 seluas 280.502 Ha, dengan demikian capaian luas tanam Provinsi NTT di atas rata-rata nasional dan berada di urutan ke 8. Untuk produksi jagung capaian nasional 2022 sebesar 22.36 juta ton dengan rata-rata 647.059.88 ton, sedangkan NTT 698.023 dengan demikian capaian produksi padi Provinsi NTT di atas rata-rata nasional di Tahun 2022. Perkembangan luas panen dan produksi padi nasional disajikan pada gambar di bawah ini.

Kacang-kacangan

Pada Tahun 2022 produksi kacang tanah di Provinsi NTT sebanyak 11.304 ton biji kering dari areal panen seluas 11.611 hektar dengan produktivitas sebesar 9,74 kuintal/ha. Bila dibandingkan dengan keadaan Tahun 2021 maka produksi kacang tanah mengalami penurunan sebesar 4,02 persen yang disebabkan oleh penurunan luas panen sebesar 6,64 persen dan produktivitas sebesar 1,65 persen. Berikut disajikan perkembangan luas panen, rata-rata produksi dan produksi kacang tanah di Provinsi NTT pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.39 Perkembangan Luas Panen, Rata-rata Produksi, dan Produksi Kacang Tanah Provinsi NTT Tahun 2012-2022

Tahun	Luas Panen		Rata-Rata Produksi		Produksi (Ton)	
	Hektar	Perkembangan (%)	Kuintal/ Ha	Perkembangan (%)	Biji Kering	Perkembangan (%)
2012	19.694	1,54	10,95	-10,31	21.562	-8,95
2013	13.880	-29,52	11,57	5,66	16.056	-25,54
2014	14.046	1,20	10,60	-8,38	14.886	-7,29
2015	12.231	-12,92	8,68	-18,11	10.620	-28,66
2016	11.474	-6,19	9,09	4,72	10.431	-1,78
2017	11.899	3,71	8,78	-3,43	10.445	0,13
2018	11.564	-2,82	8,68	-1,14	10.040	-3,88
2019	15.104	30,61	9,41	8,41	14.212	41,55
2020	10.450	-30,81	8,90	-5,42	9.297	-34,58
2021	12.437	19,01	10,03	12,69	12.476	34,19
2022	11.611	-6,64	9,74	-1,65	11.304	-4,02
Rata-Rata Pertumbuhan (% per tahun)		**-2,98**		**-1,65**		**-4,02**

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Selama 10 (sepuluh) tahun terakhir produksi kacang tanah cenderung berfluktuasi dengan rata-rata penurunan pertumbuhan produksi sebesar -4,02 persen per tahun, rata-rata penurunan luas panen sebesar -2,98 persen per tahun dan rata-rata penurunan produktivitas sebesar 1,65 persen per tahun. Berikut disajikan perkembangan luas panen, rata-rata produksi dan produksi kacang tanah di Provinsi NTT pada tabel di bawah ini.

Pada Tahun 2022 produksi kacang hijau Provinsi NTT sebanyak 9.093 ton biji kering dari areal panen seluas 12.561 hektar dengan produktivitas sebesar 7,24 kuintal/ha. Dengan demikian Produksi kacang hijau pada Tahun 2022 meningkat 1,36 persen dibanding Tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya produktivitas kacang hijau sebesar 0,68 ku/ha atau 10,37 persen meskipun luas panen kacang hijau mengalami penurunan. Berikut disajikan perkembangan luas panen, rata-rata produksi dan produksi kacang hijau di Provinsi NTT pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.40 Perkembangan Luas Panen, Rata-rata Produksi, dan Produksi Kacang Hijau di Provinsi NTT Tahun 2012-2022

Tahun	Luas Panen		Rata-Rata Produksi		Produksi (Ton)	
	Hektar	Perkembangan (%)	Kuintal/ Ha	Perkembangan (%)	Biji Kering	Perkembangan (%)
2012	13.183	7,11	8,71	2,95	11.478	10,28
2013	11.869	-9,97	8,54	-1,95	10.139	-11,67
2014	10.548	-11,13	8,65	1,29	9.121	-10,04
2015	11.130	5,52	8,73	0,92	9.717	6,53
2016	10.586	-4,89	5,79	-33,70	6.128	-36,94
2017	10.807	2,09	6,69	15,61	7.232	18,2
2018	12.236	13,22	6,51	-2,69	7.966	10,15
2019	13.830	13,03	5,09	-21,81	7.042	-11,60
2020	12.563	-9,16	8,41	65,22	10.565	50,02
2021	13.668	8,79	6,56	-21,99	8.971	-15.09
2022	12.561	-8,10	7,24	10,37	9.093	1,36
Rata-Rata Pertumbuhan (% per tahun)		**0,59**		**1,29**		**1,00**

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Selama sepuluh tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan produksi kacang hijau cenderung meningkat sebesar 1,00 persen per tahun dan meningkatnya rata-rata luas panen sebesar 0,59 persen per tahun.

c) Umbi-Umbian

Ubi Kayu

Pada saat ini Provinsi NTT belum menempatkan komoditi ubi kayu sebagai komoditas andalan, karena penggunaannya masih sebatas sebagai pangan sekunder padahal komoditas ini cukup berpotensi untuk dikembangkan di Provinsi NTT karena penyebarannya yang luas dan kegunaannya yang beragam sehingga memberikan peluang terhadap peningkatan permintaan baik di dalam maupun di luar daerah. Berikut disajikan perkembangan luas panen, rata-rata produksi dan produksi ubi kayu di NTT pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.41 Perkembangan Luas Panen, Rata-rata Produksi, dan Produksi Ubi Kayu di Provinsi NTT Tahun 2012-2022

Tahun	Luas Panen		Rata-Rata Produksi		Produksi (Ton)	
	Hektar	Perkembangan (%)	Kuintal/ Ha	Perkembangan (%)	Biji Kering	Perkembangan (%)
2012	89.282	-7,67	99,92	0,43	892.145	-7,27
2013	79.164	-11,33	102,47	2,55	811.166	-908
2014	68.836	-13,05	106,14	3,58	677.578	-16,47
2015	60.557	-12,03	105,24	-0,85	637.315	-5,94
2016	51.336	-15,23	120,44	14,44	618.281	-2,99
2017	59.226	15,37	138,98	15,39	823.114	33,13
2018	51.180	-13,59	118,74	-14,56	607.694	-26,17
2019	47.904	-6,40	125,11	5,36	599.304	-1,38
2020	41.321	-13,74	141,72	13,28	585.599	-2,28
2021	37.702	-8,75	179,09	26,37	675.182	15,30
2022	35.435	-3,36	157,65	-11,97	574.413	
Rata-Rata Pertumbuhan (% per tahun)		**-8,16**		**4,91**		**-3,46**

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Pada Tahun 2022, produksi ubi kayu di Provinsi NTT sebanyak 574.413 ton umbi basah dari areal panen seluas 36.435 hektar dengan produktivitas sebesar 157,65 kuintal/ha. Produksi ubi kayu menurun sebesar 14,92 persen dibanding Tahun 2021 yang disebabkan oleh menurunnya produktivitas ubi kayu sebesar 11,97 persen didukung juga dengan penurunan luas panen sebesar 3,36 persen.

Selama sepuluh tahun terakhir kecenderungan produksi ubi kayu mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 3,46 persen per tahun dan luas panen menurun 8,16 persen per tahun. Namun, dalam 10 tahun terakhir produktivitas ubi kayu mengalami peningkatan sebesar 4,91 persen per tahun.

Ubi Jalar

Meskipun ubi jalar mempunyai peranan yang penting, namun produksi ubi jalar masih rendah. Pada Tahun 2022, produksi ubi jalar di NTT sebanyak 41.193 ton umbi basah dari areal panen seluas 5.555 hektar dengan produktivitas sebesar 74,16 kuintal/ha. Produktivitas ubi jalar

pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 16,57 persen dibanding tahun sebelumnya.

Selama sepuluh tahun terakhir, kecenderungan produksi ubi jalar berfluktuasi dan secara umum menurun dengan rata-rata penurunan 6,92 persen per tahun dikarenakan penurunan luas panen sebesar 6,58 persen dan produktivitas 1,56 persen per tahun.

Berikut disajikan perkembangan luas panen, rata-rata produksi dan produksi ubi jalar di NTT pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.42 Perkembangan Luas Panen, Rata-rata Produksi, dan Produksi Ubi Jalar Provinsi NTT Tahun 2012-2022

Tahun	Luas Panen		Rata-Rata Produksi		Produksi (Ton)	
	Hektar	Perkembangan (%)	Kuintal/ Ha	Perkembangan (%)	Biji Kering	Perkembangan (%)
2012	18.604	17,88	82,63	0,51	151.864	17,06
2013	9.992	-46,29	79,01	-4,38	78.944	-48,02
2014	8.177	-18,16	73,42	-7,08	60.033	-23,95
2015	8.701	6,41	76,97	-4,92	60.746	1,19
2016	9.453	8,64	76.97	0,00	72.761	19,78
2017	9.453	0,00	77,18	0,27	72.954	0,27
2018	6.229	-34,11	73,63	-4,60	45.865	-37,13
2019	5.178	-16,87	75,51	2,55	39.097	-14,76
2020	4.347	-16,04	73,45	-2,73	31.931	-18,33
2021	5.047	16,10	63,62	-13,38	32.107	-0,55
2022	5.555	10,07	74,16	16,57	41.193	28,30
Rata-Rata Pertumbuhan (% per tahun)		**-6,58**		**-1,56**		**-6,92**

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Meskipun ubi jalar mempunyai peranan yang penting, namun produksi ubi jalar masih rendah. Pada Tahun 2022, produksi ubi jalar di Provinsi NTT sebanyak 41.193 ton umbi basah dari areal panen seluas 5.555 hektar dengan produktivitas sebesar 74,16 kuintal/ha. Produktivitas ubi jalar pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 16,57 persen dibanding tahun sebelumnya. Selama sepuluh tahun terakhir, kecenderungan produksi ubi jalar berfluktuasi dan secara umum menurun dengan rata-rata penurunan 6,92 persen per tahun dikarenakan penurunan luas panen sebesar 6,58 persen dan produktivitas 1,56 persen per tahun.

d) Hortikultura (Sayur-sayuran)

Sayur-sayuran

Perkembangan produksi sayur-sayuran selama periode Tahun 2018 – 2022 umumnya meningkat. Produksi komoditas sayur-sayuran yang mengalami peningkatan produksi terbesar yaitu cabai keriting sebesar 73,78% per tahun. Tanaman cabai keriting mulai dipisahkan pencatatannya dari cabai besar sejak Tahun 2021. Hal ini menyebabkan pertumbuhan produksi tanaman cabai keriting cukup tinggi. Komoditas sayur-sayuran yang mengalami kenaikan produksi terbesar selain cabai keriting adalah cabai rawit sebesar 27,48% per tahun dan bawang daun sebesar 25,98% per tahun. Berikut disajikan perkembangan luas panen, rata-rata produksi dan produksi sayur-sayuran di Provinsi NTT pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.43 Perkembangan Luas Panen, Rata-rata Produksi, dan Produksi Sayur-sayuran di Provinsi NTT Tahun 2012-2022

No	Jumlah Tanaman	Tahun					Rata-Rata Perubahan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022*	
1	Bawang Daun	11.807	8.513	8.878	21.368	18.554	25,98
2	Bawang Merah	45.415	82.540	104.238	114.300	75.845	21,01
3	Bawang Putih	4.522	8.683	9.739	5.787	4.827	11,75
4	Bayam	32.443	37.240	39.513	51.555	54.533	14,29
5	Buncis	26.973	37.979	36.900	44.478	36.065	9,90
6	Cabai Besar	18.636	29.201	33.497	18.445	15.148	2,15
7	Cabai Keriting	-	-	-	13.733	21.679	57,87
8	Cabai Rawit	52.474	88.160	104.679	90.759	198.812	48,13
9	Kacang Panjang	28.388	37.465	40.055	68.171	63.421	25,53
10	Kangkung	83.707	134.238	142.839	144.834	148.241	17,63
11	Kembang Kol	7.073	8.832	8.526	7.592	9.626	9,31
12	Kentang	6.973	5.295	6.381	4.103	3.335	-14,49
13	Kubis	34.491	42.507	39.761	34.175	30.090	-2,31
14	Labu Siam	193.866	174.175	167.136	158.843	237.773	7,63
15	Mentimun	39.426	52.615	59.591	61.998	53.054	9,08
16	Paprika	0	1.569	1.950	1.495	384	-24,46
17	Petsai/Sawi	101.878	129.882	118.803	133.763	121.575	5,61
18	Terung	82.837	120.760	132.214	144.707	166.235	19,90
19	Tomat	54.652	99.496	99.066	106.049	92.150	18,89
20	Wortel	29.051	34.201	28.045	33.769	35.229	6,12
21	Melinjo	589	591	747	1.248	676	11,99
22	Petai	3.292	3.147	3.171	4.476	3.883	6.06

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

e) Buah-buahan

Produksi buah-buahan di Provinsi NTT pada periode lima tahun terakhir ini menunjukkan adanya kenaikan meskipun ada beberapa jenis buah yang mengalami penurunan. Jenis buah-buahan yang produksinya meningkat relatif tinggi adalah melon yaitu sebesar 568,76%. Sedangkan jenis buah- buahan yang mengalami penurunan terbesar adalah lengkeng yaitu sebesar 30,58 %. Pada Tahun 2022, jenis buah-buahan yang terbanyak dihasilkan adalah pisang dan pepaya. Berikut disajikan perkembangan luas panen, rata-rata produksi dan produksi buah-buahan di Provinsi NTT pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.44 Perkembangan Luas Panen, Rata-rata Produksi, dan Produksi Buah-buahan di Provinsi NTT Tahun 2012-2022

No	Jenis Tanaman	Tahun					Rata-rata Perubahan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Alpukat	121.888	116.825	138.696	364.277	223.824	32,22
2	Anggur	0	183	180	74	175	24,95
3	Apel	107	90	76	358	639	104,58
4	Belimbing	5.924	7.555	7.671	6.643	7.182	5,95
5	Buah Naga				16,811	59.694	256,69
6	Duku/Langsa /Kokosan	148	160	46	155	73	30,17
7	Durian	20.073	15.742	17.530	37.144	44.297	30,23
8	Jambu Air	5.950	10.010	12.462	16.955	25.969	45,49
9	Jambu Biji	40.071	38.755	61.130	151.669	108.995	43,61
10	Jeruk Lemon				2.404	4.423	83,97
11	Jeruk Pamelo				18.447	16.747	-9,22

No	Jenis Tanaman	Tahun					Rata-rata Perubahan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
12	Jeruk Siam/Keprok	231.137	297.272	594.519	568.168	464.737	26,49
13	Lengkeng				218	151	-30,58
14	Mangga	472.918	518.447	605.011	872.936	819.969	16,14
15	Manggis	205	38	9	176	538	475,83
16	Nangka/ Cempedak	193.396	210.496	227.771	266.390	268.896	8,74
17	Nenas	48.652	78.093	174.740	112.315	115.409	37,83
18	Pepaya	550.672	678.789	847.167	1.036.173	1.090.945	18,92
19	Pisang	1.051.292	2.274.612	2.743.691	2.567.234	2.305.349	30,09
20	Rambutan	33.643	37.537	46.975	78.892	61.720	20,72
21	Salak	13.037	10.465	29.769	24.722	31.549	43,85
22	Sawo	6.872	8.073	7.252	10.405	14.883	23,46
23	Sirsak	21.280	26.655	30.386	45.519	41.771	20,21
24	Sukun	26.845	27.852	26.529	30.859	47933	14,66
25	Melon	350	8.322	2.351	4.444	3.557	568,76
26	Semangka	10.986	42.300	28.439	20.215	18.372	53,56
27	Stroberi				1.615	804	-50,20

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Proporsi penduduk bekerja di Provinsi NTT Tahun 2023 terbesar berada di sektor pertanian yaitu 49,06%. Berikut disajikan perkembangan penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja (Laki-laki+Perempuan) menurut lapangan pekerjaan pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.45 Penduduk bekerja menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Provinsi NTT Tahun 2023

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki		Perempuan		L+P
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	792.423	50,18	628.776	47,71	1.421.199
2	Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik, Air, Gas	29.253	1,85	6.537	0,50	35.790
3	Industri Pengolahan	69.254	4,39	204.672	15,53	273.926
4	Konstruksi	117.705	7,45	1.907	0,14	119.612
5	Perdagangan	146.757	9,29	192.619	14,62	339.376
6	Transportasi dan Akomodasi	157.869	10,00	35.471	2,69	193.340
7	Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Jasa Perusahaan	41.254	2,61	20.285	1,54	61.539
8	Administrasi Pemerintahan	116.604	7,38	48.318	3,67	164.922
9	Jasa Pendidikan dan Kesehatan	80.277	5,06	154.885	11,75	235.162
10	Jasa Lainnya	27.709	1,75	24.326	1,85	52.035
	Total	**1.579.105**	**100,00**	**1.317.79**	**100,00**	**2.896.901**

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Pada tabel di atas terlihat bahwa penduduk yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menempati urutan pertama di Tahun 2023 sebanyak 1.421.199 dengan jumlah pekerja laki-laki sebanyak 792.423 orang dan pekerja perempuan berjumlah 628.776 orang.

Sub Urusan Peternakan

a) Populasi Ternak Besar

Populasi ternak sapi terkonsentrasi di daratan Timor, yaitu sebesar 76,10 persen, dengan jumlah populasi sebesar 946.653 ekor. Penyebaran ternak kerbau terkonsentrasi di Pulau Sumba, yaitu 42,60 persen dan Flores sekitar 35,42 persen, sedangkan daratan Timor 21,98 persen. Bila dicermati populasi kerbau per kabupaten, maka penyebaran relatif tidak merata, karena ternak ini hanya cocok hidup pada daerah dataran rendah dengan curah hujan tinggi dan rawa-rawa. Daerah-daerah yang kering atau curah hujannya rendah seperti Alor, Flores Timur, dan Lembata kurang cocok untuk pemeliharaannya sehingga daerah ini populasi kerbaunya sedikit. Berikut disajikan perkembangan populasi ternak besar di Provinsi NTT pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.46 Perkembangan Populasi Ternak Besar di Provinsi NTT Tahun 2023

Pulau/ Daratan	Sapi Potong		Sapi Perah		Kerbau		Kuda	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sumba	58.542	4,71	9	26,47	73.638	42,60	70.224	56,04
Timor	946.653	76,10	25	73,53	27.985	21,98	27.512	21,96
Alor	8.527	0,69	0	0	0	0,00	43	0,03
Flores	230.162	18,50	0	0	61.227	35,42	27.523	21,97
NTT	**1.243.884**		**34**		**172.850**		**125.302**	

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

b) Populasi Ternak Kecil

Ternak kecil yang banyak dipelihara oleh masyarakat NTT adalah babi dan kambing. Ternak kecil seperti kambing/domba terbanyak di Kabupaten Rote Ndao dan Flores Timur. Penyebaran ternak kambing di wilayah NTT terbanyak di daratan Timor dan Flores masing-masing sebanyak 43,93 persen dan 40,09 persen, sementara di daratan Sumba dan Alor hanya 11,02 persen dan 4,96 persen. Berikut disajikan perkembangan populasi ternak kecil di NTT pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.47 Perkembangan Populasi Ternak Kecil di Provinsi NTT Tahun 2023

Pulau/ Daratan	Babi		Kambing		Domba	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sumba	263.268	11,32	116.756	11.02	18	0,02
Timor	1.022.773	43,99	465.323	43,93	66.295	80,10
Alor	108.305	4,66	52.498	4,96	0	0,00
Flores	930.674	40,03	424.646	40,09	16.451	19,88
NTT	**2.325.020**		**1.059.223**		**82.764**	

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Jenis ternak babi sangat potensial untuk dikembangkan, karena kesanggupannya beradaptasi dalam kondisi lingkungan yang beraneka ragam. Disamping itu pemeliharaannya juga tidak sulit karena babi dapat memanfaatkan limbah rumah tangga sebagai pakannya. Populasi ternak babi terbanyak di daratan Timor yaitu sebesar 43,99 persen kemudian di daratan Flores 40,03 persen. Sementara di daratan Sumba 11,32 persen dan di daratan Alor 4,66 persen.

Sub Urusan Perkebunan

Kegiatan subsektor Perkebunan di NTT yang meliputi perkebunan besar dan perkebunan rakyat sampai akhir Tahun 2022 terhitung masih kecil kontribusinya terhadap sektor Pertanian. Namun demikian hasil dari subsektor ini diharapkan dapat menunjang pendapatan asli Provinsi NTT dan penggerak perekonomian daerah karena komoditi perkebunan merupakan bahan baku bagi sektor Industri seperti komoditi cengkeh, kelapa, kopi, kakao dan sebagainya. Berikut ini dapat dilihat perkembangan produksi beberapa komoditi penting yakni kelapa, kopi, dan kakao. Berikut disajikan perkembangan produksi kelapa, kopi dan kakao di Provinsi NTT pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.48 Perkembangan Produksi Kelapa di Provinsi NTT Tahun 2018-2022

Pulau/ Daratan	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan per Tahun
	2018	2019	2020	2021	2022	
Sumba	7.309	7.324	7.141	7.174	7.080	-0,79
Timor	20.592	20.577	19.058	19.074	17.296	-4,17
Alor	1.379	1.591	1.420	1.448	1.690	5,83
Flores	40.127	40.484	40.817	41.478	44.131	2,43
NTT	**69.408**	**69.977**	**68.436**	**69.174**	**70.197**	**0,29**

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Tabel 2.49 Perkembangan Produksi Kopi di Provinsi NTT Tahun 2018-2022

Pulau/ Daratan	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan per Tahun
	2018	2019	2020	2021	2022	
Sumba	3.404	3.148	3.220	3.209	3.211	-1,38
Timor	528	534	535	547	491	-1,67
Alor	150	348	300	318	257	26,26
Flores	19.648	20.054	21.785	21.822	24.695	6,01
NTT	23.730	24.284	25.841	25.896	28.654	4,91

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Tabel 2.50 Perkembangan Produksi Kakao di Provinsi NTT Tahun 2018-2022

Pulau/ Daratan	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan per Tahun
	2018	2019	2020	2021	2022	
Sumba	1.286	1.228	1.256	1.279	1.286	0,04
Timor	229	191	188	198	564	43,00
Alor	64	152	49	49	46	15,90
Flores	18.187	18.091	19.068	19.067	24.693	8,59
NTT	**19.766**	**19.662**	**20.561**	**20.593**	**26.589**	**8,33**

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

4) Urusan Kehutanan

Produksi hasil hutan dapat diamati dalam dua kelompok, yaitu produksi hasil hutan jenis kayu dan produksi hasil hutan bukan kayu. Produksi hasil hutan jenis kayu Provinsi NTT yang terbesar di Tahun 2023 ialah jati, dengan total produksi sebanyak 1.065,72 m^3. Sementara pada tahun sebelumnya, total produksi terbesar ialah rimba campuran dengan total produksi sebanyak 1.868,65 m^3.

Tabel 2.51 Produksi Hasil Hutan Per Jenis Kayu di Provinsi NTT Tahun 2022-2023

Jenis Hasil Hutan		Satuan (Unit)	Jumlah Produksi	
			2022	2023
1	Rimba Campuran / *Beams*	m3	1.868,65	689,44
2	Jati / *Lardwood*	m3	706,54	1.065,72
3	Mahoni / *Mahogany*	m3	26	43,98
4	Sengon / *Silkwood*	m3	70,30	406,28
5	Kemiri / *Candle Nut*	m3	79,60	175,07
6	Cendana / *Sandalwood*	m3	42,07	78,82
7	Gmelina / *Beechwood*	m3	7	17,15
8	Ketapang / *Indian Almond*	m3	-	36,13
9	Kelapa/ *Coconut*	m3	60,17	2,30
10	Jabon /*Burnflower*	m3	268,57	-
11	Kenari/ *Walnut wood*	m3	9,19	1
12	Ampupu/ *Eucalyptus*	m3	30,30	21,20

Sumber: DLHK Provinsi NTT, 2024

Lebih lanjut, total produksi hasil hutan bukan kayu yang terbesar di Provinsi NTT ialah asam biji sebesar 722,80 ton pada Tahun 2022 dan menurun menjadi 698,69 ton pada Tahun 2023. Selain itu, madu juga memiliki total produksi cukup besar yaitu sebanyak 339 liter pada Tahun 2022 dan meningkat menjadi 471 liter pada Tahun 2023.

Tabel 2.52 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi NTT Tahun 2022-2023

Jenis Hasil Hutan		Satuan (Unit)	Jumlah Produksi	
			2022	2023
1	Asam Isi / *Tamarind Kernel*	ton	15,13	1,40
2	Asam Biji / *Tamarind*	ton	722,80	698,69
3	Kemiri Isi / *Candle Nut*	ton	20,50	20
4	Kemiri Biji / *Candle Nut*	ton	45,70	-
5	Madu / *Honey*	Liter	330	471

Sumber: DLHK Provinsi NTT, 2024

5) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan laporan Badan Energi Nasional dalam Evaluasi Capaian Bauran Energi Nasional Tahun 2022, Provinsi NTT memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Pada Tahun 2022, tercatat bahwa potensi Energi Panas Bumi di Provinsi NTT yaitu sebesar 1.177,5 MWe, Potensi Energi Angin *Onshore* sebesar 10.188 MW, dan potensi Tenaga Surya sebesar 269,5 GW. Secara umum tantangan dalam pengembangan EBT dalam rangka memenuhi target bauran energi nasional antara lain ketersediaan dan lokasi, dukungan kebijakan, dukungan finansial, dukungan infrastruktur, teknis dan lingkungan, serta situasi politik dan sosial.

Tabel 2.53 Komponen dan Potensi Energi Baru Terbarukan di Provinsi NTT

No	Komponen	Potensi EBT	Keterangan
1	Tenaga Panas Bumi	1.177,5 Potensi Energi (MWe)	Kapasitas terpasang 19,1 MWe
2	Tenaga Angin	a) Onshore 10.188 Potensi Angin (MW) b) Offshore 1.836 Potensi Angin (MW)	Potensi onshore secara nasional
3	Tenaga Surya	369,5 Potensi Surya (GW)	Potensi tenaga surya terbesar secara nasional.

Sumber: Evaluasi Capaian Bauran Energi Nasional, Dewan Energi Nasional, 2022

Selain itu, untuk bidang kelistrikan, capaian rasio elektrifikasi Provinsi NTT Tahun 2022 sebesar 92,50% dan rasio desa berlistrik yaitu sebesar 100%. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

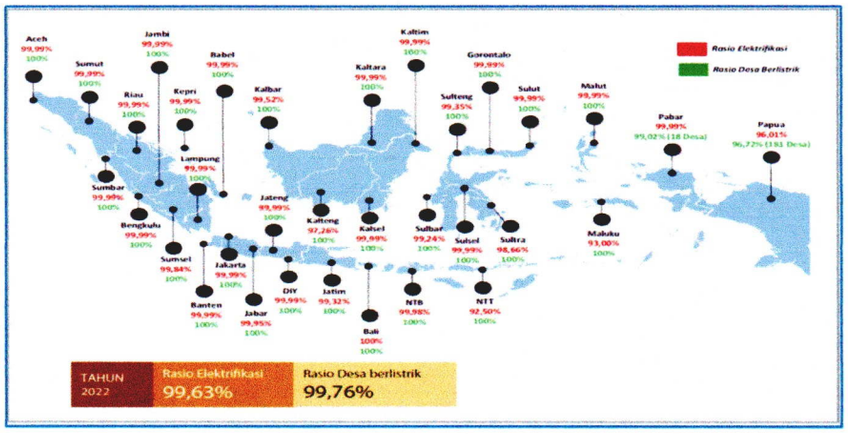

Sumber: Outlook Energi Indonesia, Dewan Energi Nasional, 2023

Gambar 2.71 Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Tahun 2022

6) Urusan Perdagangan

Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Desember Tahun 2023 mencapai US$ 5.226.433 dengan volume sebesar 10.160,3 ton. Nilai ekspor Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 9,26 persen dari ekspor bulan November 2023. Dibanding Desember 2022, nilai ekspor Provinsi NTT turun sebesar 0,31 persen.

Ekspor non migas Desember 2023 senilai US$ 4.855.171, turun 7,2 persen dibanding November 2023 dan juga mengalami penurunan sebesar 3,54 persen jika dibandingkan bulan Desember 2022. Secara kumulatif, nilai ekspor NTT Januari-Desember 2023 mencapai US$ 60.047.486 atau naik 23,39 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2022. Sementara ekspor non migas mencapai US$ 57.576.670 atau naik 23,56 persen. Berikut disajikan nilai ekspor migas dan non migas NTT, Januari-Desember 2023, pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.54 Nilai Ekspor Migas dan non Migas, Januari-Desember 2023 dan Perkembangannya di Provinsi NTT Tahun 2022-2023

Uraian	Nilai FOB (US$)					Perubahan (%)			Peran Thd Jan-Des 2023 (%) *)
	Des 2022	Jan-Des 2022	Nov 2023	Des 2023	Jan-Des 2023 *)	y-on-y	m-to-m	c-to-c	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Migas	209.509	2.067.658	528.076	371.262	2.470.798	77,21	-29,70	19,50	4,11
Non Migas	5.033.409	46.596.604	5.231.866	4.855.171	57.576.670	-3,54	-7,20	23,56	95,89
Total	**5.242.918**	**48.664.263**	**5.759.942**	**5.226.433**	**60.047.468**	**-0,31**	**-9,26**	**23,39**	**100,00**



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Migas 2022	13.463	143.377	121.036	176.723	118.528	179.476	275.597	191.707	178.269	293.355	166.620	209.509
Non Migas 2022	5.720.442	2.387.760	2.905.884	2.377.637	3.044.046	3.299.835	4.142.548	3.556.778	4.426.725	4.418.226	5.283.315	5.033.409
Migas 2023	50.711	56.041	280.504	170.217	229.732	116.951	128.794	77.229	108.005	353.277	528.076	371.262
Non Migas 2023	4.027.038	5.534.456	5.448.247	4.255.781	4.190.242	4.617.522	4.430.722	4.675.663	4.662.161	5.647.801	5.231.866	4.855.171

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Desember 2023 turun 9,26 persen dibanding November 2023 yaitu dari US$ 5.759.942 menjadi US$ 5.226.433. Jika dibanding Desember 2022, ekspor NTT juga mengalami penurunan 0,31 persen. Penurunan ekspor bulan Desember 2023 dibanding November 2023 disebabkan oleh penurunan ekspor dari sektor migas dan non migas. Ekspor migas Desember 2023 sebesar US$ 371.262, turun 29,7 persen dari US$ 528.076 pada November 2023. Hal yang sama juga terjadi pada ekspor nonmigas Desember 2023, turun 7,2 persen dari US$ 5.231.866 pada November 2023 menjadi US$ 4.855.171 di Desember 2023.

7) Urusan Perindustrian

a) Industri Mikro dan Kecil

Industri Mikro dan Kecil (IMK) mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pengalaman sejarah menunjukkan IMK mampu bertahan terhadap krisis ekonomi yang pernah dialami Indonesia beberapa tahun sebelumnya. Industri Mikro dan Kecil umumnya merupakan usaha rumah tangga, dimana pendidikan bukan menjadi syarat mutlak untuk berusaha dan tidak memerlukan modal yang cukup besar.

Usaha ini adalah pilihan yang tepat untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Selain berkontribusi dalam mempercepat pembangunan daerah, IMK juga mampu menyerap banyak tenaga kerja. Penguatan sektor Industri Mikro dan Kecil merupakan salah satu alternatif untuk memperkuat perekonomian daerah jangka panjang. Industri Mikro dan Kecil adalah suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang sebagian besar masih bercampur dengan tempat tinggal dan masih memerlukan pembinaan yang terus menerus agar masalah yang dihadapi seperti masalah pemasaran, permodalan dan pengelolan dapat segera diatasi. Berikut disajikan persentase banyaknya IMK di Provinsi NTT Tahun 2022, pada gambar di bawah ini.

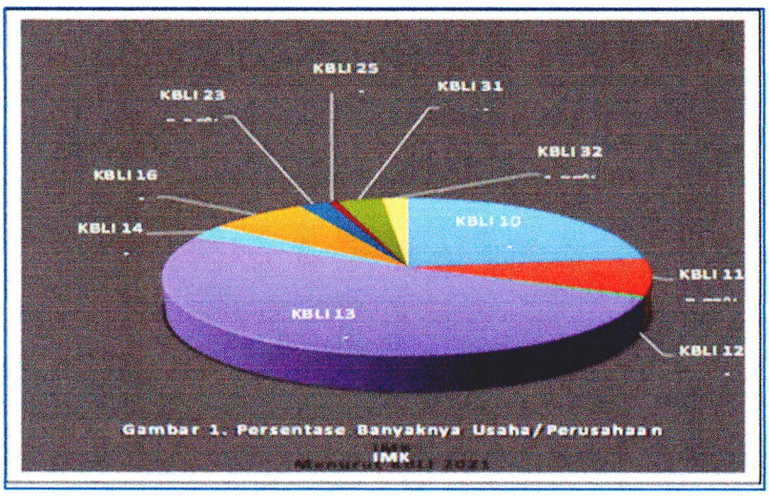

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Gambar 2.72 Persentase Banyaknya Industri Mikro dan Kecil di Provinsi NTT Tahun 2022

Berdasarkan hasil survei IMK 2021 Tahunan diperkirakan terdapat 156,30 ribu usaha/perusahaan IMK yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 155,87 ribu usaha/perusahaan (99,72 persen) merupakan industri berskala mikro dan sisanya adalah industri berskala kecil. Modal minim,

fleksibilitas dalam menjalankan usaha, penggunaan sumber daya lokal dan produk/jasa yang dihasilkan dengan jumlah menyesuaikan minat pasar menjadi ciri khas yang mendukung berkembangnya usaha ini. Sebaran usaha/perusahaan IMK menurut kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak merata antar kabupaten/kota. Usaha IMK paling banyak yakni sebanyak 23.300 usaha (14,91 persen) terdapat di Kabupaten Sikka, diikuti Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 20.020 usaha (12,81 persen), dan Kabupaten Manggarai sebanyak 14.245 usaha (9,11 persen). Sedangkan Kabupaten Sumba Tengah merupakan wilayah yang paling sedikit usaha/perusahaan IMK, yaitu sebanyak 1.064 usaha (0,68 persen), Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 1.282 (0,82 persen), dan Kabupaten Sumba Barat sebanyak 1.679 usaha (1,07 persen). Sebagai ibu kota provinsi, jumlah usaha/perusahaan IMK di Kota Kupang menduduki posisi ke tiga belas sebanyak 4.173 usaha (2,67 persen). Umumnya masyarakat Kota Kupang bekerja pada sektor perdagangan, rumah makan dan jasa perseorangan, terbukti pada tahun 2021 sebanyak 77,76 persen penduduk usia 15 tahun keatas Kota Kupang bekerja pada sektor perdagangan; transportasi; rumah makan dan jasa akomodasi; administrasi pemerintahan; dan jasa lainnya.

Berdasarkan pengelompokan tenaga kerja, sebanyak 85,98 ribu (55,01 persen) usaha/perusahaan IMK memiliki tenaga kerja berjumlah 1 (satu) orang (Tabel 1.2). Dalam hal ini pemilik/pengusaha menjadi satu-satunya pekerja yang mengelola dan menjalankan sendiri usahanya. Berikut disajikan tenaga kerja pada IMK berdasarkan tingkat pendidikan pada gambar di bawah ini.

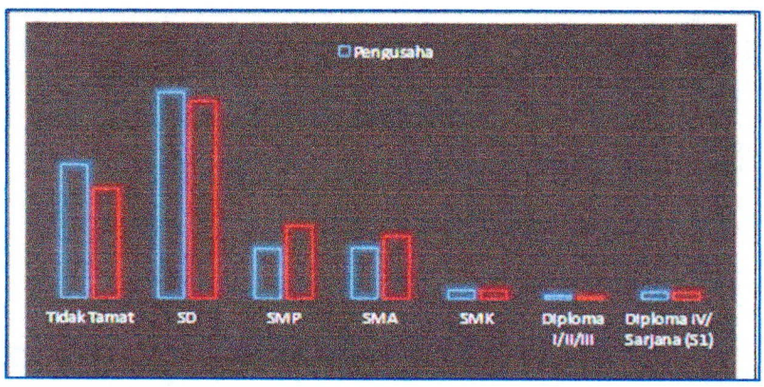

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Gambar 2.73 Tenaga Kerja pada Industri Mikro dan Kecil Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022

Sebagian besar pemilik/pengusaha IMK berpendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu 44,94 persen dan pemilik yang tidak menyelesaikan pendidikan atau tidak tamat SD cukup tinggi yaitu 28,94 persen. Persentase pemilik/pengusaha IMK yang menyelesaikan jenjang pendidikan SMP dan sederajat yakni sekitar 10,87 persen. Persentase pemilik/pengusaha IMK yang berpendidikan Diploma, hanya sekitar 0,69 persen. Banyaknya tenaga kerja usaha/perusahaan IMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2021 sebanyak 251.460 orang, yang terdiri dari 24.088 orang (9,58 persen) pekerja dibayar dan 227.372 orang (90,42 persen) pekerja tidak dibayar. Sebagian besar tenaga kerja usaha/perusahaan IMK adalah pekerja tidak dibayar yang berasal dari keluarga. Berdasarkan jenis kelamin, lebih dari setengah atau sebesar 69,21 persen tenaga kerja usaha IMK adalah perempuan.

Pendidikan tenaga kerja usaha/perusahaan IMK memiliki pola yang sama seperti pendidikan pengusaha IMK. Dilihat dari Gambar di atas, tenaga kerja usaha IMK berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 42,93 persen, pekerja yang tidak menamatkan pendidikan jenjang Sekolah Dasar sebanyak 23,75 persen, tenaga kerja tingkat pendidikan yang ditamat Sekolah Menegah Pertama (SMP) sebanyak 15,73 persen dan tenaga kerja yang berpendidiakn SMA/MA/Paket dan SMK sebanyak 15,58 persen sedangkan pekerja yang berpendidikan Diploma maupun Sarjana hanya sebanyak 2,01 persen. Jika dilihat dari usia tenaga kerja usaha IMK, sebanyak 90,85 persen berada pada usia produktif antara 15 sampai dengan 64 tahun.

8) Urusan Transmigrasi

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi pada dasarnya adalah mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang meliputi aspek-aspek penataan ruang, penataan penduduk, dan penataan sistem kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya serta pengembangan sistem agribisnis di kawasan transmigrasi. Salah satu upaya untuk mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan transmigrasi adalah melalui model program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Di NTT terdapat empat kawsan transmigrasi yang terdiri dari: Kawasan transmigrasi Bajawa; Kawasan transmigrasi Larantuka; Kawasan transmigrasi Mbay; dan Kawasan trasmigrasi Sano Ngoang. Berikut disajikan perkembangan kawasan-kawasan dimaksud pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.55 Perkembangan Indeks Komposit Kawasan Transmigrasi Bajawa-Kabupaten Ngada Tahun 2022

No	Dimensi	Indeks Dimensi		Bobot	Indeks Dimensi	
		Evaluasi 2022	Intervensi		Evaluasi 2022	Intervensi
1	Ekonomi	26.59	64.41	0.392	10.42	25.25
2	Sosial Budaya	43.32	70.47	0.1303	5.64	9.18
3	Lingkungan	35.26	75.61	0.0773	2.73	5.84
4	Jejaring Pasar	50.68	73.56	0.2829	14.34	20.81
5	Kelembagaan	36.18	57.17	0.1176	4.26	6.72
				Jumlah	**37.38**	**67.81**
				Status	**Berkembang**	**Mandiri**

Sumber: Dinas Nakertrans Provinsi NTT, 2023

Kawasan transmigrasi Bajawa sebelum diintervensi memiliki Indeks Pembangunan Kawasan (IPK) sebesar 37.38 (<50) artinya kawasan tersebut tergolong masih berkembang. Setelah itu dilakukan intervensi pada aspek-aspek: 1) Aspek ekonomi pengungkitnya adalah Bumdes untuk pengembangan komoditas unggulan; Promosi komoditas unggulan oleh klaster/ kawasan transmigrasi Pengembangan Kerjasama antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian setempat untuk Meningkatkan Inovasi Pengembangan Komoditas Unggulan; Kebijakan Daerah tentang Promosi Kawasan; 2) Aspek Sarpras pengungkitnya adalah SMK; Pemanfaatan Telepon Genggam dan Internet; Ketersediaan Bahan Bakar; 3) Aspek Sosbud pengungkitnya adalah Migrasi Penduduk Keluar Kawasan; Budaya, Informasi dan Pengetahuan; Budaya dan Perencanaan; Adaptasi terhadap perubahan iklim; Kapasitas Mitigasi Bencana; Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah. Setelah dilakukan intervensi berdampak pada peningkatan IPK semula 37.38 dengan status berkembang meningkat menjadi 67.81 dan merubah statusnya menjadi kawasan transmigrasi mandiri.

Tabel 2.56 Perkembangan Indeks Komposit Kawasan Transmigrasi Larantuka-Kabupaten Flores Timur Tahun 2022

No	Dimensi	Indeks Dimensi		Bobot	Indeks Dimensi	
		Evaluasi 2022	Intervensi		Evaluasi 2022	Intervensi
1	Ekonomi	16.67	58.72	0.392	6.53	23.02
2	Sosial Budaya	20.37	67.36	0.1303	2.65	8.78
3	Lingkungan	16.95	75.68	0.0773	1.31	5.85
4	Jejaring Pasar	25.82	52.42	0.2829	7.31	14.83
5	Kelembagaan	42.07	60.30	0.1176	4.95	7.09
				Jumlah	**22.75**	**59.57**
				Status	**Berkembang**	**Mandiri**

Sumber: Dinas Nakertrans Provinsi NTT, 2023

Kawasan transmigrasi Larantuka sebelum diintervensi memiliki Indeks Pembangunan Kawasan (IPK) sebesar 20.52 (<50) artinya kawasan tersebut tergolong masih berkembang. Setelah itu dilakukan intervensi pada aspek - aspek: 1) Aspek ekonomi pengungkitnya adalah Bumdes Bersama Mengembangkan Komoditas Unggulan, Promosi komoditas unggulan oleh klaster/ kawasan transmigrasi; Sertifikasi/ Standarisasi Produk yang dihasilkan; Tingkat Melek Keuangan Masyarakat; Migrasi Penduduk Keluar Kawasan; 2) Aspek Sarpras pengungkitnya Elektrifikasi Desa; Pemanfaatan Telepon Genggam dan Internet; Ketersediaan Bahan Bakar; Kios Sarana Produksi Pertanian; 3) Aspek Sosbud pengungkitnya adalah Budaya, Informasi dan Pengetahuan; Budaya dan Perencanaan; Pemanfaatan *Amenity Resources* untuk Kegiatan Ekonomi dan Sosial; 4) Kelembagaan dengan pengungkitnya adalah Pengembangan Klaster Berbasis Komoditas Unggulan; Kebijakan Daerah tentang Promosi Kawasan. Setelah dilakukan intervensi berdampak pada peningkatan IPK semula 22,75 dengan status berkembang meningkat menjadi 59.57 dan merubah statusnya menjadi kawasan transmigrasi mandiri.

Tabel 2.57 Perkembangan Indeks Komposit Kawasan Transmigrasi Mbay-Kabupaten Nagekeo Tahun 2022

No	Dimensi	Indeks Dimensi		Bobot	Indeks Dimensi	
		Evaluasi 2022	Intervensi		Evaluasi 2022	Intervensi
1	Ekonomi	39.95	68.74	0.392	15.66	26.95
2	Sosial Budaya	53.97	80.08	0.1303	7.03	10.43
3	Lingkungan	39.98	69.35	0.0773	3.09	5.36
4	Jejaring Pasar	51.03	67.12	0.2829	14.44	18.99
5	Kelembagaan	15.81	47.08	0.1176	1.86	5.54
				Jumlah	**42.08**	**67.27**
				Status	**Berkembang**	**Mandiri**

Sumber: Dinas Nakertrans Provinsi NTT, 2023

Kawasan transmigrasi Mbay sebelum diintervensi memiliki Indeks Pembangunan Kawasan (IPK) sebesar 42.08 (<50) artinya kawasan tersebut tergolong masih berkembang. Setelah itu dilakukan intervensi pada aspek-aspek: 1) Aspek Ekonomi pengungkitnya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama mengembangkan komoditas unggulan; Promosi komoditas unggulan oleh klaster/ kawasan transmigrasi; Sertifikasi/ Standarisasi Produk yang dihasilkan; 2) Aspek Budaya pengungkitnya adalah governansi budaya; budaya, informasi dan pengetahuan; 3) Aspek Lingkungan pengungkitnya adalah adaptasi terhadap perubahan iklim; kapasitas mitigasi bencana 3) Aspek Sarpras pengungkitnya adalah sumber air minum dan mandi/cuci masyarakat di

kawasan transmigrasi; kios sarana produksi pertanian; pasar kawasan transmigrasi; forum pengembangan (ekonomi) daerah/ kawasan transmigrasi di aras kabupaten/kota; komitmen daerah untuk pembiayaan kawasan transmigrasi; 4) Aspek Kelembagaan pengungkitnya adalah pengembangan kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian setempat untuk meningkatkan inovasi pengembangan komoditas unggulan; kebijakan daerah tentang promosi kawasan. Setelah dilakukan intervensi berdampak pada peningkatan IPK semula 42.08 dengan status berkembang meningkat menjadi 67.27 dan merubah statusnya menjadi kawasan transmigrasi mandiri.

Tabel 2.58 Perkembangan Indeks Komposit Kawasan Transmigrasi Sano Ngoang-Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022

No	Dimensi	Indeks Dimensi		Bobot	Indeks Dimensi	
		Evaluasi 2022	Intervensi		Evaluasi 2022	Intervensi
1	Ekonomi	39.62	76.39	0.392	15.53	29.94
2	Sosial Budaya	45.74	83.78	0.1303	5.96	10.92
3	Lingkungan	32.31	73.31	0.0773	2.50	5.67
4	Jejaring Pasar	27.99	53.43	0.2829	7.92	15.11
5	Kelembagaan	7.73	53.21	0.1176	0.91	6.26
				Jumlah	**32.82**	**67.90**
Status					**Berkembang**	**Mandiri**

Sumber: Dinas Nakertrans Provinsi NTT, 2023

Kawasan transmigrasi Sano Ngoang sebelum diintervensi memiliki Indeks Pembangunan Kawasan (IPK) sebesar 32.82 (<50) artinya kawasan tersebut tergolong masih berkembang. Setelah itu dilakukan intervensi pada aspek - aspek: 1) Aspek ekonomi pengungkitnya adalah BUMDes bersama mengembangkan Komoditas Unggulan; Promosi komoditas unggulan oleh klaster/ kawasan transmigrasi; Sertifikasi/ Standarisasi Produk yang dihasilkan; Sertifikasi/ Standarisasi Produk yang dihasilkan; 2) Aspek Sarpras elektrifikasi desa; sumber air minum dan mandi/cuci masyarakat di kawasan transmigrasi; ketersediaan bahan bakar; kios sarana produksi pertanian; 3) Aspek Kelembagaan pengungkitnya adalah pengembangan klaster berbasis komoditas unggulan; kebijakan daerah dalam pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan; komitmen daerah untuk pembiayaan kawasan transmigrasi; kebijakan daerah tentang promosi kawasan; 4) Aspek Lingkungan pengungkitnya adalah governansi budaya; budaya dan pendidikan; budaya, informasi dan pengetahuan; pemanfaatan *Amenity Resources* untuk kegiatan Ekonomi dan Sosial; Kapasitas Mitigasi Bencana. Setelah dilakukan intervensi berdampak pada peningkatan IPK semula 32.82 dengan status berkembang meningkat menjadi 67.90 dan merubah statusnya menjadi kawasan transmigrasi mandiri.

2.1.5 STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 Provinsi NTT memiliki tren kenaikan dalam capaian SPM, akan tetapi pada Tahun 2024 terjadi penurunan dari Tahun 2023 sebesar 95,43 persen menjadi menjadi 84,1 persen. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

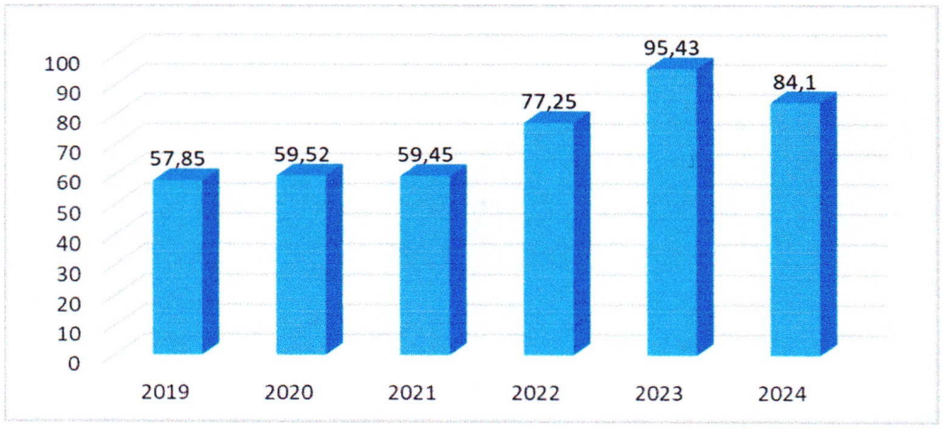

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Gambar 2.74 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi NTT Tahun 2019-2024

Khusus Pendidikan SPM bidang **Pendidikan** untuk provinsi meliputi pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Capaian SPM bidang pendidikan Provinsi NTT sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 cenderung berfluktuasi. Pada Tahun 2024 capaian SPM bidang Pendidikan Provinsi NTT sebesar 84 persen. Untuk SPM bidang **Kesehatan** untuk provinsi meliputi pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi, pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. SPM bidang kesehatan untuk kabupaten/ kota meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, serta pelayanan kesehatan dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia. Capaian SPM bidang kesehatan Provinsi NTT pada Tahun 2021 sebesar 54 persen yang terus mengalami kenaikan sampai Tahun 2023 sebesar 100 persen, akan tetapi mengalami penurunan pada Tahun 2024 menjadi 95 persen.

Khusus Pekerjaan Umum SPM bidang **Pekerjaan Umum** provinsi meliputi pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota. Capaian SPM bidang pekerjaan umum Provinsi NTT pada Tahun 2021 sebesar 1 persen dan terus mengalami peningkatan sampai Tahun 2023 sebesar 100 persen akan tetapi pada Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 98 persen. Berikutnya SPM bidang **Perumahan Rakyat** provinsi meliputi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi. Capaian SPM bidang perumahan Provinsi NTT Tahun 2021 sebesar 0 persen yang terus mengalami peningkatan sampai dengan Tahun 2023 dan 2024 senilai 100 persen.

Lebih jauh lagi, SPM bidang **Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat** provinsi meliputi pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi sedangkan SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat kabupaten/ kota meliputi pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat kabupaten/ kota, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Capaian SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Provinsi NTT pada Tahun 2021 sebesar 54 persen yang terus mengalami peningkatan sampai dengan Tahun 2023 sebesar 100 persen, akan tetapi terjadi penurunan pada Tahun 2024 menjadi 97 persen.

SPM Bidang **Sosial** provinsi meliputi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti, dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi. SPM bidang sosial kabupaten/ kota meliputi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota. Capaian SPM bidang sosial Provinsi NTT pada Tahun 2021 sebesar 72 persen yang terus mengalami peningkatan sampai dengan Tahun 2023 sebesar 100 persen dan kemudian terjadi penurunan pada Tahun 2024 menjadi 95 persen.

2.1.6 HASIL EVALUASI RPJMD PERIODE SEBELUMNYA

Berdasarkan hasil Evaluasi dan Capaian Indikator Makro pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Perkembangan Indikator Makro Tahun 2018- 2023

1) Kemiskinan

P-RPJMD NTT Tahun 2018-2023 menargetkan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi 21% di Tahun 2019, 18% Tahun 2020, 21-19,63% Tahun 2021 dan 19,35-16,15% pada Tahun 2022. Dari target yang tertuang di dalam P-RPJMD NTT Tahun 2018-2023, terealisasi 20,62% di Tahun 2019, 21,21% pada Tahun 2020, 20,44% Tahun 2021, realisasi 20,05% di Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 adalah 19,96%. Menurut data BPS, persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2019 menurun menjadi 20,52% atau melampaui target dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Jika dibandingkan dengan Tahun 2017, maka terjadi penurunan sebesar lebih dari 1 (satu) poin atau jika dikonversi dalam hitungan kepala, maka jumlah orang miskin yang terentaskan sepanjang Tahun 2017-2019 (dengan asumsi jumlah penduduk sebanyak

5,4 Juta jiwa) adalah sebanyak 54 ribu jiwa. Data persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun rencana 2023 adalah 19,96 %, namun dengan melihat kinerja pengentasan kemiskinan sepanjang 2019-2023, maka target tersebut akan dapat dicapai.

2) Indeks Pembangunan Manusia

P-RPJMD NTT Tahun 2018-2023 menargetkan skor IPM NTT meningkat menjadi 64. Berdasarkan data BPS, pada tahun tersebut IPM NTT telah meningkat menjadi 65,23, atau melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan IPM NTT didorong oleh meningkatnya nilai IPM dari Kabupaten Kota se Provinsi NTT. Kota Kupang masih merupakan daerah dengan IPM tertinggi di Provinsi NTT, sementara Sabu Raijua masih merupakan daerah dengan IPM terendah. Yang membedakannya dengan capaian tahun *baseline* adalah terjadinya peningkatan lebih dari 1 (satu) poin IPM dari setiap Kabupaten/Kota se-NTT dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, IPM NTT Tahun 2019 ditargetkan 64 poin, Tahun 2020 ditargetkan sebesar 65 poin, Tahun 2021 65,54-67,00 poin dan pada Tahun 2022 ditargetkan 67,35-69,00 poin. Dari target yang tertuang dalam P-RPJMD NTT Tahun 2018-2023, terealisasi 65,23 poin di Tahun 2019, 65,19 poin di Tahun 2020, 65,28 poin di Tahun 2021, 65,28 poin di Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 adalah 68,40 poin. Berdasarkan data-data dan jika dilihat dari pencapaian pada Tahun 2023 yang melampaui target, maka target tersebut akan dapat dicapai.

3) Pertumbuhan Ekonomi

P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,87%, namun data menunjukkan pada Tahun 2019 capaian yang tercatat adalah 5,24% masih sedikit berada di bawah target. Pertumbuhan Tahun 2019 menurut data BPS adalah sebesar 5,20%, meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2017.

Jika dilihat perlapangan usaha, lima lapangan usaha dengan laju pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2019 adalah: konstruksi tumbuh sebesar 9,53%, pertanian kehutanan dan perikanan tumbuh sebesar 8,86%, dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tumbuh sebesar 8,2%, industri pengolahan tumbuh sebesar 7,24% dan jasa lainnya tumbuh sebesar 5,98%. Dari kelima lapangan usaha tersebut, yang memberikan dampak paling besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah pada Tahun 2019 adalah lapangan usaha pertanian kehutanan dan perikanan yang memiliki *share* terbesar dalam ekonomi daerah (28%), administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang memiliki *share* sebesar 13,66% dan lapangan usaha konstruksi yang memiliki *share* sebesar 10,86%. Sementara industri pengolahan yang memiliki *share* sebesar 1,31%, dan jasa lainnya dengan *share* sebesar 2,12% meskipun tumbuh dengan laju yang tinggi, tidak memberikan pengaruh yang terlalu besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah mengingat *sharenya* yang kecil dalam ekonomi daerah di Tahun 2019.

Di Tahun 2020, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan pertumbuhan sebesar 6,6%, namun menurut *forecast* dari Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun rencana adalah sebesar 2,9% – 3,35%. Perlambatan ekonomi daerah di Tahun 2020, khususnya disebabkan oleh

pandemi COVID-19 yang memaksa pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan pembatasan sosial yang berujung kepada pembatasan aktivitas-aktivitas ekonomi dan berimbas pada perlambatan pertumbuhan daerah. Pemerintah juga melakukan *refocusing* anggaran pemerintah yang berdampak pada perubahan fokus kebijakan fiskal daerah dari yang berorientasi kepada pertumbuhan kepada penanganan pandemi dan penyediaan jaring pengaman sosial.

Untuk Tahun 2021 Pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 5,87-6,50% dan 6,33-6,90%% pada Tahun 2022. Dari target tersebut, pencapaian pertumbuhan pada Tahun 2021 adalah 2,51% dan pencapaian Tahun 2022 sebesar 3,45% sedangkan pada Tahun 2023 adalah sebesar 4,14% .

4) PDRB per Kapita

P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, menargetkan untuk meningkatkan PDRB perkapita NTT pada tahun rencana 2019 menjadi Rp. 13 Juta dan target tersebut telah terlampaui. Menurut catatan BPS, PDRB Perkapita Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 19,59 Juta perkapita, atau setara dengan Rp. 1,6 Juta perkapita per bulan.

Pada tahun rencana 2020, RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 menargetkan peningkatan PDRB Perkapita menjadi Rp. 15 Juta perkapita per tahun. Dengan melihat kinerja peningkatan PDRB Perkapita di NTT sepanjang 2017-2023, target tersebut diperkirakan akan terlampaui. Proyeksi PDRB Perkapita NTT tahun rencana 2020 adalah sebesar Rp. 20,31 juta perkapita perbulan. Angka tersebut merupakan angka proyeksi (*forecast*) dengan belum mempertimbangkan situasi pandemi yang sedang berlangsung sejak awal Tahun 2020.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan PDRB Perkapita Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 adalah sebesar 20-23 juta dan Tahun 2022 20-25 juta, namun data menunjukkan pencapaian PDRB Perkapita Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 adalah sebesar 20,58 juta dan 20,58 juta pada Tahun 2022.

5) Inflasi

P-RPJMD NTT Tahun 2018-2023, Pemerintah menargetkan inflasi sebesar 3%-3,4% pada Tahun 2019 dan 2020. Angka inflasi pada rentang demikian dipandang normal untuk sebuah ekonomi yang tumbuh. Namun data BPS menunjukkan pada Tahun 2019, inflasi di Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 0,67% atau berarti "melampaui" target pengendalian inflasi daerah. Kenaikan harga pada sebagian besar kelompok makanan dan kebijakan pemerintah untuk menaikkan cukai tembakau pada Tahun 2019 di "imbangi" oleh turunnya harga pada kelompok transportasi dan pada kelompok informasi dan telekomunikasi. Pada Tahun 2020, belum terdapat data inflasi tahunan, namun BI memprediksi bahwa inflasi di Nusa Tenggara Timur akan berkisar antara 1,60% - 2,00%. Sebagai catatan, *Forecast* Bank Indonesia ini dilakukan sebelum pandemi COVID-19, sehingga tidak memasukkan didalamnya asumsi – asumsi lain seperti misalnya perubahan kebijakan fiskal pemerintah *(refocusing).* Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan inflasi pada Tahun 2021 adalah sebesar 3%-3,4 % dan Tahun 2022 adalah sebesar 3-3,2 %, namun pencapaian yang tercatat pada Tahun 2021 adalah 0,49% dan Tahun 2022 adalah 4,93%.

6) Indeks Gini

P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 menargetkan untuk menurunkan gini ratio menjadi 0,35 poin pada tahun 2019 dan Tahun 2020. Data BPS menunjukan pencapaian target pada Tahun 2019 gini ratio NTT adalah sebesar 0,356 poin dan 2020 adalah 0,354 poin yang berarti mencapai target.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan gini ratio pada Tahun 2021 adalah sebesar 0,35-0,34 poin dan Tahun 2022 0,35-0,33 poin, dengan pencapaian 0,339 poin di Tahun 2021 dan 0,33 poin pada Tahun 2022. Melihat gini ratio Tahun 2019-2022, maka target pencapaian gini ratio pada Tahun 2023 juga akan tercapai.

7) Indeks Pembangunan Gender

P-RPJMD NTT Tahun 2018-2023 menargetkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2019 sebesar 93 poin dengan pencapaian 92,72 poin. Data BPS NTT, menunjukan IPG pada Tahun 2019 mencapai 92,72 poin atau mendekati target dan pada saat yang sama IPM mencapai 65,23 poin. Mengecilnya *gap* IPG terhadap IPM menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil.

Pada Tahun 2020 Pemerintah daerah menargetkan nilai Indeks Pembangunan Gender yang sama dengan pencapaian yang tidak berbeda jauh, sementara IPM ditargetkan meningkat menjadi 65. Untuk Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan IPG 94 poin dan 95 poin pada Tahun 2022, dengan pencapaian yang sama di Tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 92,63 poin. Dengan kinerja yang ditunjukkan sepanjang Tahun 2017-2022, target tersebut akan dapat dicapai.

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah sesuatu yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam lampiran Permendagri 86 Tahun 2018 dinyatakan bahwa "Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah". Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk bisa merencanakan program dan kebijakan yang akan di lakukan di suatu daerah.

Dalam hal ini penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang krusial dalam mengawali dan melaksanakan pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk meningkatkan capaian pembangunan yang berkualitas juga perlu didukung fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang komprehensif.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah yang dijadikan pondasi untuk perencanaan pembangunan daerah harus tercantum di Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu aspek yang penting dalam penyusunan RPJMD. Hal ini dikarenakan gambaran pengelolaan keuangan yang tersusun dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di RPJMD akan bisa mendeskripsikan sumber daya keuangan yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kebijakan di daerah. Dengan demikian APBD yang tercantum di RPJMD akan menggambarkan program prioritas pembangunan daerah yang dibiayai oleh pemerintah daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan dapat dianalisis melalui sumber daya keuangan yang digunakan.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian serta memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Demi mencapai upaya prioritas pembangunan seluruh kegiatan pada rencana pembangunan strategis yang tercantum dalam RPJMD, perlu ditetapkan gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan. Kedua hal tersebut perlu ditetapkan agar pengelolaan keuangan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk masyarakat umum. Gambaran pengelolaan keuangan membahas mengenai analisis realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selain itu, juga menganalisis perkembangan neraca daerah yang meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Kapasitas keuangan daerah perlu diketahui sebagai dasar untuk mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan, sehingga belanja pembangunan dapat dilakukan secara optimal, efektif dan efisien.

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu (2019-2024)

1) Kinerja Pelaksanaan APBD

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan sebagai bentuk realisasi dari kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Pengelolaan keuangan mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Ruang lingkup keuangan daerah dapat dijabarkan secara lebih terperinci sebagai berikut:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;

5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Perwujudan ruang lingkup tersebut selanjutnya dijabarkan dalam asas umum pengelolaan keuangan daerah. Dalam asas umum ini, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan analisis kinerja keuangan daerah, APBD merupakan suatu komponen krusial yang menjadi sorotan penting karena berperan langsung dalam menggambarkan kapasitas daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pengelolaan keuangannya dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah. Hal ini merupakan komitmen pemerintah Provinsi guna mewujudkan suatu sistem pengelolaan APBD yang terintegrasi yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dengan komponen tersebut dapat digunakan untuk menganalisis kerangka pendanaan di masa yang akan datang atau pendanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang ada. Kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan melihat indikator pengalokasian anggaran dan realisasi anggaran baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan, melihat realisasi pertumbuhan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan yang dalam analisa ini dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir (2019-2024).

Pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029, realisasi anggaran akan mencerminkan salah satu indikator kinerja pengelolaan keuangan yang baik, realisasi sektor pendapatan mutlak sangat strategis mengingat realisasi pendapatan inilah yang akan membiayai belanja daerah selama satu tahun, tidak terealisasinya pendapatan daerah akan mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat membiayai belanja daerah yang telah direncanakan. Pada sektor belanja, serapan anggaran mencerminkan bagaimana terserapnya manfaat oleh masyarakat pada kurun waktu satu tahun anggaran yang juga akan mendorong *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan realisasi pembiayaan menunjukkan bagaimana defisit anggaran dapat ditutupi atau tidak dalam satu tahun anggaran.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga komponen yaitu

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi pengelolaan pendapatan daerah Provinsi NTT terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lainnya. Sedangkan Pendapatan Transfer berasal dari bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari hibah, pendapatan lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT semakin meningkat nominalnya setiap tahunnya, meskipun dalam kaitan dengan target, masih mengalami variasi realisasi. Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT masih tergantung dari Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil pajak dan bukan pajak serta dana perimbangan lainnya, yang menunjukkan masih relatif tergantungnya APBD NTT terhadap dana perimbangan yang mengindikasikan derajat kemandirian fiskal yang masih perlu untuk ditingkatkan.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Provinsi NTT Tahun 2019-2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.59 Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
4	**PENDAPATAN**	**5.354.092.405.679**	**5.419.935.156.637**	**5.312.446.672.059**	**4.426.473.562.255**	**4.624.897.387.195**	**4.834.764.527.205,52**	**-2,02%**
	Pendapatan Asli Daerah	**1.258.958.953.288**	**1.166.570.596.936**	**1.238.032.648.889**	**1.363.737.981.851**	**1.427.035.167.291**	**1.451.674.792.810**	**2,89%**
4.1.01	Pajak daerah	908.207.117.663	924.189.837.048	925.862.559.388	1.095.501.455.474	1.164.822.144.629	1.222.849.908.092	6,13%
4.1.02	Retribusi daerah	60.831.986.435	34.959.171.078	69.890.857.732	61.613.862.027	44.202.047.251	26.995.208.576	-15,00%
4.1.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan		65.135.467.630	64.982.172.050	37.175.980.457	60.645.290.853	31.749.907.192	-14,79%
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	219.257.396.882	142.286.121.181	177.297.059.718	169.446.683.893	167.365.684.558	170.079.768.950	-4,95%
4.2	**Dana Perimbangan**	**4.067.952.844.498**		**4.000.655.446.445**	**3.053.836.755.861**	**3.194.678.968.455**	**3.380.193.914.696**	**-3,64%**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.067.952.844.498	4.152.039.227.723	4.000.655.446.445	3.053.836.755.861	3.194.678.968.455	3.380.193.914.696	-3,64%
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya		19323366000					
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**27.180.607.893**	**82.001.965.978**	**73.758.777.275**	**8.898.824.543**	**3.183.251.449**	**2.895.819.700**	**-36,10%**
4.3.01	Hibah	27.180.607.893	82.001.965.978	73.758.777.275	8.898.824.543	3.183.251.449	2.895.819.700	-36,10%
4.3.02	Dana darurat							
4.3.03	Dana hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)							
4.3.04	Dana penyesuaian dan otonomi khusus ****)							
4.3.05	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya							

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2025

Dalam struktur Pendapatan daerah Tahun 2019-2024, dana Perimbangan masih merupakan sumber penerimaan terbesar daerah. pada Tahun 2019 dana perimbangan berkontribusi sebesar Rp. 4,06 Triliun terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp. 5,35 Triliun, atau sebesar 75,98%. Pada Tahun 2020, dana perimbangan menyumbang sebesar Rp. 4,17 Triliun terhadap total pendapatan daerah tahun tersebut sebesar Rp. 5,41 Triliun atau sebesar 76,96%. Terlihat bahwa baik secara nominal maupun proporsi terhadap total pendapatan, terjadi peningkatan proporsi dana perimbangan dibanding tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2021, dana perimbangan menyumbang sebesar Rp. 4,00 Triliun terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp. 5,31 Triliun, atau berkontribusi sebesar 75,31% terhadap total pendapatan daerah tahun tersebut yang sebesar Rp. 5,31 Triliun. Terjadi penurunan nominal baik pendapatan daerah secara keseluruhan maupun dana perimbangan pada tahun tersebut jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020. Pada Tahun 2022, dana perimbangan menyumbang sebesar Rp. 3,05 Triliun atau setara dengan 68,99% dari total pendapatan daerah tahun tersebut yang sebesar Rp. 4,42 Triliun. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar hampir satu triliun rupiah dan kontribusinya dalam struktur pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 6,32 poin persen. Pada Tahun 2023, nominal dana perimbangan sedikit meningkat menjadi Rp. 3,00 Triliun atau menyumbang sebesar 69,08%. Pada Tahun 2024 realisasi dana perimbangan meningkat menjadi Rp. 3,38 Triliun yang juga mendorong peningkatan pendapatan daerah menjadi Rp. 4,83 Triliun, atau menyumbang sebesar 69,91% Grafik berikut memberikan gambaran perkembangan struktur pendapatan daerah provinsi NTT sepanjang 6 (enam) tahun terakhir Tahun 2019-2024.

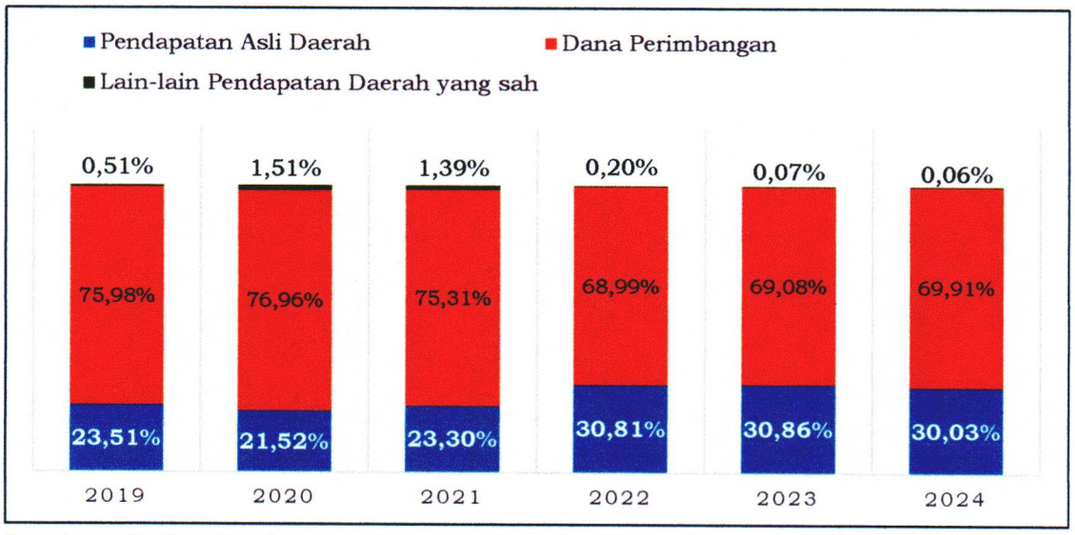

Sumber : Badan Pendapatan dan Aset Daerah, 2025, diolah

Gambar 2.75 Grafik Perbandingan Struktur Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024

Setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang perlu mendapatkan catatan. *Pertama,* Komponen dana perimbangan masih merupakan komponen terbesar dalam total pendapatan daerah sepanjang periode tersebut. Dana perimbangan masih mendominasi sumber pendapatan daerah dengan kontribusi sebesar lebih dari 65%. Hal ini mengindikasikan ketergantungan fiskal yang masih cukup tinggi dari Pemerintah Provinsi terhadap Dana Perimbangan/Transfer Pemerintah Pusat. *Kedua,* Meskipun masih merupakan komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah, proporsi dana perimbangan menunjukkan tren penurunan yang konstan sepanjang 2019-2024. *Ketiga,* Memperhatikan bahwa diantara ketiga komponen pendapatan (Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah), proporsi lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya menyumbang sebesar rata-rata 0,84%, maka dapat disimpulkan bahwa komponen Pendapatan Asli Daerah-lah yang secara perlahan

meningkatkan kontribusinya dalam struktur pendapatan daerah sepanjang Tahun 2019-2023.

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi 4 (empat) jenis pendapatan, yaitu :

1. Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dll.
2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pemakaman, Retribusi Jasa Usaha Pengolahan Limbah Cair, dll.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

Pada Tahun 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah NTT adalah sebesar Rp. 1,25 Triliun atau setara dengan sumbangan sebesar 23,51% dari total pendapatan daerah. Realisasi PAD NTT pada Tahun 2020 menurun menjadi Rp. 1,16 Triliun atau turun lebih dari Rp. 100 Milyar, dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, kontribusi PAD terhadap total pendapatan menurun menjadi 21,52%. Realisasi PAD pada Tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 1,23 Triliun, atau setara dengan 23,30% terhadap total pendapatan daerah tahun tersebut. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian Tahun 2021 berhasil meningkatkan bukan saja nominal realisasi namun juga kontribusinya terhadap total pendapatan daerah. Pada Tahun 2022 realisasi PAD NTT kembali meningkat menjadi Rp. 1,36 Triliun atau setara dengan sumbangan sebesar 30,81. Sekali lagi realisasi PAD berhasil meningkatkan bukan saja nominalnya, namun juga *share*-nya terhadap total pendapatan daerah pada tahun tersebut dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023, realisasi PAD kembali meningkat menjadi Rp. 1,42 Triliun dan *share*-nya mencapai 30,86% terhadap total pendapatan daerah. Pada Tahun 2024, realisasi PAD juga meningkat menjadi Rp. 1,45 Triliun namun *share* nya sedikit menurun menjadi 30,03% dari total pendapatan daerah. Jika membandingkan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah dalam kurun waktu Tahun 2019-2024 secara umum terlihat kinerja yang semakin baik yang dapat diinterpretasikan sebagai indikasi meningkatnya derajat kemandirian fiskal daerah secara konsisten.

Tabel 2.60 Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2019-2024

Tahun	Total Pendapatan (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi PAD Terhadap total pendapatan
2019	5.354.092.405.679	1.258.958.953.288	23,51%
2020	5.419.935.156.637	1.166.570.596.936	21,52%
2021	5.312.446.872.609	1.238.032.648.889	23,30%
2022	4.426.473.562.255	1.363.737.981.851	30,81%
2023	4.624.897.387.195	1.427.035.167.291	30,86%
2024	4.834.764.527.26	1.451.674.792.810	30,03%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2025, diolah

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah NTT terus mengalami peningkatan sepanjang periode 2019-2024. Sepanjang periode tersebut pertumbuhan rata-rata tahunan PAD adalah sebesar 2,89%. Dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya, rata-rata pertumbuhan PAD adalah satu-satunya yang bernilai positif jika dibandingkan dengan dana perimbangan mengalami pertumbuhan negatif rata-rata pertahun sebesar -3,64%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang tumbuh negatif rata-rata pertahun sebesar -36,10%. Bahkan PAD tetap tumbuh positif saat pendapatan daerah mengalami kontraksi rata-rata tahunan sebesar -2,02%.

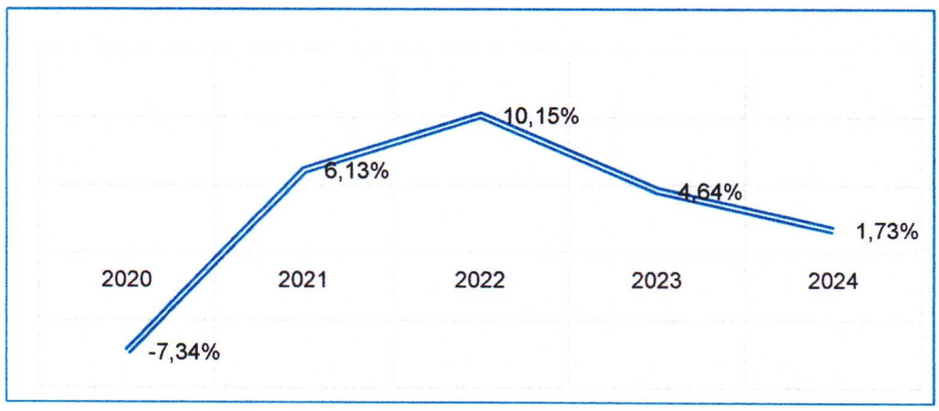

Sumber : Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, 2025, diolah

Gambar 2.76 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT Tahun 2019- 2024

2.2.2 NERACA DAERAH

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah neraca menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Keuangan Daerah menjelaskan bahwa neraca adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut : Aset adalah sumber

daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber–sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas.

Neraca Daerah memberikan informasi tentang posisi keuangan pada saat tertentu. Posisi keuangan yang dimaksud adalah posisi keuangan atas aset, utang dan ekuitas. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang

Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurun waktu 2019-2023 seperti terlihat tabel berikut dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut :

Tabel 2.61 Neraca Provinsi NTT Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
ASET							
ASET LANCAR	**463.602.595.083**	**269.666.041.007**	**482.245.798.152**	**479.497.721.040**	**499.307.602.592**	**739.877.232.414**	**9,80%**
Kas	282.629.763.942	68.383.358.384	62.544.957.627	83.034.698.805	121.412.516.764	263.265.280.880	-1,41%
Piutang	74.014.842.942	93.366.490.821	162.122.316.442	133.532.691.718	19.995.894.628	88.303.349.306	3,59%
Beban Dibayar Dimuka	690.075.268	323.258.064	211.728.495	194.398.746	7.289.642.524	200.304.096.578	210,86%
Persediaan	106.267.912.932	107.592.933.739	257.366.795.589	262.735.931.772	350.609.548.677	188.004.505.650	12,09%
INVESTASI JANGKA PANJANG	**592.998.225.440**	**594.630.895.887**	**829.823.515.361**	**865.331.161.186**	**824.154.472.608**	**846.667.485.865**	**7,38%**
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	7.975.834.273	4.671.332.858	3.435.164.323	1.367.363.828	-		-44,45%
Investasi Jangka Panjang Permanen	585.022.391.167	589.959.563.029	826.388.351.037	863.963.797.358	824.154.472.608	846.667.485.865	**7,67%**
ASET TETAP	**7.973.851.665.808**	**8.500.707.994.267**	**9.165.391.028.141**	**9.843.614.899.262**	**9.308.575.197.202**	**9.789.058.207.876**	**4,19%**
Tanah	2.816.892.864.073	2.864.160.351.261	2.970.509.471.380	2.946.035.625.118	2.935.540.314.813	2.767.006.705.334	-0,36%
Peralatan dan Mesin	514.564.673.693	607.167.473.231	666.843.407.440	1.735.225.417.396	1.983.477.478.891	2.169.023.298.506	33,34%
Gedung dan Bangunan	1.572.379.124.806	1.638.136.673.181	1.768.448.619.693	2.297.838.521.597	2.461.271.590.018	3.469.315.810.755	17,15%
Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.583.277.441.762	3.019.497.773.582	3.281.118.734.917	6.509.714.653.635	6.819.220.982.208	7.048.196.309.841	22,23%
Aset Tetap Lainnya	121.810.071.907	171.551.388.632	202.452.912.761	222.888.117.017	245.951.097.870	270.358.725.959	17,29%

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Konstruksi dalam pengerjaan	364.927.489.567	200.194.334.381	276.017.881.950	221.575.002.030	185.895.865.804	144.240.219.938	-16,94%
Akumulasi Penyusutan				- 4.089.662.437.531	- 5.322.782.132.401	- 6.079.082.862.457	21,92%
PROPERTY INVESTASI				-	**22.933.168.922**	**547.734.873.892**	**22,88**
Properti Investasi				-	22.933.168.922	547.734.873.892,00	22,88
DANA CADANGAN	-	-	-	**101.018.750.000**	**211.429.551.796**	-	**109,30%**
Dana Cadangan				101.018.750.000	211.429.551.796	-	109,30%
ASET LAINNYA	**87.386.938.924**	**384.517.471.501**	**369.950.425.579**	**373.972.116.462**	**393.018.493.958**	**378.304.054.693**	**34,05%**
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	33.060.950.000	33.060.950.000	35.243.950.000	35.243.950.000	54.759.930.962	54.759.930.962	10,62%
Aset Tidak Berwujud	9.566.707.975	8.640.269.604	9.374.962.224	8.502.614.253	15.317.022.173	15.331.522.173	9,89%
Aset Lain-lain	44.759.280.950	342.816.251.897	325.331.513.354	330.225.552.210	338.126.806.131	324.135.243.336	48,58%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud					-14.003.455.531	-14.714.720.558	5,08%
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya					-1.181.809.777	-1.207.921.219	2,21%
JUMLAH ASET DAERAH	**11.663.434.647.951**	**11.663.434.647.951**	**11.663.434.647.951**	**11.663.434.647.951**	**11.259.418.487.078**	**12.301.641.854.741**	**1,07%**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
KEWAJIBAN	**56.929.422.509**	**228.479.309.224**	**641.414.208.027**	**1.267.002.282.372**	**1.195.417.144.551**	**952.013.151.226**	**75,66%**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**56.929.422.509**	**156.520.948.224**	**390.635.768.027**	**286.124.959.116**	**398.959.631.717**	**318.298.365.594**	**41,09%**
Utang Perhitungan Fihak Ketiga				-	201.458.557	436.070.688,00	**116,46%**
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		1.070.113.277		61.069.423.338	55.688.549.678	45.397.745.235,00	155,21%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		71.958.361.000	210.015.569.086	-	159.640.544.216	159.291.542.148,00	21,98%
Pendapatan Diterima Dimuka	1.550.815.834	1.262.383.333	2.712.571.254	1.281.125.050	2.090.653.209	5.161.956.414,87	27,19%
Utang Belanja	27.674.966.720	33.177.073.950	34.053.595.722	23.531.085.677	181.338.426.057	108.011.051.108,60	31,30%
Utang Jangka Pendek Lainnya	27.703.639.956	49.053.016.664	143.854.031.965	200.243.325.051	-	-	0,00%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	**71.958.361.000**	**250.778.440.000**	**980.877.323.256**	**796.457.512.834**	**633.714.785.632**	**72,27%**
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	-	71.958.361.000	250.778.440.000	980.877.323.256	796.457.512.834	633.714.785.632,00	72,27%

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
EKUITAS DANA	**9.091.417.465.318**	**9.552.250.935.718**	**10.233.719.426.349**	**10.396.432.365.579**	**10.064.001.342.527**	**11.349.628.703.515**	**4,54%**
Ekuitas	9.091.417.465.318	9.552.250.935.718	10.233.719.426.349	10.396.432.365.579	10.064.001.342.527	11.349.628.703.515,30	4,54%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**9.148.346.887.827**	**9.780.730.244.942**	**10.875.133.634.377**	**11.663.434.647.951**	**11.259.418.487.078**	**12.301.641.854.742**	**6,10%**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2024, diolah

Adapun rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019- 2023 dapat dijelaskan pada Tabel di atas sebagai berikut:

1. Struktur Aset Daerah

Total aset NTT menunjukkan stabilitas dengan nilai konsisten sebesar Rp11.663 triliun (2019–2024). Komponen utama aset meliputi:

a) **Aset Lancar**: Berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan -1,58% per tahun. Kas dan persediaan mendominasi, meski terjadi penurunan signifikan pada kas di Tahun 2020 (Rp. 68,3 miliar) yang pulih ke Rp. 263,2 miliar pada Tahun 2024.
b) **Aset Tetap**: Menjadi tulang punggung aset daerah (Rp. 9.843 miliar pada Tahun 2022), dengan pertumbuhan rata-rata 4,34% per tahun. Infrastruktur seperti jalan, jaringan, dan irigasi berkontribusi besar (Rp. 6.509 miliar pada Tahun 2022), diikuti gedung dan bangunan (Rp2.297 miliar).
c) **Investasi Jangka Panjang**: Tumbuh 7,86% per tahun, terutama dari investasi permanen (Rp. 863,9 miliar pada Tahun 2022).
d) **Dana Cadangan:** Muncul pertama kali pada Tahun 2022 (Rp. 101 miliar), menunjukkan upaya penguatan cadangan fiskal.

2. Kewajiban Daerah

Kewajiban NTT meningkat signifikan dari Rp. 56,9 miliar (2019) menjadi Rp. 1,267 Triliun (2022), dengan pertumbuhan rata-rata 117,5% per tahun. Dominasi berasal dari:

a) **Kewajiban Jangka Pendek**: Utang belanja dan utang jangka pendek lainnya menjadi penyumbang utama (Rp. 200,2 miliar pada Tahun 2022).
b) **Kewajiban Jangka Panjang**: Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) meningkat pesat (Rp. 980,8 miliar pada Tahun 2022), mencerminkan kebutuhan pembiayaan infrastruktur.

3. Ekuitas Dana

Ekuitas dana menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan rata-rata 2,23% per tahun, mencapai Rp. 10.396 miliar pada Tahun 2022. Hal ini mengindikasikan peningkatan kapasitas modal daerah untuk mendukung pembangunan.

Dalam rangka memperkuat fondasi keuangan daerah, RPJMD 2025–2029 akan memprioritaskan beberapa langkah strategis. Pertama, optimalisasi aset lancar, terutama kas dan piutang, menjadi kunci untuk menjaga likuiditas dan fleksibilitas fiskal. Dengan meningkatkan efisiensi penagihan piutang dan pengelolaan kas, pemerintah daerah dapat memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk mendukung program-program prioritas. Kedua, pertumbuhan aset tetap, terutama infrastruktur seperti jalan, jaringan, dan gedung, perlu diimbangi dengan komitmen pemeliharaan dan pemanfaatan yang optimal. Hal ini tidak hanya memperpanjang usia aset tetapi juga memaksimalkan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

Selanjutnya, manajemen utang yang *prudent* menjadi sangat penting mengingat peningkatan kewajiban yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Strategi *refinancing* dan restrukturisasi utang perlu diterapkan untuk mengurangi beban bunga dan memperpanjang tenor pembayaran, sehingga tidak mengganggu anggaran belanja daerah. Terakhir, penguatan ekuitas melalui dana

cadangan dan kemitraan dengan pihak ketiga dapat menjadi alternatif pembiayaan yang berkelanjutan. Dengan memperluas kolaborasi dengan swasta dan lembaga non-pemerintah, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pada utang sekaligus mendorong investasi di sektor-sektor strategis. Langkah-langkah ini secara holistik akan memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi NTT.

2.2.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam pengambilan keputusan baik terkait pendapatan maupun belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran dengan menggunakan basis atau pendekatan kinerja, yang mana setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan pencapaian tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan pembiayaan dari APBD harus memiliki tujuan, sasaran yang jelas, mampu memberikan manfaat yang besar dan dampak yang terukur pada kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini.

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, yaitu :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Idealnya, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK).

1) Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauh mana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan.

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta mendekati *value of money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun 2019-2023 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Gambaran mengenai belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.62 Kinerja Belanja Daerah 2019 – 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	BELANJA	**5.769.807.564.377**	**6.346.051.009.714**	**5.508.767.906.133**	**4.816.652.654.357**	**4.460.910.047.258**	**4.734.233.960.687**	**-3,88**
A	**Belanja Operasi**	**4.216.534.683.151**	**4.308.249.666.531**	**4.061.962.995.626**	**3.051.851.164.202**	**3.185.343.321.503**	**3.466.416.165.986**	**-3,84**
1	Belanja Pegawai	1.529.240.445.790	1.572.840.496.872	1.608.464.234.033	1.421.874.102.462	1.511.605.996.659	1.657.120.559.738	1,62
2	Belanja Barang dan Jasa	1.338.350.537.361	1.267.165.716.152	1.078.288.386.249	1.208.109.064.096	1.207.862.533.807	1.187.933.433.010	-2,36
3	Belanja Bunga	-	13.572.187.737	17.483.698.422	54.539.281.319	62.884.046.386	57.260.225.861	43,32
4	Belanja Hibah	1.319.391.900.000	1.430.660.663.400	1.347.483.386.922	335.277.916.325	379.445.844.651	534.471.551.377	-16,53
5	Belanja Bantuan Sosial	29.551.800.000	24.010.602.370	10.243.290.000	32.050.800.000	23.544.900.000	29.630.396.000	0,05
B	**Belanja Modal**	**993.171.440.674**	**1.230.586.986.777**	**903.257.622.800**	**1.216.802.446.597**	**621.342.023.686**	**534.026.912.722**	**-11,67**
1	Belanja Modal Tanah	30.000.000	209.530.885.897	147.952.000	1.050.294.656	-	-	103,63
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.925.962.502	181.551.939.494	185.901.613.833	144.284.448.880	193.621.780.166	176.283.126.408	5,49
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	145.135.351.565	668.647.178.200	135.344.543.385	141.655.437.253	248.250.770.111	216.818.216.838	8,36
4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	566.621.688.160	170.856.983.186	572.412.496.697	909.704.835.562	155.271.232.138	114.279.541.753	-27,4
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	146.458.438.447	-	9.451.016.885	20.107.430.246	24.198.241.271	26.646.027.723	-28,88
C	**Belanja Tidak Terduga**	**12.700.000.000**	**282.577.430.725**	**135.775.036.685**	**7.228.173.756**	**707.344.000**	**3.331.110.441**	**-23,48**
1	Belanja Tidak Terduga	12.700.000.000	282.577.430.725	135.775.036.685	7.228.173.756	707.344.000	3.331.110.441	-23,48
D	**Belanja Transfer**	**547.401.440.552**	**524.636.925.681**	**407.772.251.022**	**540.770.869.801**	**653.517.358.069**	**730.459.771.539**	**5,94**
1	Belanja Bagi Hasil	544.690.506.152	519.636.925.681	397.772.251.022	527.502.869.801	653.517.358.069	724.153.525.994	5,86
2	Belanja Bantuan	2.710.934.400	5.000.000.000	10.000.000.000	13.268.000.000	-	6.306.245.545	18,39

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2025

Secara umum sepanjang periode 2019-2024, belanja daerah mengalami kontraksi tahunan sebesar -3,88%. Dari empat kelompok belanja yang ada, sebanyak tiga kelompok belanja mengalami rata-rata pertumbuhan negatif dan hanya satu kelompok belanja yang tumbuh positif. Kelompok Belanja operasi sepanjang periode 2019-2024 berkontraksi sebesar rata-rata -3,84% per tahun, kelompok belanja modal juga tumbuh negatif sebesar rata-rata -11,67% per tahun. Kelompok Belanja tidak terduga juga tumbuh negatif sebesar rata-rata -23,48% per tahun. Hanya kelompok belanja transfer yang tumbuh positif sebesar rata-rata 5,94 % per tahun sepanjang periode 2019-2023.

Dalam kelompok belanja operasi, 3 (tiga) jenis belanja tumbuh positif sepanjang periode 2019-2024 yaitu belanja bunga dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 43,32%, belanja pegawai sebesar 1,62% dan belanja bantuan sosial sebesar 0,05%. Jenis belanja lain dalam kelompok belanja operasional mengalami pertumbuhan negatif. Belanja barang dan jasa tumbuh negatif sebesar -2,36%, belanja hibah mengalami kontraksi sebesar rata-rata -16,53% per tahun sepanjang Tahun 2019-2024.

Jenis-jenis belanja dalam kelompok belanja modal mengalami rata-rata pertumbuhan yang sedikit berbeda dengan apa yang terjadi pada jenis belanja pada kelompok belanja operasi. Meskipun secara umum belanja modal mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar -11,67%, jenis belanja modal tanah tumbuh positif sebesar rata-rata 103,63% sepanjang 2019-2024, belanja modal peralatan dan mesin tumbuh positif sebesar rata-rata 5,49%, dan belanja modal gedung dan bangunan tumbuh rata-rata sebesar 8,36%. Sementara itu jenis belanja lain dalam kelompok belanja modal ini berkontribusi terhadap rata-rata kontraksi tahunan kelompok belanja modal. Belanja jalan, jaringan dan irigasi tumbuh rata-rata -27,40% dan belanja modal aset tetap lainnya tumbuh rata-rata negatif sebesar -28,88%. Oleh karena proporsinya yang dominan dalam kelompok belanja modal, jenis belanja jalan, jaringan dan irigasi sangat berpengaruh terhadap rata-rata kontraksi tahunan yang terjadi pada kelompok belanja modal.

Pada kelompok belanja tidak terduga, terlihat pertumbuhan yang negatif. Pada Tahun 2019, realisasi belanja tidak terduga mencapai Rp. 12,7 milyar, meningkat menjadi Rp. 282,57 milyar pada Tahun 2020 sebelum menurun pada Tahun 2021 menjadi Rp. 135,7 milyar. Pada Tahun 2022 belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp. 7,2 milyar sebelum turun menjadi Rp. 707,3 juta pada Tahun 2023, namun kemudian meningkat menjadi Rp. 3,33 milyar pada 2024. Dengan realisasi demikian, rata-rata pertumbuhan tahunan belanja tidak terduga tercatat sebesar -23,48% sepanjang periode 2019-2024.

Satu-satunya kelompok belanja yang tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan positif hanyalah belanja transfer. Belanja transfer tumbuh sebesar rata-rata 5,94% sepanjang 2019-2024. Kedua jenis belanja yang termasuk dalam kelompok belanja ini yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan tahunan yang berbeda. Belanja bagi hasil sepanjang 2019-2024 tumbuh sebesar rata-rata 5,86% sementara belanja bantuan keuangan tumbuh rata-rata sebesar 18,39% sepanjang 2019-2024. Oleh karena proporsinya yang sangat dominan, pertumbuhan belanja bagi hasil memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong rata-rata pertumbuhan kelompok belanja transfer.

Sepanjang periode 2019-2024 proporsi belanja Operasi dalam APBD Provinsi NTT merupakan komponen terbesar dalam struktur belanja daerah dengan rentang 63,36% (terendah, Tahun 2022), dan 73,22% (tertinggi, Tahun 2024). Pada Tahun 2019 Belanja Operasi berkontribusi sebesar 73,08% terhadap total belanja, menurun menjadi 67,89% pada Tahun 2020 namun meningkat proporsinya menjadi 73,74% pada Tahun 2021. Pada Tahun 2022 proporsi belanja operasi terhadap total belanja menurun menjadi 63,36 untuk kemudian kembali meningkat menjadi 71,41% terhadap total belanja pada Tahun 2023.

Dalam kelompok belanja operasi ini, jenis belanja Pegawai merupakan jenis belanja yang memiliki proporsi terbesar. Pada Tahun 2019, belanja pegawai memiliki proporsi 36,27% sedikit meningkat proporsinya menjadi 36,51% pada Tahun 2020 dan kembali meningkat menjadi 39,60% pada Tahun 2021. Tren peningkatan belanja pegawai pada kelompok belanja operasi berlanjut pada Tahun 2022 dan 2023. Pada Tahun 2022, proporsi belanja pegawai meningkat menjadi 46,59% untuk kemudian meningkat lagi menjadi 47,46% pada Tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi 47,81% pada Tahun 2024. Masih dalam kelompok belanja operasi, Belanja barang dan jasa dan belanja hibah merupakan jenis belanja dengan proporsi terbesar setelah belanja pegawai sepanjang periode 2019-2024. Pada Tahun 2019, jenis belanja barang dan jasa berkontribusi sebesar 31,74% sementara belanja hibah tercatat berkontribusi sebesar 31,29%. Pada Tahun 2020, proporsi belanja hibah meningkat menjadi 33,21% sementara belanja barang dan jasa menurun proporsinya menjadi 29,41%. Belanja hibah pada Tahun 2021 masih merupakan jenis belanja dengan proporsi terbesar dalam kelompok belanja operasi dengan *share* sebesar 33,17% berbanding belanja barang dan jasa yang memiliki proporsi sebesar 26,55%. Proporsi belanja barang dan jasa meningkat pada Tahun 2022 menjadi 39,59% sementara belanja hibah mengalami penurunan proporsi menjadi 10,99% dalam kelompok belanja operasi. Pada Tahun 2023 proporsi belanja hibah sedikit meningkat menjadi 11,91% sementara proporsi belanja barang dan jasa dalam kelompok belanja operasi berkurang proporsinya menjadi 37,92%. Pada Tahun 2024 proporsi belanja barang dan jasa sedikit menurun menjadi 34,27% sementara belanja hibah meningkat menjadi 15,42%.

Tabel 2.63 Struktur Belanja Daerah Tahun 2019-2024

Uraian	Proporsi					
	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
BELANJA						
Belanja Operasi	**73,08**	**67,89**	**73,74**	**63,36**	**71,41**	**73,22**
Belanja Pegawai	36,27	36,51	39,60	46,59	47,46	47,81
Belanja Barang dan Jasa	31,74	29,41	26,55	39,59	37,92	34,27
Belanja Bunga	0,00	0,32	0,43	1,79	1,97	1,65
Belanja Hibah	31,29	33,21	33,17	10,99	11,91	15,42
Belanja Bantuan Sosial	0,70	0,56	0,25	1,05	0,74	0,85
Belanja Modal	**17,21**	**19,39**	**16,40**	**25,26**	**13,93**	**11,28**
Belanja Modal Tanah	0,00	17,03	0,02	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13,59	14,75	20,58	31,16	31,16	33,01
Belanja Modal Gedung	14,61	54,34	14,98	39,95	39,95	40,60

Uraian	Proporsi					
	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
dan Bangunan						
Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	57,05	13,88	63,37	24,99	24,99	21,40
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14,75	0,00	1,05	3,89	3,89	4,99
Belanja Tidak Terduga	**0,22**	**4,45**	**2,46**	**0,15**	**0,02**	**0,07**
Belanja Tidak Terduga	100	100	100	100,00	100	100
Belanja Transfer	**9,49**	**8,27**	**7,40**	**11,23**	**14,65**	**15,43**
Belanja Bagi Hasil	99,50	99,05	97,55	97,55	100,00	99,14
Belanja Bantuan	0,50	0,95	2,45	2,45	0,00	0,86

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2025

Belanja modal merupakan kelompok belanja terbesar kedua setelah belanja operasi. Pada periode Tahun 2019-2024 proporsi rata-rata belanja modal terhadap keseluruhan belanja daerah berkisar antara 25,26% (terbesar pada Tahun 2022) dan 11.28% (terkecil pada Tahun 2024). Pada Tahun 2019, belanja modal memiliki proporsi sebesar 17,21% terhadap total belanja. Pada Tahun 2020 meningkat menjadi 19,39% dan pada Tahun 2021 meningkat menjadi 16,40%. Kembali meningkat menjadi 25,26% pada Tahun 2022 sebelum turun menjadi 13,93% pada Tahun 2023 dan kembali menurun pada Tahun 2024 menjadi 11,28% dari total belanja daerah. Peningkatan proporsi belanja modal dalam struktur belanja daerah ini terutama didorong oleh peningkatan jenis belanja jalan, jaringan dan irigasi yang memiliki proporsi terbesar pada kelompok belanja modal. Jenis belanja jalan, jaringan dan irigasi memiliki proporsi rata-rata 49,12% sepanjang periode 2019-2023 diikuti oleh Gedung dan Bangunan sebesar 26,99%. Sementara itu rata-rata proporsi belanja Peralatan dan Mesin, Tanah, dan Aset Tetap Lainnya sepanjang periode tersebut adalah masing-masing 13,09%, 5,69% dan 5,10% terhadap total belanja modal.

Belanja tidak terduga merupakan belanja dengan proporsi terkecil dalam APBD NTT periode 2019-2024. Rentang proporsi Belanja Tidak Terduga sepanjang lima tahun tersebut adalah 0,02% (terendah, pada Tahun 2023) hingga 4,45% (tertinggi, pada Tahun 2020). Pada kelompok belanja transfer, jenis belanja terbesar adalah belanja bagi hasil. Dalam lima tahun antara 2019-2023 belanja bagi hasil memiliki share sebesar lebih dari 97%. Jenis belanja lain dalam kelompok ini adalah belanja bantuan keuangan hanya memiliki proporsi sebesar 0,50% (terendah, pada Tahun 2019) sampai 2,45% (tertinggi, pada Tahun 2022). Belanja bantuan keuangan tidak terealisasi pada Tahun 2023.

Selanjutnya dilakukan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 3 (tiga) tahun terakhir dengan Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.64 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Tahun Anggaran	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	2019	1.858.181.867.078,49	5.780.556.528.376,55	32,15
2	2020	1.827.233.350.611,00	6.373.051.009.714,00	28,67

No	Tahun Anggaran	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
3	2021	1.833.165.988.730,00	5.752.925.004.696,89	31,86
4	2022	1.734.971.692.769,36	5.139.606.200.246,69	33,76
5	2023	1.787.918.247.620,00	5.174.188.030.274,00	34,55
6	2024	1.594.546.766.984,00	4.897.325.689.957,31	32,56

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat total belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur pada Tahun 2019 sebesar Rp. 1.858.181.867.078,49 dan proporsinya terhadap total pengeluaran pemerintah adalah sebesar 32,15%. Pada Tahun 2020 belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur menurun menjadi Rp. 1.827.233.350.611,00 dan proporsinya dalam total pengeluaran pemerintah daerah juga menurun menjadi 28,67%. Pada Tahun 2021, Total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur sedikit meningkat menjadi Rp. 1.833.165.988.730,00 dan proporsinya kembali meningkat menjadi 31,86%. Pada Tahun 2022, namun meskipun secara nominal mengalami penurunan menjadi Rp. 1.734.971.692.769,36 namun proporsinya terhadap total belanja mengalami peningkatan menjadi 33,76%. Pada tahun berikutnya, realisasi belanja kebutuhan aparatur sedikit meningkat menjadi Rp. 1.787.918.247.620,00 dan proporsinya meningkat menjadi 34,55%.

Pada Tahun 2024, realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur kembali menurun menjadi Rp. 1.594.546.766.984, dan proporsinya terhadap total belanja menurun menjadi 32,56%. Terdapat tren peningkatan alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur yang juga berarti proporsi belanja non kebutuhan aparatur cenderung menurun proporsinya dalam struktur pengeluaran daerah sepanjang periode tersebut, yang juga berarti belanja-belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat lewat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan daerah semakin berkurang proporsinya dalam struktur pengeluaran pemerintah daerah sepanjang periode 2019-2023.

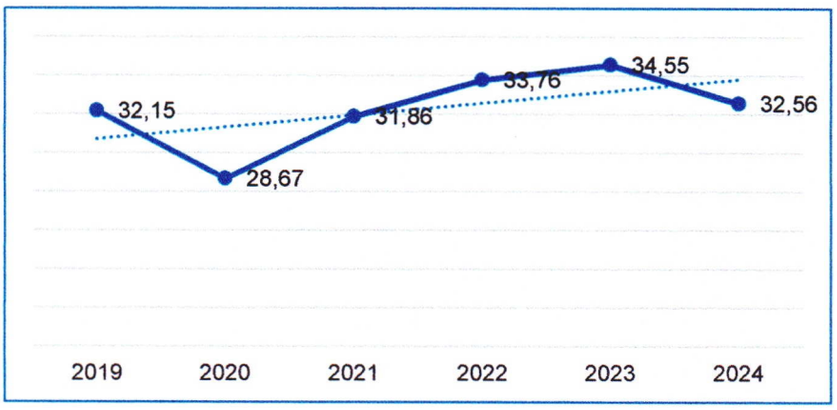

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2025, diolah

Gambar 2.77 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi NTT Tahun 2019 -2024

Apabila didalami, juga terlihat tren peningkatan belanja Pegawai terhadap total belanja daerah pada periode 2019-2024. Pada Tahun 2019, proporsi belanja pegawai terhadap total belanja adalah sebesar 26,50%, menurun pada tahun berikutnya menjadi 24,78% namun meningkat menjadi 29,20% pada Tahun 2021. Pada Tahun 2022, proporsi belanja pegawai terhadap total belanja meningkat menjadi 29,52% dan pada Tahun 2023 meningkat cukup besar menjadi 33,89%. Pada Tahun 2023, peningkatan belanja kebutuhan aparatur menurun menjadi 32,56%. Meskipun mengalami dua kali penurunan (pada Tahun 2020 dan 2024), namun peningkatan pada Tahun 2019, 2021, 2022 dan 2023 menyebabkan kinerja belanja pemenuhan aparatur ini mengalami peningkatan dalam enam tahun terakhir. Peningkatan proporsi belanja pegawai ini sejalan dengan peningkatan proporsi belanja untuk kebutuhan aparatur yang mengindikasikan perubahan konstan dalam struktur belanja daerah sepanjang periode 2019-2024. Apabila jumlah belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur meningkat berarti alokasi belanja operasi semakin kecil. Anggaran belanja operasi merupakan anggaran terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (*pro-poor*), pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dan perluasan lapangan kerja (*pro-job*).

2) Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui Analisis sumber penutup defisit riil, yang akan memberi gambaran tentang kebijakan anggaran periode sebelumnya untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah.

Tabel 2.65 Defisit Riil Anggaran Provinsi NTT Tahun 2019-2024

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
01:00	Realisasi Pendapatan Daerah	5.354.092.405.679	5.419.935.156.637	5.312.446.872.609	4.426.473.562.255	4.624.897.387.195	4.834.764.527.205,52
	Dikurangi realisasi:						
02:00	Belanja Daerah	5.277.064.650.987	5.755.258.016.194	5.508.767.906.133	4.816.652.654.357	4.460.910.047.258	4.734.233.960.687,31
03:00	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.748.964.000	27.000.000.000	244.157.098.564	322.953.545.890	264.779.266.206	163.091.729.270,00
A	**Defisit riil**	**66.278.790.692**	**-362.322.859.556**	**-440.478.132.088**	**-713.132.637.991**	**-100.791.926.269**	**-62.561.162.751,79**

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2025

Sepanjang periode 2019-2024 hanya pada tahun 2019 terjadi surplus rill anggaran sebesar Rp. 66,27 Milyar lebih sementara pada tahun 2020 -2024 terjadi defisit riil anggaran sebesar masing-masing Rp. 362,32 Milyar lebih (2020), Rp. 440,47 Milyar lebih (2021), Rp. 713,13 Milyar lebih (2022), Rp. 100,79 Milyar lebih (2023), dan Rp. 62,56 Milyar lebih (2024). Pada Tahun 2019 realisasi pendapatan daerah melampaui target sehingga dapat menutupi realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah sementara pada Tahun 2020 – 2025 terdapat dua hal yang mendorong terjadinya defisit riil, yaitu adanya pinjaman daerah khususnya pada Tahun 2020-2021, dan Realisasi pendapatan daerah yang tidak mencapai target.

Adapun komposisi penutup defisit riil APBD Anggaran Provinsi NTT Tahun 2019 – 2025 digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.66 Komposisi Penutup Defisit Riil APBD Anggaran Provinsi NTT Tahun 2019-2024

NO	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
01:00	**Realisasi Pendapatan Daerah**	**5.354.092.405.679**	**5.419.935.156.637**	**5.312.446.872.609**	**4.426.473.562.255**	**4.624.897.387.195**	**4.834.764.527.205,52**
	Dikurangi realisasi:						
02:00	Belanja Daerah	5.277.064.650.987	5.755.258.016.194	5.508.767.906.133	4.816.652.654.357	4.460.910.047.258	4.734.233.960.687,31
03:00	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.748.964.000	27.000.000.000	244.157.098.564	322.953.545.890	264.779.266.206	163.091.729.270,00
A	**Defisit riil**	**66.278.790.692**	**-362.322.859.556**	**-440.478.132.088**	**-713.132.637.991**	**-100.791.926.269**	**-62.561.162.751,79**
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
04:00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	212.794.972.829	282.629.763.942	68.383.358.384	62.544.957.627	83.195.862.278	121.211.058.206,94
05:00	Pencairan Dana Cadangan					136.488.800.000	203.511.200.000,00
06:00	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan						
07:00	Penerimaan Pinjaman Daerah		143.916.722.000	431.234.385.650	730.098.883.256		
08:00	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.556.000.421	4.159.731.999	3.405.345.681	3.523.495.914	2.318.322.197	1.132.467.037,00
09:00	Penerimaan Piutang Daerah						
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**216.350.973.250**	**430.706.217.941**	**503.023.089.715**	**796.167.336.797**	**222.002.984.475**	**325.854.725.243,94**
A-B	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**	**282.629.763.942**	**68.383.358.384**	**62.544.957.627**	**83.034.698.805**	**121.211.058.207**	**263.293.562.492,15**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2024

Total realisasi penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun 2019 berasal dari Silpa sebesar Rp. 212.79 Milyar dan penerimaan kembali pembiayaan daerah sebesar Rp. 3,55 Milyar sehingga berjumlah total Rp. 216, 35 Milyar. Ditambah dengan surplus riil Tahun 2019, maka sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan 2019 adalah sebesar Rp. 282,62 milyar lebih. Pada Tahun 2020, total realisasi penerimaan pembiayaan daerah adalah sebesar

Rp. 430, 70 milyar lebih yang berasal dari silpa tahun sebelumnya sebesar Rp. 282,62 milyar, penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp. 143,91 milyar lebih, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp. 4,15 milyar lebih. Oleh karena terjadi defisit riil sebesar Rp. 363,32 milyar lebih pada tahun ini, besaran penerimaan pembiayaan daerah pada tahun tersebut membuat terbentuknya Silpa tahun berkenaan sebesar Rp. 68,38 milyar lebih.

Silpa tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 282,62 milyar lebih ditambah pinjaman daerah sebesar Rp. 143,91 milyar ditambah dengan penerimaan kembali pemberian pembiayaan daerah sebesar Rp. 4,15 milyar lebih mengkomposisi total realisasi penerimaan pembiayaan daerah 2020 sebesar Rp. 430, 70 Milyar lebih. Setelah menutup defisit riil Tahun 2020 yang sebesar Rp 362,32 Milyar lebih, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 2020 adalah sebesar Rp. 68,38 milyar lebih.

Pada Tahun 2021, ketika defisit riil mencapai Rp. 440,47 Milyar lebih, total realisasi penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp. 503,02 milyar lebih yang terdiri dari silpa sebesar Rp. 68,35 milyar lebih, penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp. 431,23 milyar lebih dan Penerimaan Kembali Pemberian Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 3,40 milyar lebih. Setelah menutup defisit riil Tahun 2021, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan adalah sebesar Rp. 62,54 milyar lebih.

Pada Tahun 2022, ketika defisit riil mencapai Rp. 713,13 milyar lebih, total realisasi penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp. 796,16 milyar lebih yang berasal dari silpa tahun anggaran sebelumnya yang mencapai Rp. 62,54 milyar, penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp. 730, 09 milyar lebih dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp. 3, 52 milyar lebih. Setelah menutup defisit belanja, total realisasi penerimaan pembiayaan daerah ini masih menyisakan silpa tahun berkenaan sebesar Rp. 83,03 milyar lebih.

Pada Tahun 2023, ketika terjadi defisit belanja sebesar Rp. 100,79 milyar lebih, defisit ditutup dari penerimaan pembiayaan yang terealisasi sebesar Rp. 222,0 milyar lebih yang berasal dari silpa tahun sebelumnya sebesar Rp. 83,19 milyar, pencairan dana cadangan sebesar Rp. 136,48 milyar dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp. 2,3 milyar lebih. Penerimaan pembiayaan yang lebih besar dari defisit riil menyebabkan silpa tahun berjalan pada Tahun 2023 tercatat sebesar Rp. 121,211 milyar lebih.

Di Tahun 2024, ketika defisit riil mencapai Rp. 65,56 milyar, defisit ditutup dari penerimaan pembiayaan yang terealisasi sebesar Rp. 325,85 milyar lebih yang berasal dari silpa tahun sebelumnya sebesar Rp. 121,211 milyar (Silpa sebesar ini diperoleh setelah dilakukannya penghematan belanja daerah), pencairan dana cadangan sebesar Rp. 203,51 milyar dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp. 1,13 milyar lebih.

2.2.4. Kerangka Pendanaan

Analisis Kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama masa transisi menuju pelaksanaan Pemilihan sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024. Kapasitas riil keuangan daerah adalah merupakan penerimaan/pendapatan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat.

Proyeksi pendanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 merupakan angka optimal yang didasarkan atas asumsi dan tren rata-rata pertumbuhan dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dari sisi pendapatan yang dipakai adalah analisis pertumbuhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah, ditambah dengan potensi pendapatan daerah yang akan dikembangkan dalam periode perencanaan. Dari sisi belanja tren pertumbuhan digunakan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal, membiayai program strategis dan prioritas pembangunan daerah serta pencapaian indikator kinerja utama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029. Dari sisi pembiayaan, akan dilakukan investasi-investasi pada sektor produktif untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah, di samping membiayai kebijakan hutang daerah untuk membiayai investasi publik yang menghasilkan pendapatan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut selanjutnya akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan serta perubahan terhadap asumsi makro ekonomi, harga minyak, nilai tukar rupiah, inflasi, dan perkembangan situasi serta kondisi ekonomi global, nasional, dan regional. Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2030 sebagaimana berikut:

2.2.5 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

1) Proyeksi Pendapatan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur sumber keuangan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis pembagian subsidi pusat kepada Daerah. Pada prinsipnya pembagian sumber keuangan menurut Undang-Undang ini menganut asas pemisahan terikat terhadap sumber keuangan, dimana objek pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Pusat tidak dapat dikenakan lagi oleh Pemerintah Daerah sehingga sistem pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia menganut asas pemisahan terikat pembagian sumber penerimaan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sumber-sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang ini adalah: (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain PAD yang sah, (5) Dana Transfer, (6) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana Transferyang dimaksud pada poin 5 (lima) adalah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dari komponen pendapatan sebagaimana dijabarkan di atas dan gambaran perkembangan realisasi kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2024, ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur cukup tinggi terhadap alokasi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang masih belum berubah yaitu kurang optimalnya pengelolaan PAD yang berakibat masih rendahnya kemampuan PAD, alokasi jenis belanja yang tidak produktif, pemanfaatan alokasi belanja yang tidak efisien dan efektif serta pengelolaan administrasi yang belum optimal.

Terkait dengan permasalahan tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan keuangan kedepan yaitu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menetapkan arah dan kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan daerah. Untuk Pendapatan, perlu adanya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD agar ketergantungan keuangan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat dapat ditutupi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 , Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari : (a) Pajak daerah, (b) Retribusi daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Mendasarkan capaian kinerja pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023, maka pendapatan daerah tahun 2025–2029 diupayakan dapat meningkat. Peningkatan kinerja pendapatan daerah tersebut dapat ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah melalui peningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Yang dimaksud dengan upaya intensifikasi yaitu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber pendapatan yang sudah ada. Upaya intensifikasi pendapatan ditempuh melalui:

a. Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah melalui :
   - Pemetaan potensi dan pemutakhiran data wajib pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
   - Meningkatkan porsi pembayaran pajak melalui digitalisasi System (SAMSAT Online);
   - Pemberlakuan *Tax amnesty* untuk merangsang kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.
b. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum melalui :
   - Revisi/penyesuaian Perda untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
   - Pemberlakuan mekanisme *reward and punishment* kepada wajib pajak daerah (Misalnya pemberian diskon 5% kepada 1.000 pembayar PKB yang membayar sebelum jatuh tempo sebagai bentuk reward, dan pengumuman nama penunggak pajak di koran/radio-*Naming and shaming* sebagai bentuk sanksi)

- Penguatan regulasi daerah terkait opsen pajak yang mulai berlaku.

c. Inovasi melalui pemanfaatan Teknologi dan Data :
   - Implementasi sistem terintegrasi (*e-government*) dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
   - Analisis *big data* untuk identifikasi potensi dan kebocoran.
d. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dengan melakukan pelatihan administrasi pajak dan manajemen aset daerah
e. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui edukasi (kampanye kesadaran pajak dan transparansi penggunaan PAD);
f. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI;
g. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
h. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
i. Evaluasi dan Adaptasi Berkala. Pemantauan kinerja triwulanan dan *benchmarking* untuk mengetahui efektifitas kebijakan pendapatan pemerintah daerah.

Upaya ekstensifikasi pendapatan asli daerah adalah upaya menciptakan/memanfaatkan sumber pendapatan baru yang belum optimal. Upaya ekstensifikasi pendapatan daerah melalui:

a. Pengembangan Sumber PAD Baru melalui upaya-upaya :
   - Pemanfaatan SDA berkelanjutan (pariwisata, hasil hutan non-kayu)
   - Inovasi retribusi baru (destinasi wisata, layanan digital, sewa aset).
   - Penguatan BUMD di sektor strategis (transportasi, energi terbarukan).
   - Pemanfaatan peluang terkait perdagangan carbon (carbon trading) melalui pengembangan proyek carbon daerah, penerapan pajak dan retribusi daerah terhadap transaksi carbon di daerah.
b. Optimalisasi Aset Daerah melalui :
   - Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPBU) untuk pengembangan aset menganggur.
   - Monetisasi aset digital (platform *e-government* berbayar).
c. Peningkatan Iklim Investasi melalui
   - Pembangunan infrastruktur penunjang (kawasan industri, KEK).
   - Kemudahan perizinan dan insentif bagi investor.
d. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah serta Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan perangkat daerah serta mengembangkan potensi usaha;
e. Pembentukan perusahaan induk/ holding Badan Usaha Milik Daerah.
f. Sinergi dengan Pemerintah Pusat/Daerah Lain melalui kerja sama peningkatan PAD melalui sektor-sektor unggulan.

Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan daerah sebagaimana terihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.67 Rata-rata Pertumbuhan dan Proyeksi Pendapatan Daerah

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi Pertumbuhan Rata-rata (%)
4	**PENDAPATAN**	**-202,00**	**4,40**
04:01	**Pendapatan Asli Daerah**	**289,00**	**8,15**
04:01:01	Pajak daerah	613,00	6,07
04:01:02	Retribusi daerah	-1500,00	13,84
04:01:03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	-1479,00	22,96
04:01:04	Lain-lain PAD yang sah	-4,95	14,61
04:02	**Dana Perimbangan**	**-3,64**	**0,45**
04:02:01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-3,64	
04:02:02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		
04:03	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	-36,10	3,19
04:03:01	Hibah	-36,10	3,19
04:03:02	Dana darurat		
04:03:03	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)		
04:03:04	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)		
04:03:05	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya		
01:03:04	Pendapatan Lainnya		
01:03:05	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, diolah

Pajak daerah, walaupun secara rata-rata bertumbuh sebesar 6,13% selama kurun waktu 2019-2024, diproyeksikan hanya bertumbuh rata-rata 6,07% setiap tahunnya selama tahun rencana 2025-2030. Hal ini disebabkan pajak provinsi yang hanya terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok. Khususnya terkait Pajak Kendaraan Bermotor ini, sebagaimana diatur dalam PP No. 73/2019 berpotensi menciptakan kerangka pajak kendaraan yang lebih adaptif, berorientasi

lingkungan, dan transparan. Bagi PAD provinsi, regulasi ini berpotensi meningkatkan penerimaan melalui penyesuaian NJKB dan digitalisasi. Namun yang perlu diingat bahwa dengan kondisi makro ekonomi yang tidak menentu ke depan, akan sangat mempengaruhi kemampuan konsumsi masyarakat di luar kebutuhan wajib dan mendesak sehingga akan mempengaruhi tingkat konsumsi untuk produk-produk yang tidak wajib dan mendesak. Hal ini tentu akan mempengaruhi penerimaan pajak terkait kendaraan bermotor, khususnya untuk kendaraan baru dan BBNKB. Karena itu, perlu kerja keras untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari kendaraan yang sudah ada, dan penerimaan dari piutang pajak. Di sisi lain, PBBKB dan pajak rokok walaupun merupakan pajak provinsi tetapi dipungut oleh pemerintah pusat sehingga sangat tergantung pada alokasi dari pemerintah pusat. Pajak Air Permukaan selama ini besarannya sangat kecil dan tidak signifikan.

Retribusi Daerah diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai 13,84%, berdasarkan skenario optimalisasi, rehabilitasi, peremajaan kembali dan restocking aset-aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan cara melakukan investasi pada kebun-kebun dinas, instalasi ternak milik Pemerintah, investasi pada pengembangan instalasi yang akan mendatangkan profit sesuai hasil kajian, investasi pada BBI Noekele, PPI Oeba, Tambak Oesapa dan mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset lainnya untuk peningkatan PAD yang bersumber dari Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah serta Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Pengelolaan Pariwisata Estate yang telah dibangun perlu dioptimalkan kembali sehingga dapat memberikan kontribusi pada PAD. Dengan semakin terbatasnya penerimaan dari pajak daerah, maka optimalisasi pada retribusi daerah, termasuk dengan pola investasi, menjadi salah satu strategi yang harus dilakukan untuk memastikan dalam kurun waktu 2025-2030 ini, PAD harus bisa memberikan kontribusi yang lebih baik pada total pendapatan daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, diharapkan juga akan memberikan kontribusi pendapatan berupa dividen dengan proyeksi pertumbuhan rata-rata 22,96%.

Pengembangan sektor-sektor produktif seperti pertanian, peningkatan produksi beras, peningkatan populasi ternak (sapi, babi, kambing dan unggas), pengembangan perikanan baik tangkap maupun budidaya, pengembangan hasil-hasil perikanan dan kelautan seperti rumput laut, shrimp, pengembangan garam, pengembangan kelor, dan sektor-sektor lain yang potensial sebagaimana selama ini telah dilakukan tetap dilanjutkan dengan pola kemitraan atau kerja sama dengan pihak ketiga, baik perbankan maupun pihak lainnya yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Khusus untuk lain-lain PAD yang sah diproyeksikan tumbuh sebesar 14,61%.

Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar kewenangan menarik pungutan pajak dan retribusi daerah segera disesuaikan dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan belum ditetapkannya pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang bagi daerah untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Selain itu, bisa dikaji agar pengalokasian belanja yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang berakibat mendatangkan penerimaan daerah, misalnya terkait dengan UPTD yang mengelola pendapatan, termasuk penyewaan sarana prasarana olahraga bisa dialokasikan melalui pembiayaan daerah dengan konsep investasi daerah yang anggarannya harus dikembalikan ke Pemerintah. UPTD Pendapatan Daerah yang selama ini lebih mengarah pada pencapaian target pajak daerah, juga mengawal pencapaian target retribusi daerah dengan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap aset-aset pemerintah provinsi yang berada di wilayah kerjanya. Di sisi lain, dari segi pelaksanaan, perlu memastikan semua proses berjalan secara transparan, akuntabel dan terintegrasi.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat, yang merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari revenue sharing policy. Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Dengan pola DAU saat ini dimana sebagian merupakan DAU terikat yang diarahkan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal, dan hanya sebagian yang bebas digunakan sebagai block grant akan semakin mempersulit Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran yang sangat terbatas karena tingkat ketergantungan yang tinggi pada Pemerintah Pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga harus dapat diupayakan peningkatannya melalui pelaporan dan pengelolaan dana DAK yang baik dengan memastikan realisasi penyerapan DAK sesuai target, penyusunan program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK, perencanaan dengan didukung ketersediaan data yang baik untuk proses pengusulan sesuai aplikasi dan menu yang disediakan.

Dana Perimbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2030 diproyeksikan tumbuh positif sebesar 0,45%, yang seluruhnya berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Sementara itu lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan tumbuh sebesar 3,19% yang seluruhnya disumbangkan oleh dana hibah.

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan pendapatan di atas, maka proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.68 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025-2030

URAIAN	BASELINE	PROYEKSI INDIKATIF ANGGARAN DAERAH				
		TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN	**5.219.986.855.755**	**6.362.283.934.165**	**6.366.642.450.238**	**6.379.824.669.932**	**6.392.473.390.306**	**6.472.471.610.187**
Pendapatan Asli Daerah	**1.923.350.420.755**	**2.800.000.000.000**	**2.811.298.608.000**	**2.822.676.799.296**	**2.834.135.302.915**	**2.845.674.855.042**
Pajak daerah	1.567.588.247.801	2.087.674.000.000	2.091.849.348.000	2.096.033.046.696	2.100.225.112.789	2.104.425.563.015
Retribusi daerah	218.587.260.975	401.626.000.000	405.642.260.000	409.698.682.600	413.795.669.426	417.933.626.120
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	62.519.178.857	168.860.000.000	170.548.600.000	172.254.086.000	173.976.626.860	175.716.393.129
Lain-lain PAD yang sah	74.655.733.122	141.840.000.000	143.258.400.000	144.690.984.000	146.137.893.840	147.599.272.778
Dana Perimbangan	**3.296.636.435.000**	**3.561.718.097.991**	**3.554.759.955.890**	**3.556.545.358.314**	**3.557.716.354.926**	**3.626.155.189.414**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.296.636.435.000	3.561.718.097.991	3.554.759.955.890	3.556.545.358.314	3.557.716.354.926	3.626.155.189.414,15
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya						
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	**565.836.174**	**583.886.348**	**602.512.322**	**621.732.465**	**641.565.730**
Hibah	-	565.836.174	583.886.348	602.512.322	621.732.465	641.565.730,45
Dana darurat						
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)						

URAIAN	BASELINE	PROYEKSI INDIKATIF ANGGARAN DAERAH				
		TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)						
Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya						
Pendapatan Lainnya						
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya						

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2025, diolah

2) Proyeksi Belanja

Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan didasarkan atas pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun kedepan dan digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dan diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (efektivitas).

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Prisip-prinsip pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b) Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan danpertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

c) Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d) Optimalisasi Belanja

Belanja diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e) Transparansi dan Akuntabilitas

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan pada publik dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, maka prencanaan dan pangganggaran telah menggunakan *e-planning* dan *e-budgeting*. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses keluaran dan hasil.

Belanja daerah merupakan cerminan prioritas dan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai instrumen vital dalam pengelolaan keuangan daerah, kebijakan belanja tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan, tetapi juga harus berorientasi pada pencapaian target pembangunan jangka menengah dan panjang. Dalam konteks ini, efektivitas alokasi anggaran menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan akses layanan publik, dan penguatan daya saing daerah.

Arah kebijakan belanja daerah juga perlu mengedepankan prinsip *value for money*, yakni memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan manfaat optimal dengan biaya yang efisien. Prioritas utama harus diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya UMKM. Selain itu, belanja daerah harus responsif terhadap isu-isu mendesak, seperti mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, dan transformasi digital, yang semakin relevan dalam menghadapi dinamika global.

Transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi pondasi utama untuk menghindari pemborosan dan penyimpangan. Partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran, melalui mekanisme musrenbang, juga perlu diperkuat agar kebijakan belanja selaras dengan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat. Di sisi lain, penguatan sistem pengawasan berbasis kinerja dan teknologi diperlukan untuk memastikan evaluasi yang objektif serta perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, arah kebijakan belanja daerah bukan hanya tentang bagaimana dana dibelanjakan, melainkan juga tentang bagaimana setiap langkah pengeluaran mampu menjadi katalisator pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.

Belanja diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Belanja daerah tahun rencana 2025-2029 diarahkan pada :

1. Prioritas Belanja pada pemenuhan Dasa Cita

Anggaran belanja daerah periode 2025-2029 diprioritaskan pada program-program unggulan Pemerintah Provinsi NTT (dasa cita) yaitu:

1) Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman.
2) Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal.
3) Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal.
4) Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk masyarakat.
5) Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting.
6) Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi unggulan.
7) Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera.
8) Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin.
9) Membangun NTT Digital : Akses Merata, Komunikasi Lancar.
10) Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama.

2. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Belanja daerah 2025-2029 perlu diarahkan untuk dapat memenuhi prinsip efisien tanpa mengorbankan efektivitas anggaran dalam upaya membiayai program dan kegiatan prioritas daerah. Untuk itu kebijakan belanja yang akan diambil diantaranya adalah :

1) *Performance-Based Budgeting*: Mengaitkan alokasi anggaran dengan indikator kinerja (*output/outcome*).
2) *Zero-Based Budgeting*: Menyusun anggaran dari nol, bukan berdasarkan tahun sebelumnya.
3) Penggunaan teknologi (*e-budgeting, e-procurement*) untuk mengurangi kebocoran dan inefisiensi.

3. Belanja Modal untuk Pembangunan Berkualitas

Dalam rangka mendorong pencapaian visi misi daerah tahun rencana, pengerahan belanja modal perlu diarahkan pada penyediaan layanan yang dipandang sangat urgen agar dapat menciptakan pembangunan yang berkualitas. Kebijakan yang perlu dilaksanakan antara lain :

1) Memprioritaskan belanja modal (infrastruktur, aset produktif) daripada belanja rutin/ kebutuhan aparatur.
2) Memastikan proyek infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang agar dapat memenuhi target daerah jangka panjang .
3) Memastikan adanya Integrasi dengan program nasional /Asta Cita.

4. Pengelolaan Utang dan Risiko Fiskal

Tahun 2025-2029 merupakan periode dimana Pemerintah Provinsi NTT masih berada dalam masa pelunasan pinjaman daerah yang dilakukan pada Tahun 2021. Dalam kaitan itu kebijakan belanja daerah dalam periode tersebut perlu memikirkan pengelolaan utang dan pengelolaan risiko fiskal daerah melalui kebijakan :

1) Membatasi utang daerah sesuai batas aman (maximal 60% dari PAD sesuai Permendagri Nomor 13/2022).
2) Pembiayaan non-utang melalui kerjasama dengan swasta, pihak donor dalam dan luar negeri, serta kelompok filantropis NTT diaspora.
3) Pembentukan dana darurat untuk antisipasi krisis.

5. Inovasi dan Transformasi Digital

Pengelolaan belanja daerah di tahun rencana 2025-2029 perlu menerapkan prisip inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong peningkatan efektivitas belanja. Beberapa kebijakan yang perlu dilaksanakan antara lain :

1) Pengalokasian anggaran untuk transformasi digital (*smart city, e-government*, digitalisasi pelayanan publik).
2) Pelatihan SDM aparatur dan kampanye kepada masyarakat dalam pemanfaatan teknologi.

6. Program Inklusif dan Berkeadilan

Seluruh visi NTT tahun rencana 2025-2029 dijiwai oleh semangat inklusi. Semangat Inklusi adalah adalah prinsip atau nilai yang mendorong terciptanya lingkungan yang terbuka, adil, dan setara bagi semua individu atau kelompok, tanpa memandang perbedaan latar belakang, kemampuan, status sosial, agama, gender, suku, atau karakteristik lainnya. Dalam rangka mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, kebijakan belanja daerah pada tahun rencana 2025-2029 adalah :

1) Mengalokasikan belanja untuk program afirmasi (perempuan, disabilitas, masyarakat adat).
2) Subsidi silang untuk layanan dasar (pendidikan, kesehatan) bagi masyarakat miskin.
3) Pengembangan ekonomi desa melalui inovasi *One Village One Product* (OVOP) dalam rangka mendorong mengecilnya ketimpangan antara desa dengan kota.

7. Penguatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Sebagai subsistem dari keseluruhan sistem pengelolaan keuangan nasional, pemerintah provinsi perlu menyesuaikan prioritas belanja dengan prioritas belanja pemerintah pusat. Ini dilakukan selain dalam rangka sinergitas pembangunan nasional, juga dalam rangka memberikan daya dukung yang lebih kepada permasalahan-permasalahan daerah yang juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Kebijakan belanja tahun rencana 2025-2029 yang dapat diambil adalah :

1) Penyelarasan belanja daerah dengan program nasional (khususnya pengentasan kemiskinan dan pencegahan stunting).
2) Memanfaatkan dana transfer pusat (DAU, DAK, DBH) secara optimal.

8. Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan belanja daerah menjadi sangat penting bukan saja untuk menjamin konsistensi perencanaan sepanjang periode perencanaan daerah, tetapi juga untuk mencegah inefisiensi penggunaan anggaran dan perilaku koruptif. Berikut beberapa kebijakan daerah terkait evaluasi dan pemantauan berkala :

1) Membentuk sistem evaluasi kinerja belanja daerah berbasis evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (EKPD).
2) Melakukan audit kinerja dan audit investigatif untuk mencegah korupsi.

Secara keseluruhan, belanja daerah mengalami rata-rata pertumbuhan tahunan negatif sebesar -3,88% selama kurun waktu 2019-2024, namun diproyeksikan akan berbalik tumbuh positif dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai 4,90% selama periode 2025-2030. Belanja Operasi, yang rata-rata mengalami kontraksi sebesar -3,84% pada periode sebelumnya, diproyeksikan akan tumbuh positif sebesar 3,11% pada Tahun 2025-2030. Dalam komponen Belanja Operasi, Belanja Pegawai menunjukkan tren pertumbuhan positif sebesar 1,62% di Tahun 2019-2024 dan diproyeksikan akan meningkat signifikan menjadi 6,30% pada Tahun 2025-2030. Belanja Barang dan Jasa yang sebelumnya mengalami penurunan rata-rata -2,36%, diperkirakan akan berbalik tumbuh positif sebesar 3,93% pada periode rencana. Belanja Bunga menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang sangat tinggi sebesar 43,32% di periode sebelumnya, namun diproyeksikan akan mengalami kontraksi tajam hingga -48,95% di Tahun 2025-2030. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial menunjukkan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -16,53% dan positif 0,05% masing-masing pada periode 2019-2024. Namun, proyeksi untuk tahun 2025-2030 menunjukkan Belanja Hibah akan terus mengalami kontraksi hingga -20,98%, sementara Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan tumbuh positif 1,00%.

Belanja Modal secara keseluruhan menunjukkan rata-rata pertumbuhan negatif yang signifikan sebesar -11,67% selama periode 2019-2024, namun diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi mencapai 28,66% pada Tahun 2025-2030. Belanja Modal Tanah menunjukkan pertumbuhan yang sangat fluktuatif, dengan rata-rata pertumbuhan 103,63% di periode 2019-2024. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yang tumbuh rata-rata 5,49% sebelumnya, diproyeksikan akan melonjak menjadi 32,71% pada periode 2025-2030. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, yang tumbuh rata-rata 8,36%, diproyeksikan akan terus tumbuh sebesar 13,11%. Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi, yang mengalami kontraksi signifikan -27,40% di periode sebelumnya, diproyeksikan akan mengalami pembalikan tren yang kuat dengan pertumbuhan 42,41% di Tahun 2025-2030. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya juga menunjukkan tren yang sama, dari kontraksi -28,88% menjadi pertumbuhan yang sangat tinggi, yaitu 90,61%.

Belanja Tidak Terduga mengalami rata-rata penurunan sebesar -23,48% di periode 2019-2024, namun diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan yang substansial sebesar 33,17% pada Tahun 2025-2030. Sementara itu, Belanja Transfer, yang rata-rata tumbuh 5,94% di periode 2019-2024, diproyeksikan akan mengalami kontraksi signifikan sebesar -15,08% pada periode 2025-2030.

Belanja Bagi Hasil menunjukkan pertumbuhan 5,86% di periode sebelumnya, namun diproyeksikan akan mengalami penurunan menjadi -18,41%. Di sisi lain, Belanja Bantuan Keuangan menunjukkan pertumbuhan yang kuat sebesar 18,39% di periode 2019-2024, namun proyeksi menunjukkan penurunan menjadi 11,24%.

Tabel 2.69 Rata-rata Pertumbuhan Belanja Tahunan Daerah Tahun 2019-2024 dan Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2025-2029

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan tahunan 2019-2024 (%)	Proyeksi pertumbuhan tahunan 2025-2030 (%)
	BELANJA	**-3,88**	**4,90**
A	**Belanja Operasi**	**-3,84**	**3,11**
1	Belanja Pegawai	1,62	6,30
2	Belanja Barang dan Jasa	-2,36	3,93
3	Belanja Bunga	43,32	-48,95
4	Belanja Hibah	-16,53	-20,98
5	Belanja Bantuan Sosial	0,05	1,00
B	**Belanja Modal**	**-11,67**	**28,66**
1	Belanja Modal Tanah	103,63	
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,49	32,71
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8,36	13,11
4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	-27,40	42,41
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-28,88	90,61
C	**Belanja Tidak Terduga**	**-23,48**	**33,17**
1	Belanja Tidak Terduga	-23,48	33,17
D	**Belanja Transfer**	**5,94**	**-15,08**
1	Belanja Bagi Hasil	5,86	-18,41
2	Belanja Bantuan Keuangan	18,39	11,24

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov NTT, 2025

Sedangkan proyeksi indikatif Belanja Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.70 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025-2030

URAIAN	BASELINE	PROYEKSI INDIKATIF ANGGARAN DAERAH				
		TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN	**5.219.986.855.755**	**6.362.283.934.165**	**6.366.642.450.238**	**6.379.824.669.932**	**6.392.473.390.306**	**6.472.471.610.187**
Pendapatan Asli Daerah	**1.923.350.420.755**	**2.800.000.000.000**	**2.811.298.608.000**	**2.822.676.799.296**	**2.834.135.302.915**	**2.845.674.855.042**
Pajak daerah	1.567.588.247.801	2.087.674.000.000	2.091.849.348.000	2.096.033.046.696	2.100.225.112.789	2.104.425.563.015
Retribusi daerah	218.587.260.975	401.626.000.000	405.642.260.000	409.698.682.600	413.795.669.426	417.933.626.120
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	62.519.178.857	168.860.000.000	170.548.600.000	172.254.086.000	173.976.626.860	175.716.393.129
Lain-lain PAD yang sah	74.655.733.122	141.840.000.000	143.258.400.000	144.690.984.000	146.137.893.840	147.599.272.778
Dana Perimbangan	**3.296.636.435.000**	**3.561.718.097.991**	**3.554.759.955.890**	**3.556.545.358.314**	**3.557.716.354.926**	**3.626.155.189.414**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.296.636.435.000	3.561.718.097.991	3.554.759.955.890	3.556.545.358.314	3.557.716.354.926	3.626.155.189.414,15
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya						
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	**565.836.174**	**583.886.348**	**602.512.322**	**621.732.465**	**641.565.730**
Hibah	-	565.836.174	583.886.348	602.512.322	621.732.465	641.565.730,45
Dana darurat						
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)						
Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)						

URAIAN	BASELINE	PROYEKSI INDIKATIF ANGGARAN DAERAH				
		TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya						
Pendapatan Lainnya						
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya						
BELANJA	**5.056.507.288.791**	**6.153.855.227.862**	**5.913.813.743.935**	**5.976.995.963.629**	**6.522.044.684.003**	**6.422.471.610.187**
Belanja Operasi	**3.964.259.077.875**	**4.476.567.600.054**	**4.475.858.623.025**	**4.610.448.415.926**	**4.842.050.382.965**	**4.620.597.585.254**
Belanja Pegawai	2.434.609.539.949	2.891.027.113.399	2.900.578.067.846	2.929.875.453.542	3.059.174.208.077	3.303.908.144.723
Belanja Barang dan Jasa	942.887.980.442	1.287.176.778.486	1.287.176.778.486	1.300.048.546.271	1.463.049.031.734	1.143.126.481.437
Belanja Bunga	47.206.923.484	35.460.009.244	25.200.077.768	14.991.680.199	4.717.694.045	-
Belanja Hibah	529.694.634.000	71.547.503.195	71.547.503.195	172.262.978.227	71.547.503.195	163.200.000.000
Belanja Bantuan Sosial	9.860.000.000	191.356.195.730	191.356.195.730	193.269.757.687	243.561.945.914	10.362.959.094
Belanja Modal	**400.871.425.891**	**992.988.023.159**	**863.161.789.040**	**879.085.697.575**	**1.236.300.457.506**	**1.413.486.459.065**
Tanah	-					
Peralatan dan Mesin	54.366.315.333	157.084.631.100	143.655.477.411	145.092.032.185	221.542.952.507	223.758.382.032
Gedung dan Bangunan	240.986.243.000	428.035.555.150	338.081.586.702	338.294.294.867	441.677.237.816	446.094.010.194
Jalan, Jaringan dan Irigasi	99.017.331.408	301.353.297.687	298.845.040.312	301.833.490.716	428.275.728.579	580.031.731.329
Aset Tetap Lainnya	6.501.536.150	106.514.539.222	82.579.684.615	93.865.879.807	144.804.538.605	163.602.335.510
Belanja Tidak Terduga	**22.180.954.686**	**65.000.000.000**	**65.650.000.000**	**66.306.500.000**	**91.969.565.000**	**92.889.260.650**

URAIAN	BASELINE	PROYEKSI INDIKATIF ANGGARAN DAERAH				
		TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Tidak Terduga	22.180.954.686	65.000.000.000	65.650.000.000	66.306.500.000	91.969.565.000	92.889.260.650
Belanja Transfer	**669.195.830.339**	**619.299.604.649**	**509.143.331.870**	**421.155.350.128**	**351.724.278.532**	**295.498.305.219**
Belanja Bagi Hasil	629.338.931.939	554.044.137.265	443.235.309.812	354.588.247.850	284.491.505.230	227.593.204.184
Belanja Bantuan Keuangan	39.856.898.400	65.255.467.384	65.908.022.058	66.567.102.278	67.232.773.301	67.905.101.034

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2025, diolah

2.2.6 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Dalam perencanaan anggaran, pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran pendapatan dan belanjanya defisit atau surplus. Pada kenyataannya, di dalam perencanaan yang dilakukan seringkali terjadi defisit anggaran daerah. Defisit tersebut harus dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri dari dua pos yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah memiliki kecenderungan untuk menutup defisit daerah dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya atau dengan melakukan pinjaman daerah atau obligasi daerah yang berada di pos penerimaan pembiayaan. Dalam perencanaan dokumen rencana jangka menengah, tidak diperkenankan untuk merencanakan apalagi memproyeksi SiLPA. Pos pengeluaran pembiayaan juga memiliki dua komponen utama yang banyak digunakan oleh pemda yaitu penyertaan modal (investasi daerah) dan pembayaran pokok utang.

Proyeksi Pembiayaan Daerah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.71 Proyeksi Pembiayaan Daerah

URAIAN	BASELINE	PROYEKSI INDIKATIF ANGGARAN DAERAH TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PEMBIAYAAN						
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	**338.000.000.000**	-
Penerimaan pinjaman daerah	-					
Pencairan Dana Cadangan	-				338.000.000.000	
Investasi non permanen	-					
Penerimaan kembali pinjaman daerah	-					
Pengeluaran Pembiayaan	**163.479.566.964**	**208.428.706.303**	**452.828.706.303**	**402.828.706.303**	**208.428.706.303**	**50.000.000.000**
Pembentukan dana cadangan	-	50.000.000.000	244.400.000.000	194.400.000.000		
Penyertaan Modal			50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Investasi non permanen						
Pembayaran pokok hutang	163.479.566.964	158.428.706.303	158.428.706.303	158.428.706.303	158.428.706.303	-
Pemberian pinjaman daerah						
Pembiayaan Netto	**-163.479.566.964**	**-208.428.706.303**	**-452.828.706.303**	**-402.828.706.303**	**-129.571.293.697**	**-50.000.000.000**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2025, diolah

Struktur pembiayaan sepanjang 2025-2030 dapat digambarkan sebagai berikut: pada Tahun 2025, pembiayaan netto dalam APBD NTT adalah -Rp. 163.479.566.964, yang seluruhnya berasal dari pembayaran pokok utang sebesar Rp. 163.479.566.964. Kemudian, pada Tahun 2026, pembiayaan netto daerah berkurang menjadi –Rp. 208.428.706.303, yang berasal dari pembayaran pokok utang sebesar Rp. 158.428.706.303 dan pembentukan dana cadangan sebesar Rp. 50.000.000.000. Pembentukan dana cadangan ini merupakan langkah strategis daerah, salah satunya dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) serta untuk meningkatkan kesiapsiagaan akan risiko fiskal di masa mendatang.

Selanjutnya, pada Tahun 2027, pembiayaan netto dalam APBD NTT diproyeksikan sebesar -Rp 452.828.706.303, yang berasal dari pembayaran pokok utang sebesar Rp. 158.428.706.303, pembentukan dana cadangan sebesar Rp. 244.400.000.000 (juga ditujukan untuk persiapan PON dan penguatan ketahanan fiskal), dan penyertaan modal sebesar Rp. 50.000.000.000. Pada Tahun 2028, pembiayaan netto daerah diproyeksikan sebesar -Rp. 402.828.706.303, yang berasal dari pembayaran pokok utang sebesar Rp. 158.428.706.303, penyertaan modal sebesar Rp. 50.000.000.000, dan pembentukan dana cadangan sebesar Rp. 194.400.000.000. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, dari Tahun 2025 hingga 2028, pembiayaan netto hanya terdiri dari pengeluaran pembiayaan.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada Tahun 2029, pembiayaan netto diproyeksikan sebesar Rp. 129.571.293.697, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 338.000.000.000 (seluruhnya berasal dari pencairan dana cadangan) dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 208.428.706.303 (berasal dari pembayaran pokok utang sebesar Rp. 158.428.706.303 dan penyertaan modal sebesar Rp. 50.000.000.000). Terakhir, pada Tahun 2030, struktur pembiayaan daerah hanya terdiri dari pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal sebesar Rp. 50.000.000.000, sehingga pembiayaan netto daerah adalah –Rp. 50.000.000.000.Secara lengkap proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.72 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025-2030

URAIAN	BASELINE	PROYEKSI INDIKATIF ANGGARAN DAERAH				
		TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN	**5.219.986.855.755**	**6.362.283.934.165**	**6.366.642.450.238**	**6.379.824.669.932**	**6.392.473.390.306**	**6.472.471.610.187**
Pendapatan Asli Daerah	**1.923.350.420.755**	**2.800.000.000.000**	**2.811.298.608.000**	**2.822.676.799.296**	**2.834.135.302.915**	**2.845.674.855.042**
Pajak Daerah	1.567.588.247.801	2.087.674.000.000	2.091.849.348.000	2.096.033.046.696	2.100.225.112.789	2.104.425.563.015
Retribusi Daerah	218.587.260.975	401.626.000.000	405.642.260.000	409.698.682.600	413.795.669.426	417.933.626.120
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	62.519.178.857	168.860.000.000	170.548.600.000	172.254.086.000	173.976.626.860	175.716.393.129
Lain-lain PAD yang Sah	74.655.733.122	141.840.000.000	143.258.400.000	144.690.984.000	146.137.893.840	147.599.272.778
Dana Perimbangan	**3.296.636.435.000**	**3.561.718.097.991**	**3.554.759.955.890**	**3.556.545.358.314**	**3.557.716.354.926**	**3.626.155.189.414**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.296.636.435.000	3.561.718.097.991	3.554.759.955.890	3.556.545.358.314	3.557.716.354.926	3.626.155.189.414,15
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya						
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	**565.836.174**	**583.886.348**	**602.512.322**	**621.732.465**	**641.565.730**
Hibah	-	565.836.174	583.886.348	602.512.322	621.732.465	641.565.730,45
Dana darurat						
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)						
Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)						
Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya						

URAIAN	BASELINE	PROYEKSI INDIKATIF ANGGARAN DAERAH				
		TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan Lainnya						
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya						
BELANJA	**5.056.507.288.791**	**6.153.855.227.862**	**5.913.813.743.935**	**5.976.995.963.629**	**6.522.044.684.003**	**6.422.471.610.187**
Belanja Operasi	**3.964.259.077.875**	**4.476.567.600.054**	**4.475.858.623.025**	**4.610.448.415.926**	**4.842.050.382.965**	**4.620.597.585.254**
Belanja Pegawai	2.434.609.539.949	2.891.027.113.399	2.900.578.067.846	2.929.875.453.542	3.059.174.208.077	3.303.908.144.723
Belanja Barang dan Jasa	942.887.980.442	1.287.176.778.486	1.287.176.778.486	1.300.048.546.271	1.463.049.031.734	1.143.126.481.437
Belanja Bunga	47.206.923.484	35.460.009.244	25.200.077.768	14.991.680.199	4.717.694.045	-
Belanja Hibah	529.694.634.000	71.547.503.195	71.547.503.195	172.262.978.227	71.547.503.195	163.200.000.000
Belanja Bantuan Sosial	9.860.000.000	191.356.195.730	191.356.195.730	193.269.757.687	243.561.945.914	10.362.959.094
Belanja Modal	**400.871.425.891**	**992.988.023.159**	**863.161.789.040**	**879.085.697.575**	**1.236.300.457.506**	**1.413.486.459.065**
Tanah	-					
Peralatan dan Mesin	54.366.315.333	157.084.631.100	143.655.477.411	145.092.032.185	221.542.952.507	223.758.382.032
Gedung dan Bangunan	240.986.243.000	428.035.555.150	338.081.586.702	338.294.294.867	441.677.237.816	446.094.010.194
Jalan, Jaringan dan Irigasi	99.017.331.408	301.353.297.687	298.845.040.312	301.833.490.716	428.275.728.579	580.031.731.329
Aset Tetap Lainnya	6.501.536.150	106.514.539.222	82.579.684.615	93.865.879.807	144.804.538.605	163.602.335.510
Belanja Tidak Terduga	**22.180.954.686**	**65.000.000.000**	**65.650.000.000**	**66.306.500.000**	**91.969.565.000**	**92.889.260.650**
Belanja Tidak Terduga	22.180.954.686	65.000.000.000	65.650.000.000	66.306.500.000	91.969.565.000	92.889.260.650
Belanja Transfer	**669.195.830.339**	**619.299.604.649**	**509.143.331.870**	**421.155.350.128**	**351.724.278.532**	**295.498.305.219**

URAIAN	BASELINE	PROYEKSI INDIKATIF ANGGARAN DAERAH				
		TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Bagi Hasil	629.338.931.939	554.044.137.265	443.235.309.812	354.588.247.850	284.491.505.230	227.593.204.184
Belanja Bantuan Keuangan	39.856.898.400	65.255.467.384	65.908.022.058	66.567.102.278	67.232.773.301	67.905.101.034
SURPLUS/(DEFISIT)	**163.479.566.964**	**208.428.706.303**	**452.828.706.303**	**402.828.706.303**	**-129.571.293.697**	**50.000.000.000**
PEMBIAYAAN						
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	**338.000.000.000**	-
Penerimaan pinjaman daerah	-					
Pencairan Dana Cadangan	-				338.000.000.000	
Investasi non permanen	-					
Penerimaan kembali pinjaman daerah	-					
Pengeluaran Pembiayaan	**163.479.566.964**	**208.428.706.303**	**452.828.706.303**	**402.828.706.303**	**208.428.706.303**	**50.000.000.000**
Pembentukan dana cadangan	-	50.000.000.000	244.400.000.000	194.400.000.000		
Penyertaan Modal			50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Investasi non permanen						
Pembayaran pokok hutang	163.479.566.964	158.428.706.303	158.428.706.303	158.428.706.303	158.428.706.303	-
Pemberian pinjaman daerah						
Pembiayaan Netto	**-163.479.566.964**	**-208.428.706.303**	**-452.828.706.303**	**-402.828.706.303**	**129.571.293.697**	**-50.000.000.000**
SILPA / (SIKPA)	-	**0**	-	-	-	-

2.2.7 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

Tabel 2.73 Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2030

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan Daerah	5.219.986.855.755	6.362.283.934.165	6.366.642.450.238	6.379.824.669.932	6.392.473.390.306	6.472.471.610.187
2	Pencairan Dana Cadangan	0				338.000.000.000	
3	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0					
4	SiLPA						
	TOTAL PENERIMAAN DAERAH	**5.219.986.855.755**	**6.362.283.934.165**	**6.366.642.450.238**	**6.379.824.669.932**	**6.730.473.390.306**	**6.472.471.610.187**
	Dikurangi :						
1	Belanja Wajib Mengikat	3.384.620.375.323,94	3.252.597.559.164,13	3.287.347.779.995,70	3.587.124.576.201,70	3.532.359.385.602,76	2.039.441.447.924,51
2	Pengeluaran Pembiayaan	163.479.566.964	208.428.706.303	452.828.706.303	402.828.706.303	208.428.706.303	50.000.000.000
	Kapasitas riil Keuangan daerah	**1.671.886.913.467**	**2.901.257.668.698**	**2.626.465.963.939**	**2.389.871.387.427**	**2.989.685.298.400**	**4.383.030.162.262**

Kapasitas riil keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diproyeksikan akan menunjukkan fluktuasi sepanjang periode 2025-2030, mencerminkan dinamika antara total penerimaan daerah, belanja wajib mengikat, dan pengeluaran pembiayaan. Pada Tahun 2025, kapasitas riil keuangan daerah diperkirakan mencapai Rp. 2.275.428.279.956. Angka ini didapatkan dari total penerimaan daerah sebesar Rp. 5.219.986.855.755 dikurangi belanja wajib mengikat sebesar Rp. 2.781.079.008.835,05 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 163.479.566.964.

Selanjutnya, pada Tahun 2026, kapasitas riil keuangan daerah menunjukkan peningkatan menjadi Rp. 2.769.234.852.538. Hal ini terjadi karena total penerimaan daerah meningkat menjadi Rp. 6.362.283.934.165, didorong oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diproyeksikan naik. Belanja wajib mengikat tercatat Rp. 3.384.620.375.323,94 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 208.428.706.303. Namun, pada Tahun 2027, terjadi sedikit penurunan kapasitas riil keuangan daerah menjadi Rp. 2.661.216.184.771. Penurunan ini disebabkan adanya penambahan pada pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 452.828.706.303, dalam rangka pembentukan dana cadangan untuk penyelenggaraan PON dan cadangan Pilkada. Pada tahun ini, total penerimaan daerah adalah Rp. 6.366.642.450.238, dikurangi belanja wajib mengikat sebesar Rp. 3.252.597.559.164,13.

Penurunan kembali terjadi pada Tahun 2028, di mana kapasitas riil keuangan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 2.699.648.183.633. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh adanya penambahan pada pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 402.828.706.303 dalam rangka dana cadangan PON dan cadangan Pilkada. Pada tahun ini, total penerimaan daerah mencapai Rp. 6.379.824.669.932, dengan belanja wajib mengikat sebesar Rp. 3.287.347.779.995,70.

Memasuki tahun 2029, kapasitas riil keuangan daerah kembali menunjukkan peningkatan substansial, mencapai Rp. 2.934.920.107.801. Peningkatan ini didorong oleh total penerimaan daerah yang meningkat

signifikan menjadi Rp. 6.730.473.390.306, yang sebagian besar berasal dari pencairan dana cadangan sebesar Rp. 338.000.000.000. Meskipun belanja wajib mengikat membesar menjadi Rp. 3.587.124.576.201,70 karena belanja hibah untuk kegiatan politik (Pemilu), proyeksi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi tidak lagi perlu menyiapkan dana cadangan pemilu yang sudah disiapkan pada tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan tercatat sebesar Rp. 208.428.706.303.

Pada Tahun 2030, kapasitas riil keuangan daerah sedikit menurun menjadi Rp. 2.890.112.224.594. Angka ini merupakan hasil dari total penerimaan daerah sebesar Rp. 6.472.471.610.187, dengan belanja wajib mengikat sebesar Rp. 3.532.359.385.602,76 dan pengeluaran pembiayaan yang hanya sebesar Rp. 50.000.000.000. Fluktuasi kapasitas riil keuangan daerah ini menunjukkan perlunya manajemen fiskal yang cermat dan strategi adaptif dalam menghadapi dinamika pendapatan dan belanja daerah di masa mendatang.

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan manifestasi dari adanya kesenjangan antara kondisi aktual yang dicapai saat ini dengan kondisi ideal sebagaimana yang dirumuskan dalam rencana, standar, maupun tujuan jangka panjang pembangunan. Kesenjangan ini mencerminkan dinamika antara harapan normatif dengan realitas empirik, yang harus dikaji secara sistematis guna merumuskan strategi intervensi yang relevan dan efektif di masa mendatang. Dalam konteks ini, permasalahan tidak hanya dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai titik refleksi untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pembangunan. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor penyebab, baik yang bersifat internal maupun eksternal, menjadi krusial dalam proses perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Permasalahan pembangunan daerah, pada hakikatnya, mencerminkan tantangan lintas sektor yang bersifat makro, sehingga membutuhkan pendekatan lintas bidang (*cross-cutting strategy*) dalam penyelesaiannya. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan berdasarkan analisis menyeluruh atas gambaran umum daerah, yang mencakup aspek geografis, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta kualitas pelayanan publik. Di samping itu, proses identifikasi ini juga merujuk pada hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025. Dalam horizon dua dekade ke depan, permasalahan pembangunan daerah di Nusa Tenggara Timur yang masih relevan untuk diangkat mencakup dimensi struktural maupun kultural, dan memerlukan penanganan strategis yang berbasis pada keunggulan lokal, partisipasi masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan. Dengan demikian, permasalahan bukan hanya soal ketertinggalan, melainkan panggilan untuk membangun masa depan NTT yang maju, sehat cerdas, sejahtera dan berkelanjutan

2.3.1. Permasalahan Pembangunan

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari adanya *gap* antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal. Mengacu pada kondisi sebagaimana tergambarkan pada Sub Bab 2.1 di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan pokok pembangunan di Nusa Tengara Timur antara lain sebagai berikut: **(1) Masih tingginya tingkat kemiskinan dan stunting, pengangguran, dan masalah sosial; (2) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia; (3) Masih kurang optimalnya pelayanan infrastruktur; (4) Pertumbuhan ekonomi daerah mengalami perlambatan; (5) Masih kurang optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik.** Kelima masalah pokok pembangunan tersebut di atas dipetakan dalam beberapa transformasi pembangunan yaitu 1) transformasi sosial, 2) transformasi ekonomi, 3) transformasi supremasi hukum, stabilitas makro dan kepemimpinan daerah, 4) transformasi ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Kemudian, penyajian permasalahan pembangunan ini juga di jabarkan berdasarkan 4 (empat) aspek antara lain aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

Permasalahan Pembangunan berdasarkan Transformasi Pembangunan

1) Transformasi Sosial

a. Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia secara paripurna. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada semua kelompok masyarakat sesuai siklus kehidup an yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Nusa Tenggara Timur telah dilakukan selama ini, namun masih ditemui berbagai tantangan dan permasalahan antara lain sebagai berikut :

a. Masih terbatasnya Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;
b. Masih terbatasnya Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa(KLB) Provinsi;
c. Masih terbatasnya kualitas layanan Usaha Kesehatan Masyarakat(UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan(UKP);
d. Masih tingginya Prevalensi Stunting;
e. Masih tingginya Kasus Kematian Ibu, bayi dan Balita;
f. Masih tingginya angka Wasting (Gizi Buruk dan Gizi Kurang) dan Underweight;
g. Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan)
h. Terbatasnya Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
i. Terbatasnya temuan Kasus dan pengobatan HIV dan Tuberculosis yang diobati;
j. Terbatasnya Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria;
k. Terbatasnya Kabupaten/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (*success* RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 *Rate*) TBC>85%;

l. Rendahnya Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar;
m. Rendahnya Persentasi Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar;
n. Rendahnya cakupan kesehatan berbasis Masyarakat;
o. Kurang optimalnya Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan
p. Kurang optimalnya kemampuan penyedia layanan Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

b. Pendidikan Berkualitas dan Merata

Masalah pokok pembangunan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain: (1) Belum meratanya akses pendidikan; (2) Kurang optimalnya mutu pendidikan; (3) Kurang optimalnya tata kelola pendidikan; (4) Belum terjadi *link and match* antara lulusan pendidikan Vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; dan (5) Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan. (6) Masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah; (7) Masih rendahnya angka Harapan Lama Sekolah. Ketujuh masalah pokok tersebut disebabkan oleh beberapa akar masalah yang dapat dikelompokan sebagai berikut;

1. Permasalahan Akses layanan Pendidikan antara lain sebagai berikut:
   a. Terbatasnya jumlah sarana-prasana Pendididikan;
   b. Rendahnya kualitas sarana prasana Pendidikan;
   c. Belum meratanya distribusi tenaga pendidik;
   d. Masih rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik di daerah 3 T (Terpencil, Terluar dan Terdepan);
   e. Terbatasnya akses digitalisasi dalam pembelajaran di sekolah; dan
   f. Minimnya analisis dalam pembukaan Unit Sekolah Baru.
2. Permasalahan Mutu layanan Pendidikan antara lain sebagai berikut:
   a. Rendahnya capaian literasi dan numerasi;
   b. Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik masih relatif rendah dan terbatas;
   c. Rendahnya kualitas manajemen sekolah;
   d. Rendahnya kompetensi guru;
   e. Rendahnya daya saing lulusan; dan
   f. Masih rendahnya jumlah sekolah menengah dan kejuruan yang berakreditasi B.
3. Permasalahan Khusus Sekolah Vokasi antara lain sebagai berikut;
   a. Belum tersediannya Sekolah Menengah Vokasi Unggulan;
   b. Terbatasnya sarana dan prasarana praktek bagi siswa SMK;
   c. Kurang optimalnya daya saing / lulusan SMK (Sekolah Vokasi);
   d. Rendahnya kompetensi guru produktif pada sekolah menengah Vokasi;
   e. Terbatasnya ketersediaan dunia usaha dan industri yang dapat mendukung pembelajaran (magang) bagi siswa SMK;
   f. Terbatasnya sumber daya listrik dan air di sekolah untuk mendukung pembelajaran praktik;
   g. Minimnya dana operasional praktek di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
   h. Kurang optimalnya pendidikan anak yang holistik dan integratif.

c. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Hakekat perlindungan sosial yang adaptif yakni meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi resiko sosial. Impelementasi perlindungan sosial yang adaptif belum optimal. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak, bermartabat, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial termasuk subyek didalamnya lansia dan penyandang disabilitas. Pembangunan kesejahteraan sosial di Nusa Tenggara Timur dilakukan oleh pemerintah daerah, namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial antara lain;

a. Masih tingginya angka kemiskinan;
b. Rendahnya cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
c. Terbatasnya penanganan warga negara pekerja migran korban tindak kekerasan;
d. Terbatasnya cakupan jaminan sosial bagi PMKS;
e. Terbatasnya cakupan penanganan korban bencana skala provinsi;
f. Cakupan program kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan yang belum terjangkau secara menyeluruh;
g. Kurang optimalnya pembangunan *Gender equality, Disability and Social Inclusion* (GEDSI/Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial, sehingga menyebabkan kesempatan yang belum merata untuk berpartisipasi dalam pembangunan bagi penyandang disabilitas, lansia, anak usia dini dan kelompok rentan;
h. Kurang optimalnya cakupan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan;
i. Kurang optimalnya akurasi data yang mempengaruhi ketepatan intervensi;
j. Kurang optimalnya pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat miskin;
k. Masih banyak rumah masyarakat yang masuk kategori rumah tidak layak huni;
l. Belum ramahnya fasilitas umum terhadap penyandang Disabilitas dan kelompok rentan;
m. Kurang optimalnya perlindungan penyandang disabilitas dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran;
n. Kurang optimalnya penyediaan dan perluasan akses lapangan kerja termasuk untuk penduduk disabilitas;
o. Rendahnya kualitas SDM Kesejahteraan Sosial (Kesos) yang bersertifikat;
p. Rendahnya jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terakreditasi; dan
q. Permasalahan terkait data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2) Transformasi Ekonomi

a. Produksi dan Produktivitas Sektor Primer

Kurang optimalnya produksi dan produktivitas sektor primer yang disebabkan oleh:

1. Pola pertanian, peternakan, dan perikanan masih bersifat subsisten, belum berorientasi komersil;
2. Kurang optimalnya adopsi teknologi pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan;
3. Dominasi petani gurem dimana, pusat-pusat produksi pertanian masih sporadis dan dalam skala kecil;
4. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi sektor primer;
5. Lemahnya rantai pasok dalam sistem agribisnis yakni, penyediaan dan akses terhadap sarana produksi utama dalam sistem agribisnis di Provinsi NTT masih lemah;
6. Kurang optimalnya ketersediaan sarana dan prasana termasuk ketersediaan pupuk, benih, jalan usaha tani, ketersediaan air dan irigasi;
7. Kurang optimalnya penanganan hama penyakit pada sektor pertanian dan peternakan;
8. Keselarasan hubungan hulu-hilir (produsen dan pengguna produk pertanian dan perikanan) yang belum terjalin.
9. Ancaman hama penyakit yang berdampak luas, khususnya *African Swine Fever* (ASF) pada ternak babi dan hama belalang kembara (*locusta migrotoria manilensis meyen*).
10. Dampak perubahan iklim terhadap pola tanam dan masa tanam sehingga menyebabkan fenomena gagal panen.
11. Jaringan irigasi yang tidak efisien di sentra produksi padi (sawah).

b. Industri

1. Kurang optimalnya pengolahan hasil-hasil produksi sektor primer.
2. Masih rendahnya pembangunan dan pengembangan industri menengah besar di daerah, disebabkan oleh:
   a) Daya tarik investasi masih rendah, disebabkan oleh insentif berinvestasi belum menarik minat investor akibat tingginya biaya logistik;
   b) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia trampil yang dipelukan dalam sektor industri;
   c) Masih terbatasnya adopsi tekhnologi modern serta penguasaan tekhnologi dan literasi tekhnologi tenaga kerja di industri pengolahan masih rendah;
   d) Sektor industri masih bertumpu pada industri kecil dan menengah;
   e) Kurang optimalnya pemanfaatan akses pembiayaan, dimana sudah banyak program-program pembiayaan yang diluncurkan oleh Pemerintah, salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan masyarakat;

f) Produksi dan produktifitas sektor primer yang bersifat sporadis, termasuk rendahnya rantai pasok sehingga menyebabkan lemahnya ketersediaan dan kontinuitas bahan baku industri yang menjamin keberlanjutan supply faktor produksi yang diperlukan dalam pengembangan industri; dan
g) Faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur, serta kurang optimalnya konektivitas antardaerah.

3. Kurang optimalnya realisasi PMA dan PMDN;
4. Masih terbatasnya pengembangan pasar yang inkulsif pada sektor primer maupun hasil produksi sektor industri; dan
5. Kurang optimalnya transaksi produk lokal.

c. Pariwisata

1. Kurang optimalnya pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan yang disebabkan oleh:
   a) Kurang optimalnya pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan;
   b) Kurang optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata baik dalam maupun luar negeri;
   c) Rendahnya kualitas sumber daya manusia terampil yang terlatih untuk pengembangan pariwisata;
   d) Industri pariwisata belum berkembang secara merata pada setiap destinasi wisata;
   e) Kurang optimalnya kerja sama antardaerah dalam pengembangan pemasaran pariwisata melalui penyediaan paket-paket wisata antar daerah;
   f) Belum meratanya infrastruktur yang mendukung pariwisata berupa aksesibilitas, konektivitas, dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pada daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata; dan
   g) Masih terbatasnya informasi pariwisata akibat terbatasnya pusat-pusat informasi pariwisata (*Tourism Information Center*-TIC).
2. Kurang optimalnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah; dan
3. Industri pariwisata belum mampu menciptakan lapangan kerja baru.

d. Ekonomi Kreatif

1. Kurang optimalnya pengelolaan potensi ekonomi kreatif akibat:
   a) Kurang optimalnya sumber daya manusia yang trampil, kreatif dan inovasi serta rendahnya literasi wirausaha termasuk kemampuan tekhnologi yang belum optimal;
   b) Kurang optimalnya kelembagaan ekonomi kreatif dan manejemen pengelolaan usaha;
   c) Masih lemahnya perlindungan terhadap produk usaha ekonomi kreatif melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual hasil budaya tradisonal;
   d) Daya saing SDM ekonomi kreatif yang masih lemah dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual;
   e) Rendahnya akses permodalan yakni, terbatasnya akses pada pembiayaan atau modal untuk usaha kecil dan menengah di sektor ekonomi kreatif; dan

f) Kurangnya adopsi teknologi dan inovasi dalam proses produksi dan distribusi.

2. Kurang optimalnya promosi dan pemasaran produk kreatif dari NTT dengan memanfaatkan pasar digital; dan
3. Kurang optimalnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah.

e. Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau

1. Masih rendahnya pengembangan ekonomi biru dan ekonomi hijau yang ditandai dengan pola produksi pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek keberlanjutan;
2. Tingginya biaya pengelolaan lingkungan di darat dan laut;
3. Masih lemahnya pemahaman dan aktualisasi pengembangan indeks ekonomi biru dan indeks ekonomi hijau;
4. Prevelensi kemiskinan yang masih tinggi di masyarakat pesisir, petani dan peternak;
5. Masih rendahnya pola pembangunan yang menjawab tuntutan pembangunan berkelanjutan yang melihat kemajuan secara holistik dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan; dan
6. Kurang optimalnya pelestarian ekosistem hutan guna menjamin keseimbangan ekosistem hutan untuk mempertahankan fungsi ekologis hutan, seperti penyerapan karbon, pengaturan siklus air, dan konservasi keanekaragaman hayati.

f. UMKM dan Koperasi

1. Kurang optimalnya pengambangan UMKM dan Koperasi yang ditunjukan dengan masih lemahnya daya saing UMKM dan Koperasi yang dapat memberikan sumbangan bagi perekonomi daerah;
2. Rendahnya keterikatan UMKM pada rantai pasok dan rantai nilai produksi;
3. Jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil masih rendah;
4. Terbatasnya jumlah koperasi perempuan yang terbentuk;
5. Terbatasnya kelompok perempuan yang mendapat bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan; dan
6. Tingkat produktivitas UKM belum optimal akibat keterbatasan permodalan serta rendahnya penguasaaan proses produksi dan teknologi.

g. Ketenagakerjaan

1. Rendahnya daya saing tenaga kerja akibat rendahnya tingkat pendidikan dan/atau tingkat keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kebutuhan cluster kompetensi tenaga kerja;
2. Masih tingginya tenaga kerja tidak berbayar;
3. Kurang optimalnya penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
4. Masih tingginya tenaga kerja yang bekerja pada lapangan pekerjaan berkualitas rendah di sektor informal dengan kondisi kerja yang tidak stabil dan kurangnya jaminan sosial dengan upah yang rendah;

5. Mayoritas tenaga kerja bekerja pada jenis mata pencaharian dengan tingkat keragaman yang rendah dan sangat sensitive pada perubahan iklim serta memiliki ketahanan iklim kategori sedang;
6. Masih rendahnya literasi wirausaha dan penguasaan teknologi oleh tenaga kerja di NTT;
7. Terbatasnya penyerapan eks peserta pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) di pasar kerja;
8. Kurangnya minat dan kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja sendiri (wirausaha baru);
9. Masih terdapat perusahaan yang belum melaksanakan Upah Minimum Provinsi;
10. Masih tingginya perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan antar serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan;
11. Terbatasnya Jumlah SDM Pengawas Ketenagakerjaan untuk menilai perusahaan yang melaksanakan norma kerja; dan
12. Penanganan warga migran korban tindak kekerasan.

h. Badan Usaha Milik Daerah

1. Kurang optimalnya kinerja BUMD:
   a) Masih rendahnya ROA BUD, dan
   b) Masih rendahnya kontribusi BUMD terhadap Penerimaan Daerah.
2. Kurang Optimalnya Daya Saing BUMD:
   a) Masih rendahnya Total Asset Turnover BUMD.
3. Peran BUMD Sebagai Agen Pembangunan:
   a) Masih Rendahnya Rasio capaian BUMD terhadap PDRB, dan
   b) Kurang Optimalnya pemanfaatan program CSR.

i. Percepatan Transmisi Energi

1. Masih tingginya ketergantungan terhadap energi fosil yang cadangannya terus menurun;
2. Potensi energi terbarukan yang sangat besar tetapi pemanfaatan masih sangat rendah;
3. Kualitas infrastruktur ketenagalistrikan yang belum memadai;
4. Tingginya biaya investasi terkait EBT; dan
5. Terbatasnya rantai nilai domestik pendukung transisi energi.

j. Digital

1. Kurang optimalnya digitaliasi sektor strategis, yakni:
   a) Terdapat layanan pendidikan dan kesehatan belum berbasis digital;
   b) Belum otpimalnya penguatan Sistem Pemerintah Berbasis Digital (SPBE) dan Sistem Distribusi Informasi (SDI);
   c) Adopsi digital bagi para pelaku UMKM masih rendah (e-commerce);
   d) Pemahamanan masyarakat tentang inovasi dan pengembangan keuangan digital (Fin Tech) masih rendah;
   e) Pengelolaan destinasi wisata, pertanian, perikanan, dan industri berbasis teknologi masih rendah;
   f) Kualitas data dan kelembagaan yang belum memadai; dan
   g) Belum optimalnya inventarisasi kegiatana statistik sektoral dan pembangunan ekosistem data.

2. Masih terbatasnya aspek pendukung dan akselerator transformasi digital, yakni:
   a) Masih rendahnya infrastruktur dan sarana prasarana dasar digital;
   b) Literasi digital masyarakat belum merata yakni, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan digital; dan
   c) Rendahnya pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI), *Big Data Analytics, Blackhain.*

k. Integrasi Ekonomi Domestik dan Nasional

1. Masih rendahnya mengembangkan ekonomi lokal yang kuat dan terintegrasi yang disebabkan oleh:
   a) Infrastruktur konektivitas belum memadai dan terintegrasi, yakni, belum optimal dukungan infrastruktur transportasi, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, menghambat mobilitas barang dan orang serta meningkatkan biaya logistik;
   b) Kurang optimalnya kerjasama antar daerah untuk mengatasi ketimpangan antardaerah; dan
   c) Rantai pasok yang tidak efisien dan kurang terintegrasi membuat distribusi barang lebih sulit dan mahal rendah.
2. Masih rendahnya daya saing ekonomi daerah dan ketergantungan terhadap ekonomi nasional masih sangat tinggi.
3. Perdagangan antarwilayah dan ekspor serta partisipasi dalam rantai nilai nasional masih belum optimal, disebabkan oleh:
   a) Kurang optimalnya keterkaitan rantai nilai antarwilayah dan ekspor produk lokal masih rendah; dan
   b) Kurang optimalnya pengembangan industri pengolahan di daerah yang mengakibatkan banyak hasil Sumber Daya Alam (SDA) diantarpulaukan dalam bentuk mentah.
4. Masih lemahnya daya dukung tercapainya integrasi ekonomi domestik dan konektivitas nasional, yakni:
   a) Kurang optimalnya regulasi perbaikan iklim berusaha dan investasi; dan
   b) Terbatasnya investasi produktif dan berkualitas yang mendukung upaya transformasi ekonomi.

l. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Pusat-pusat pertumbuhan belum memberikan dampak signifikan pada perekonomian daerah;
2. Pembangunan yang dilakukan belum merata menyebabkan ketimpangan antarwilayah;
3. Pengembangan sentra pengolahan di wilayah perkotaan belum optimal karena belum terpetakannya sentra produksi; dan
4. Kurang optimalnya pengembangan pemasaran dan dukungan sarana prasarana terhadap sentra produksi dan sentra pengolahan.

m. Infrastruktur

1. Masih rendahnya penyediaan infrastruktur pelayanan dasar ke-PU-an dan perumahan;
2. Disparitas kualitas dan kuantitas infrastruktur antar wilayah masih tinggi;

3. Keterbatasan pembangunan teknis keirigasian dan kelembagaan pada daerah irigasi kewenangan Provinsi;
4. Minimnya penyediaan bangunan air baku dalam menunjang produktifitas sektor primer;
5. Tingginya kesenjangan pemanfaatan ruang berdasarkan dokumen tata ruang;
6. Konsolidasi yang terbatas antara pemerintah pusat dan daerah serta lintas sektor dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana wilayah dan tata ruang;
7. Rendahnya kepatuhan jasa kontruksi sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Keamanan dan keselamatan transportasi masih rendah;
9. Interkoneksi laut khususnya yang mendukung pariwisata (Sumba, Labuan Bajo, Timor dan Alor) masih belum tersedia;
10. Masih rendahnya persentase rumah layak huni;
11. Masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan akses elektrifikasi;
12. Pembangunan simpul transportasi yang menghubungkan darat, laut, udara, ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) belum maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
13. Belum memadai sarana prasarana dan berikut fasilitas penunjang transportasi darat dan laut sesuai dengan kebutuhan; dan
14. Fungsi pembinaan, pengawasan dan koordinasi lintas sektor sesuai kewenangan untuk pengelolaan transportasi belum berjalan optimal.

3) Tranformasi Tata Kelola

1. Kemampuan Fiskal Daerah

a. Masih rendahnya derajat kemandirian fiskal daerah yang ditandai dengan masih tingginya angka ketergantungan pada dana transfer pusat;
b. Kurang optimalnya pengelolaan terhadap potensi PAD;
c. Belum dikembangkannya investasi dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan daerah ;
d. Kurang optimalnya pengelolaan asset daerah; dan
e. Belum tersedianya Kawasan khusus untuk pedagangan antar kedua Negara di Kawasan Perbatasan. Kawasan ini dapat berupa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun *Free Trade Zone* (FTZ).

2. Pelayanan Publik

a. Kurang optimalnya implementasi reformasi birokrasi;
b. Kurang optimalnya implementasi SAKIP;
c. Masih rendahnya akses pelayanan pubik berbasis digital yang merata bagi masyarakat;
d. Pelayanan yang berbasis kepuasan masyarakat belum optimal;
e. Kurang optimalnya inovasi pelayanan public;
f. Kurang optimalnya pendekatan pembangunan yang ramah GEDSI pada berbagai urusan pelayanan umum;
g. Kurang optimalnya pendekatan pembangunan yang tahan teradap resiko bencana pada berbagai urusan pelayanan; dan
h. Kurang optimalnya pembangunan dan layanan dasar di kawasan perbatasan negara.

3. Manajemen Talenta

a. Kurang optimalnya indeks profesionalisme ASN; dan
b. Kurang optimalnya pengembangan SDM birokrasi berbasis manajemen talenta.

4. Kualitas Regulasi

a. Kurang optimalnya ketersediaan SDM regulasi.

5. Keberlanjutan Pembangunan

a. Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, pengaggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi; dan
b. Kurang optimalnya perencanaan dan penganggaran dalam memastikan keberlanjutan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

4) Transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas Makro dan Kepemimpinan Daerah

1. Stabilitas Makro

Hakekat Stabilitas Makro adalah menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan seimbang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi risiko ekonomi dan meningkatkan investasi. Stabilitas makro dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kondisi ekonomi global yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi; Kebijakan fiskal yang mengatur pengeluaran pemerintah dan pajak; serta perdagangan internasional yang mempengaruhi neraca pembayaran dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi fiskal daerah Nusa Tenggara Timur dihadapkan pada permasalahan antara lain;

a. Terbatasnya kemampuan fiskal daerah (fiskal rendah) sehingga membutuhkan dukungan intervensi pemerintah pusat melalui Dana Transter daerah (DAU, DAK dan Dekon); dan
b. Masih rendahnya daya saing ekonomi daerah yang disebabkan oleh lemahnya investasi dan penciptaan nilai tambah.

5) Transformasi Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

1. Budaya

a. Penurunan (degradasi) nilai sakral budaya dari substansi seharusnya karena berbagai faktor diantaranya faktor pembelajaran arti budaya yang tidak diturunkan secara baik ke generasi seterusnya dari beberapa dimensi seperti dimensi pendidikan, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender;
b. Masih rentannya karakter dan jati diri, budaya dan kearifan lokal terhadap meningkatnya ancaman negatif budaya global;
c. Budaya dan kearifan lokal belum menjadi pertimbangan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi masyarakat; dan
d. Masih kurangnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat.

2. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

a. Kualitas hidup keluarga yang semakin terdegradasi oleh dampak lingkungan. Peran dan fungsi keluarga yang belum optimal menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter kalangan generasi muda;

b. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda dan perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum optimal;
c. Pembangunan *Gender equality, Disability and Social Inclusion* (GEDSI/Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial kurang optimal; dan
d. Kurang optimalnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum kuatnya sinergi layanan untuk penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

3. Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati

a. Kurangnya pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam yang lestari serta pembangungan yang belum memperhatikan aspek resiko bencana;
b. Menurunnya kualitas air, udara, tutupan lahan, dan air laut;
c. Resiko krisis kelangkaan air pada beberapa daerah akibat kurang optimalnya pemanfaatan daya tampung air di daerah secara merata;
d. Pengelolaan sampah dan limbah yang belum optimal;
e. Sektor lahan selalu menjadi sumber emisi tertinggi di NTT;
f. seluruh wilayah di Provinsi NTT akan mengalami kenaikan suhu secara terus menerus serta penurunan curah hujan maupun lama hari hujan, sedangkan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim belum optimal;
g. Tingginya resiko bencana terhadap aktifitas masyarakat dan pembangunan daerah;
h. Keterbatasan akses informasi dan koordinasi kebencanaan lintas sektor terkait penyediaan layanan dasar dan layanan publik;
i. Kurang optimalnya implementasi perencanaan tata ruang dan pembangunan rendah karbon yang ditandai dengan:
    a) Kurang optimalnya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang (fungsi, struktur dan pola ruang);
    b) Cakupan penyimpangan terhadap RUTR dan RDTR pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih tinggi;
    c) Meningkatnya emisi gas rumah kaca yang didominasi oleh sektor energi dan transportasi;
    d) Rendahnya perhatian terhadap aspek keberlanjutan lingkungan dapat memperparah rusaknya ekosistem;
    e) Masih rendahnya cakupan pencegahan dan penanggulangan daerah berpotensi rawan kebakaran setiap tahun;
    f) Masih terbatasnya cakupan pemasangan rambu peringatan dini pada daerah rawan bencana;
    g) Masih terbatasnya cakupan desa/kelurahan tangguh bencana pada kawasan pariwisata; dan
    h) Masih minimnya cakupan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki rencana kontinjensi kebencanaan.

4. Energi

a. Masih rendahnya pemerataan akses terhadap energi;
b. Masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan;
c. Masih rendahnya efisiensi penggunaan dan pemanfaatan energi;

d. Ketergantungan daerah terhadap supply energi berbasis fosil masih tinggi;
e. Kurang optimalnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan; dan
f. Minimnya ketersediaan sistem komunikasi, informasi dan edukasi pembangunan dan pemanfaatn energi terbarukan.

5. Pangan

a. Kurang optimalnya produksi dan produktivitas sektor pertanian penghasil pangan yang menyebabkan terbatasnya ketersediaan pangan;
b. Kurang optimalnya akses dan distribusi pangan; dan
c. Kurang optimalnya pengelolaan sistem pangan yang berdampak pada pemanfaatan pangan.

6. Perubahan Iklim dan Bencana

a. Ancaman pada ketahanan pangan, kepunahan pada keaneragaman hayati daerah NTT;
b. Belum optimal dan minimnya infrastruktur yang resilient bencana dan perubahan iklim;
c. Kurang optimalnya pemanfaatan ruang dan lahan berdasarkan daya dukung dan daya tampung (DDDT) yang berbasis penanggulangan resiko bencana;
d. Pranata kuat masih berkutat pada kesiapan dokumen aksi daripada sarana-prasarana kebencanaan;
e. Masih berpatok pada aksi setelah bencana dari pada mitigasi dan adaptasi;
f. Rencana pemulihan penghidupan masyrakat pasca bencana yang belum mempertimbangkan prinsip-prinsip resiko bencana jangka panjang;
g. Minimnya ketersediaan sistem komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan dan perubahan iklim yang inklusi;
h. Kurangnya pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam yang lestari serta pembangunan yang memperhatikan aspek resiko bencana; dan
i. Belum tersedia rencana pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan resiko bencana jangka panjang.

Permasalahan Pembangunan berdasarkan Aspek Pembangunan

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, hingga pelayanan publik. Meskipun laju pertumbuhan penduduk menurun, kepadatan meningkat dan mayoritas penduduk berada pada usia produktif, potensi ini belum dioptimalkan akibat keterbatasan infrastruktur dasar seperti listrik dan bendungan. Ketahanan air juga belum berkontribusi maksimal terhadap ketahanan pangan, sementara ancaman bencana alam akibat patahan sesar geologis menambah risiko terhadap pembangunan. Di sisi kesejahteraan, tingginya angka kemiskinan,

fluktuasi angka stunting, dan belum meratanya pertumbuhan indeks pendidikan serta usia harapan hidup menunjukkan lemahnya sistem perlindungan sosial.

Tabel 2.74 Gambaran Umum Kondisi Daerah dan Permasalahan

Gambaran Kondisi Daerah	Permasalahan
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	
• Laju pertumbuhan penduduk NTT Tahun sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2022 cenderung menurun, namun tingkat kepadatan penduduk meningkat. Sebagian besar penduduk NTT merupakan kelompok usia produktif yaitu mencapai lebih dari 60 persen. • Dampak Perubahan iklim cukup berpengaruh pada kejadian cuaca ekstrim. • 60 DAS yang tersebar pada 22 Kab/Kota berperan penting dalam mendukung kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. • Kapasitas daya dukung air lebih tinggi dari kapasitas daya tampung air. • Ketersediaan listrik pada seluruh wilayah NTT sudah mencapai 94,89% (rasio eletrifikasi) namun secara nyata belum bisa berkontribusi pada indeks ketahanan pangan. • Ketahanan Air di NTT di dukung oleh 21 bendungan yang diantaranya 17 bendungan telah beroperasi namun secara nyata belum bisa berkontribusi pada indeks ketahanan pangan. • Wilayah Provinsi NTT dilewati oleh *patahan sesar Flores Back Arc Thrust, sesar Bondowatu Fault, sesar Sumba Strike-slip Fault, sesar Sumba Ridge Thrust, sesar Savu Thrust, sesar Semau Fault dan sesar Sape Strike-slip Fault* sehingga memiliki dampak yang cukup besar terhadap ancaman bencana alam.	• Kurang optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya manusia usia produktif dan infrastruktur dasar seperti listrik dan bendungan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan ketahanan pangan. • Masih kurangnya integrasi pengelolaan sumber daya alam, terutama air dan DAS, dalam mendukung keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat, akibat keterbatasan daya tampung dan infrastruktur pendukung yang belum terhubung. • Belum memadainya kesiapan wilayah terhadap risiko perubahan iklim dan bencana geologis, yang berdampak pada meningkatnya kerentanan masyarakat dan terganggunya stabilitas pembangunan lintas sektor.secara efektif.
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
• Tingginya tingkat kemiskinan disertai dengan ketidakakuratan data penerima bantuan sosial, rendahnya tingkat pendidikan, tigginya beban tanggungan keluarga(social obligation) konvergensi program yang belum optimal dan rendahnya produktivitas petani yang merupakan mayoritas penduduk miskin. • Kurang cakupan sosial *protection* dan sosial security ketenagakerjaan ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kepesertaan BPJS ketenagakerjaan • Laju Pertumbuhan ekonomi mengalami ketidakstabilan. • Dampak rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) belum	• Penurunan kemiskinan tidak merata, perlindungan sosial belum Terintegrasi, dan angka stunting masih fluktuatif menunjukkan masih lemahnya jaring pengaman sosial dan ketahanan keluarga. • Meskipun pengangguran menurun, belum berdampak pada penciptaan pekerjaan yang ideal, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil menghambat pemerataan kesejahteraan. • Indeks pemuda, pendidikan, literasi, dan harapan hidup belum tumbuh secara merata dan konsisten, sementara pembangunan olahraga justru mengalami penurunan.

Gambaran Kondisi Daerah	Permasalahan
berpengaruh pada ketenagakerjaan yang ideal. • Nilai Indeks Kualitas Keluarga mengalami pertumbuhan positif. • Nilai Indeks Pembagunan olahraga mengalami penurunan. • Nilai Indeks Pembangunan Pemuda mengalami pertumbuhan. • Indeks pendidikan, Indeks literasi masyarakat dan literasi digital mengalami pertumbuhan yang belum stabil. • Dampak Pertumbuhan Usia Harapan Hidup yang belum merata Presentase stunting masih berfluktuasi.	
ASPEK DAYA SAING DAERAH	
• Indeks Modal Manusia mengalami penurunanProporsi lapangan usaha industri pengolahan mengalami tren kenaikan. • Proporsi wirausaha cenderung mengalami penurunan. • Indikator Penerapan ekonomi hijau dan biru mengalami pertumbuhan positif. • Pertumbuhan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi fluktuatif. • Integrasi Ekonomi Domestik dan Global mengalami pertumbuhan yang stagnan dan cenderung menurun. • Indiktor Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi mengalami pertumbuhan signifikan. • Pertumbuhan Pajak, Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan bertumbuh signifikan.	• Indeks Modal Manusia mengalami penurunan dan proporsi wirausaha cenderung menurun, menunjukkan tantangan dalam membangun SDM yang produktif dan berjiwa wirausaha, yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. • Meskipun beberapa sektor seperti industri pengolahan dan ekonomi hijau-biru tumbuh, namun transformasi digital masih fluktuatif, dan integrasi ekonomi domestik maupun global belum optimal, mencerminkan belum meratanya perkembangan antarwilayah dan sektor. • Pertumbuhan signifikan pada pajak, literasi keuangan, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan perdesaan perlu diiringi kebijakan yang menjaga keberlanjutan, pemerataan, serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional.
ASPEK PELAYANAN UMUM	
• Indeks Pelayanan Publik Provinsi NTT pada tahun 2021 masih berada pada kategori Cukup, yang menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik belum sepenuhnya optimal dalam memenuhi ekspektasi masyarakat. • Peningkatan Indeks Inovasi Daerah dari tahun 2021 ke 2022 menunjukkan kemajuan, namun capaian nilai masih belum menunjukkan lompatan inovatif yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. • Turunnya nilai SPBE pada tahun 2021 dan baru meningkat kembali pada tahun 2023 mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang berisiko menurunkan efisiensi pelayanan dan pengambilan keputusan berbasis data.	• Beberapa indikator seperti Indeks Pelayanan Publik, SAKIP, dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa kinerja pelayanan dan pengelolaan pemerintahan di Provinsi NTT masih berada pada level sedang dan memerlukan peningkatan kualitas secara menyeluruh. • Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Belum Konsisten dan Maksimal. Nilai SPBE serta capaian inovasi yang belum signifikan menunjukkan bahwa transformasi digital dan budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah belum berjalan secara stabil dan terintegrasi. • Daya Saing dan Demokrasi Daerah Mengalami Penurunan. Penurunan nilai IDSD dan IDI dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan

Gambaran Kondisi Daerah	Permasalahan
• Nilai Indeks SAKIP yang masih berada pada kisaran 63 atau predikat Baik selama 5 tahun terakhir menunjukkan kurang optimalnya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. • Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, laju perbaikannya masih tergolong lambat. Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan struktural dalam reformasi organisasi, SDM, dan budaya kerja birokrasi. • Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTT mengalami penurunan sejak tahun 2016, yang mengindikasikan menurunnya kualitas partisipasi politik, kebebasan sipil, atau lembaga demokrasi di tingkat daerah. • Dampak Penurunan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dari tahun 2019 ke 2023 mencerminkan kurang optimalnya kinerja daerah dalam aspek produktivitas, inovasi, dan efisiensi birokrasi. Hal ini menunjukkan tantangan besar dalam membangun daya saing daerah yang berkelanjutan.	menurunnya daya saing daerah serta kualitas demokrasi yang berpotensi menghambat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil belum menghasilkan lapangan kerja ideal. Di aspek daya saing, penurunan Indeks Modal Manusia dan rendahnya tingkat kewirausahaan menjadi hambatan dalam menciptakan ekonomi berbasis inovasi, walau terdapat pertumbuhan di sektor industri pengolahan, ekonomi hijau, dan pusat-pusat ekonomi. Pelayanan publik pun masih belum optimal, tercermin dari indeks pelayanan dan reformasi birokrasi yang stagnan, serta penurunan kualitas demokrasi dan daya saing daerah. Ketidakkonsistenan dalam transformasi digital dan rendahnya inovasi memperkuat perlunya reformasi menyeluruh demi pemerintahan yang lebih efektif, inklusif, dan tangguh dalam menghadapi tantangan masa depan.

2.3.2. Isu Strategis

1. Isu Strategis Internasional / Global

Isu-isu strategis global mencakup berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh komunitas internasional atau secara global yang turut berpengaruh terhadap pembangunan baik nasional mapun daerah. Beberapa isu strategi global, antara lain:

1. Perdagangan dan Perekonomian Global

Meskipun pertumbuhan ekonomi global mulai menunjukkan gejala positif, perlu tetap diwaspadai terjadinya inflasi global yang meningkat, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Cina, Eropa dan negara-negara sedang berkembang. Tambahan pula dengan adanya gejolak harga minyak dunia di satu sisi memberi dampak positif pada perekonomian nasional, namun di sisi lain juga dapat berdampak pada tekanan inflasi apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Kebijakan perekonomian AS saat ini juga perlu tetap diantisipasi dampaknya ke depan, terkait dengan normalisasi kebijakan moneter seperti meningkatnya suku bunga FFR (*Federal Funds Rate*), yang berpotensi memicu gejolak di pasar keuangan. Gejolak tersebut dapat mengakibatkan arus modal keluar (*capital outflow*) tiba-tiba dari negara-negara berkembang, seperti Indonesia, yang dapat memicu kenaikan pinjaman dan fluktuasi harga saham sehingga investasi bisa terhambat. Kebijakan perpajakan AS (*tax policy*) yang baru juga dapat memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian Indonesia, di mana Pemerintah AS berencana memotong pajak AS yang dapat mendorong perpindahan arus modal ke AS dan pelemahan mata uang global terhadap dolar AS. Selain kebijakan Pemerintah AS, kebijakan ekonomi Cina yang sedang melakukan restrukturisasi perekonomian dalam upaya menyeimbangkan.

Komposisi pertumbuhan ekonominya dinilai juga dapat berpengaruh pada perekonomian nasional dan daerah. Kawasan Asia Pasifik mulai mengalami pergeseran gravitasi perekonomian global karena kurang lebih 41% penduduk dunia berada di kawasan ini dan 50% transaksi dunia terjadi di kawasan ini. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Asia Pasifik mulai pulih dan membaik. Pertumbuhan kawasan akan terus ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, termasuk dari publik dan investasi swasta. Kecenderungan (*trend*) ini akan ditopang oleh kenaikan ekspor secara bertahap, seiring dengan pemulihan perekonomian yang berkembang. Berbagai kerjasama lintas negara Asia Pasifik yang dibangun dalam beberapa tahun ini menempatkan posisi kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan ekonomi perdagangan yang semakin kuat. Beberapa kerjasama tersebut antara lain *Trans Pacific Partnerships* (TPP), *ASEAN Regional Forum* (ARF), *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), *East Asia Summit* (EAS), serta *Expand ASEAN Maritime Forum* (EAMF).

2. Konflik Geopolitik

Meskipun ekonomi global mulai menunjukkan gejala positif di tahun 2023, perlu tetap diwaspadai terjadinya masalah geopolitik global yang berkepanjangan, seperti Invasi Rusia ke Ukraina, konflik di jalur Gaza, dan konflik geopolitik lainnya. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia dan Laut Cina Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan. Konflik yang terjadi kemungkinan mengundang kehadiran negara-negara besar lainnya untuk terlibat yang ditakutkan akan menjadi masalah global yang berkepanjangan, sehingga tentu akan memberikan dampak yang signifikan bagi kondisi sosial-ekonomi dunia dikarenakan kontribusi negara-negara tersebut yang sangat besar terhadap dunia.

3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030 atau dikenal juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan pembangunan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi yang bersinergi dengan aspek lingkungan secara berkelanjutan. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 Goals dan 169 Target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030. Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 Goals dan 169 Target SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu:

1. Pilar Pembangunan Sosial, meliputi:

Tujuan 1: Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
Tujuan 2: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
Tujuan 4: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum Perempuan.

2. Pilar Pembangunan Ekonomi, meliputi:

Tujuan 7: Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
Tujuan 10: Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
Tujuan 17: Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

3. Pilar Pembangunan Sosial, meliputi:

Tujuan 6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
Tujuan 11: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
Tujuan 12: Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
Tujuan 13: Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
Tujuan 14: Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
Tujuan 15: Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, meliputi:

Tujuan 16: Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Peran negara sangat penting dan strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs berbasis pada pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini karena konten permasalahan dalam SDGs merupakan permasalahan aktual dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Rancangan akhir RPJPN Indonesia 2025-2045, dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, Indonesia berkomitmen untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang secara internasional berakhir di Tahun 2030.

4. Isu Perubahan Iklim (*Climate Change*)

Perubahan iklim telah menjadi isu global yang mendesak dan memerlukan perhatian serius. Dunia kini menghadapi berbagai dampak nyata, seperti kenaikan suhu ekstrem, cuaca yang tidak teratur, kekeringan masal, krisis air, kelangkaan pangan, munculnya berbagai penyakit, hingga naiknya permukaan air laut. Semua ini erat kaitannya dengan pemanasan global yang semakin parah. Perubahan ini dapat mengakibatkan; kerusakan infrastruktur, dimana badai tropis yang intens atau banjir bisa merusak jembatan, jalan raya, dan bangunan penting lainnya; ancaman terhadap kesehatan, yakni gelombang panas yang lebih sering dan ekstrem dapat meningkatkan risiko kesehatan seperti penyakit panas dan dehidrasi; ketidakstabilan pangan, yakni kekeringan yang parah atau banjir dapat mengganggu produksi pangan dan mengakibatkan kenaikan harga pangan; kehilangan keanekaragaman hayati, yakni perubahan iklim yang drastis dapat mengancam spesies-spesies tertentu dan mengganggu ekosistem yang rapuh, dan; meningkatnya pengungsi iklim, yakni masyarakat yang terdampak dapat terpaksa pindah atau mengungsi akibat bencana alam yang lebih sering dan parah.

Pemanasan global terjadi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, seperti karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dan dinitrogen oksida (N2O). Aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, serta industri yang tidak ramah lingkungan, menjadi penyebab utama meningkatnya emisi gas-gas tersebut. Gas rumah kaca berfungsi seperti selimut yang menyelimuti bumi dan menjebak panas matahari, menyebabkan suhu bumi terus meningkat.

Dampak perubahan iklim sudah dapat kita rasakan di berbagai belahan dunia. Salah satu contoh nyata adalah naiknya suhu rata-rata global. Menurut data dari lembaga iklim internasional, suhu bumi telah meningkat sekitar 1,1 derajat celsius sejak era pra-industri. Peningkatan ini mungkin terdengar kecil, tetapi dampaknya sangat signifikan. Misalnya, pemanasan global menyebabkan mencairnya es di kutub, yang berkontribusi pada naiknya permukaan air laut. Hal ini mengancam daerah pesisir dan pulau kecil, bahkan bisa menyebabkan tenggelamnya wilayah tersebut jika tidak segera ditangani.

Selain itu, perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Curah hujan menjadi tidak menentu, di beberapa daerah terjadi hujan ekstrem yang mengakibatkan banjir besar, sedangkan di daerah lain terjadi kekeringan berkepanjangan yang memicu krisis air. Kondisi ini berdampak buruk pada sektor pertanian karena tanaman sulit tumbuh dengan baik, menyebabkan kelangkaan pangan di banyak negara.

Munculnya berbagai penyakit juga menjadi salah satu konsekuensi dari perubahan iklim. Suhu yang lebih hangat menciptakan lingkungan yang ideal bagi perkembangan berbagai virus dan bakteri. Penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan infeksi saluran pernapasan menjadi lebih mudah menyebar, terutama di wilayah tropis dan subtropis.

5. Masalah Keamanan *Cyber Security*

Di era revolusi industri 4.0 segala aspek kehidupan tidak terlepas dari sentuhan teknologi, mendorong transformasi digital pada aktivitas dan proses bisnis di berbagai sektor. Hal ini melahirkan beragam inovasi teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI) dan *Internet of Things* (IoT). Melalui perkembangan teknologi informasi, saat ini setiap perangkat dengan mudah terkoneksi dalam jaringan komputer seperti internet. Peningkatan jumlah pengguna internet di dunia tidak terlepas dari peningkatan jumlah ancaman ataupun serangan siber (cyber attack). Serangan siber (cyber attack) terus menciptakan ancaman potensial bagi sistem sampai end-user. Salah satu solusi untuk meminimalisir hal tersebut yaitu dengan memberi perhatian terhadap pengelolaan sistem keamanan siber (cybersecurity).

Cybersecurity merupakan perlindungan yang sangat dibutuhkan baik untuk perorangan, perusahaan, ataupun pemerintahan untuk menjaga dan mencegah penyalahgunaan akses maupun pemanfaatan data dalam sistem teknologi informasi dari seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses maupun memanfaatkan data dalam sistem tersebut.

Beberapa risiko utama yang terkait dengan kegagalan *cybersecurity* meliputi; serangan siber, dimana serangan *malware*, *ransomware*, *phishing*, dan *hacking* yang dapat mengakibatkan pencurian data sensitif, pencurian identitas, atau gangguan pada infrastruktur kritis; kerentanan perangkat IoT, dimana peningkatan penggunaan dan ketergantungan pada perangkat *Internet of Things* (IoT) meningkatkan risiko terhadap serangan siber karena keamanan yang lemah pada perangkat tersebut; kehilangan kepercayaan publik, dimana kejadian kebocoran data atau pelanggaran keamanan yang sering dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap perusahaan atau institusi yang terlibat; dampak ekonomi, yakni biaya besar untuk memulihkan data, memperbaiki sistem yang terpengaruh, dan mengganti kerugian akibat serangan siber dapat berdampak pada kesehatan finansial perusahaan dan perekonomian secara keseluruhan, dan; ancaman terhadap keamanan nasional, dimana serangan siber yang terkoordinasi dan kompleks dapat menimbulkan ancaman terhadap infrastruktur kritis suatu negara, seperti sistem energi, transportasi, dan komunikasi.

2. Isu Regional

Isu strategis regional dalam perencanaan pembangunan daerah adalah keadaan atau kondisi klaster pada wilayah Bali-Nusra yang meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang memiliki dampak signifikan bagi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beberapa isu strategis regional meliputi :

1. Perlambatan laju perekonomian sektor primer seperti sektor pertanian;
2. Pengangguran lulusan di atas pendidikan dasar cukup tinggi;
3. Indeks pembangunan manusia di bawah rata-rata nasional;
4. Aksesibilitas fasilitas pendidikan, kesehatan yang masih rendah dengan sumber daya/tenaga yang terbatas;
5. Prevalensi stunting yang masih tinggi. Faktor-faktor seperti kemiskinan, sanitasi yang buruk, kurangnya akses terhadap makanan bergizi, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi menjadi tantangan utama dalam upaya penurunan stunting pada regional ini;
6. Keterpaparan penyakit menular dan menular akut seperti TBC, Rabies ISPA, dan lain-lain yang masih tinggi;
7. Isu elektrifikasi yang belum merata. Isu strategis elektrifikasi di Bali dan Nusa Tenggara meliputi tantangan mencapai elektrifikasi 100%, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), dan dedieselisasi (mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel);
8. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan seperti sektor pariwisata. Tantangan seperti kualitas sumber daya manusia yang belum mumpuni, keterbatasan infrastruktur, pemasaran yang belum optimal dan kendala rantai pasok seperti gangguan dan keterbatasan pasokan, masalah kualitas produk, biaya logistik yang tinggi, kurangnya adopsi teknologi, regulasi dan prosedur yang masih belum terbangun utuh dari hulu ke hilir;
9. Alih fungsi lahan yang cenderung sporadis. Alih fungsi lahan dari hutan atau kawasan hijau dan atau kawasan lindung menjadi lahan pertanian, permukiman, pariwisata atau budidaya lainnya memberikan dampak tidak baik pada ketahanan dan ketersediaan air dan pada akhirnya mempengaruhi ketahanan pangan;
10. Kondisi geografis dan sosial-budaya. Kondisi lingkungan yang ekstrim dan faktor tradisi struktur adat masyarakat menjadi kendala aksesibilitas sektor-sektor dasar dan primer seperti pendidikan, kesehatan, perumahan layak huni, air sehat cenderung sulit dijangkau.

3. Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan berbagai masalah, tantangan, dan peluang yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan Indonesia serta dampaknya terhadap pembangunan daerah. Isu-isu ini mendapatkan perhatian dan penanganan serius oleh Pemerintah Pusat sehingga memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi NTT untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

1. Isu Strategis Transformasi Sosial Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada masalah dan tantangan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, peningkatan kapasitas, dan pemerataan kapasistas dan *responsiveness* sistem kesehatan di seluruh wilayah, yang ditandai dengan; AKI masih tinggi (189/100.000); Stunting masih tinggi (21,6%); Prevelensi obesitas 21,8%; Kasus baru TB meningkat ke-2 dunia; Kasus kusta peringkat ke-3 dunia; 51,14% puskesmas tidak tersedia 9 jenis nakes sesuai standar; 24,7% RSUD kelas C belum memiliki 7 dokter spesialis dasar dan penunjang, dan; 36,5% Rumah Sakit terakreditasi Paripurna, 56,4% FKTP terakreditasi.

Pembangunan pendidikan dihadapkan pada kondisi untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di daerah pada berbagai bidang. Beberapa kendala yang asih dihadapi, antara lain; Layanan pendidikan belum merata; Kualitas pendidikan masih rendah; Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas; Kualitas pendidikan angkatan kerja masih rendah; Kualitas lulusan masih rendah, sehingga produktivitas dan daya saingnya masih rendah, dan; Daya saing perguruan tinggi di tingkat global masih rendah.

Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip keadilan dan inklusif. Beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain; Akurasi program bantuan social masih rendah; Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim; Kesempatan yang belum merata bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah; Kurang optimalnya integrasi layanan dan system administrasi kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan, dan; Program Jaminan Sosial belum optimal.

2. Isu Strategis Transformasi Ekonomi Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja

Pembangunan ekonomi pada periode pertama dari 20 tahun pembangunan jangka panjang diarahkan untuk penyelesaian isu:

a. Peningkatan produktivitas, sektor-sektor ekonomi melalui industralisasi, modernisasi dan digitalisasi pertanian dengan pemanfaatan IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengembangan UMKM dan Koperasi, Produktivitas BUMN, dan penguatan ekonomi dan keuangan Syariah.
b. Pengembangan IPTEK dan Inovasi.
c. Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
d. Transformasi digital.
e. Integrasi ekonomi domestik dan global.
f. Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

3. **Isu Strategis Transformasi Tata Kelola Kelembagaan Tepat Fungsi dan Kolaboratif, Peningkatan Kualitas ASN, Regulasi yang Efektif, Digitalisasi Pelayanan Publik, Peningkatan Integritas Partai Politik, dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil**

Transformasi tata kelola akan menjamin terlaksananya transformasi sosial dan tranformasi ekonomi sesuai dengan prinsip kepemerintahan yang baik (*good governance*). Transformasi tata kelola akan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan masyarakat sipil yang partisipatif. Transformasi tatakelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif.

4. **Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia: Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.**

Supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi diarahkan untuk; terwujudnya supremasi hukum nasional yang berkeadilan, kepastian hukum, bermanfaat dan berlandaskan HAM; terwujudnya keselamatan bangsa, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara nusantara Indonesia yang aman, damai dan mandiri serta aktif menjaga perdamaian dunia dan berpengaruh di dunia internasional; terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik; kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik, serta terbukanya partisipasi untuk semua pihak; terwujudnya kesinambungan fiskal dan stabilitas harga melalui transformasi tata kelola dan kelembagaan keuangan negara disertai optimalisasi bauran kebijakan; penguatan sinergi dan fokus diplomasi, dan; pemantapan kelembagaan dan infrastruktur pendukung diplomasi.

5. **Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi: Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan**

Ketahanan sosial budaya dan ekologi yang kuat merupakan landasan sangat penting untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Ketahanan sosial budaya dan ekologi adalah ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan sekitarnya untuk bertahan dan menjaga kesinambungan alam menghadapi berbagai perubahan dan guncangan, agar daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjaga secara berkelanjutan dan setiap individu dapat hidup berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan. Ketahanan sosial, budaya dan ekologi bertumpu pada; penguatan agama sebagai landasan spiritual, etika, moral sebagai modal dasar pembangunan; pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menetapkan peran dan posisi Indonesia dalam mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia; peningkatan ketangguhan individu keluarga, dan masyarakat untuk memastikan

terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; memastikan kemandirian pangan didukung dengan ketahanan energi dan air dilakukan pendekatan terpadu FEW Nexus (*Food, Energy, Water*), dan; pembangunan rendah karbon dilakukan untuk mencapai penurunan emisi GRK, pembangunan berketahanan iklim, dan penanggulangan bencana didasarkan pada karakteristik dan kondisi berbasis pulau.

6. Isu Strategis Transformasi Sistem Pangan

Sektor pangan adalah pilar penting dalam perekonomian Indonesia dimana sektor ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan ketahanan pangan. Tetapi sektor ini dalam beberapa tahun terakhir dihadapkan pada beberapa tantangan seperti adanya konflik geopolitik dan dampak dari perubahan iklim global. Tantangan-tantangan ini sangat mempengaruhi stabilitas pasokan pangan, kualitas, keamanan, hingga akses masyarakat terhadap pangan.

Industri pangan di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Ke depan, terdapat tantangan besar yang perlu dihadapi oleh setiap insan pangan dalam pengelolaan dan pengembangan sistem pangan di Indonesia. Tantangan besar tersebut adalah bagaimana Indonesia dapat melaksanakan transformasi sistem pangan.

Transformasi sistem pangan bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan resiliensinya; yaitu kemampuannya untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi, mengatasi, mencegah, meminimalkan atau menghilangkan tekanan pada sistem. Dengan demikian, diharapkan untuk terus mampu berfungsi memberikan ketahanan pangan dan gizi bagi semua. Menjamin kemampuan produksi pangan dalam berbagai skenario situasi, sehingga dapat memastikan ketahanan pangan dan gizi, dengan tetap memberikan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang optimal. Transformasi ini memerlukan investasi dan inovasi untuk memastikan bahwa sistem pangan secara keseluruhan menjadi lebih berkelanjutan dan adil, serta menjamin akses bagi setiap individu untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

7. Isu Strategis Transformasi Energi Baru Terbarukan

Dalam mitigasi perubahan iklim, Indonesia telah meratifikasi Paris *Agreement* dan berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89% hingga 43,2% dengan bantuan internasional pada 2030. Salah satu upaya mengurangi emisi GRK yakni melalui transisi energi dimana sistem energi yang ada sekarang ditransformasi untuk mengakomodasi penetrasi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang tinggi, sehingga secara berangsur-angsur akan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

Pada 2023, Indonesia berhasil untuk mencapai porsi energi terbarukan sebesar 14%. Namun demikian, potensi pemanfaatan energi baru terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik masih sangat besar.

Dari potensi tenaga listrik sebesar 3.686 GW, pemanfaatan EBT baru mencapai 12.557 MW dimana bioenergi berkontribusi sebesar 3.086 MW.

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengembangan energi terbarukan. Hingga Semeter I (Januari - Juni) Tahun 2024, penambahan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Energi Baru dan Terbarukan (EBT) telah mencapai 217,73 Mega Watt (MW) atau sekitar 66,6% dari target tahunan sebesar 326,91 MW. Peningkatan kapasitas ini didominasi oleh PLT hidro dan PLT surya. PLT hidro berhasil mencapai 66,4% dari target, sementara PLT surya bahkan melampaui target dengan capaian 147,02%. Kendati PLT panas bumi belum mencapai target, namun sektor energi terbarukan lainnya seperti bioenergi juga menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu 43,2% dari target.

Dalam upaya pengembangan energi bersih, Indonesia menghadapi tantangan berupa realisasi bauran EBT yang belum mencapai target. Hingga semester I-2024, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan realisasi bauran EBT baru mencapai 13,93%, masih jauh dari target 23% yang ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional pada 2025.

4. Isu Strategis Daerah

Berdasarkan permasalahan serta isu global dan nasional, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis daerah yang dipetakan pada beberapa transformasi sebagai berikut:

1. **Isu Strategis Transformasi Sosial:** Peningkatan kualitas hidup manusia pada seluruh siklus hidup manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan kohesif **(Kurang Optimalnya Mutu dan Akses Pendidikan dan Kurang Optimalnya Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial serta Pembangunan *Gender equality, Disability and Social Inclusion* (GEDSI/Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial yang belum optimal).**

   Tercapainya transformasi sosial bertumpu pada upaya pemenuhan pelayanan dasar serta pengembangan modal manusia dan modal sosial budaya yang berkaitan dengan kesehatan untuk semua, pendidikan yang berkualitas dan merata, dan perlindungan sosial yang adaptif. Karena itu, transformasi sosial di NTT adalah upaya untuk; mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di daerah, dan menciptakan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, serta masyarakat yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing.

   Kesehatan untuk semua dihadapkan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui; optimalisasi penanganan stunting dan penyakit endemik (malaria), dan; pemerataan dan peningkatan akses serta kualitas fasilitas kesehatan; optimalisasi peningkatan umur harapan hidup; optimalisasi penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, dan; optimalisasi penurunan angka wasting yaitu gizi buruk, gizi kurang, dan *underweight*.

Pendidikan yang berkualitas dan merata dihadapkan pada upaya untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di Provinsi NTT yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di daerah pada berbagai bidang melalui; peningkatan mutu pendidikan, peningkatan angka partisipasi sekolah untuk penduduk usia sekolah termasuk disabilitas, peningkatan angka melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah, mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan vokasional, peningkatan cakupan SMA dan SMK yang terakreditasi, peningkatan digitalisasi sektor pendidikan, dan peningaktan SPM sektor pendidikan.

Perlindungan sosial yang adaptif dihadapkan pada upaya untuk memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip keadilan dan inklusif adaptif. Upaya tersebut dilaksanakan melalui: penurunan angka kemiskinan; optimalisasi pembangunan *Gender equality, Disability and Social Inclusion* (GEDSI/Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial, peningkatan perlindungan sosial bagi PMKS; optimalisasi cakupan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan; optimalisasi akurasi data untuk ketepatan intervensi; optimalisasi pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; fasilitas umum yang ramah GEDSI, dan; Mengurangi jumlah masyarakat yang masuk kategori rumah tidak layak huni.

2. **Isu Strategis Transformasi Ekonomi:** Peningkatan produksi dan produktifitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi **(1) Belum Maksimalnya Transformasi Ekonomi Daerah, (2) Belum Terbangunnya Ketahanan Pangan yang Tangguh dan Berkelanjutan; (3) Kurang optimalnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar; (4) Peningkatan produksi dan produktifitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi dan swasembada pangan**

   Terciptanya transformasi ekonomi bertumpu pada upaya penciptaan kemampuan dan daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan kontribusi sektor primer, sektor indutri, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, serta BUMD. Upaya tersebut ditunjang dengan penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau untuk memastikan keberlanjutan pembangunan pada berbagai sektor.

   Peningkatan produksi dan produktifitas pada sektor primer sentra-sentra pengolahan dan pemasaran di kawasan perkotaan; perbaikan dihadapkan pada upaya untuk; perbaikan pola pertanian, peternakan, dan perikanan yang bersifat subsisten kepada pola pertanian yang berorientasi komersil; optimlsiasi adopsi teknologi pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan; optimalisasi penguatan sentra produksi dikawasan pedesaan, serta insentif pada sistem pasar sektor primer; optimalisasi ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasana termasuk ketersediaan pupuk, benih, jalan usaha tani, ketersediaan air dan irigasi; optimalisasi penanganan hama penyakit pada sektor pertanian dan peternakan, dan optimalisasi ketahanan sektor primer terhadap dampak perubahan iklim.

Peningkatan produksi dan produksi pada sektor primer memberikan dukungan terhadap pengembangan industri pengolahan (hilirisasi). Selain itu, ketersediaan dan kontinuitas produksi dan produktifitas sektor primer juga diperlukan agar dapat menjamin keberlanjutan *supply* bahan baku bagi pengembangan industri di NTT. Apa lagi NTT memiliki komoditas berbasis *Core Competence* Komoditas Unggulan Wilayah, antara lain; padi, mete, kopi, kakao, jagung, babi, sapi, rumput laut, perikanan tangkap, dan garam. Komoditas- komoditas ini perlu diperkuat guna mendukung indutri pariwisata dan ekonomi kreatif.

3. **Isu Strategis Transformasi Tata Kelola:** Peningkatan efektifitas, akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan **(Kurang Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan)**

   Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah daerah bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga bisa menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini ditempuh melalui; peningkatan kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan public, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan.

   Penguatan terhadap derajat kemandirian fiskal dihadapkan pada upaya; optimalisasi pengelolaan potensi PAD; mengembangkan investasi pengelolaan keuangan daerah, dan; penguatan pengelolaan asset daerah. penguatan terhadap pelayanan publik ditempuh melalui upaya; peningkatan akses pelayanan publik berbasis digital yang merata bagi masyarakat; penyediaan kawasan khusus pedagangan antar negara di kawasan perbatasan berupa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun *Free Trade Zone* (FTZ), peningkatan pelayanan yang berbasis kepuasan pelanggan dan; optimalisasi inovasi pelayanan publik. Peningkatan manajemen talenta ditempuh melalui; optimalisasi pengembangan SDM birokrasi berbasis manajamen talenta. Keberlanjutan pembangunan ditempuh melalui; pengintagrasian proses bisnis perencanaan, pengaggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi dan; peningkatan perencanaan dan penganggaran dalam memastikan keberlanjutan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. **Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia**

   Penekanan utama pada isu yakni stabilitas makro dengan penjabaran isu strategis daerah sebagai berikut: peningkatan stabilitas makro dalam mewujudkan kesinambungan fiskal dan kemampuan serta stabilitas ekonomi daerah melalui kerja kolaborasi/*hexa helix*; peningkatan efektifitas, akutantabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan.

5. Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Fokus isu meliputi aspek ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi yang dijabarkan dalam beberapa isu strategis daerah sebagai berikut: peningkatan pemanfatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi; peningkatan ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang bertumpu pada keseimbangan alam dan lingkungan; Perubahan Iklim, ketahanan pangan dan penurunan indeks resiko bencana memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan pengelolaan lingkungan yang kuat dengan perencanaan strategis untuk mengurangi risiko bencana, meningkatkan adaptasi perubahan iklim dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Keselarasan Isu Daerah dengan Isu KLHS serta Isu Lingkungan Dinamis yang mencakup Isu Global, Isu Nasional, dan Isu Regional dapat dilihat secara mendetail pada tabel di bawah ini yang menjelaskan bahwa Isu Strategis Daerah Provinsi NTT telah selaras dengan isu KLHS, isu Global, Nasional dan Regional. Selain itu, keselarasan menggambarkan adanya sinergitas setiap isu pembangunan yang wajib diselesaikan dengan dukungan kerja kolaborasi produktif bersama pihak/hexa helix demi mewujudkan agenda pembangunan NTT sekaligus mencapai tujuan pembangunan global yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Tabel 2.75 Persandingan Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

No	Permasalahan	Isu Lingkungan Dinamis KLHS/Global/Nasional/Regional	Isu Strategis Daerah	
Potensi Daerah				
1. Sumber Daya Alam (SDA)				
a. Pariwisata				
1	Kurang optimalnya pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan yang disebabkan oleh:	**Isu KLHS**	**Isu Strategis Transformasi Ekonomi**	
a)	Kurang optimalnya pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan;	Isu Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran;	1	Belum Maksimalnya Transformasi Ekonomi Daerah;
b)	Kurang optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata baik dalam maupun luar negeri;	Isu Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan;	2	Belum Terbangunnya Ketahanan Pangan yang Tangguh dan Berkelanjutan; dan
c)	Rendahnya kualitas sumber daya manusia terampil yang terlatih untuk pengembangan pariwisata;	Isu Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan	3	Kurang optimalnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.
d)	Industri pariwisata belum berkembang secara merata pada setiap destinasi wisata;	Isu Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan Pangan.		
e)	Kurang optimalnya kerja sama antardaerah dalam pengembangan pemasaran pariwisata melalui penyediaan paket-paket wisata antardaerah;		4	Peningkatan produksi dan produktifitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi dan swasembada pangan
f)	Belum meratanya infarstuktur yang mendukung pariwisata berupa aksesibilitas, konektivitas, dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pada daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata; dan	**Isu Global**	**Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi**	

No	Permasalahan	Isu Lingkungan Dinamis KLHS/Global/Nasional/Regional	Isu Strategis Daerah	
g)	Masih terbatasnya informasi pariwisata akibat terbatasnya pusat-pusat informasi pariwisata (*Tourism Information Center*-TIC).	Pembangunan infrastruktur yang solid, inovatif, dan berorientasi pada industri berkelanjutan; Perlindungan dan penggunaan secara berkelanjutan sumber daya laut daratan.	1	Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana.
2	Kurang optimalnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah.	**Isu Nasional**	2	Peningkatan Pemanfaatan EBT sebagai sumber energi
		Pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, meliputi pengembangan destinasi wisata baru yang tidak merusak lingkungan, pengelolaan limbah pariwisata yang efektif, dan penggunaan energi terbarukan.	3	Peningkatan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi yang bertumpu pada keseimbangan alam dan lingkungan
		Isu Regional	**Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia**	
		Pengembangan Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional.	1	Peningkatan stabilitas makro dalam mewujudkan kesinambungan fiskal dan kemampuan serta stabilitas ekonomi daerah melalui kerja antar daerah/kolaborasi (hexa helix).
			2	Peningkatan efektifitas, akutantabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan.

No	Permasalahan	Isu Lingkungan Dinamis KLHS/Global/Nasional/Regional	Isu Strategis Daerah	
Potensi Daerah				
2. Ekonomi				
a. Ekonomi Kreatif (Kriya, Kuliner, Fashion)				
1	Kurang optimalnya pengelolaan potensi ekonomi kreatif akibat:	**Isu KLHS**	**Isu Strategis Transformasi Ekonomi**	
a)	Kurang optimalnya sumber daya manusia yang trampil, kreatif dan inovasi serta rendahnya literasi wirausaha termasuk kemampuan tekhnologi yang belum optimal;	Isu Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran;	1	Belum Maksimalnya Transformasi Ekonomi Daerah;
b)	Kurang optimalnya kelembagaan ekonomi kreatif dan manejemen pengelolaan usaha;	Isu Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan;	2	Belum Terbangunnya Ketahanan Pangan yang Tangguh dan Berkelanjutan;
c)	Masih lemahnya perlindungan terhadap produk usaha ekonomi kreatif melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual hasil budaya tradisonal;	Isu Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan	3	Kurang optimalnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar; dan
			4	Konektivitas infrastruktur fisik dan ekonomi belum terintegrasi terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman.
d)	Daya saing SDM ekonomi kreatif yang masih lemah dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual;	Isu Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan Pangan.	5	Peningkatan produksi dan produktifitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi dan swasembada pangan.
			6	Diversifikasi ekonomi berjalan lambat, terutama pada sektor industri hilir, ekonomi kreatif, dan pariwisata.
			7	Hilirisasi belum didukung oleh ekosistem investasi, teknologi dan SDM yang memadai.

No	Permasalahan	Isu Lingkungan Dinamis KLHS/Global/Nasional/Regional	Isu Strategis Daerah	
e)	Rendahnya akses permodalan yakni, terbatasnya akses pada pembiayaan atau modal untuk usaha kecil dan menengah di sektor ekonomi kreatif; dan	**Isu Global**	**Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi**	
f)	Kurangnya adopsi teknologi dan inovasi dalam proses produksi dan distribusi.	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak;	1	Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana
			2	Peningkatan Pemanfaatan EBT sebagai sumber energi
			3	Peningkatan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi yang bertumpu pada keseimbangan alam dan lingkungan
2	Kurang optimalnya promosi dan pemasaran produk kreatif dari NTT dengan memanfaatkan pasar digital.	Pengelolaan daratan yang berkelanjutan,	**Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia**	
3	Kurang optimalnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah	Pemulihan lahan terdegradasi, dan pelestarian keanekaragaman hayati; dan	1	Peningkatan stabilitas makro dalam mewujudkan kesinambungan fiskal dan kemampuan serta stabilitas ekonomi daerah melalui kerja kolaborasi / *hexa helix*
		Pengurangan emisi gas rumah kaca, Adaptasi terhadap perubahan iklim, serta peningkatan ketahanan terhadap bencana.		
		Isu Nasional		
		Kerawanan pangan; Ekosistem terdegradasi; emisi gas rumah kaca; perubahan iklim.		
		Isu Regional		

No	Permasalahan	Isu Lingkungan Dinamis KLHS/Global/Nasional/Regional	Isu Strategis Daerah
		Pengembangan Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional; dan	
		Pengembangan Kawasan Potensial Swasembada Pangan, Swasembada Air dan Energi, Daerah Tertinggal.	
Potensi Daerah			
3. Sektor Produktif			
a. Sektor Pertanian dan Perkebunan			
1	Kurang optimalnya produksi dan produktivitas sektor primer yang disebabkan oleh:	**Isu KLHS**	**Isu Strategis Transformasi Ekonomi**
2	Pola pertanian, peternakan, dan perikanan masih bersifat subsisten, belum berorientasi komersil.	Isu Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran;	1 Belum Maksimalnya Transformasi Ekonomi Daerah;
3	Kurang optimalnya adopsi teknologi pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.	Isu Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan;	2 Belum Terbangunnya Ketahanan Pangan yang Tangguh dan Berkelanjutan;
4	Dominasi petani gurem dimana, pusat-pusat produksi pertanian masih sporadis dan dalam skala kecil	Isu Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;	3 Kurang optimalnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar
5	Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi sektor primer.	Isu Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan Pangan	4 Peningkatan produksi dan produktifitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi dan swasembada pangan
6	Lemahnya rantai pasok dalam sistem agribisnis yakni, penyediaan dan akses terhadap sarana produksi utama dalam sistem agribisnis di NTT masih lemah.	**Isu Nasional**	**Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi**

No	Permasalahan	Isu Lingkungan Dinamis KLHS/Global/Nasional/Regional	Isu Strategis Daerah	
7	Kurang optimalnya ketersediaan sarana dan prasana termasuk ketersediaan pupuk, benih, jalan usaha tani, ketersediaan air dan irigasi.	Kerawanan pangan; Ekosistem terdegradasi; emisi gas rumah kaca; perubahan iklim	1	Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana
			2	Peningkatan Pemanfaatan EBT sebagai sumber energi
			3	Peningkatan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi yang bertumpu pada keseimbangan alam dan lingkungan
8	Kurang optimalnya penanganan hama penyakit pada sektor pertanian dan peternakan.	**Isu Regional**	**Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia**	
9	Keselerasan hubungan hulu-hilir (produsen dan pengguna produk pertanian dan perikanan) yang belum terjalin.	Kawasan Potensial Swasembada Pangan, Swasembada Air dan Energi; Daerah Tertinggal	1	Peningkatan stabilitas makro dalam mewujudkan kesinambungan fiskal dan kemampuan serta stabilitas ekonomi daerah melalui kerja kolaborasi / *hexa helix*
10	Ancaman hama penyakit yang berdampak luas, khususnya ASF pada ternak babi dan hama belalang kembara (*locusta migrotoria manilensis meyen*).		2	Peningkatan efektifitas, akutantabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan
11	Dampak perubahan iklim terhadap pola tanam dan masa tanam sehingga menyebabkan fenomena gagal panen.			
12	Jaringan irigasi yang tidak efisien di sentra produksi padi (sawah).			

No	Permasalahan	Isu Lingkungan Dinamis KLHS/Global/Nasional/Regional	Isu Strategis Daerah	
Potensi Daerah				
b. Sektor Peternakan				
1	Sistem pemeliharaan ternak sebagian besar masih konvensional	**Isu KLHS**	**Isu Strategis Transformasi Ekonomi**	
2	Belum terpenuhinya kebutuhan bibit ternak (sapi potong,sapi Perah, kerbau, kambing, domba,babi,	Isu Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	1	Belum Maksimalnya Transformasi Ekonomi Daerah,
3	Ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik	Isu Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	2	Belum Terbangunnya Ketahanan Pangan yang Tangguh dan Berkelanjutan;
4	Penurunan kualitas bibit ternak	Isu Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	3	Kurang optimalnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar
5	Masih adanya kasus penyakit hewan menular strategis	Isu Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan Pangan	4	Peningkatan produksi dan produktifitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi dan swasembada pangan
6	Masih adanya produk hewan yang beredar belum memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner	**Isu Global**	**Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi**	
		Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	1	Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana
			2	Peningkatan Pemanfaatan EBT sebagai sumber energi
			3	Peningkatan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi yang bertumpu pada keseimbangan alam dan lingkungan
		Isu Nasional	**Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia**	

No	Permasalahan	Isu Lingkungan Dinamis KLHS/Global/Nasional/Regional	Isu Strategis Daerah	
		Peningkatan produksi pakan ternak; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; penyediaan benih dan bibit seta peningkatan produksi ternak; peningkatan kesehatan masyarakat veteriner; pengembangan pengolahandan pemasaran hasil ternak	1	Peningkatan stabilitas makro dalam mewujudkan kesinambungan fiskal dan kemampuan serta stabilitas ekonomi daerah melalui kerja kolaborasi / *hexa helix*
		Isu Regional Pengembangan Kawasan Potensial Swasembada Pangan, Swasembada Air dan Energi; Daerah Tertinggal	2	Peningkatan efektifitas, akutantabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan
Potensi Daerah				
c. Sektor Kelautan dan Perikanan (Rumput Laut, Garam, Perikanan Tangkap, Budidaya Air Tawar				
1	Terbatasnya Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola;	**Isu KLHS**	**Isu Strategis Transformasi Ekonomi:**	
2	Masih terbatasnya Produksi Perikanan Tangkap dan budidaya; dan	Isu Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	1	Belum Maksimalnya Transformasi Ekonomi Daerah,
3	Masih rendahnya angka konsumsi ikan.	Isu Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	2	Belum Terbangunnya Ketahanan Pangan yang Tangguh dan Berkelanjutan;
a.	**Garam**	Isu Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;	3	Kurang optimalnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar

No	Permasalahan	Isu Lingkungan Dinamis KLHS/Global/Nasional/Regional	Isu Strategis Daerah	
1	Teknologi Produksi yang Tradisional: Sebagian besar petani garam masih menggunakan metode tradisional (solar evaporation), yang bergantung pada cuaca sehingga produksi tidak stabil, terutama saat musim hujan;	Isu Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan Pangan	4	Peningkatan produksi dan produktifitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi dan swasembada pangan
2	Kualitas Garam yang Rendah: Garam rakyat seringkali mengandung kadar NaCl rendah dan pengotor (kotoran, logam berat) karena kurangnya proses pemurnian, sehingga kurang bersaing di pasar industri;	**Isu Global**	**Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi**	
3	Infrastruktur yang Tidak Memadai: Minimnya lahan garam (tambak) yang berkualitas, akses air laut yang terbatas, serta kurangnya fasilitas penyimpanan dan pengolahan garam modern;	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak	1	Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana
4	Pasar dan Harga yang Tidak Stabil: Petani garam seringkali kesulitan memasok ke industri besar karena ketidaksesuaian standar mutu, sehingga harga jual rendah dan dikuasai oleh tengkulak; dan	Pengelolaan daratan yang berkelanjutan	**Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia**	
5	Dampak Perubahan Iklim: Cuaca ekstrem (hujan berkepanjangan atau kemarau panjang) mengganggu proses kristalisasi garam.	Pemulihan lahan terdegradasi, dan pelestarian keanekaragaman hayati	1	Peningkatan stabilitas makro dalam mewujudkan kesinambungan fiskal dan kemampuan serta stabilitas ekonomi daerah melalui kerja kolaborasi / *hexa helix*
b.	**Rumput Laut**	Pengurangan emisi gas rumah kaca, Adaptasi terhadap perubahan iklim, serta peningkatan ketahanan terhadap bencana	2	Peningkatan efektifitas, akutantabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal
1	Serangan Hama dan Penyakit: Budidaya rumput laut rentan terhadap hama seperti ice-ice dan parasit yang menurunkan kualitas produksi;			

No	Permasalahan	Isu Lingkungan Dinamis KLHS/Global/Nasional/Regional	Isu Strategis Daerah	
2	Teknik Budidaya yang Masih Sederhana: Mayoritas petani menggunakan metode tali panjang (long line) tanpa penerapan teknologi yang meningkatkan produktivitas;	**Isu Nasional**		daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan
3	Pasca Panen yang Minim Pengolahan: Rumput laut NTT umumnya dijual dalam bentuk kering tanpa nilai tambah (hanya bahan mentah), sehingga harga jual rendah. Minimnya industri pengolahan rumput laut di lokal;	Penangkapan ikan terukur; budidaya laut, pesisir dan payau; pengolahan sampah plastik di laut		
4	Akses Pasar yang Terbatas: Ketergantungan pada pasar ekspor (seperti China) membuat harga fluktuatif. Selain itu, rantai distribusi yang panjang mengurangi keuntungan petani;	**Isu Regional**		
5	Perubahan Lingkungan: Degradasi kualitas perairan akibat sedimentasi dan aktivitas manusia mempengaruhi pertumbuhan rumput laut.	Pengembangan Kawasan Potensial Swasembada Pangan, Sentra Produksi Garam, Sentra produksi rumput laut		
4. Potensi Sumber Daya Manusia				
1	Masih tingginya prevalensi Stunting, AKI, AKB,Gizi buruk;	**Isu KLHS**	**Isu Strategis Transformasi Sosial**	
2	Masih rendah kualitas pendidikan dan ketrampilan masyarakat;	Isu Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan Berkualitas, Inklusif dan Merata;	1	Kurang Optimalnya Mutu dan Akses Pendidikan;
3	Kurang optimalnya kapasitas aparatur pemerintah; dan	Isu Good Governance dan Akses Pelayanan Publik yang Belum Optimal.	2	Kurang Optimalnya Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial

No	Permasalahan	Isu Lingkungan Dinamis KLHS/Global/Nasional/Regional	Isu Strategis Daerah	
4	Terbatasnya akses pendidikan dan pekerjaan bagi kelompok rentan (Disabilitas, lansia dll)	Isu Pengarusutamaan GEDSI (Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial) dan Perlindungan Anak serta Perempuan	3	Kurang optimalnya pembangunan Gender, Equalitas, Disabilitas, dan Social Inklusi (GEDSI)
		Isu Global	**Isu Strategis Transformasi Tata Kelola**	
		Tanpa kemiskinan,	1	Peningkatan efektifitas, akutantabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan
		Tanpa kelaparan		
		Kehidupan sehat dan sejahtera		
		Pendidikan berkualitas		
		Kesetaraan gender		
		Pengembangan kapasitas dan transfer teknologi		
		Isu Nasional		
		Kesehatan untuk semua	2	Kurang Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
		Pendidikan berkualitas yang merata	3	Riset dan Inovasi teknologi lingkungan belum menjadi arus utama kebijakan daerah.
		Perlindungan sosial yang adaptif		
		Isu Regional		
		Dukungan bagi pembangunan Daerah Tertinggal		

Dengan demikian, persandingan isu strategis dan Visi dan Misi Kepala Daerah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.76 Persandingan Isu Strategis Daerah dan Visi, Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029

Isu Strategis Daerah		Misi
VISI : "NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan"		
Isu Strategis Transformasi Ekonomi		
1	Belum Maksimalnya Transformasi Ekonomi Daerah;	**Misi I:** Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan demi mewujudkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yang Berdaya Saing (Maju)
2	Belum Terbangunnya Ketahanan Pangan yang Tangguh dan Berkelanjutan;	
3	Kurang optimalnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar; dan	**Misi IV:** Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses, serta Kualitas Hidup yang Berkeadilan dan Madani bagi seluruh lapisan Masyarakat (Sejahtera)
4	Peningkatan produksi dan produktifitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi dan swasembada pangan.	**Misi V:** Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang Bijak serta Pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang Inklusif (Berkelanjutan)
Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi		
1	Peningkatan pemanfatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi;	**Misi I:** Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan Demi Mewujudkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah Yang Berdaya Saing (Maju)
2	Peningkatan ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang bertumpu pada keseimbangan alam dan lingkungan; dan	**Misi IV:** Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses, serta Kualitas Hidup yang Berkeadilan dan Madani bagi seluruh lapisan Masyarakat (Sejahtera)
3	Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana.	**Misi V:** Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang Bijak serta Pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang Inklusif (Berkelanjutan)
Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia		
1	Peningkatan stabilitas makro dalam mewujudkan kesinambungan fiskal dan kemampuan serta stabilitas ekonomi daerah melalui kerja antar daerah/kolaborasi (hexa helix); dan	**Misi I:** Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan demi mewujudkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yang Berdaya Saing (Maju)

Isu Strategis Daerah		Misi
2	Peningkatan efektifitas, akutantabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan.	**Misi V:** Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang Bijak serta Pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang Inklusif (Berkelanjutan)
Isu Strategis Transformasi Sosial		
1	Kurang Optimalnya Mutu dan Akses Pendidikan;	**Misi III:** Menghadirkan Pendidikan Berkualitas yang merata, Partisipatif dan Tepat Sasaran (Cerdas)
2	Kurang Optimalnya Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial; dan	**Misi II:** Memperluas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial yang Lebih Inkusif, Terjangkau dan Mudah di Akses (Sehat)
3	Kurang optimalnya pembangunan Gender, Equalitas, Disabilitas, dan Social Inkluasi (GEDSI).	**Misi IV:** Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses, serta Kualitas Hidup yang Berkeadilan dan Madani bagi seluruh lapisan Masyarakat (Sejahtera) **Misi V:** Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang Bijak serta Pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang Inklusif (Berkelanjutan)
Isu Strategis Transformasi Tata Kelola		
1	Peningkatan efektifitas, akutantabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan; dan	**Misi IV:** Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses, serta Kualitas Hidup yang Berkeadilan dan Madani bagi seluruh lapisan Masyarakat (Sejahtera)
2	Kurang Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.	**Misi V:** Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang Bijak serta Pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang Inklusif (Berkelanjutan)

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1 Visi dan Misi

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu E. Melkiades Lakalena dan Johni Asadoma menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Nusa Tenggara Timur sampai dengan Tahun 2029 difokuskan untuk mewujudkan Visi. Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029, adalah :

"NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan"

Pernyataan Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 memiliki makna sebagai berikut:

Makna NTT Maju : Kemajuan yang mencakup berbagai aspek di Nusa Tenggara Timur, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan NTT sebagai provinsi yang maju dan berkarakter. Memastikan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing.

Makna Filosofisnya: Kemajuan adalah gerak menuju masa depan yang lebih baik tanpa meninggalkan akar budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.

Makna NTT Sehat : Upaya bersama untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Nusa Tenggara Timur serta Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau, dan mudah diakses.

Makna Filosofisnya: Kesehatan adalah pondasi kehidupan, tubuh yang sehat menciptakan masyarakat yang kuat.

Makna NTT Cerdas : Berkomitmen menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif, dan tepat sasaran membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing dan inovatif.

Makna Filosofisnya: Kecerdasan bukan sekedar ilmu melainkan kebijaksanaan dalam bertindak demi kebaikan bersama

Makna NTT Sejahtera : Membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang, berinovasi dan berkontribusi bagi kemajuan daerah serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Makna Filosofisnya: Kesejahteraan tercapai saat semua warga hidup layak

dan saling menguatkan dalam keadilan

Makna NTT Berkelanjutan : Keberlanjutan bukan hanya soal mempertahankan kebijakan, tetapi tentang membangun ekosistem yang mampu berkembang secara mandiri dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Keberlanjutan berarti memastikan bahwa setiap kemajuan yang kita capai baik di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial tidak sekedar bertahan tetapi juga memperkuat masyarakat agar tidak terus menerus bergantung pada intervensi pemerintah sehingga menciptakan inisiatif yang tumbuh berkembang dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Makna Filosofisnya: Keberlanjutan adalah warisan bumi, budaya dan kemanusiaan yang akan tetap lestari.

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan beberapa Misi Pembangunan Jangka Menengah Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan demi mewujudkan Ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU);
2. Memperluas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT);
3. Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif, dan tepat sasaran (CERDAS);
4. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses serta Kualitas Hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan Masyarakat (SEJAHTERA); dan
5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang bijak serta pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN).

1) Keselarasan Sasaran, Indikator, Visi dan Misi RPJMD dengan Visi Misi RPJPD

Sasaran Visi dan Indikator Visi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 hanya menetapkan baseline Tahun 2025 dan target tahun 2045 sehingga RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 berkewajiban untuk menetapkan target pada periode pertama RPJPD yaitu Tahun 2025-2029 seperti persandingan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Persandingan Sasaran Visi dan Indikator Visi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 dengan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025 -2029

Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045		RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025 -2029						
		Baseline 2025	Target 2045	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju	• PDRB per kapita (Rp Juta)	24,57 - 24,85	154,72 - 176,22	23,52	24,57- 24,85	24,71- 25,25	24,85– 25,65	24,99-26,05	25,13- 26,45	25,27- 26,85
	• Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI/Poin)	60,41	233,21	NA	60,41	69,05	77,69	86,33	94,97	103,61
	• Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	1,31 - 1,34	2,25 - 2,76	2,46	1,31 - 1,34	1,36 - 1,41	1,40 - 1,48	1,45 - 1,55	1,50 - 1,62	1,55 - 1,70
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	• Tingkat Kemiskinan (%)	15,32 – 15,82	0,01-1,01	19,02	18,81 - 19,36	18,12- 18,74	17,43 – 18,12	16,74 – 17,50	16,05 – 16,88	15,36 – 16,26
	• Rasio Gini (Indeks)	0,319 – 0,324	0,257 – 0,308	0,316	0,309- 0,315	0,302- 0,308	0,295- 0,301	0,288-0,295	0,281- 0,287	0,274-0- 280
	• Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,62	0,79	NA	0,62	0,6285	0,637	0,6455	0,654	0,6625
	• Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,75-5,65	6,21-7,63	3,73	3,95-4,75	4,43-5,01	4,78-5,65	5,13-6,29	5,48-6,93	5,83-7,53
3. Daya Saing Daerah yang meningkat	• Indeks Daya Saing Daerah	3,20 (2022)	3,9 – 4,45	3,41	3,42	3,43	3,44	3,45	3,46	3,47

Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045		RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025 -2029						
		Baseline 2025	Target 2045	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4. Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif dan inovatif	• Indeks Modal Manusia (Poin)	0,47	0,72	0,48	0,487	0,493	0,500	0,506	0,513	0,519
5. Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*	• Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	61,82	98,59	53,27	61,82	63,19	64,57	69,07	70,26	71,45
	• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	80,02	86,31	74,42	80,02	80,19	80,35	80,52	80,69	80,85

Sumber : RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 dan Olahan Tim Penyusun RPJMD Provinsi NTT, 2025

Visi RPJMD NTT 2025-2029 tidak terlepas dari visi jangka panjang yang termuat dalam RPJPD Provinsi NTT 2025-2045. Tabel di bawah ini menjelaskan hubungan logis antara Visi dan Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045.

Tabel 3.2 Keselarasan Visi, Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045

Visi RPJMD 2025-2029		**Visi RPJPD 2025-2045**
NTT Maju Sehat Cerdas, Sejahtera Dan Berkelanjutan	**selaras**	Tenggara Timur Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045
Misi RPJMD 2025-2029		**Misi RPJPD 2025-2045**
Misi I: Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan demi mewujudkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yang Berdaya Saing (MAJU)	**selaras**	**Misi 2**: Membangun Ekonomi NTT yang maju dan berdaya saing berbasis Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru. **Misi 4:** Meningkatkan Supremasi Hukum yang menjamin keadilan, kepastian, stabilitas ekonomi dan demokrasi. **Misi 6:** Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan. **Misi 7**: Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. **Misi 8:** Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Daerah
Misi II: Memperluas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial yang Lebih Inkusif, Terjangkau dan Mudah di Akses (SEHAT)	**selaras**	**Misi 1** : Membangun Sumberdaya manusia yang berdaya saing dan terlindungi hak dasarnya. **Misi 6:** Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan. **Misi 8:** Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Daerah
Misi III: Menghadirkan Pendidikan Berkualitas yang merata, Partisipatif dan Tepat Sasaran (CERDAS)	**selaras**	**Misi 1** : Membangun Sumberdaya manusia yang berdaya saing dan terlindungi hak dasarnya. **Misi 6:** Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan. **Misi 8:** Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Daerah.

Misi RPJMD 2025-2029		Misi RPJPD 2025-2045
Misi IV: Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses, serta Kualitas Hidup yang Berkeadilan dan Madani bagi seluruh lapisan Masyarakat (SEJAHTERA)	**selaras**	**Misi 5:** Mewujudkan Pembangunan yang inklusif dan berketahan Sosial Budaya dan Ekologi. **Misi 4:** Meningkatkan Supremasi Hukum yang menjamin keadilan, kepastian, stabilitas ekonomi dan demokrasi. **Misi 6:** Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan
Misi V: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang Bijak serta Pemenuhan HAM untuk Menciptakan masa depan yang Inklusif (BERKELANJUTAN)	**selaras**	**Misi 3:** Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif. **Misi 4:** Meningkatkan Supremasi Hukum yang menjamin keadilan, kepastian, stabilitas ekonomi dan demokrasi. **Misi 5:** Mewujudkan Pembangunan yang inklusif dan berketahan Sosisal Budaya dan Ekologi. **Misi 6:** Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan **Misi 8:** Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Daerah

Sumber : olahan Tim Penyusun RPJMD Provinsi NTT, 2025

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa persandingan antara Visi kedua dokumen selaras untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang maju, berdaulat yang mengutamakan asas kelestarian lingkungan dan keberlanjutan, dimana RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 lebih luas cakupannya untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan mengusung 8 (delapan) misi misi yang mencakup Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Tata Kelola Pemerintahan dan Hukum, Pembangunan Inklusif, Pembangunan Kewilayahan, Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan dan Kesinambungan Pembangunan Daerah. Sedangkan Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 yang merupakan periode pertama dari RPJPD hanya difokuskan pada 5 (lima) aspek antara lain; Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan, Kesejahteraan, Sumber Daya Alam. Dengan demikian, setiap misi RPJMD Provinsi NTT tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan langsung dengan misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045.

2) Keselarasan Visi dan Misi RPJMD dengan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029

Keselarasan Visi, Misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 dengan Visi, Misi RPJMN 2025-2045 sebagaimana terlihat di bawah ini :

1. Visi RPJMN 2025-2029 : **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.**
2. Visi RPJMD 2025-2029 : **NTT Maju, Sehat Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan.**

Tabel keselarasan Misi RPJMD dengan Misi RPJMN sebagai berikut.

Tabel 3.3 Keselarasan Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMN Tahun 2025-2029

MISI RPJMD PROVINSI NTT TAHUN 2025-2029	MISI RPJMN TAHUN 2025-2029
Misi I: Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan Demi Mewujudkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah Yang Berdaya Saing (MAJU)	**Misi II** : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
	Misi III : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
	Misi V : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
	Misi VI : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
Misi II : Memperluas Pelayanan Kesehatan Dan Jaminan Sosial Yang Lebih Inkusif, Terjangkau Dan Mudah Diakses (SEHAT)	**Misi I** : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
	Misi IV : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Misi III : Menghadirkan Pendidikan Berkualitas Yang Merata, Partisipatif Dan Tepat Sasaran (CERDAS)	**Misi IV** : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

MISI RPJMD PROVINSI NTT TAHUN 2025-2029	MISI RPJMN TAHUN 2025-2029
Misi III : Menghadirkan Pendidikan Berkualitas Yang Merata, Partisipatif Dan Tepat Sasaran (CERDAS)	**Misi VIII** : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Misi IV : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses, Serta Kualitas Hidup Yang Berkeadilan Dan Madani Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat (SEJAHTERA)	**Misi V** : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
	Misi VI : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
Misi V : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Manusia Yang Bijak Serta Pemenuhan HAM Untuk Menciptakan Masa Depan Yang Inklusif (BERKELANJUTAN)	**Misi I** : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
	Misi IV : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
	Misi V : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
	Misi VII: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
	Misi VIII: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sumber : olahan Tim Penyusun RPJMD Provinsi NTT, 2025

3) Keselarasan Misi RPJMD dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2015-2029

Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals/SDGs* di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres ini menguraikan 17 (tujuh belas) tujuan dari implementasi TPB yang termasuk dalam sasaran nasional RPJMN Tahun 2025-2029 di Indonesia.

Pada Tabel 3.4 menggambarkan keselarasan antara Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2015-2029. Keselarasan ini menunjukkan komitmen

pemerintah daerah dalam mendukung agenda global pembangunan berkelanjutan sekaligus mencerminkan integrasi prinsip-prinsip SDGs ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Berikut penjelasan rincinya:

1. **Misi I: Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan demi mewujudkan Ekonomi berbasis Potensi Daerah yang Berdaya Saing (MAJU)**

   Misi ini selaras dengan beberapa tujuan SDGs, antara lain:

   - **Tanpa Kemiskinan** : Pembangunan infrastruktur berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan daya saing daerah;
   - **Tanpa Kelaparan** : Infrastruktur yang memadai mendukung ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan;
   - **Air Bersih dan Sanitasi Layak** : Misi ini mencakup penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan;
   - **Energi Bersih dan Terjangkau** : Pembangunan infrastruktur energi yang andal dan berkelanjutan;
   - **Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi** : Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesempatan kerja produktif;
   - **Industri, Inovasi, dan Infrastruktur** : Fokus pada pembangunan infrastruktur tangguh dan peningkatan inovasi;
   - **Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan** : Menciptakan kota inklusif, aman, dan berkelanjutan; dan
   - **Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab** : Mendorong pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.

2. **Misi II: Memperluas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial yang Lebih Inklusif, Terjangkau dan Mudah Diakses (SEHAT)**

   Misi ini sejalan dengan tujuan SDGs :

   - **Kehidupan Sehat dan Sejahtera** : Memastikan akses layanan kesehatan yang inklusif dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
   - **Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi** : Pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang baik mendukung produktivitas tenaga kerja.

3. **Misi III: Menghadirkan Pendidikan Berkualitas yang Merata, Partisipatif dan Tepat Sasaran (CERDAS)**

   Misi ini berkaitan dengan tujuan SDGs:

   - **Pendidikan Berkualitas** : Menjamin pendidikan inklusif, merata, dan berkesempatan belajar sepanjang hayat; dan
   - **Industri, Inovasi, dan Infrastruktur** : Pendidikan berkualitas mendorong inovasi dan pengembangan SDM unggul.

4. **Misi IV: Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses, serta Kualitas Hidup yang Berkeadilan dan Madani bagi Seluruh Lapisan Masyarakat (SEJAHTERA)**

   Misi ini selaras dengan tujuan SDGs:

   - **Kesetaraan Gender** : Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
   - **Berkurangnya Kesenjangan** : Mengurangi kesenjangan intra-daerah dan antar-daerah;

- **Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan** : Meningkatkan kualitas hidup yang inklusif; dan
- **Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab** : Mendorong pola hidup berkeadilan dan berkelanjutan.

5. Misi V: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang Bijak serta Pemenuhan HAM untuk Menciptakan Masa Depan yang Inklusif (BERKELANJUTAN)

Misi ini mencakup banyak aspek SDGs, seperti:

- **Penanganan Perubahan Iklim** : Tindakan cepat untuk mengatasi dampak perubahan iklim;
- **Ekosistem Laut** : Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya kelautan;
- **Ekosistem Daratan** : Restorasi dan pengelolaan berkelanjutan ekosistem daratan;
- **Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh**: Mewujudkan masyarakat inklusif dan damai; dan
- **Kemitraan untuk Mencapai Tujuan** : Revitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sehubungan dengan itu, maka penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan 5 (lima) misi pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Keselarasan Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029
dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2015-2029

Misi RPJMD Tahun 2025-2029/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2015-2029							
Misi I : Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan demi mewujudkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yang berdaya saing (MAJU)							
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan : Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	**Tujuan 2 Tanpa Kelaparan**: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	**Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak:** Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	**Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau**: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	**Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	**Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur:** Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	**Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan**: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	**Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab**: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
Misi II : Memperluas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial yang lebih Inklusif, Terjangkau dan Mudah di Akses (SEHAT)							
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan: Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	**Tujuan 2 Tanpa Kelaparan**: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian perkelanjutan	**Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera**: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan Kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	**Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua				
Misi III : Menghadirkan Pendidikan Berkualitas yang Merata, Partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS)							
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan :Mengakhiri Kemiskinan	**Tujuan 2 Tanpa Kelaparan**: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta	**Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas:** Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan	**Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja	**Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur:** Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta			

Misi RPJMD Tahun 2025-2029/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2015-2029								
dalam segala bentuk dimanapun	meningkatkan pertanian perkelanjutan	Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua		yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua		Mendorong Inovasi		
Misi IV : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses, serta Kualitas Hidup yang Berkeadilan dan Madani bagi seluruh Lapisan Masyarakat (SEJAHTERA)								
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan : Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	**Tujuan 2 Tanpa Kelaparan**: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian perkelanjutan	**Tujuan 5 Kesetaraan Gender**: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	**Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	**Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan:** Mengurangi Kesenjangan Intra- dan antar Negara	**Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan**: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan		**Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab** : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	
Misi V : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang bijak serta Pemenuhan HAM untuk menciptakan dasa depan yang Inklusif (BERKELANJUTAN)								
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan : Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	**Tujuan 2 Tanpa Kelaparan**: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian perkelanjutan	**Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur:** Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	**Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab** : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	**Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim** : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	**Tujuan 14 Ekosistem Laut** : Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	**Tujuan 15 Ekosistem Daratan** : Melindungi, Merestorasi, dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	**Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh** : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	**Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan** : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Olahan Tim Penyusun RPJMD Provinsi NTT, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dengan satu atau lebih TPB/SDGs. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan agenda global, sekaligus memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan bersifat inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya menjadi panduan pembangunan daerah, tetapi juga kontribusi nyata terhadap pencapaian TPB/SDGs.

3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non-pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis masing-masing misi yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dan selanjutnya menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan NTT Tahun 2025-2029. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Ini disebabkan sasaran pembangunan jangka menengah merupakan sarana untuk melaksanakan dan mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Tahun 2025-2045 melalui RPJMD Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan Visi **"NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan"** pada periode 2025–2030, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan sejumlah sasaran strategis yang menjadi landasan pencapaian pembangunan daerah. Sasaran-sasaran tersebut dirumuskan secara terukur dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta keberlanjutan pembangunan. Berikut adalah sasaran visi yang akan dicapai :

1. MAJU

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dengan target rata-rata 8% per tahun, didorong oleh penguatan sektor unggulan seperti pertanian, kelautan, perikanan, dan pariwisata berbasis potensi lokal;
- Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang yang berkelanjutan, termasuk jalan, air bersih, listrik, dan jaringan digital, guna mengurangi kesenjangan antarwilayah; dan

- Menciptakan 50.000 lapangan kerja baru melalui pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, serta program kewirausahaan yang berorientasi pada pemberdayaan generasi muda dan perempuan.

2. SEHAT

- Menurunkan prevalensi stunting secara signifikan hingga di bawah 20% melalui intervensi terpadu di bidang kesehatan, gizi, dan sanitasi, dengan fokus pada penguatan peran Posyandu sebagai garda terdepan;
- Meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan hingga 95% penduduk NTT untuk menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan terjangkau; dan
- Memperluas dan memodernisasi fasilitas kesehatan dasar, termasuk pembangunan 100 Puskesmas baru serta peningkatan kompetensi tenaga medis dan kader kesehatan.

3. CERDAS

- Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT hingga 72 melalui pemerataan akses pendidikan berkualitas, pelatihan vokasi, dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik;
- Mengembangkan 20 sekolah vokasi unggulan berbasis potensi daerah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap kerja (*link and match* dengan kebutuhan industri); dan
- Memastikan 90% sekolah di NTT memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang layak serta didukung oleh tenaga pengajar yang tersertifikasi.

4. SEJAHTERA

- Menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 15% melalui pendekatan graduasi dengan mengintegrasikan program perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian yang meliputi akses permodalan dan transfer aset, pemberdayaan sosial yang meliputi penguatan efikasi, motivasi dan pendampingan intensif dan inklusi keuangan dengan prioritisasi masyarakat desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN);
- Meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sebesar 15% per tahun dengan mendorong produktivitas sektor riil dan perluasan kesempatan kerja; dan
- Memastikan 100% pekerja terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial bagi tenaga kerja.

5. BERKELANJUTAN

- Menerapkan prinsip infrastruktur hijau dan biru (*green and blue infrastructure*) dalam 70% proyek pembangunan untuk mendukung ketahanan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim;
- Melestarikan 30% kawasan konservasi serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam berbasis partisipasi masyarakat; dan
- Mewujudkan NTT Digital dengan menyediakan akses internet merata di 100% desa/kelurahan guna mendukung pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik berbasis teknologi.

6. KOLABORASI DAN SINERGI

- Melibatkan diaspora NTT dan sektor swasta dalam 80% program pembangunan melalui inisiatif seperti platform "Ayo Bangun NTT!" dan kemitraan strategis; dan
- Menyelaraskan 100% program pemerintah kabupaten/kota dengan kebijakan provinsi untuk memastikan konsistensi dan efektivitas pencapaian target pembangunan.

Dengan pencapaian sasaran-sasaran tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat menjadi wilayah yang unggul, mandiri, dan berkeadilan, sekaligus meletakkan fondasi yang kuat bagi pembangunan jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan. Pemetaan tujuan, sasaran dan indikator masing-masing misi sebagai berikut:

Tabel 3.5 Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

TUJUAN (T)/SASARAN (S)		INDIKATOR KINERJA/SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VISI: NTT Maju Sehat Cerdas Sejahtera dan Berkelanjutan										
Misi 1: Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)										
Pilar 3: Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan dan Pilar 7: Kolaborasi										
Cita 7: Jalan , air Listrik, rumah layak huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera										
T.1.1	**Pemenuhan Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan**	**Indeks Layanan Infrastruktur (Poin)**		**7,65**	**17,65**	**27,65**	**37,65**	**47,65**	**57,65**	**67,65**
S.1.1.1	Meningkatnya Kinerja Infrastruktur: Tersedianya infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum bersih, kelistrikan, transportasi, pertanahan dan rumah layak huni dengan partisipasi bersama melalui skema penerapan infrastruktur hijau dan biru (*green and blue infrastructure*), serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim									
S.1.1.1.A	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Jalan dalam menunjang aksesibilitas wilayah	a.	Penyediaan Infrastruktur Transportasi (Poin)	11,85	25,57	22,23	24,17	26,12	28,06	30
S.1.1.1.B	Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	a	Cakupan Layanan Air Minum Layak (%)	88.55	88,75	88,95	89,15	89,35	89,55	89,75
		b	Cakupan Layanan Air Minum Aman (%)	N.A	19.05	21.24	23.43	25.62	27.81	30.00
		c.	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	N.A	34.36	37.42	40.924	44.206	47.48	50.77
		d	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	N.A	0,04	0.44	0.85	1.25	1.662	2.067
S.1.1.1.C	Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	a	Rasio Elektrifikasi (%)	96,35	97,08	97,81	98,54	99,00	99,27	99,50

TUJUAN (T)/SASARAN (S)		INDIKATOR KINERJA/SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		b	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh/Kapita)	211,22	216,02	220,82	225,62	230,42	235,22	240,02
		c	Intensitas Energi Primer (SBN/ Rp Miliar)	80,32	79,51	78,70	77,89	77,08	76,27	75,45
		d	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	19,05	22,12	25,19	28,26	31,33	34,4	37,47
S.1.1.1.D	Tersedianya Rumah Layak Huni yang berbasis partisipatif dan berkelanjutan	a	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%)	N.A	2,5	4.88	7.38	9.75	12.13	14.50
		b	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	N.A	5.00	9,25	13,5	17,75	22.00	26,25
		c.	Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	0.00	15.00	19.25	23.50	27.75	32.00	36.25
		d	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)	46.88	50.76	53,22	55,68	58,14	60,60	63,07
		e.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Kewenangan Provinsi (Poin)	36,9	38,9	46,9	51,9	56,9	61,9	66,9
S.1.1.1.E	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan melalui penerapan ekonomi hijau (*green economy*) dan ekonomi biru (*blue economy*)	a.	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (poin)	N.A	0,465	0,473	0,481	0,489	0,497	0,505
		b.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (poin)	74,42	80,02	80,18	80,35	80,52	80,69	80,85

TUJUAN (T)/SASARAN (S)		INDIKATOR KINERJA/SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
S.1.1.1.F	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	a.	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Poin)	131,85	186,87	185,48	184,09	182,70	181,32	179,93
		b.	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (%)	19,85	19,85	20,55	21,30	22,14	23,08	23,85
		c.	Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)	34,27	34,27	38,38	39,01	40,67	41,12	41,77
		d.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	53,27	61,82	63,19	64,57	69,07	70,26	71,45
		e.	Indeks Ketahanan Daerah (Poin)	0,41	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59
S.1.1.2	Meningkatnya daya saing antar wilayah	a.	Indeks Kemahalan Konstruksi	93,58	92,78	92,22	91,67	91,11	90,56	89,99
		b.	Koefisien variasi harga antarwilayah tingkat provinsi	N.A	11,49	11,21	10,93	10,65	10,37	10,09
		c.	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	N.A	46,09	46,111	46,132	46,153	46,174	46,195
		d.	Persentase Desa Mandiri (%)	1.78	2.42	3.06	3.69	4.33	4.97	5.61
Cita 9: Membangun NTT Digital : akses Merata, Komunikasi Lancar										
T.1.2	**Peningkatan akses dan Infrastruktur Digital**	**Indeks Masyarakat Digital (Poin)**		**42,32**	**47,21**	**52,1**	**56,99**	**61,88**	**66,77**	**71,66**
S.1.2.1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan teknologi digital untuk menunjang pelayanan publik dan aktivitas ekonomi	a.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK)	N.A	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8

TUJUAN (T)/SASARAN (S)		INDIKATOR KINERJA/SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 2: Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT)										
Pilar 4: Kesehatan dan Pilar 7: Kolaborasi										
Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting										
T.2.1	**Pemenuhan pelayanan kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses**	**Capaian SPM Bidang Kesehatan (%)**		**95**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
S.2.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses.	a	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,83	72,05	72,35	72,65	72,94	73,24	73,54
		b.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	103	101	99	97	95	93	91
		c.	Angka Kematian Balita (per 1000 KH)	11	10	9	8	7	6	5
		d.	Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)	7,85	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,00
		e.	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate)*	2,71	2,70	2,67	2,63	2,60	2,56	2,53
		f.	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	56	59	68	72	77	81	85
		g.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	87	90	90	90	90	90	90
S.2.1.2	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dengan pendekatan hexahelix	a.	Prevelensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	37	33,1	31,9	30,7	29,5	28,38	27,1
S.2.1.3	Penguatan Infrastruktur di Fasilitas Layanan Kesehatan	a.	Persentase Kabupaten/ Kota dengan Minimal 80% Posyandu Aktif (%)	95	96	97	98	99	100	100

TUJUAN (T)/SASARAN (S)		INDIKATOR KINERJA/SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
S.2.1.4	Meningkatnya cakupan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan untuk seluruh masyarakat NTT	a.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	80	80	85	90	95	100	100
		b.	Cakupan kabupaten/kota yang sudah memenuhi *Universal Health Coverage* (UHC) (%)	100	100	100	100	100	100	100
S.2.1.5	Pemerataan Distribusi dan Peningkatan Kualitas SDM	a.	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	35	37	40	43	45	48	50
		b.	Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	55	60	65	70	75	80	90
Misi 3: Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS)										
Pilar 5: Pendidikan dan Pilar 7: Kolaborasi										
Cita 6: Sekolah Vokasi Unggulan berbasis potensi unggulan										
T.3.1	**Pemenuhan SDM NTT yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran**	**Capaian Indeks SPM Bidang Pendidikan (%)**		**58,35**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
S.3.1.1	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan yang inklusif dan holistik integratif	a.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,02	8,61-8,62	8,49	8,38	8,27	8,15	8,04
		b.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	N.A	13,47-13,48	13,54	13,60	13,67	13,75	13,81
		c.	Skor Kemampuan Literasi							
			- SMA	63,34	63,94	64,54	65,14	65,74	66,34	66,94
			- SMK	58,53	59,83	61,13	62,43	63,73	65,03	66,33
			- SDLB	52,35	53,95	55,55	57,15	58,75	60,35	61,95

TUJUAN (T)/SASARAN (S)		INDIKATOR KINERJA/SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			- SMPLB	61,05	61,55	62,05	62,55	63,05	63,55	64,05
			- SMALB	57,22	57,72	58,22	58,72	59,22	59,72	60,22
		d.	Skor Kemampuan Numerasi							
			- SMA	53,89	55,49	57,09	58,69	60,29	61,89	63,49
			- SMK	50,88	53,08	55,28	57,48	59,68	61,88	64,08
			- SDLB	47,59	48,29	48,89	49,49	50,09	50,69	51,29
			- SMPLB	55,03	55,28	55,53	55,78	56,03	56,28	56,53
			- SMALB	52,94	53,44	53,94	54,44	54,94	55,44	55,94
		e.	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	N.A	10,53	10,60	10,68	10,76	10,85	10,92
T.3.2	**Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah secara berkelanjutan**	**Indeks Pembangunan Kebudayaan (poin)**		**53,69**	**54,89**	**56,09**	**57,29**	**58,49**	**59,69**	**60,89**
S.3.2.1	Mewujudkan integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam sistem pendidikan yang inklusif dan berkarakter dan meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan dalam rangka mendukung pariwisata	a.	Persentase Dimensi Pendidikan dalam Pembangunan Kebudayaan	70,21	72,58	73,9	75,18	76,49	77,79	79,09
Misi 4: Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA)										
Pilar 2: Pemberdayaan Komunitas dan Pilar 7: Kolaborasi										
Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal										
T.4.1.	**Meningkatkan pemberdayaan komunitas yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing melalui penguatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, serta partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan guna menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan**	**Indeks Desa (nilai)**		**0,63**	**0,65**	**0,66**	**0,67**	**0,69**	**0,70**	**0,72**

TUJUAN (T)/SASARAN (S)		INDIKATOR KINERJA/SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
S.4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat, ketimpangan berkurang, dan kemiskinan menurun	a.	PDRB Per Kapita (Rp. Juta)	23,52	24,57-24,85	24,71-25,25	24,85–25,65	24,99-26,05	25,13-26,45	25,27-26,85
		b.	Gini Ratio (0-1)	0,316	0,309-0,315	0,302-0,308	0,295-0,301	0,288-0,295	0,281-0,287	0,274-0-280
		c.	Tingkat Kemiskinan	19,02	18,81 - 19,36	18,12-18,74	17,43 – 18,12	16,74 – 17,50	16,05 – 16,88	15,36 – 16,26
S.4.1.2	Meningkatnya ekosistem yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis potensi desa	a.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	2,46	1,31	1,36 - 1,41	1,40 - 1,48	1,45 - 1,55	1,50 - 1,62	1,55 - 1,70
		b.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Level provinsi (%)	N.A	7,45	7,55	7,64	7,74	7,84	7,94
		c.	Proporsi jumlah Industri kecil dan Menengah pada Level provinsi (%)	N.A	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44
		d.	Kontribusi UMKM Terhadap PDRB (%)	86,17	86,17	86,18	86,19	86,20	86,21	86,22
		e.	Persentase Desa Mandiri (%)	1,78	2,42	3,06	3,69	4,33	4,97	5,61
S.4.1.3	Terwujudnya koperasi modern yang mandiri melalui transformasi digital, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi usaha	a.	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)	0,11	3,48	3,56	3,64	3,72	3,80	3,88
		b.	Rasio Koperasi Produktif Provinsi NTT (%)	22,00	26,00	27,00	28,00	30,00	35,00	40,00
		c.	Tingkat Digitalisasi Koperasi	50,00	51,00	53,00	55,00	56,00	58,00	60,00
		d.	Persentase Koperasi Aktif dan Berkinerja Baik (%)	77,81	77,63	75,00	77,00	80,00	81,00	85,00

TUJUAN (T)/SASARAN (S)		INDIKATOR KINERJA/SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
T.4.2	**Meningkatkan Kapasitas Perempuan dan Pemuda yang mandiri dan berdaya saing**	**Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)**		**N.A**	**60,1 - 60,14**	**60,30**	**60,50**	**60,70**	**60,90**	**61,11**
S.4.2.1	Meningkatnya partisipasi aktif seluruh masyarakat terutama perempuan dan kaum milenial dalam pengembangan ekonomi kreatif yang meningkatkan nilai tambah produk lokal	a.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407 - 0,405	0,396	0,385	0,375	0,364	0,354	0,195 - 0,174
S.4.2.2	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga NTT di Tingkat Nasional	a.	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	55.86	56.30	56.84	57.36	57.89	58.27	58,86
Misi 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)										
Pilar 1: Ekonomi Berkelanjutan , Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia dan Pilar 7: Kolaborasi										
Cita 1: Dari ladang dan laut ke pasar : Efisien , modern dan aman										
T.5.1	**Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan dan berbasis potensi daerah**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**		**3,73**	**3,95-4,75**	**4,43-5,01**	**4,78-5,65**	**5,13-6,29**	**5,48-6,93**	**5,83-7,53**
S.5.1.1	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	a.	Pravelensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	12,49	11,85	11,22	10,58	9,94	9,30	8,67
		b.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	N.A	67,04	67,86	68,68	69,50	70,32	71,14
		c.	Indeks Ketahanan Pangan	70,91	71,30	71,80	72,40	73,10	73,70	74,00
		d.	Nilai Tukar Petani (NTP)	99,60	100,00	100,20	100,30	100,70	100,80	101,00
		e.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	89	89	90	90	91	91	92
		f.	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	100	100	101	101	102	102	103
S.5.1.2	Peningkatan daya saing dan keberlanjutan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan sebagai sektor unggulan yang berbasis potensi daerah.	a.	Tingkat Inflasi (%)	N.A	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1
		b.	Indeks Daya Saing Daerah (Poin)	3,41	3,42	3,43	3,44	3,45	3,46	3,47
		c.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-37,52	-34,56	-31,60	-28,64	-25,68	-22,72	-19,76

TUJUAN (T)/SASARAN (S)		INDIKATOR KINERJA/SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
T.5.2	**Terwujudnya percepatan penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru serta peningkatan kapasitas wirausaha**	**Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**		**3,02**	**2,49 - 2,99**	**2,39 – 2,94**	**2,30 – 2,89**	**2,20 – 2,84**	**2,10-2,79**	**2,00 – 2,74**
S.5.2.1	Meningkatnya kesempatan kerja yang merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat	a.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	77,50	78,60	79,70	80,80	81,90	83,00	84,10
		b.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	N.A	73,63	74,45	75,27	76,09	76,91	77,73
S.5.2.2	Meningkatnya wirausaha baru yang berdaya saing dan kapasitas usaha melalui penyediaan akses yang dapat dijangkau secara inklusif	a.	Proporsi jumlah IKM (Industri Kecil Menengah) pada Level Provinsi	N.A	7,45	7,55	7,64	7,74	7,84	7,94
		b.	Inklusi Keuangan (%)	N.A	92,07	92,41	92,76	93,11	93,45	93,80
		c.	Proporsi Jumlah UKM (Usaha Kecil Menengah) pada level Provinsi	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41
Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal										
T.5.3	**Terwujudnya pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi lokal**	**Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)**		**8,49**	**8,52**	**8,60**	**8,70**	**8,80**	**8,90**	**9,00**
S.5.3.1	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata NTT (destinasi, pemasaran, kelembagaan dan industri pariwisata) untuk berkontribusi pada peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal	a.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	7,77	7,77	7,80	7,84	7,90	7,95	8,00
S.5.3.2	Meningkatkan Kesejahteraan NTT melalui peningkatan usaha ekonomi kreatif	a.	Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap PDRB (%)	0,72	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00

TUJUAN (T)/SASARAN (S)		INDIKATOR KINERJA/SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Cita 4: Kesejahteraan Bersama: Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan untuk Masyarakat										
T.5.4	**Terwujudnya perlindungan bagi seluruh tenaga kerja NTT dalam BPJS Ketenagakerjaan**	**Meningkatnya cakupan perlindungan Tenaga Kerja NTT melalui kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan (%)**		N.A	64,82	73,81	75,16	76,51	77,87	79,22
S.5.4.1	Jaminan dan perlindungan bagi tenaga kerja NTT, baik formal maupun non formal terutama tenaga kerja rentan.	a.	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) (%)	N.A	28,42	30,62	32,81	35,01	37,21	39,40
Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia										
Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin										
T.5.5	**Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia**	**Indeks Pelayanan Publik (poin)**		**3,56**	**3,66**	**3,73**	**3,80**	**3,87**	**3,94**	**4,00**
S.5.5.1	Transformasi pelayanan publik menjadi lebih transparan, efisien, profesional, proaktif, dan melayani	a.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (poin)	94,30	94,39	94,47	94,56	94,64	94,73	94,82
		b.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor/Nilai)	3,87/ N.A	3,87/ N.A	3,89/ 1,7	3,91/ 1,7	3,95/ 1,9	4,0/ 1,9	4,1/ 2
		c.	Indeks Integritas nasional (poin)	N.A	65,65	66,31	66,97	67,63	68,29	68,95
		d.	Persentase penegakan hukum peraturan daerah (%)	N.A	70,00	71,50	73,00	74,50	76,00	77,50
		e.	Indeks Kapabilitas APIP (poin)	3.09	3,09	3,12	3,17	3,22	3,25	3,27
		f.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		g.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (poin)	82,91	83,41	83,91	84,41	84,91	85,41	85,91
S.5.5.2	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	a.	Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB (%)	N.A	2,36	2,48	2,60	2,72	2,84	2,96
		b.	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah (%)	30,21	30,50	31,00	31,50	32,00	32,50	33,00

TUJUAN (T)/SASARAN (S)		INDIKATOR KINERJA/SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
S.5.5.3	Meningkatnya perlindungan hak-hak masyarakat khususnya kelompok rentan dengan partisipasi aktif masyarakat dan kerja sama lintas sektor	a.	Indeks Reformasi Hukum (poin)	N.A	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	82,50
		b.	Persentase capaian pelaksanaan aksi HAM (%)	N.A	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00
		c.	Proporsi penduduk merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	N.A	64,03	64,88	65,73	66,58	67,43	68,28
		d.	Indeks Demokrasi Provinsi (poin)	N.A	78,22 - 81,47	78,35 - 81,60	78,48 - 81,73	78,61 - 81,86	78,74 - 81,99	78,87 - 82,12
		e.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	N.A	15,00	16,5	18,00	19,5	21,00	22,5
		f.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	68,86	70,12	70,93	71,75	72,56	73,38	74,19
		g.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	84,25	86,46-86,51	86,87-86,94	87,28-87,37	87,69-87,80	88,10-88,23	88,51-88,67

3.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025-2029 merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi pembangunan dilaksanakan melalui analisis lingkungan strategis internal dan analisis lingkungan strategis eksternal dengan mengidentifikasikan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Strategi akan memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada.

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025-2029. Adapun penetapan strategi dan arah kebijakan ini mengarah pada penerapan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025 – 2029 dengan memperhatikan arahan umum terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimum berdasarkan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimum (SPM) Provinsi NTT, GEDSI (*Gender Equality, Disability and Social Inclusion*)/Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial, Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi NTT, Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran misi pembangunan dengan mempedomani target pembangunan nasional, maka disusun strategi pembangunan selama lima tahun yang dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Provinsi NTT

VISI: NTT MAJU, SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN

TUJUAN (T)		SASARAN (S)		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
MISI 1: Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)						
Pilar 3: Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan dan Pilar 7: Kolaborasi						
Cita 7: Jalan, air Listrik, rumah layak huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera						
T.1.1	**Pemenuhan Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan**	S.1.1.1	Meningkatnya Kinerja Infrastruktur: Tersedianya infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum bersih, kelistrikan, transportasi, pertanahan dan rumah layak huni dengan partisipasi bersama melalui skema penerapan infrastruktur hijau dan biru (*green and blue infrastructure*), serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim.			
		S.1.1.1.A	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Jalan dalam menunjang aksesibilitas wilayah		Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur jalan melalui optimalisasi kemitraan dalam pembangunan dan pengembangan prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial, serta meningkatkan kemantapan Jalan sampai ke pelosok sesuai prioritas dan program unggulan daerah dan bersinergi dengan program strategis nasional dan kabupaten/kota.	- Pembangunan dan pengembangan ruas jalan provinsi meliputi jalan akses simpul transportasi dan jalan strategis dengan pendekatan optimalisasi pola kemitraan (Pendekatan kolaboratif) yang menghubungkan pusat -pusat pertumbuhan baru, desa-desa wisata, wilayah sentra komoditi dan desa-desa yang memiliki produk unggulan. - Upaya pengalihan status ruas jalan Provinsi pada kawasan perbatasan negara yang masih merupakan kewenangan Provinsi menjadi kewenangan Nasional. - Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan strategis dan 3 TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan). - Melaksanakan urusan Transmigrasi sesuai dengan kebijakan nasional dan peraturan yang berlaku di daerah afirmasi kawasan transmigrasi.
		S.1.1.1.B	Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air		Meningkatkan kemitraan dalam pendayagunaan dan kelestarian sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat dan mendukung produktivitas ekonomi menuju ketahanan air termasuk mendukung penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum.	- Peningkatan kapasitas tampungan air melalui penguatan koordinasi dalam pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan keberlanjutan infrastruktur sumber daya air: bendungan, embung, waduk, jalan usaha tani, jalan produksi dll untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan penyediaan air bersih. - Pembangunan sistem pengelolaan air minum yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk pemenuhan air

TUJUAN (T)		SASARAN (S)			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
							minum layak melalui peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintah dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
						-	Pemenuhan akses air minum layak bagi rumah tangga
						-	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah
						-	Pemenuhan ketersediaan dan keberfungsian jaringan irigasi pertanian dan infrastruktur sumber daya air melalui perencanaan irigasi partisipatif, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air
						-	Pemenuhan dan optimalisasi Wilayah Sungai di Provinsi NTT dalam menjaga kuantitas dan kualitas air.
		S.1.1.1.C	Terpenuhinya kebutuhan energi daerah		Meningkatkan kemitraan dalam pemenuhan akses dan kualitas layanan listrik yang merata dan berkelanjutan berbasis Energi Baru Terbarukan menuju Swasembada Energi.	-	Koordinasi pemenuhan elektrifikasi berbasis pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan PLN bagi rumah tangga belum berlistrik
						-	Peningkatan pemanfaatan riset PLN dan Non-PLN
						-	Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan
						-	Peningkatan kualitas operasional instalasi tenaga listrik melalui kemitraan pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (*isolated mini/micro-grid)* untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas
						-	Pembangunan jaringan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mempercepat transisi energi

TUJUAN (T)		SASARAN (S)			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
						-	Penguatan optimalisasi sumber Energi Baru Terbarukan sebagai sumber cadangan energi dalam mendukung transisi energi berbasis potensi Energi Baru Terbarukan sesuai potensi Daerah, yaitu *Timor Biomass Island, Flores Gheotermal Island, Sumba Iconic Island*, serta potensi gelombang laut, arus laut temperatur laut dan hidrogen hijau
						-	Penguatan peran dan kapasitas masyarakat lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan
						-	Penguatan peran Pemerintah melalui dukungan regulasi dan kebijakan dalam mempercepat transisi energi berbasis potensi Energi Baru dan Terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi.
		S.1.1.1.D	Tersedianya Rumah Layak Huni yang berbasis partisipatif dan berkelanjutan		Meningkatkan kualitas pemukiman yang aman dan berkelanjutan melalui pembangunan rumah bersanitasi layak yang terintegrasi dengan PSU termasuk mendukung penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum.	-	Penguatan Peran Pemerintah dalam mendorong pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian kepemilikan lahan bersertifikat dan kemudahan perizinan dalam proses penyediaan rumah
						-	Peningkatan efektivitas pengendalian untuk menjamin keandalan bangunan dan kesesuaian terhadap tata ruang
						-	Meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU, layanan akses sanitasi dan persampahan yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan sesuai dengan aturan yang berlaku
						-	Penyediaan infrastruktur menuju sanitasi aman
						-	Pengelolaan dan penetapan standar pengolahan limbah
						-	Penguatan kolaborasi lintas sektor (hexahelix) dan kewenangan dalam pengelolaan sampah terpadu
		S.1.1.1.E	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan		Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan,berketahanan iklim dan resiliensi terhadap bencana	-	Optimalisasi regulasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang (kawasan lindung dan budidaya) untuk mendorong pembangunan yang tepat sasaran dalam mencapai

TUJUAN (T)		SASARAN (S)			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
			melalui penerapan ekonomi hijau (*green economy*) dan ekonomi biru (*blue economy*)				keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (lingkungan tangguh)
						-	Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perijinan investasi energi, insentif fiskal yang terarah serta stabilitas sosial/politik guna mendorong pembangunan infrastruktur energi yang berkelanjutan dan inklusif.
		S.1.1.1.F	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim			-	Mitigasi krisis keanekaragaman hayati dengan menurunkan tingkat keterancaman spesies dan ekosistem melalui perlindungan habitat alami dan restorasi ekosistem yang terdegradasi.
						-	Peningkatan Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi melalui Pembinaan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan konservasi, Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan pengawasan terhadap tindak pidana pelanggaran di kawasan konservasi.
						-	Pemanfaatan riset dan penguatan kapasitas SDM untuk mendukung pembangunan berketahanan iklim dan tanggap terhadap resiko bencana.
						-	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim melalui: (i) Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim (ii) Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim (iii) Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati

TUJUAN (T)		SASARAN (S)			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
							(iv) pengembangan restorasi ekosistem di laha terdegradasi, hutan dan sumber daya air. (v) Peningkatan Kapasitas institusi dan Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dengan mempertimbangkan resiko bencana. - Pemanfaatan ruang budi daya berbasis risiko bencana melalui pemenuhan dokumen dasar perencanaan penanggulangan bencana yang tepat dan akurat serta pengendalian tata ruang berbasis risiko bencana , terutama pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan pengawasan terhadap tindak pidana pelanggaran di kawasan konservasi.
							- Pemulihan dan pengurangan lahan kritis secara bertahap, melalui rehabilitasi lahan untuk mendukung ketahanan lingkungan dan penghidupan masyarakat. - Penguatan riset dan kapasitas SDM dalam pengembangan dan penerapan transportasi - Optimalisasi inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi per sektor secara terukur untuk mendukung penurunan emisi GRK dan pencapaian target pembangunan rendah karbon. - Penguatan sistem ketahanan mata pencaharian penduduk terhadap bencana dan perubahan iklim - Penguatan investasi pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan untuk membangun ketahanan ekonomi yang adaptif dan responsif - Peningkatan pengawasan pembangunan infrastruktur publik yang adaptif terhadap resiko bencana sesuai rencana tata ruang.

TUJUAN (T)		SASARAN (S)			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
						-	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemenuhan SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana.
		1.1.2	**Meningkatnya daya saing antar wilayah**	-	Meningkatkan pengembangan Pusat Pertumbuhan yang terintegrasi melalui peningkatan kemitraan dalam pengembangan Infrastruktur Transportasi Darat, Laut dan Udara untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, terutama wilayah strategis dan daerah afirmasi secara merata dan berkelanjutan.	-	Pengembangan dan peningkatan pelayanan prasarana transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP dan konektivitas yang terintegrasi, berkeselamatan, nyaman, aman, terjangkau dan menghubungkan wilayah strategis.
				-	Meningkatkan pengembangan infrastruktur untuk mendukung penciptaan nilai tambah ekonomi dan *multiplier effect* serta akselerasi pembangunan industri.	-	Keterpaduan Pengembangan pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi termasuk pariwisata diantaranya pelabuhan Tenau dan Labuan Bajo secara terpadu. - Pengembangan transportasi publik termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Kota Kupang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang melalui audit dan rencana peremajaan armada, serta pembenahan sistem layanan moda transportasi dan sistem informasi yang terintegrasi secara real time. - Pengembangan Kawasan Sentra Produksi melalui peningkatan Jalan Usaha Tani dan Penguatan kerja sama intra daerah dengan kabupaten/kota dalam menjamin penyediaan rantai pasok. - Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas rumput laut dengan dukungan kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya melalui Peningkatan sarana prasarana pendukung dengan pengembangan pelabuhan pendukung industri rumput laut, pembangunan jalan dan infrastruktur TIK.

TUJUAN (T)		SASARAN (S)			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
Cita 9: Membangun NTT Digital : akses Merata, Komunikasi Lancar							
T.1.2	**Peningkatan akses dan Infrastruktur Digital**	S.1.2.1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan teknologi teknologi digital untuk menunjang pelayanan publik dan aktivitas ekonomi	-	Meningkatkan kemitraan dalam penguatan Infrastruktur TIK/Digital Berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, budaya, sosial, politik dan ekonomi masyarakat.		- Peningkatan layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi - Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur TIK/Digital, penyimpanan, dan pengeloaan arsip secara efisien.
				-	Meningkatkan literasi difital dan akses teknologi informasi bagi seluruh penduduk khusus perempuan untuk mendukung partisipasi inklusif dan ekonomi digital.	-	Peningkatan penyebaran informasi publik yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah pusat dan provinsi
				-	Meningkatkan kemitraan usaha, proses bisnis, dan kelembagaan serta adopsi teknologi dan inovasi. Meningkatkan kemitraan dalam pengembangan teknologi digital yang adaptif dalam mendukung Pelayanan Publik dan Percepatan Pembangunan.	-	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
						-	Meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat sesuai dengan kewenangan provinsi
						-	Penguatan komunitas lokal untuk Pemasaran produk digital UMKM dan kelembagaan
						-	Mendorong perluasan dan pemerataan literasi digital serta integrasi layanan publik yang ramah terhadap perempuan untuk mempersempit kesenjangan dan mendorong kemandirian ekonomi.
						-	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Layanan Publik Terpadu melalui: Aplikasi yang mengintegrasikan layanan publik seperti kesehatan (BPJS, jadwal dokter), pendidikan (data siswa, e-learning), dan bantuan sosial dan pariwisata
						-	Layanan Aspirasi dan Aduan Online dengan pengembangan aplikasi mobile phone yang akan ditindaklanjuti dengan penangan prioritas untuk masalah mendesak melalui platform MEJA RAKYAT

TUJUAN (T)		SASARAN (S)			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
						-	Koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam Pengembangan *Smart Village* dan *Smart City* melalui: (i) Penetapan Pilot Project Desa Digital (ii) Pengembangan Big Data dan *Artificial Inteligence* untuk Kebijakan Publik
MISI 2: Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT)							
Pilar 4: Kesehatan dan Pilar 7: Kolaborasi							
Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting							
T.2.1	**Pemenuhan pelayanan kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses**	S.2.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses				
		a.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	-	Meningkatkan akses dan kualitas Layanan Kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses	-	Peningkatan peran dan dukungan Pemerintah Desa dalam Promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan AIDS, TBC, Malaria (ATM) dan penyakit menular lainnya serta tidak menular dengan pendekatan *one health*, termasuk masalah kesehatan akibat perubahan iklim melalui fasilitisasi dukungan kebijakan di tingkat kabupaten/kota dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Provinsi
				-	Meningkatkan layanan promotif, pencegahan dan penyediaan layanan bagi lansia yang terjangkau dan inklusif.	-	Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau dan sarana untuk aktivitas fisik
						-	Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
						-	Inovasi dan pemanfaatan pengembangan kesehatan digital dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui : penguatan tata kelola pelayanan kesehatan (implementasi Satu Sehat NTT Terintegrasi)

TUJUAN (T)		SASARAN (S)			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
						-	Penyediaan Promotif, Peningkatan dukungan Pemerintah Desa dalam promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan bagi lansia melalui fasilitisasi dukungan kebijakan di tingkat kabupaten/kota dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Provinsi.
						-	Pemenuhan SPM Urusan Kesehatan.
		S.2.1.2	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dengan pendekatan hexahelix		Meningkatkan kolaborasi dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting untuk menciptakan masyarakat sehat dan bebas stunting	-	Pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui pendekatan hexahelix
		S.2.1.3	Penguatan Infrastruktur di Fasilitas Layanan Kesehatan				
		a.	Infrastruktur di Fasilitas Layanan kesehatan	-	Pengembangan sistem jaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, dan terjangkau	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana, prasarana, bangunan gedung, tata kelola, obat dan alat kesehatan, dan pembiayaan yang berkualitas di fasilitas kesehatan
				-	Meningkatkan Pusat layanan kesehatan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan lansia yang memiliki hambatan mobilitas.	-	Peningkatan kapasitas posyandu dalam pemenuhan 6 (enam) bidang SPM melalui Peningkatan peran pemerintah, masyarakat, dengan lembaga mitra
						-	Meningkatkan Pusat layanan kesehatan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan lansia yang memiliki hambatan mobilitas.
		S.2.1.4	Meningkatnya cakupan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan untuk seluruh masyarakat NTT				
		a.	Seluruh Masyarakat NTT menjadi peserta aktif BPJS		Pengembangan sistem jaminan kesehatan yang memastikan setiap warga, terutama kelompok rentan seperti PKRT, disabilitas, lansia, anak memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, dan terjangkau	-	Upaya pencapaian *Univeral Health Coverage* (Jaminan Kesehatan) di seluruh NTT
						-	Penguatan kerjasama dengan pemerintah desa dan lembaga masyarakat untuk meningkatkan cakupan kepesertaan PKRT, disabilitas lansia dalam JKN.
		S.2.1.5	Pemerataan Distribusi dan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan				

TUJUAN (T)		SASARAN (S)			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
		a.	Peningkatan Distribusi Tenaga Kesehatan		Meningkatkan pemerataan penyebaran dan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan di daerah terpencil	-	Meningkatkan kualitas dan sebaran tenaga kesehatan melalui penyediaan beasiswa dan pelatihan bagi tenaga kesehatan RSUD dan/atau fasilitas kesehatan pada Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan melalui insentif Tambahan Penghasilan (Tamsil)
MISI 3: Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS)							
Pilar 5 : Pendidikan dan Pilar 7: Kolaborasi							
Cita 6: Sekolah Vokasi Unggulan berbasis potensi unggulan							
T.3.1	**Pemenuhan SDM NTT yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran**	S.3.1.1	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu Pendidikan yang inklusif dan holistik integratif		Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau dengan afirmasi keadilan gender dan memperhatikan pengembangan di daerah afirmasi.	- - - -	Koordinasi, pembinaan dan pengawasan percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) yang dilakukan melalui : (i) Pengembangan layanan pendidikan anak usia dini yang holistik integratif (PAUD HI); (ii) Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran; (iii) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas; Penanganan anak tidak sekolah yang meliputi anak yang belum pernah sekolah, pencegahan tingkat *Drop Out* (DO) serta penanganan peserta didik yang lulus tidak melanjutkan. Pembangunan dan revitalisasi sekolah pendidikan khusus yang berkualitas untuk mendorong pendidikan yang inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus; Peningkatan iklim inklusivitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus di level pendidikan layanan khusus;

TUJUAN (T)		SASARAN (S)		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
					-	Penyiapan sarana, prasarana, dan peningkatan kualitas fasilitas dan layanan pendidikan, serta Penyediaan beasiswa afirmasi Pendidikan Menengah untuk daerah kepulauan yang masih belum terjangkau dengan afirmasi bagi perempuan ;
					-	Mendorong tingkat partisipasi mahasiswa di Perguruan Tinggi berkualitas melalui Pemanfaatan beasiswa afirmasi Pendidikan Tinggi dengan afirmasi bagi perempuan ;
					-	Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran .
					-	Penguatan kelembagaan dan peningkatan akses terhadap lima model penghidupan yang sensitif terhadap *Gender Equality, Disability and Social Inclusion* (GEDSI)/Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial meliputi: penghidupan berbasis masyarakat, penghidupan inklusif, penghidupan berkelanjutan, penghidupan berbasis hak, dan penghidupan partisipatif.
				- Memastikan pengintegrasian program. Kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan di sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi	-	Peningkatan kualitas pendidikan melalui Peningkatan akreditasi pendidikan menengah dan khusus berakreditasi minimal B
					-	Pemenuhan SPM bidang Pendidikan
					-	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Pendidik
				- Meningkatkan kemitraan dalam mendorong penyelenggaraan pendidikan vokasi berkualitas berbasis potensi unggulan daerah	-	Revitalisasi sekolah vokasi sektor prioritas (pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan (garam, rumput laut) berdasarkan potensi lokal dan pioritas pemerintah fasilitas pendidikan SMK, Politeknik dan Balai Latihan Kerja (BLK)
T.3.2	**Peningkatan perlindungan,**	S.3.2.1	Mewujudkan integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam sistem	- Melestarikan kearifan lokal dan nilai-nilai kebudayaan	-	Pengembangan dan pelestarian budaya lokal melalui perlindungan dan pelestarian warisan budaya, pengembangan komunitas budaya dan daerah

TUJUAN (T)		SASARAN (S)		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
	pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah secara berkelanjutan		pendidikan yang inklusif dan berkarakter dan Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan dalam rangka mendukung pariwisata			melalui kolaborasi dengan Diaspora, jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya dan pemberdayaan masyarakat hukum adat
				- Meningkatkan Penerapan Nilai-nilai Agama dan Pancasila bagi peserta didik	-	Meningkatkan peran keluarga sebagai media sosialisasi primer dan kontrol sosial
					-	Mengintegrasikan nilai-nilai agama dan pancasila dalam pembelajaran di sekolah
					-	Internalisasi dan penguatan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat melalui kegiatan ekstrakurikuler berbasis budaya dan kearifan lokal serta pelestarian kegiatan perayaan hari besar kenegaraan
				- Mendorong integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam pengembangan pariwisata dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama	-	Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan
					-	Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal
					-	Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah
MISI 4: Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA)						
Pilar 2 : Pemberdayaan Komunitas dan Pilar 7: Kolaborasi						
Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal						
T.4.1	**Meningkatkan pemberdayaan komunitas yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing melalui penguatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, serta partisipasi aktif**	S.4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat, ketimpangan berkurang, dan kemiskinan menurun	Mengoptimalkan model Graduasi melalui pola kemitraan dalam rangka peningkatan pendapatan perempuan dan laki- laki, yang merata dengan mempertimbangkan investasi sektor produktif, optimalisasi pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal, pemerataan akses infrastruktur, layanan pendidikan vokasi, dan perlindungan sosial	-	Mengoptimalkan integrasi program perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial produktif dan inklusi keuangan dengan prioritisasi masyarakat desil 1 dan 2 DTSEN dan kesenjangan antara perempuan dan laki- laki.
					-	Peningkatan skala ekonomi lewat pengelolaan usaha berbasis kelompok atau korporasi rakyat.
					-	Pengembangan akses pasar, teknologi melalui pola kemitraan yang baik,
					-	Pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam rantai nilai bisnis yang lebih besar.

TUJUAN (T)		SASARAN (S)			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
	dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan guna menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan					-	Pemenuhan SPM Urusan Sosial.
		S.4.1.2	Terbangunnya ekosistem yang mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis potensi ekonomi lokal desa		Optimalisasi potensi ekonomi desa melalui pengembangan produk dan layanan UMKM yang didukung oleh pola kemitraan strategis	-	Penguatan kapasitas kelembagaan dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM
						-	Fasilitasi akses permodalan , pembiayaan dan literasi keuangan
						-	Pengembangan sentra produksi berbasis komoditas unggulan perdesaan
						-	Pengembangan kawasan pedesaan agrowisata
						-	Pembangunan rantai nilai dan jaringan kemitraan antara UMKM, pemerintah dan sektor swasta
		S.4.1.3	Terwujudnya koperasi modern yang mandiri melalui transformasi digital, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi usaha		Mendorong transformasi koperasi melalui penguatan kelembagaan, adopsi teknologi digital, serta pengembangan kemitraan usaha yang inklusif terutama untuk sektor-sektor produktif	-	Penguatan infrastruktur digital koperasi yang merata dan terjangkau.
						-	Peningkatan literasi digital dan kapasitas inovasi bagi pengurus dan anggota koperasi.
						-	Pemanfaatan platform dan aplikasi digital untuk efisiensi layanan dan ekspansi usaha koperasi.
						-	Pengembangan kemitraan strategis dalam ekosistem digital koperasi.
						-	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Desa Merah Putih.
T.4.2	**Meningkatkan Kapasitas Perempuan dan Pemuda yang mandiri dan berdaya saing**	S.4.2.1	Meningkatnya partisipasi aktif seluruh Perempuan, kaum milenial, dan kelompok rentan dalam pengembangan ekonomi kreatif yang meningkatkan nilai tambah produk lokal		Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan partisipatif, melalui penguatan SDM, Kemitraan usaha, serta pemanfaatan teknologi digital dengan pelibatan aktif perempuan, kaum milenial, PKRT, kelompok disabilitas, lansia pempuan dan laki- laki dan kelompok masyarakat rentan lainnya.	-	Penguatan pelatihan dan pendampingan keterampilan ekonomi, kreatif berbasis kebutuhan pasar khususnya bagi anak muda milenial dan Perempuan
						-	Pengembangan youth campaign dan inkubator bisnis, kemitraan kreatif dan akses pembiyaaan bagi perempuan dan milenial
						-	Peningkatan dan perluasan promosi, pemasaran digital, dan branding produk lokal berbasis budaya dan inovasi

TUJUAN (T)		SASARAN (S)			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
		S.4.2.2	Meningkatnya peran strategis pemuda dalam pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga Provinsi NTT di tingkat Nasional		Meningkatkan pemberdayaan dan pelibatan pemuda dalam pembangunan daerah, serta meningkatkan fasilitas dan pembinaan olahraga dalam rangka mendukung PON Nusra XXII tahun 2028	-	Peningkatan partisipasi kepemudaan dalam ekonomi mandiri termasuk didalamnya kegiatan kewirausahaan, sosial dan budaya
						-	Peningkatan akses dan kualitas fasilitas olahraga di daerah
						-	Pengembangan sistem pembinaan atlet dan penyelenggaraan kompetisi olahraga berjenjang untuk mendukung PON Nusra XXII
						-	Penguatan kelembagaan olahraga daerah untuk mendukung prestasi nasional
MISI 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)							
Pilar 1: Ekonomi Berkelanjutan, Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia dan Pilar 7: Kolaborasi							
Cita 1: Dari ladang dan laut ke pasar : Efisien , modern dan aman							
T.5.1	**Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan dan berbasis potensi daerah**	S.5.1.1	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian		Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pertanian melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian, dan penguatan kapasitas petani untuk mendukung swasembada pangan termasuk produk unggulan daerah (garam, rumput laut, tuna cakalang, tongkol) termasuk yang berada di daerah afirmasi.	-	Meningkatkan pemanfaatan lahan
						-	Meningkatkan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, penyakit hewan dan zoonosis
						-	Pemanfaatan bibit/ benih unggul dan penerapan praktik pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
						-	Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung
						-	Penguatan kapasitas SDM
						-	Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan
						-	Mendorong swasembada pangan sebagai dasar kedaulatan dan kemandirian pangan provinsi melalui penguatan produksi dalam daerah, perlindungan sumber daya pangan, serta pembangunan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan guna menjamin ketahanan dan penyelamatan pangan jangka panjang antara lain melalui pengembangan Kawasan Strategi Produksi Pangan (KSPP).

TUJUAN (T)		SASARAN (S)			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
						-	Pengembangan komoditas berbasis praktik pertanian baik.
						-	Penguatan rantai nilai dan konektivitas ekonomi wilayah yang berkeadilan.
		5.1.2	Peningkatan daya saing dan keberlanjutan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan sebagai sektor unggulan yang berbasis potensi daerah		Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan secara berkelanjutan melalui hilirisasi dan diversifikasi produk unggulan daerah (garam, rumput laut, tuna cakalang, tongkol)	-	Pengembangan komoditas unggulan daerah yang terintegrasi dari hulu ke hilir
						-	Pengembangan sentra produksi di kawasan perdesaan, dan pengolahan dan pemasaran di kawasan perkotaan, serta keterkaitan antar desa dan kota
						-	Peningkatan akses pasar dan nilai tambah produk melalui penguatan sistem logistik, standardisasi kualitas, dan promosi produk unggulan daerah
T.5.2	**Terwujudnya percepatan penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru serta peningkatan kapasitas wirausaha**	S.5.2.1	Meningkatnya kesempatan kerja yang merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat		Meningkatkan akses ketenagakerjaan yang sinergi dengan kebutuhan pasar dan penciptaan ekosistem yang mendukung pertumbuhan lapangan kerja dan pemerataan bagi perempuan dan laki- laki serta kelompok disabilitas	-	Mendorong iklim kebijakan yang kondusif dengan peningkatan investasi guna penciptaan lapangan kerja
						-	Penguatan peran BLK dalam meningkatkan kompetensi angkatan kerja
						-	Pengembangan sistem pelatihan melalui BLK dan BLK Komunitas serta penciptaan lapangan kerja baru dengan sektor swasta
						-	Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi daerah, yang berfokus pada sektor Pertanian/Perkebunan, Peternakan, Pariwisata dan Perikanan/Kemaritiman
						-	Penguatan koordinasi peningkatan perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
						-	Pendataan penduduk usia kerja untuk penerbitan administrasi kependudukan berupa NIK dan KTP.
						-	Mendorong iklim kebijakan yang kondusif dengan peningkatan investasi guna penciptaan lapangan kerja.

TUJUAN (T)		SASARAN (S)			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
		S.5.2.2	Meningkatnya wirausaha baru yang berdaya saing dan kapasitas usaha melalui penyediaan akses yang dapat dijangkau secara inklusif		Penguatan ekosistem kewirausahaan melalui pendampingan terpadu dan kemudahan akses terhadap pembiayaan, pasar, dan teknologi	-	Pendampingan wirausaha baru yang intensif dan berkelanjutan
						-	Peningkatan akses pembiayaan yang inklusif melalui kerja sama dengan lembaga keuangan dan pengembangan skema pembiayaan alternatif
						-	Penguatan literasi digital dan adopsi teknologi untuk meningkatkan daya saing wirausaha dalam ekonomi digital
Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal							
T.5.3	**Terwujudnya pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis komunitas sebagai penggerak ekonomi lokal NTT dan menampilkan jati diri dan pesona NTT ke dunia**	S.5.3.1	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata NTT (detinasi, pemasaran, kelembagaan dan industri pariwisata) untuk berkontribusi pada peningkatan pendapatan dari Sektor Pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal		Pengembangan pariwisata di destinasi prioritas Provinsi yang berkualitas dan berkelanjutan	-	Peningkatan aksesibilitas pariwisata
						-	Pengembangan atraksi
						-	Pengembangan keterampilan SDM, layanan dan tata Kelola pariwisata
						-	Penguatan dan perluasan pemasaran pariwisata
						-	Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata (IKM, KOPERASI, UMKM dan BUMDES)
						-	Kolaborasi dalam rangka mendukung Tour de EnTeTe
		S.5.3.2	Meningkatkan Kesejahteraan NTT melalui peningkatan usaha ekonomi kreatif		Meningkatkan inovasi, kreativitas, dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan produk dan layanan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal	-	Penguatan akses permodalan, pelatihan, dan promosi bagi pelaku ekonomi kreatif
						-	Mendorong kemitraan pelaku ekonomi kreatif dengan sektor swasta
						-	Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif
Cita 4: Kesejahteraan Bersama: Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan untuk Masyarakat							
T.5.4	**Terwujudnya Perlindungan bagi seluruh Tenaga Kerja NTT dalam BPJS Ketenagakerjaan**	S.5.4.1	Jaminan dan Perlindungan bagi tenaga kerja NTT, baik formal maupun non formal terutama tenaga kerja rentan.		Perluasan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui kolaborasi dengan stake holders	-	Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek
						-	Pengembangan sistem pelatihan melalui BLK serta penciptaan lapangan kerja baru dengan sektor swasta

TUJUAN (T)		SASARAN (S)		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
					-	Pendataan penduduk usia kerja untuk penerbitan administrasi kependudukan berupa NIK dan KTP
					-	Peningkatan Pengawasan tenaga kerja melalui K/L dan OPD ketenagakerjaan (BP2MI) dan Swasta
					-	Menyiapkan skema pembiayaan inovatif.
Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia						
Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin						
T.5.5	**Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia**	S.5.5.1	Transformasi Pelayanan Publik menjadi lebih transparan, efisiensi, profesional, proaktif dan melayani	- Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel - Terhadap Laporan Keuangan : Setiap Laporan Keuangan SKPD maupun Pemprov harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	-	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
					-	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui SPM serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Pengawasan Masyarakat
				- Terhadap SPI (Sistem Pengendalian Intern) : Administrasi SPM/SPP harus sesuai SOP yang terdokumentasi dan terukur serta ketepatan waktu.	-	Peningkatan Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik
				- Terhadap Kepatuhan kepada Peraturan Perundang-undangan : Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dan sesuai dengan prosedur serta mekanisme yang telah ditetapkan.	-	Evaluasi produk-produk regulasi daerah
					-	Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks keterbukaan informasi publik
					-	Peningkatan akses informasi dan layanan yang akurat dan up to date melalui MEJA Rakyat & Sekber
					-	Peningkatan Profesionalime ASN melalui pola karier dan merit sistem
					-	Tersusunnya Paket Regulasi untuk SKPD dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
					-	Pembinaan ASN dalam rangka peningkatan kapasitas agar mempu mengelola keuangan sesuai standar regulasi yang ada;
					-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

TUJUAN (T)		SASARAN (S)			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
						-	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana baik fisik maupun digital untuk mendukung pengelolaan keuangan dan administrasi berbasis akrual.
						-	Pemenuhan SPM Urusan Trantibumlinmas
		S.5.5.2	Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah	-	Mendorong kolaborasi terkait peningkatan kontribusi PAD dan aset terhadap pendapatan daerah	-	Mengintensifkan Peningkatan pendapatan pajak, retribusi, BUMD dan sumber-sumber lainnya
						-	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan (aset) secara terpadu
				-	Meningkatkan profesionalitas, kompetensi dan kinerja ASN yang handal	-	Pengembangan kapasitas SDM ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
						-	Mendorong keberlanjutan pemberian tunjangan kinerja untuk peningkatan profesionalitas
						-	Menentukan indikator dan target kinerja realistis dan terukur sebagai patokan pemberian tunjangan kinerja
		S.5.5.3	Meningkatnya perlindungan hak-hak masyarakat khususnya kelompok rentan dengan partisipasi aktif masyarakat dan kerja sama lintas sektor	-	Meningkatkan kolaborasi penegakan hukum, edukasi dan pencegahan konflik untuk menimbulkan rasa aman dan nyaman. KtP/A dan migrasi aman	-	Deregulasi terkait akses terhadap lapangan kerja bagi perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
				-	Penguatan kolaborasi dalam peningkatan perluasan akses bagi perempuan, disabilitas, anak, lansia dan kelompok rentan lainnya.	-	Optimalisasi Pengawasan terkait tenaga kerja perempuan dan disabilitas
				-	Mendorong kolaborasi peningkatan perluasan akses dan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan PMI yang berkasus	-	Peningkatan dan perluasan pelayanan FKUB
				-	Meningkatkan kolaborasi untuk menimbulkan rasa aman dan nyaman serta pencegahan konflik SARA	-	Memperkuat kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah, Organisasi Masyarakat sipil dan swasta dalam penegakan hukum, edukasi migrasi aman serta peningkatan dan pemerataan akses layanan yang inklusif dan berkelanjutan bagi korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

3.2.2 PENTAHAPAN ARAH KEBIJAKAN

1) Pentahapan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi NTT

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah Pembangunan Provinsi NTT menjadi 5 (lima) tahapan yaitu:

a. Tahap I Tahun 2026 dengan Prioritas: Peningkatan Produktivitas Dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Energi untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif;
b. Tahap II Tahun 2027 dengan Prioritas: Peningkatan Pelayanan Dasar dan Sumber Daya Manusia Berkualitas;
c. Tahap III Tahun 2028 dengan Prioritas: Transformasi Ekonomi dan Pariwisata yang Kreatif dan Kompetitif;
d. Tahap IV Tahun 2029 dengan Prioritas: Penguatan Ekonomi Lokal melalui Sentra Pangan, Energi Terbarukan dan Inovasi Digital; dan
e. Tahap V Tahun 2030 dengan Prioritas: Pemantapan kolaborasi dan inovasi untuk kesejahteraan Masyarakat.

Pada setiap tahapan akan diarahkan untuk melaksanakan Tema-tema Pembangunan yang di pilih berdasarkan Arahan Tema Pembangunan Nasional pada saat itu, sedangkan Arah Kebijakan per misi, pilar dan cita akan menyesuaikan. Dengan demikian, arah kebijakan yang dilaksanakan selama lima tahun dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan Tabel 3.7 berikut.

Gambar 3.1
Arah Pembangunan Nasional dan Prioritas Tahunan Pembangunan Daerah Provinsi NTT
Tahun 2025 – 2029

Arahahan RPJPN 2025-2045:
17 Arah Pembangunan (17 IE)

Visi Pembangunan 2025-2045:
"Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan".

Arahan RPJMN 2025-2029 :
8 Prioritas Nasional Asta Cita

***Visi Pembangunan 2025-2029*:**
"Bersama Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045".

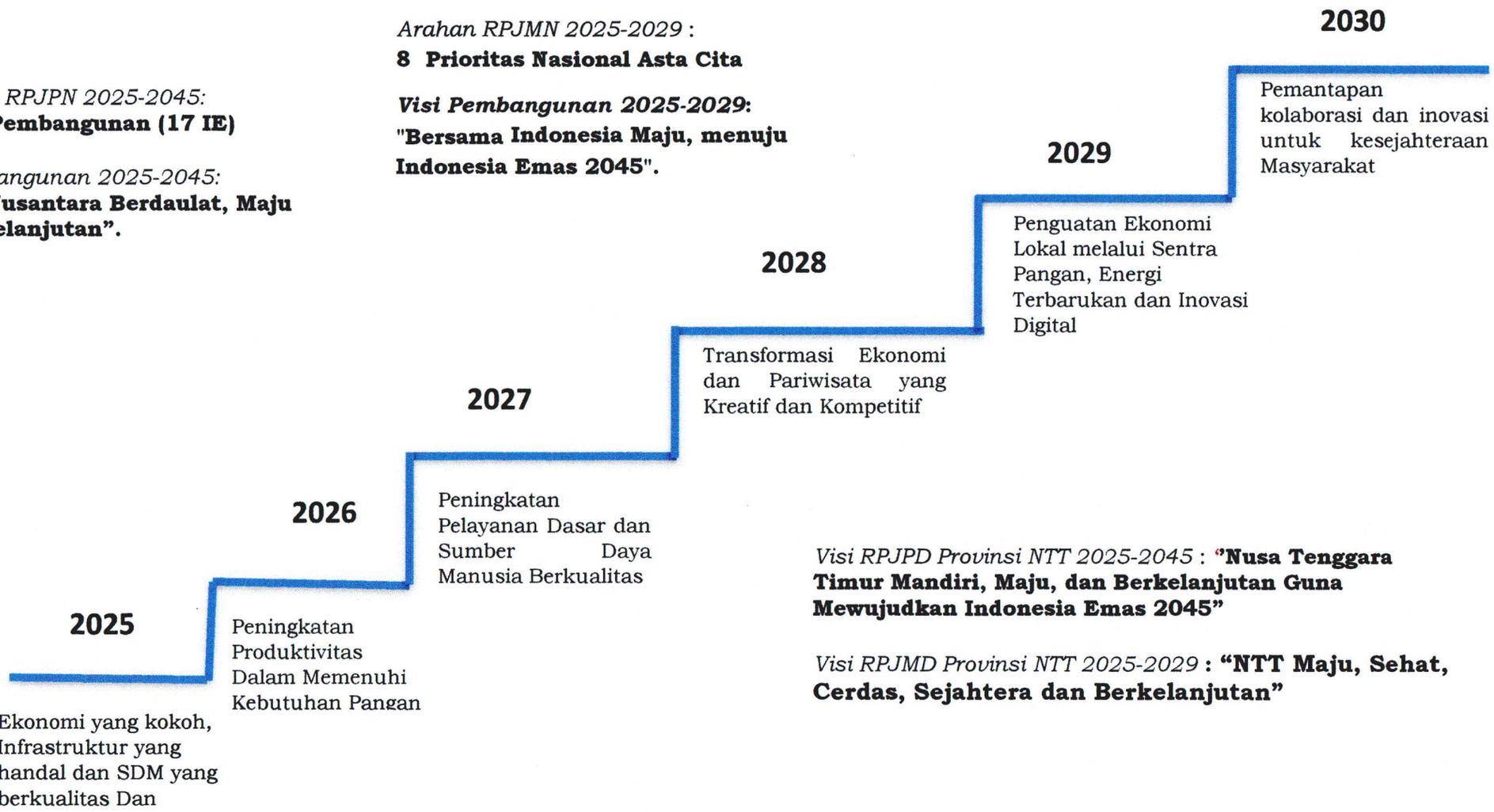

Visi RPJPD Provinsi NTT 2025-2045 : **"Nusa Tenggara Timur Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045"**

Visi RPJMD Provinsi NTT 2025-2029 **: "NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan"**

Tabel 3.7 Penahapan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026-2030

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN				
TAHAPAN PEMBANGUNAN				
Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
Tema Umum: MEWUJUDKAN NUSA TENGGARA TIMUR YANG SEJAHTERA DAN TANGGUH MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL YANG BERDAYA SAING, SDM UNGGUL, TRANSFORMASI DIGITAL YANG MERATA SERTA TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, INOVATIF DAN BERMARTABAT MENUJU PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN				
Prioritas: Peningkatan Produktivitas Dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Energi untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	**Prioritas:** Peningkatan Pelayanan Dasar dan Sumber Daya Manusia Berkualitas	**Prioritas:** Transformasi Ekonomi dan Pariwisata yang Kreatif dan Kompetitif	**Prioritas:** Penguatan Ekonomi Lokal melalui Sentra Pangan, Energi Terbarukan dan Inovasi Digital	**Prioritas:** Pemantapan kolaborasi dan inovasi untuk kesejahteraan Masyarakat
ARAH KEBIJAKAN				
MISI 1: Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)				
Pilar 3: Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan dan Pilar 7 Kolaborasi				
Cita 7: Jalan , air Listrik, rumah layak huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera				**Cita 9: Membangun NTT Digital : akses Merata, Komunikasi Lancar**
- Pembangunan dan pengembangan ruas jalan provinsi meliputi jalan akses simpul transportasi dan jalan strategis dengan pendekatan optimalisasi pola kemitraan (Pendekatan kolaboratif) yang menghubungkan pusat -pusat pertumbuhan baru, desa-desa wisata, wilayah sentra komoditi dan desa-desa yang memiliki produk unggulan. - Upaya pengalihan status ruas jalan Provinsi pada kawasan perbatasan negara yang masih merupakan kewenangan Provinsi menjadi kewenangan Nasional. - Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan strategis dan 3 TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan) - Melaksanakan urusan Transmigrasi sesuai dengan kebijakan nasional dan peraturan yang berlaku di daerah afirmasi kawasan transmigrasi. - Peningkatan kapasitas tampungan air melalui penguatan koordinasi dalam pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan keberlanjutan infrastruktur sumber daya air: bendungan, embung, waduk, jalan usaha tani, jalan produksi dll untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan penyediaan air bersih. - Pembangunan sistem pengelolaan air minum yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk pemenuhan air minum layak melalui peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintah dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. - Pemenuhan akses air minum layak bagi rumah tangga.				- Peningkatan layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. - Peningkatan penyebaran informasi publik yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah pusat dan Provinsi. - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
- Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah. - Pemenuhan ketersediaan dan keberfungsian jaringan irigasi pertanian dan infrastruktur sumber daya air melalui perencanaan irigasi partisipatif, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air. - Pemenuhan dan optimalisasi Wilayah Sungai di Provinsi NTT dalam menjaga kuantitas dan kualitas air. - Koordinasi pemenuhan elektrifikasi berbasis pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan PLN bagi rumah tangga belum berlistrik. - Peningkatan pemanfaatan riset PLN dan Non-PLN. - Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. - Peningkatan kualitas operasional instalasi tenaga listrik melalui kemitraan pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil *(isolated mini/ micro-grid)* untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas. - Pembangunan jaringan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mempercepat transisi energi. - Penguatan optimalisasi sumber Energi Baru Terbarukan sebagai sumber cadangan energi dalam mendukung transisi energi berbasis potensi Energi Baru Terbarukan sesuai potensi Daerah, yaitu *Timor Biomass Island, Flores Gheotermal Island, Sumba Iconic Island*, serta potensi gelombang laut, arus laut, temperatur laut dan hidrogen hijau. - Penguatan peran dan kapasitas masyarakat lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan. - Penguatan peran Pemerintah melalui dukungan regulasi dan kebijakan dalam mempercepat transisi energi berbasis potensi Energi Baru dan Terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi. - Penguatan Peran Pemerintah dalam mendorong pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian kepemilikan lahan bersertifikat dan kemudahan perizinan dalam proses penyediaan rumah. - Peningkatan efektivitas pengendalian untuk menjamin keandalan bangunan dan kesesuaian terhadap tata ruang. - Meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU, layanan akses sanitasi dan persampahan yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan sesuai dengan aturan yang berlaku. - Penyediaan infrastruktur menuju sanitasi aman. - Pengelolaan dan penetapan standar pengolahan limbah. - Penguatan kolaborasi lintas sektor (hexahelix) dan kewenangan dalam pengelolaan sampah terpadu. - Optimalisasi regulasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang (kawasan lindung dan budidaya) untuk mendorong pembangunan yang tepat sasaran dalam mencapai keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (lingkungan tangguh). - Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perijinan investasi energi, sistem insentif dan menjaga kestabilan sosial/politik untuk mendorong pembangunan infrastruktur energi yang berkelanjutan. - Mitigasi Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem yang terancam punah. - Peningkatan Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi melalui Pembinaan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL	- Meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat sesuai dengan kewenangan provinsi. - Penguatan komunitas lokal untuk Pemasaran produk digital UMKM dan kelembagaan. - Mendorong perluasan dan pemerataan literasi digital serta integrasi layanan publik yang ramah terhadap perempuan untuk mempersempit kesenjangan dan mendorong kemandirian ekonomi. - Meningkatkan kemitraan dalam penguatan infrastruktur digital koperasi yang merata dan terjangkau. - Meningkatkan literasi digital dan adopsi teknologi untuk pengembangan Koperasi. - Mengoptimalkan platform dan aplikasi digital untuk pengembangan Koperasi.

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
(Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan pengawasan terhadap tindak pidana pelanggaran di kawasan konservasi. - Pemanfaatan riset dan penguatan kapasitas SDM dalam pembangunan yang berketahanan iklim dan resilien terhadap bencana. - Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim melalui: (i) Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim (ii) Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim (iii) Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. (iv) Peningkatan Kapasitas institusi dan Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dengan mempertimbangkan resiko bencana - Pemanfaatan ruang budi daya berbasis risiko bencana melalui pemenuhan dokumen dasar perencanaan penanggulangan bencana yang tepat dan akurat serta pengendalian tata ruang berbasis risiko bencana , terutama pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil - Perluasan tutupan lahan kritis secara bertahap - Penguatan riset dan kapasitas SDM dalam pengembangan dan penerapan transportasi - Optimalisasi inventarisasi dan implementasi aksi mitigasi per sektor yang menyumbang penurunan Emisi GRK - Penguatan sistem ketahanan mata pencaharian penduduk terhadap bencana dan perubahan iklim. - Penguatan investasi pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan untuk membangun ketahanan ekonomi yang adaptif dan responsif. - Peningkatan pengawasan pembangunan infrastruktur publik yang adaptif terhadap resiko bencana sesuai rencana tata ruang. - Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemenuhan SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana. - Pengembangan prasarana transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP yang berkeselamatan dan menghubungkan wilayah strategis - Keterpaduan Pengembangan pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi termasuk pariwisata diantaranya pelabuhan Tenau dan Labuan Bajo secara terpadu - Pengembangan transportasi publik termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Kota Kupang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang melalui audit dan rencana peremajaan armada, serta pembenahan sistem layanan moda transportasi dan sistem informasi yang terintegrasi secara real time - Pengembangan Kawasan Sentra Produksi melalui peningkatan Jalan Usaha Tani dan Penguatan kerja sama intra daerah dengan kabupaten/kota dalam menjamin penyediaan rantai pasok - Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas rumput laut dengan dukungan kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya melalui Peningkatan sarana prasarana pendukung dengan pengembangan pelabuhan pendukung industri rumput laut, pembangunan jalan dan infrastruktur TIK	- Koordinasi, Pembinaan dan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih. - Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Layanan Publik Terpadu melalui: - Aplikasi yang mengintegrasikan layanan publik seperti kesehatan (BPJS, jadwal dokter), pendidikan (data siswa, e-learning), dan bantuan sosial dan pariwisata. - Layanan Aspirasi dan Aduan Online dengan pengembangan aplikasi mobile phone yang akan ditindaklanjuti dengan penangan prioritas untuk masalah mendesak melalui platform MEJA RAKYAT. - Koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam Pengembangan *Smart Village* dan *Smart City* melalui: (i) Penetapan Pilot Project Desa Digital (ii) Pengembangan Big Data dan Artificial Inteligence untuk Kebijakan Publik

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
MISI 2: Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT)
Pilar 4: Kesehatan dan Pilar 7 Kolaborasi
Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting
- Peningkatan peran dan dukungan Pemerintah Desa dalam Promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan AIDS, TBC, Malaria (ATM) dan penyakit menular lainnya serta tidak menular dengan pendekatan *one health*, termasuk masalah kesehatan akibat perubahan iklim melalui fasilitisasi dukungan kebijakan di tingkat kabupaten/kota dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Provinsi. - Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau dan sarana untuk aktivitas fisik. - Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. - Inovasi dan pemanfaatan pengembangan kesehatan digital dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui : penguatan tata kelola pelayanan kesehatan (implementasi Satu Sehat NTT Terintegrasi). - Penyediaan Promotif, Peningkatan dukungan Pemerintah Desa dalam promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan bagi lansia melalui fasilitisasi dukungan kebijakan di tingkat kabupaten/kota dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Provinsi. - Pemenuhan SPM Urusan Kesehatan. - Pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui pendekatan hexahelix. - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana, prasarana, bangunan gedung, tata kelola, obat dan alat kesehatan, dan pembiayaan yang berkualitas di fasilitas kesehatan. - Peningkatan kapasitas posyandu dalam pemenuhan 6 (enam) bidang SPM melalui Peningkatan peran pemerintah, masyarakat, dengan lembaga mitra. - Meningkatkan Pusat layanan kesehatan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan lansia yang memiliki hambatan mobilitas. - Upaya pencapaian *Universal Health Coverage* (Jaminan Kesehatan) di seluruh NTT. - Penguatan kerjasama dengan pemerintah desa dan lembaga masyarakat untuk meningkatkan cakupan kepesertaan PKRT, disabilitas lansia dalam JKN. - Meningkatkan kualitas dan sebaran tenaga kesehatan melalui penyediaan beasiswa dan pelatihan bagi tenaga kesehatan RSUD dan/atau fasilitas kesehatan pada Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan melalui insentif Tambahan Penghasilan (Tamsil).
MISI 3: Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS)
Pilar 5 : Pendidikan dan Pilar 7 Kolaborasi
Cita 6: Sekolah Vokasi Unggulan berbasis potensi unggulan
- Koordinasi, pembinaan dan pengawasan percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) yang dilakukan melalui : (i) Pengembangan layanan pendidikan anak usia dini yang holistik integratif (PAUD HI); (ii) Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran; (iii) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas; dan

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
(iv) Penanganan anak tidak sekolah yang meliputi anak yang belum pernah sekolah, pencegahan tingkat Drop Out (DO) serta penanganan peserta didik yang lulus tidak melanjutkan. - Pembangunan dan revitalisasi sekolah pendidikan khusus yang berkualitas untuk mendorong pendidikan yang inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus. - Peningkatan iklim inklusivitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus di level pendidikan layanan khusus. - Penyiapan sarana, prasarana, dan peningkatan kualitas fasilitas dan layanan pendidikan, serta Penyediaan beasiswa afirmasi Pendidikan Menengah untuk daerah kepulauan yang masih belum terjangkau dengan afirmasi bagi perempuan. - Mendorong tingkat partisipasi mahasiswa di Perguruan Tinggi berkualitas melalui Pemanfaatan beasiswa afirmasi Pendidikan Tinggi dengan afirmasi bagi perempuan. - Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. - Penguatan kelembagaan dan peningkatan akses terhadap lima model penghidupan yang sensitif terhadap GEDSI (penghidupan berbasis masyarakat, penghidupan inklusif penghidupan berkelanjutan, penghidupan berbasis hak, dan penghidupan partisipatif). - Peningkatan kualitas pendidikan melalui Peningkatan akreditasi pendidikan menengah dan khusus berakreditasi minimal B. - Pemenuhan SPM bidang Pendidikan. - Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik. - Revitalisasi sekolah vokasi sektor prioritas (pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan (garam, rumput laut) berdasarkan potensi lokal dan pioritas pemerintah fasilitas pendidikan SMK, Politeknik dan Balai Latihan Kerja (BLK). - Pengembangan dan pelestarian budaya lokal melalui perlindungan dan pelestarian warisan budaya, pengembangan komunitas budaya dan daerah melalui kolaborasi dengan Diaspora, jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. - Meningkatkan peran keluarga sebagai media sosialisasi primer dan kontrol sosial. - Mengintegrasikan nilai-nilai agama dan pancasila dalam pembelajaran di sekolah. - Internalisasi dan penguatan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat melalui kegiatan ekstrakurikuler berbasis budaya dan kearifan lokal serta pelestarian kegiatan perayaan hari besar kenegaraan. - Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan. - Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal. - Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah.
MISI 4: Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA)
Pilar 2 : Pemberdayaan Komunitas dan Pilar 7 Kolaborasi
Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal
- Mengoptimalkan integrasi program perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial produktif dan inklusi keuangan dengan prioritisasi masyarakat desil 1 dan 2 DTSEN dan kesenjangan antara perempuan dan laki- laki.

<table>
<tr><th colspan="4">TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN</th></tr>
<tr><td colspan="4">- Peningkatan skala ekonomi lewat pengelolaan usaha berbasis kelompok atau korporasi rakyat.
- Pengembangan akses pasar, teknologi melalui pola kemitraan yang baik.
- Pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam rantai nilai bisnis yang lebih besar.
- Pemenuhan SPM Urusan Sosial.
- Penguatan kapasitas kelembagaan dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM.
- Fasilitasi akses permodalan, pembiayaan dan literasi keuangan.
- Pengembangan sentra produksi berbasis komoditas unggulan perdesaan.
- Pengembangan kawasan pedesaan agrowisata.
- Pembangunan rantai nilai dan jaringan kemitraan antara UMKM, pemerintah dan sektor swasta.
- Penguatan infrastruktur digital koperasi yang merata dan terjangkau.
- Peningkatan literasi digital dan kapasitas inovasi bagi pengurus dan anggota koperasi.
- Pemanfaatan platform dan aplikasi digital untuk efisiensi layanan dan ekspansi usaha koperasi.
- Pengembangan kemitraan strategis dalam ekosistem digital koperasi.
- Koordinasi, Pembinaan dan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih.
- Penguatan pelatihan dan pendampingan keterampilan ekonomi, kreatif berbasis kebutuhan pasar khususnya bagi anak muda milenial dan Perempuan.
- Pengembangan youth campaign dan inkubator bisnis, kemitraan kreatif dan akses pembiyaaan bagi perempuan dan milenial.
- Peningkatan dan perluasan promosi, pemasaran digital, dan branding produk lokal berbasis budaya dan inovasi.
- Peningkatan partisipasi kepemudaan dalam ekonomi mandiri termasuk didalamnya kegiatan kewirausahaan, sosial dan budaya.
- Peningkatan akses dan kualitas fasilitas olahraga di daerah.
- Pengembangan sistem pembinaan atlet dan penyelenggaraan kompetisi olahraga berjenjang untuk mendukung PON Nusra XXII.
- Penguatan kelembagaan olahraga daerah untuk mendukung prestasi nasional.</td></tr>
<tr><td colspan="4">MISI 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Pilar 1: Ekonomi Berkelanjutan, Pilar 6: Reformasi Birokrasi Dan Hak Azasi Manusia dan Pilar 7 Kolaborasi</td></tr>
<tr><td>Cita 1: Dari ladang dan laut ke pasar : Efisien , modern dan aman</td><td>Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal</td><td>Cita 4: Kesejahteraan Bersama: Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan untuk Masyarakat</td><td>Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin</td></tr>
<tr><td>- Meningkatkan pemanfaatan lahan
- Meningkatkan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, penyakit hewan dan zoonosis</td><td>- Peningkatan aksesibilitas pariwisata</td><td>- Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial</td><td>- Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Peningkatan transparansi dan</td></tr>
</table>

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
- Pemanfaatan bibit/ benih unggul dan penerapan praktik pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan - Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung - Penguatan kapasitas SDM - Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan - Mendorong swasembada pangan sebagai dasar kedaulatan dan kemandirian pangan provinsi melalui penguatan produksi dalam daerah, perlindungan sumber daya pangan, serta pembangunan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan guna menjamin ketahanan dan penyelamatan pangan jangka panjang. - Pengembangan komoditas unggulan daerah yang terintegrasi dari hulu ke hilir - Pengembangan sentra produksi di kawasan perdesaan, dan pengolahan dan pemasaran di kawasan perkotaan, serta keterkaitan antar desa dan kota - Peningkatan akses pasar dan nilai tambah produk melalui penguatan sistem logistik, standardisasi kualitas, dan promosi produk unggulan daerah. - Mendorong iklim kebijakan yang kondusif dengan peningkatan investasi guna penciptaan lapangan kerja - Penguatan peran BLK dalam meningkatkan kompetensi angkatan kerja - Pengembangan sistem pelatihan melalui BLK dan BLK Komunitas serta penciptaan lapangan kerja baru dengan sektor swasta - Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi daerah, yang berfokus pada sektor Pertanian/Perkebunan, Peternakan, Pariwisata dan Perikanan/Kemaritiman - Penguatan koordinasi peningkatan perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). - Pendataan penduduk usia kerja untuk penerbitan administrasi	- Pengembangan atraksi - Pengembangan keterampilan SDM, layanan dan tata Kelola pariwisata - Penguatan dan perluasan pemasaran pariwisata - Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata (IKM, Koperasi, UMKM dan BUMDES) - Kolaborasi dalam rangka mendukung Tour de EnTeTe - Penguatan akses permodalan, pelatihan, dan promosi bagi pelaku ekonomi kreatif - Mendorong kemitraan pelaku ekonomi kreatif dengan sektor swasta - Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan pemasaran dan	(PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek - Pengembangan sistem pelatihan melalui BLK serta penciptaan lapangan kerja baru dengan sektor swasta - Pendataan penduduk usia kerja untuk penerbitan administrasi kependudukan berupa NIK dan KTP - Peningkatan Pengawasan tenaga kerja melalui K/L dan OPD ketenagakerjaan (BP2MI) dan Swasta - Menyiapkan skema pembiayaan inovatif	akuntabilitas melalui SPM serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Pengawasan Masyarakat - Peningkatan Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik - Evaluasi produk-produk regulasi daerah - Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks keterbukaan informasi publik - Peningkatan akses informasi dan layanan yang akurat dan up to date melalui MEJA Rakyat & Sekber - Peningkatan Profesionalime ASN melalui pola karier dan merit sistem - Tersusunnya Paket Regulasi untuk SKPD dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; - Pembinaan ASN dalam rangka peningkatan kapasitas agar mempu mengelola keuangan sesuai standar regulasi yang ada; - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. - Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana baik fisik maupun digital untuk mendukung pengelolaan keuangan dan administrasi berbasis akrual. - Pemenuhan SPM Urusan Trantibumlinmas. - Mengintensifkan Peningkatan pendapatan pajak, retribusi, BUMD dan sumber-sumber lainnya - Optimalisasi sumber-sumber pendapatan (aset) secara terpadu

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
kependudukan berupa NIK dan KTP. - Mendorong iklim kebijakan yang kondusif dengan peningkatan investasi guna penciptaan lapangan kerja. - Pendampingan wirausaha baru yang intensif dan berkelanjutan - Peningkatan akses pembiayaan yang inklusif melalui kerja sama dengan lembaga keuangan dan pengembangan skema pembiayaan alternatif - Penguatan literasi digital dan adopsi teknologi untuk meningkatkan daya saing wirausaha dalam ekonomi digital.	promosi produk ekonomi kreatif		- Pengembangan kapasitas SDM ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi - mendorong keberlanjutan pemberian tunjangan kinerja untuk peningkatan profesionalitas - Menentukan indikator dan target kinerja realistis dan terukur sebagai patokan pemberian tunjangan kinerja - Deregulasi terkait akses terhadap lapangan kerja bagi perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lainnya - Optimalisasi Pengawasan terkait tenaga kerja perempuan dan disabilitas - Peningkatan dan perluasan pelayanan FKUB - Memperkuat kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah, Organisasi Masyarakat sipil dan swasta dalam penegakan hukum, edukasi migrasi aman serta peningkatan dan pemerataan akses layanan yang inklusif dan berkelanjutan bagi korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anan (KtP/A) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

3.2.3 Arah Pembangunan

1) Arah Pembangunan per Wilayah Pulau

Pembangunan kewilayahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menghadapi kesenjangan, baik secara ekonomi maupun sosial. Wilayah kabupaten/kota di NTT terbagi menjadi empat kelompok jika diklasifikasikan berdasarkan Tipologi Klasen. Di Tahun 2022 wilayah NTT yang termasuk dalam kelompok daerah maju adalah Kota Kupang, Rote Ndao, Belu, Ende, dan Ngada. Wilayah yang masuk dalam daerah maju tertekan adalah Kabupaten Kupang dan Sumba Timur. Selanjutnya, wilayah yang masuk dalam kelompok daerah berkembang adalah Kabupaten Sikka, Nagekeo, Sumba Barat, TTS, Malaka, Manggarai Timur, SBD, dan Manggarai Barat. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok Daerah Relatif Tertinggal adalah Kabupaten Flores Timur, Manggarai, Sumba Tengah, Lembata, TTU, Alor, dan Sabu Raijua.

Kemampuan pembangunan masing-masing wilayah sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang berbeda-beda, yang dalam pengelolaannya dapat menimbulkan kesenjangan antar wilayah dan berimbas pada kesenjangan pendapatan antar wilayah. Ketidakmerataan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait antara lain kepemilikan sumber daya, fasilitas yang dimiliki, infrastruktur, keadaan geografis wilayah dan lain sebagainya.

a. Pulau Sumba

Pulau Sumba merupakan salah satu pulau terbesar di Provinsi NTT dengan luas wilayah mencapai 11.005 Km2 atau 22.96% dari total wilayah provinsi. Dengan luas wilayah tersebut, pulau ini dihuni oleh 775.050 penduduk atau sebesar 15.2% dari total jumlah penduduk di Provinsi NTT. Pulau ini terbagi menjadi 4 wilayah administrasi yang terdiri atas Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Sumba Timur dengan karakteristik dan potensi wilayahnya masing masing. Meskipun demikian, Kinerja pembangunan daerah di Pulau Sumba masih relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain di Provinsi NTT.

Pulau Sumba memiliki keberagaman potensi baik daya tarik pariwisata, sumber daya alam, maupun energi baru terbarukan. Hal tersebut menjadi modal dasar yang apabila dikelola dan direncanakan dengan baik serta terarah maka akan berperan penting dalam menunjang pencapaian tujuan nasional, yakni meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, serta mendorong pembangunan daerah. Selain potensi tersebut, Pulau Sumba memiliki sektor unggulan berupa sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif serta Energi Baru Terbarukan (EBT).

Pulau Sumba memiliki potensi EBT yang besar terutama potensi tenaga surya tetapu belum dimanfaatkan dengan baik. Padahal, Pulau Sumba merupakan salah satu pulau di Provinsi NTT yang memiliki rasio elektrifikasi yang rendah yaitu 85,84%. Sumba sebagai pulau yang memiliki potensi ekonomi di bidang pertanian dan pariwisata yang tinggi, belum dapat memanfaatkan potensi ini secara maksimal karena mengalami kendala pada akses listrik, dan masih terdapat desa yang belum memiliki akses jaringan ke PLN. Oleh karena itu, akselerasi pengembangan EBT di Pulau Sumba diarahkan sebagai penopang energi untuk wilayah NTT dan sekitarnya.

b. Pulau Flores dan Lembata

Pembangunan pariwisata di Pulau Flores dan Lembata tidak terlepas dari dua destinasi unggulan yang ada di dalamnya, yaitu Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo dan Kelimutu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Selain kedua potensi unggulan tersebut, terdapat potensi pariwisata beragam dan unik yang tersebar di setiap kabupaten di Flores dan sekitarnya. Terletak di kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati laut seperti terumbu karang yang luas dan ekosistem laut yang sehat, ketersediaan sumber makanan yang cukup bagi ikan-ikan di perairan Flores dan sekitarnya serta upaya konservasi dalam menjaga kelestarian ekosistem laut, aktivitas wisata seperti *diving* dan *snorkeling* sangat potensial untuk dikembangkan seperti di wilayah perairan Labuan Bajo, Riung, Lembata dan Alor.

Aktivitas trekking, *bird watching* dan kegiatan petualangan lain yang menonjolkan keindahan alam Flores dan sekitarnya juga dapat dikembangkan. Potensi wisata budaya berupa Atraksi budaya seperti Caci, tinju adat Etu, prosesi Semana Santa di Larantuka hingga perburuan ikan paus di Lamalera sangat potensial untuk dikembangkan.

Potensi pariwisata yang terdapat di Pulau Flores dan Lembata, maka arah pembangunan kewilayahan Pulau Flores dan Lembata diarahkan pada kawasan pariwisata berbasis ekowisata yang premium. Pengembangan ekowisata di Pulau Flores juga diarahkan untuk menciptakan konektivitas yang baik antar destinasi, sehingga wisatawan dapat dengan mudah menjelajahi berbagai tempat menarik di Flores. Hal ini menjadi alternatif kunjungan wisatawan ke Pulau Flores selain ke Manggarai Barat dan Ende sehingga diharapkan dapat meningkatkan lama kunjung wisatawan.

Selain potensi pariwisata, Pulau Flores juga terkenal sebagai penghasil tanaman pertanian seperti padi, tanaman perkebunan seperti kopi, kakao dan jambu mete dan perikanan budidaya khusunya rumput laut. Kabupaten Flores Timur diproyeksikan untuk menjadi pusat produksi, industri dan ekosistem riset dan inovasi dengan dukungan kontribusi dari kabupaten sekitarnya seperti Lembata dan Alor.

c. Pulau Timor

Kondisi geografis dan hidrologi Pulau Timor mendukung pengembangan potensi sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, potensi-potensi ini dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri sangat penting untuk mewujudkan pengembangan yang berkelanjutan dan inklusif di Pulau Timor.

Usaha-usaha pertanian dan peternakan dipercaya akan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Untuk itu, daerah ini diarahkan untuk pengembangan sektor pertanian dan peternakan. Dengan Food Estate yang berlokasi di Belu, ke depan Belu diarahkan menjadi penopang pangan di Pulau Timor. Proyeksi ke depan, Greater Kupang (Kota Kupang dan Kabupaten Kupang) diarahkan untuk menjadi Pusat Produksi, Industri dan ekosistem riset-inovasi Rumput Laut dengan dukungan kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya seperti Kabupaten Rote Ndao.

d. Pulau-pulau: Alor, Rote, Sabu

Pulau Alor

Pulau Alor terletak di kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati laut, sehingga sektor perikanan sangat potensial untuk dikembangkan. Pada Tahun 2021, produksi ikan tongkol Alor menjadi yang terbesar di NTT yaitu mencapai 4.284 ton sedangkan di tahun yang sama produksi ikan tuna menjadi yang terbesar ke empat di NTT dengan 562 ton. Adapun produksi rumput laut pada Tahun 2022 sebesar 2015 ton (terbesar ke enam di NTT). Namun pemanfaatan potensi yang ada ini perlu dioptimalkan agar dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Di sektor pertanian, khususnya tanaman Perkebunan dan pertanian, potensi yang cukup menonjol dari Kabupaten Alor disumbang dari komoditas jambu mete, vanili, kemiri, kenari, jagung dan ubi kayu. Berdasarkan data BPS Tahun 2023 luas areal tanam jambu mete 12.636 ha dengan produksi 3.507 ton (terbesar ke enam di NTT). Produksi jagung pada Tahun 2022 sebesar 26.916 (terbesar ke tujuh di NTT), sedangkan produksi ubi kayu 35.751 ton (terbesar ke sembilan di NTT).

Potensi pariwisata di Kabupaten Alor terletak pada budaya dan tradisi unik masyarakat lokal seperti Kampung Adat Takpala yang masih memegang teguh warisan budaya leluhur. Selain itu, Alor terkenal dengan keindahan pantai pasir putih dan pulau-pulau kecilnya. Terdapat banyak spot untuk menikmati keindahan bawah laut di Alor baik untuk *snorkeling* maupun *diving.* Atraksi pengamatan dugong juga cukup terkenal di Alor. Spesies yang mulai langka ini biasanya hidup pada habitat dengan kualitas yang baik. Ini juga erat kaitannya konservasi yang terus dilakukan dan berkembang baik di perairan Alor.

Selain itu, di wilayah laut Pulau Alor juga terdapat potensi engeri baru terbarukan (EBT) yakni arus laut yang dapat dikembangkan untuk penyediaan energi listrik untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Memperhatikan potensi yang ada, Kabupaten Alor diproyeksikan dapat memberikan dukungan kontribusi bagi Kabupaten Flores Timur sebagai pusat produksi, industri serta ekosistem riset dan inovasi.

Pulau Rote

Rote Ndao memiliki potensi perikanan yang sangat besar karena didukung oleh kondisi geografis dan ekosistem laut yang kaya. Perairan di sekitar Rote Ndao merupakan habitat yang baik untuk ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang. Selain itu, jenis ikan karang seperti kerapu, kakap, dan baronang banyak ditemukan di perairan dangkal di sekitar Rote Ndao. Potensi perikanan budidaya terutama rumput laut sangat menjanjikan. Tahun 2022 produksi rumput laut tercatat sebanyak 88.028 ton yang menjadikan Rote Ndao sebagai daerah penghasil rumput laut terbanyak ke dua di NTT.

Di sektor peternakan, Pulau Rote memiliki potensi peternakan khususnya ternak sedang. Populasi domba di Rote Ndao pada Tahun 2023 tercatat sebanyak 30.283 ekor (terbanyak ke dua di NTT). Selain itu, Pulau Rote termasuk dalam pulau-pulau terluar dengan kekayaan destinasi wisata dan keindahan alam yang sangat memukau. Beberapa destinasi wisata yang sangat terkenal di Rote Ndao misalnya Pantai Nembrala yang terkenal untuk *surfing* dan Mulut Seribu.

Pulau Sabu

Sabu Raijua juga memiliki kondisi geografis dan ekosistem laut yang mendukung perkembangan sektor perikanan. Potensi perikanan budidaya terutama rumput laut Sabu Raijua pada Tahun 2022 sebanyak 53.921 ton menjadikan Sabu Raijua sebagai daerah penghasil rumput laut terbanyak ke tiga di NTT. Selain rumput laut, Pulau Sabu juga memiliki potensi pengembangan garam dengan dukungan garis pantai kondisi panas yang sangat mendukung kualitas garam yang baik. Terdapat pula potensi peternakan khususnya ternak sedang. Populasi domba di Sabu Raijua pada Tahun 2023 tercatat sebanyak 35.633 ekor yang menjadikan Sabu Raijua sebagai daerah dengan populasi domba terbanyak di NTT.

Di sektor pariwisata, Pulau Sabu juga termasuk dalam kategori pulau terluar yang tememiliki objek wisata baik alam, wisata laut maupun budaya misalnya Kelaba Maja dan ritus-ritus budaya yang dikembangkan di masyarakat. Dengan potensi yang ada, Sabu Raijua diharapkan dapat memberikan kontribusi/penyuplai dukungan kontribusi bagi Greater Kupang sebagai pusat produksi, industri serta ekosistem riset dan inovasi.

2) Lokus Pembangunan Wilayah di Provinsi NTT

Lokus pembangunan per Pulau secara umum disandingkan dengan arah pembangunan Wilayah Bali-Nusra yang tertuang di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut pada Tabel 3.9 di bawah ini antara lain meliputi:

1. Kawasan Strategis: Penguatan Kawasan Pariwisata Prioritas Eksiting
2. Kawasan Sentra Produksi Pangan
3. Sentra Pemerataan Ekonomi Rintisan:
   a. Kawasan Pariwisata Rintisan
   b. Kawasan terintegrasi berbasis Perikanan
   c. Kawasan Perkotaan

Tabel 3.8 Lokus Pembangunan Wilayah di Provinsi NTT Tahun 2025-2029

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH				
No	**RPJMN Tahun 2025-2029**		**RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029**	
A	➢ Kawasan Pertumbuhan **Kawasan Pawisata** 1. Destinasi Parawisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo – **Kab. Manggarai Barat,** dengan rencana perluasan menjadi DPP Labuan Bajo – Flores : • **Kab. Manggarai** • **Kab. Ngada, dan** • **Kab. Ende** **Kawasan Perkotaan** 2. Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Parawisata Labuan Bajo - **Kab. Manggarai Barat**	• Penguatan kawasan pariwisata prioritas eksisting (DPP Labuan Bajo) dan perluasannya di Pulau Flores melalui peningkatan aksesibilitas (jalan strategis dan pelabuhan kapal pesiar), pembangunan prasarana dan amenitas pariwisata (SPAL, SPAM, pengolahan sampah berbasis 3R, infrastruktur kelistrikan dan revitalisasi pasar rakyat), atraksi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan keterampilan SDM (pembinaan, pelatihan, pembekalan kerja) • Pengembangan Kawasan perkotaan pariwisata Labuan Bajo melalui penataan dan peningkatan citra kota (penguatan branding kawasan dan penguatan promosi daya tarik kawasan), peningkatan prasarana pelayanan dasar perkotaan, serta peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan.	**A**	• Prinsip pengembangan wilayah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 adalah melakukan perencanaan dan pembangunan yang bertujuan untuk mendukung lokasi prioritas pengembangan wilayah yang diarahkan di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan Provinsi NTT dan dengan memperhatikan dan mempedomani arahan pola dan struktur ruang pada RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043 dalam semangat kerja kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan (*hexa helix*) yang berkelanjutan. Sedangkan yang bersifat lintas Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan akan tetap dilakukan pada 21 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi NTT.
B	➢ Kawasan Komoditas Unggulan **Sentra Industri Berbasis Komoditas Rumput Laut** 1. Kab. Kupang dan Kota Kupang 2. Kab. Sumba Timur	• Penyiapan pengembangan sentra industri komoditas rumput laut dengan dukungan kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya melalui penguatan produksi rumput laut, industri, ekspor, aksesibilitas dan konektivitas, peningkatan kualitas SDM (termasuk STEAM dan vokasi), peningkaatan sarana prasana pendukung (termasuk pembangunan jalan akses Pelabuhan maritaing), pendampingan UMKM/IKM, koperasi, dan BUMDes, pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas, serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan.	**B**	• Prinsip pengembangan wilayah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 adalah melakukan perencanaan dan pembangunan yang bertujuan untuk mendukung lokasi prioritas pengembangan wilayah yang diarahkan di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan Provinsi NTT dan dengan memperhatikan dan mempedomani arahan pola dan struktur ruang pada RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043 dalam semangat kerja kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan (*hexa helix*) yang berkelanjutan. Sedangkan yang bersifat lintas Koordinasi,

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH				
No	**RPJMN Tahun 2025-2029**		**RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029**	
	Sentra Produksi Berbasis Komoditas Rumput Laut 1. Kab. Kupang 2. Kab. Sumba Timur 3. Kab. Rote Ndao 4. Kab. Sabu Raijua 5. Kab. Alor 6. Kab. Flores Timur **Sentra Industri Berbasis Garam** 1. Kab. Sabu Raijua 2. Kab. Kupang 3. Kab. Nagekeo **Sentra Produksi Berbasis Garam** 1. Kab. Sabu Raijua 2. Kab. Kupang 3. Kab. Nagekeo 4. Kab. Sumba Timur 5. Kab. Ende	• Penguatan sentra produksi serta penyiapan pengembangan sentra industri garam terintegrasi melalui peningkatan produksi, industri, aksesbilitas dan konektivitas, sertifikasi mutu produk, perluasan ekspor, promosi produk garam industri, pengembangan BUMDes, serta kualitas SDM (termasuk STEAM dan vokasi), peningkatan sarana prasarana (pelabuhan, jalan strategis, inovasi teknologi).		Pembinaan dan Pengawasan akan tetap dilakukan pada 21 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi NTT.
C	➢ Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: **1. Kab. Sumba Tengah**: KSPP **2. Kab. Belu**: KSPP, potensial air **3. Kab. Manggarai Barat**: potensial pangan. **4. Kab. Manggarai**; potensial pangan, potensial energi.	• Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Belu dan KSPP Sumba Tengah melalui pengembangan kawasan (termasuk optimasi lahan, pembangunan embung, jaringan drainase dan irigasi), peningkatan produksi termasuk penyediaan benih dan pengendalian hama, penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana produksi; penguatan pasca panen dan tata kelola, serta pengembangan riset dan inovasi teknologi.	**C**	• Prinsip pengembangan wilayah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 adalah melakukan perencanaan dan pembangunan yang bertujuan untuk mendukung lokasi prioritas pengembangan wilayah yang diarahkan di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan Provinsi NTT dan dengan memperhatikan dan mempedomani arahan pola dan struktur ruang pada RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043 dalam semangat kerja kolaborasi bersama seluruh pemangku

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH				
No	**RPJMN Tahun 2025-2029**		**RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029**	
	5. **Kab. Manggarai Timur**: potensial pangan. 6. **Kab. Sikka**: potensial pangan 7. **Kab. Lembata:** potensial pangan. 8. **Kab. Kupang**: potensial air, potensial energi. 9. **Kab. Nagekeo: potensial air** 10. **Kab. Timor Tengah Selatan: potensial pangan**	• Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis pertanian tanaman pangan pangan (padi, jagung, sorgum), pangan akuatik/bluefood berbasis perikanan tangkap laut, dan pangan hewani (sapi dan babi) melalui penguatan produksi, pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, penguatan kapasitas SDM, penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, serta diversifikasi pangan pada kawasan rentan • Peningkatan ketahanan air pulau dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas tampungan/SDA termasuk bendungan, serta penyediaan sumber air baku alternatif di kawasan rawan air dengan embung dan/atau pengeboran sumber air • Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan melalui percepatan pengembangan dan optimalisasi infrastruktur pembangkit listrik berbasis EBT terutama energi surya, perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan di kawasan rentan energi, penyediaan sarana prasarana pendukung, dan perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan pada Kawasan rendah elektrifikasi		kepentingan (*hexa helix*) yang berkelanjutan. Sedangkan yang bersifat lintas Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan akan tetap dilakukan pada 21 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi NTT.
D	➢ Kawasan Afirmasi **Daerah tertinggal** 1. Kab. Sumba Tengah 2. Kab. Sumba Barat Daya 3. Kab. Sabu Raijua	• Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial; penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal, inovasi berbasis	**D**	• Prinsip pengembangan wilayah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 adalah melakukan perencanaan dan pembangunan yang bertujuan untuk mendukung lokasi prioritas pengembangan wilayah yang diarahkan di

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH				
No	**RPJMN Tahun 2025-2029**		**RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029**	
	*) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal **Kawasan Perbatasan** • PKSN dan Wilayah Pendukung 1. Kecamatan PKSN Kefamenanu, Kec. Biboki Moenleu, Naibenu, Mutis, Musi - **Kab. Timor Tengah Utara** 2. PKSN Atambua, Kec. Lasiolat, Lamaknen Selatan, Tasifeto Barat, Nanaet Duabesi - **Kab. Belu** 3. PKSN Kalabahi, Kec. Pantar Timur – **Kab. Alor** • Perbatasan Prioritas 1. Kec. Lamboya, Lamboya Barat – **Kab. Sumba Barat**	pengembangan sentra pertanian dan perikanan terintegrasi, dan pariwisata; pemerataan penyediaan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah; serta pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna. • Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), serta kecamatan perbatasan prioritas, melalui pemenuhan layanan dasar (penyediaan rumah layak, sarana prasarana, peningkatan SPAM, SPAL), pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas unggulan terutama di PKSN, penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, serta penguatan tata kelola pemerintahan.		dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan Provinsi NTT dan dengan memperhatikan dan mempedomani arahan pola dan struktur ruang pada RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043 dalam semangat kerja kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan (*hexa helix*) yang berkelanjutan. Sedangkan yang bersifat lintas Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan akan tetap dilakukan pada 21 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi NTT.

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH				
No	**RPJMN Tahun 2025-2029**		**RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029**	
	2. Kec. Ngadu Ngala, Karera, Pinu Pahar, Tabundung, Katala Hamu Lingu – **Kab. Sumba Timur** 3. Kec. Amfoang Timur, Kupang Barat, Nekamese, Amarasi Barat, Amarasi Selatan, Amarasi Timur – **Kab. Kupang** 4. Kec. Nunloko, Kot Olin, Kualin – **Kab. Timor Tengah Selatan** 5. Kec. Landu Leko, Rote Timur, Pantai Baru, Rote Selatan, Lobalain, Rote Barat Daya, Ndao Nuse – **Kab. Rote Ndao** 6. Kec. Kodi Balaghar – **Kab. Sumba Barat Daya** 7. Kec. Sabu Timur, Sabu Liae, Hawu Mehara, Raijua – **Kab. Sabu Raijua** 8. Kec. Kobalima Timur – **Kab. Malaka**			
	Kawasan Transmigrasi 1. KT Ponu – **Kab. Timor Tengah Utara**	• Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ponu, Tasifeto – Mandeu, dan Kobalima Timur, melalui pembangunan infrastruktur permukiman dan		

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH				
No	**RPJMN Tahun 2025-2029**		**RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029**	
	2. KT Tasifeto Mandeu – **Kab. Belu** 3. KT Kobalima Timur – **Kab. Malaka** **Kawasan Perdesaan Prioritas** 1. Kawasan Perdesaan Agrowisata Kopi Flores Bajawa – **Kab. Ngada**	aksesibilitas logistik, pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, redistribusi aset (tanah) transmigrasi, penataan persebaran penduduk, serta penyediaan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja terampil. • Pengembangan kawasan perdesaan agrowisata berbasis komoditas Kopi Flores Bajawa, melalui penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan, peningkatan aksesibilitas desa, peningkatan produktivitas perdesaan dan diversifikasi ekonomi lokal, peningkatan kapasitas tata kelola desa.		
E	➢ Kawasan Konservasi 1. Taman Nasional Komodo – **Kab. Manggarai Barat** 2. Cagar Alam Wae Wuul – **Kab. Manggarai Barat** 3. Kawasan Konservasi Daerah Selat Pantar dan Laut Sekitarnya – **Kab. Alor** 4. Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau – **Kab. Ngada** 5. Cagar Alam Riung – **Kab. Ngada** 6. Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya (10 Kab. Di Prov. NTT)	• Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem, pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, serta peningkatan sarana prasarana pendukung.	**E**	• Prinsip pengembangan wilayah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 adalah melakukan perencanaan dan pembangunan yang bertujuan untuk mendukung lokasi prioritas pengembangan wilayah yang diarahkan di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan Provinsi NTT dan dengan memperhatikan dan mempedomani arahan pola dan struktur ruang pada RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043 dalam semangat kerja kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan (*hexa helix*) yang berkelanjutan. Sedangkan yang bersifat lintas Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan akan tetap dilakukan pada 21 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi NTT.

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 dan Hasil olahan Tim Penyusun

3.2.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Kerangka Perumusan Program Prioritas RPJMD secara umum diturunkan dari penelaahan terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sehingga dapat diperoleh outcome, indikator yang bermuara pada pemilihan program- program prioritas daerah yang akan menjandi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun dokumen turunan selanjutnya. Secara umum, kerangka perumusan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat di lihat pada Gambar 3.2 di bawah ini.

Menunjuk amanat pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025- 2029. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh Belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Dengan demikian, pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 ditujukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur, yang menjabarkan makna Dasa Cita Ayo Bangun NTT dengan 5 Misi, 7 Pilar/Prioritas Pembangunan dan 10 Dasa Cita yang kemudian mengerucut pada pemilihan program – program prioritas pembangunan daerah. Pemetaan Misi, Prioritas Daerah/Pilar dan Dasa Cita Ayo Bangun NTT pada Tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.9 Pemetaan Misi, Pilar Pembangunan dan Dasa Cita

MISI	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
PILAR PEMBANGUNAN	**3,7**	**4,7**	**5,7**	**2,7**	**1,6,7**
DASA CITA	**7, 9,10**	**4,5,10**	**6,10**	**2,10**	**1,3,4,8,10**

MISI	**PILAR PEMBANGUNAN**	**DASA CITA**
Misi I Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)	**Pilar 3**: PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN **Pilar 7:** KOLABORASI	**Cita 7**: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera **Cita 9**: Membangun NTT Digital : Akses Merata, Komunikasi Lancar **Cita 10**: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama

MISI	PILAR PEMBANGUNAN	DASA CITA
Misi II Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT)	**Pilar 4**: KESEHATAN **Pilar 7:** KOLABORASI	**Cita 4**: Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk masyarakat. **Cita 5**: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting **Cita 10**: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama
Misi III Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS)	**Pilar 5:** PENDIDIKAN **Pilar 7:** KOLABORASI	**Cita 6**: Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi unggulan **Cita 10**: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama
Misi IV Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA)	**Pilar 2:** PEMBERDAYAAN KOMUNITAS **Pilar 7:** KOLABORASI	**Cita 2:** Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal **Cita 10**: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama
Misi V Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)	**Pilar 1:** EKONOMI BERKELANJUTAN **Pilar 6:** REFORMASI BIROKRASI DAN HAK AZASI MANUSIA **Pilar 7:** KOLABORASI	**Cita 1**: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman **Cita 3:** Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal **Cita 4**: Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk masyarakat **Cita 8:** Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin **Cita 10:** Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama

Adapun Pilar Pembangunan Daerah selama lima tahun ke depan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Pilar 1: Ekonomi Berkelanjutan**
   a. Memajukan sektor pertanian, Perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan berbasis potensi daerah;
   b. Mengakselerasi program penciptaan lapangan kerja dan wira usaha baru serta meningkatkan kapasitas wirausaha;
   c. Memperkaya ekowisata, geowisata, geopark, dan wisata budaya berbasis komunitas, menampilkan jati diri dan pesona NTT ke dunia;
   d. Memastikan seluruh Masyarakat NTT yang bekerja terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

2. **Pilar 2: Pemberdayaan Komunitas**
   a. Mengembangkan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal khususnya oleh anak muda milenial dan perempuan;

b. Menciptakan ekosistem yang mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis Potensi Desa;
c. Digitalisasi, kolaborasi dan revitalisasi koperasi menuju kemandirian ekonomi;
d. Optimalisasi dan penguatan kapasitas BUMDES untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.

3. Pilar 3: Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan

a. Membangun jalan, sumber daya air, air minum bersih,kelistrikan, dan rumah layak huni dengan partisipasi bersama melalui skema penerapan infrastruktur hijau dan biru (*green and blue infrastructure*), serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim;
b. Pembangunan infrastruktur digital untuk memperluas akses internet dan komunikasi;
c. Meningkatkan kualitas layanan transportasi publik guna meningkatkan konektivitas antar wilayah.

4. Pilar 4: Kesehatan

a. Pencegahan dan percepatan penurunan stunting dengan pendekatan hexahelix;
b. Penguatan infrastruktur di fasilitas layanan kesehatan;
c. Memastikan seluruh Masyarakat NTT sebagai peserta aktif BPJS;
d. Pemerataan distribusi dan peningkatan kualitas SDM Kesehatan;
e. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses.

5. Pilar 5: Pendidikan

a. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur Pendidikan berkualitas;
b. Insentif Pendidikan bagi siswa/mahasiswa berprestasi kurang mampu serta tenaga pendidik di daerah perifer;
c. Membangun sekolah vokasi unggulan berbasis potensi daerah;
d. Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk pembelajaran formal dan non formal;
e. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus.

6. Pilar 6: Reformasi Birokrasi Dan Hak Azasi Manusia

a. Mentransformasi pelayanan publik menjadi lebih transparan, efisien, professional proaktif dan melayani;
b. Memperkuat sumber pendapat daerah;
c. Meningkatkan kesejahteraan ASN sebagai salah satu penggerak ekonomi;
d. Meningkatkan keamanan daerah dan melindungi hak-hak Masyarakat khususnya kelompok rentan dengan partisipasi aktif Masyarakat dan kerja sama lintas sektor.

7. Pilar 7: Kolaborasi

a. Melibatkan dan mengoptimalkan kontribusi diaspora dan potensi Keluarga Besar NTT untuk membangun daerah
b. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh program pemerintah kabupaten/kota serta CSO/NGO untuk Pembangunan di Provinsi NTT
c. Mengoptimalkan penggunaan IPTEK, Riset dan Inovasi Daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan di Provinsi NTT.

Pemetaan Misi, Pilar Pembangunan dan Dasa Cita dapat dilihat pada Gambar 3.2 dan 3.3 di bawah ini. Dengan demikian terdapat 156 program prioritas pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029.

Kemudian, sesuai arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan turunannya, maka pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan menggunakan acuan ketentuan yang berlaku yang tertuang di dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) seperti pada Tabel 3.10.



Gambar 3.2 Pemetaan Misi, Pilar Pembangunan dan Dasa Cita

TRANSFORMASI NTT:

AYO BANGUN NTT

VISI

NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan

MISI	Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan demi mewujudkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah Yang Berdaya Saing (MAJU)	Memperluas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial yang Lebih Inklusif, Terjangkau, dan Mudah Diakses (SEHAT)	Menghadirkan Pendidikan Berkualitas Yang Merata, partisipatif, dan Tepat Sasaran (CERDAS)	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses, serta Kualitas Hidup yang Berkeadilan dan Madani bagi Seluruh Lapisan Masyarakat (SEJAHTERA)	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang Bijak serta Pemenuhan HAM untuk Menciptakan Masa Depan yang Inklusif (BERKELANJUTAN)
PROGRAM (7 PILAR)	**1 PILAR EKONOMI BERKELANJUTAN** A. Memajukan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan dan berbasis potensi daerah. B. Mengakselerasi program penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru serta meningkatkan kapasitas wirausaha. C. Memperkaya ekowisata, geowisata, geopark, dan wisata budaya berbasis komunitas, menampilkan jati diri dan pesona NTT ke dunia. D. Memastikan seluruh masyarakat NTT yang bekerja terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.	**2 PILAR PEMBERDAYAAN KOMUNITAS** A. Mengembangkan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal khususnya oleh anak muda milenial dan perempuan. B. Menciptakan ekosistem yang mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis potensi desa. C. Digitalisasi, kolaborasi dan refitalisasi koperasi menuju kemandirian ekonomi.	**3 PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN** A. Membangun jalan, sumber daya air, air minum bersih, kelistrikan dan rumah layak huni dengan partisipasi bersama, penerapan infrastruktur hijau dan biru (green and blue infrastructure), serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim. B. Pembangunan insfrastruktur digital untuk memperluas akses internet dan komunikasi. C. Meningkatkan kualitas layanan transportasi publik guna meningkatkan konektivitas antar wilayah.	**4 PILAR KESEHATAN** A. Pencegahan dan percepatan penurunan stunting dengan pendekatan hexahelix. B. Penguatan infrastruktur di fasilitas pelayanan kesehatan. C. Memastikan seluruh masyarakat NTT sebagai peserta aktif BPJS. D. Pemerataan distribusi dan peningkatan kualitas SDM kesehatan	**5 PILAR PENDIDIKAN** A. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur pendidikan berkualitas. B. Insentif pendidikan bagi siswa/mahasiswa berprestasi kurang mampu, serta tenaga pendidik di daerah perifer C. Membangun sekolah vokasi unggulan berbasis potensi daerah. D. Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk pembelajaran formal dan non-formal.	**6 PILAR REFORMASI BIROKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA** A. Mentransformasikan pelayanan publik menjadi lebih transparan, efisien, profesional, proaktif, dan melayani. B. Memperkuat sumber pendapatan daerah. C. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu penggerak ekonomi. D. Meningkatkan keamanan daerah dan melindungi hak-hak masyarakat khususnya kelompok rentan dengan partisipasi aktif masyarakat dan kerja sama lintas sektor.

7 PILAR KOLABORASI

A. Melibatkan dan mengoptimalkan kontribusi diaspora dan potensi "Keluarga Besar NTT" untuk membangun daerah.
B. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh program pemerintah Kabupaten/Kota serta CSO/NGO untuk pembangunan di Provinsi NTT

Gambar 3.3 Visi, Misi dan Pilar Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025-2029

Tabel 3.10 Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2029

VISI: NTT MAJU, SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
MISI 1: Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)				
Pilar 3: Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan dan Pilar 7 : Kolaborasi				
Tujuan 1.1 : Pemenuhan Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan				
Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya Kinerja Infrastruktur: Tersedianya infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum bersih,kelistrikan, dan rumah layak huni dengan partisipasi bersama melalui skema penerapan infrastruktur hijau dan biru (*green and blue infrastructure*), serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim				
a. Meningkatnya kualitas Infrastruktur Jalan dalam menunjang aksesibilitas wilayah				
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	PUPR
b. Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air				
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	PUPR
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir 2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		PUPR
Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI		DLHK
Meningkatnya tata kelola kegeologian	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas kabupaten/ Kota	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		DINAS ESDM

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
c. Terpenuhinya kebutuhan energi daerah				
Meningkatnya cakupan Pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	ESDM
Meningkatnya tata kelola baru terbarukan	Porsi EBT dalam bauran energi	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAN ENERGI BARU TERBARUKAN		
d. Tersedianya Rumah Layak Huni				
Meningkatnya Layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	PUPR
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		PUPR
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		PUPR
Meningkatnya Kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		
Meningkatnya Kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		PUPR
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		PUPR
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		PUPR

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni 2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		PUPR
Meningkatnya Kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	1.03.07 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		PUPR
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	PUPR
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Meningkatnya kualitas pembangunan Kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transrnigrasi yang Berkembang	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Meningkatnya Pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
e. Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya alam yang berkelanjutan melalui penerapan ekonomi hijau (*green economy*) dan ekonomi biru (*blue economy*)				
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	PUPR
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		DLHK
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		DLHK

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	DLHK
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup	Persentase Pembinaan Izin lingkungan	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		DLHK
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		DLHK
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		ESDM
f. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan yang resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim				
1. Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	BPBD
2. Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	2. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana			BPBD
3. Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	3. Persentase Penanganan Pasca Bencana			BPBD
1. Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	1. Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN,		SATPOL PP

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
2. Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2. Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Porsi EBT dalam bauran energi	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		ESDM
Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya daya saing antar wilayah				
Meningkatnya kualitas layanan Transportasi darat	1. Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi 2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	DINAS PERHUBUNGAN
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	1. Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi 2. Konektivitas Laut	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		DINAS PERHUBUNGAN
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKT DESA
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Tujuan 1.2 : Peningkatan akses dan Infrastruktur Digital				
Sasaran 1.2.1 : Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan teknologi digital untuk menunjang pelayanan publik dan aktivitas ekonomi				
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cita 9: Membangun NTT Digital : Akses Merata, Komunikasi Lancar	DINAS KOMINFO
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		DINAS KOMINFO
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi Penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		DPMPTSP
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		DPMPTSP
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
MISI 2: Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT)				
Pilar 4: Kesehatan dan Pilar 7: Kolaborasi				
Tujuan 2.1 : Pemenuhan pelayanan kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses				
Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses				
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting	DINAS KESEHATAN
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive* (mCPR) 2. Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		DP3AP2KB

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		DP3AP2KB
	2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)			
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		DP3AP2KB
Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		DINAS SOSIAL
Sasaran 2.1.2 : Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dengan pendekatan Pentahelix				
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting	DINAS KESEHATAN
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting	BAPPERIDA
Sasaran 2.1.3 : Penguatan Infrastruktur di Fasilitas Layanan Kesehatan				
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting	DINAS KESEHATAN
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		DINAS KESEHATAN

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Sasaran 2.1.4 : Meningkatnya cakupan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan untuk seluruh masyarakat NTT				
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stuntinga	DINAS DUKCAPIL
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL		DINAS DUKCAPIL
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DINAS DUKCAPIL
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		DINAS DUKCAPIL
Sasaran 2.1.5 : Pemerataan Distribusi dan Peningkatan Kualitas SDM				
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting	DINAS KESEHATAN

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
MISI 3: Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS)				
Pilar 5: Pendidikan dan Pilar 7: Kolaborasi				
Tujuan 3.1 : Pemenuhan SDM NTT yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran				
Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya aksesibilitas dan mutu Pendidikan yang inklusif dan holistik integratif				
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Presentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) 2. Presentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cita 6: Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi unggulan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1. Indeks Pemerataan Guru 2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cita 6: Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi unggulan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cita 6: Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi unggulan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Meningkatnya kapasitas SDM bidang kearsipan	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya	2.24.05 PROGRAM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	3. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		DP3AP2KB
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)			
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cita 6: Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi unggulan	DP3AP2KB
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	1. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/ TFR) 2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		DP3AP2KB
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		DP3AP2KB

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Tujuan 3.2 : Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah secara berkelanjutan				
Sasaran 3.2.1 : Mewujudkan integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam sistem pendidikan yang inklusif dan berkarakter dan Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan dalam rangka mendukung pariwisata				
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan 2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 2. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		BADAN KESBANGPOL
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		BADAN KESBANGPOL
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		BADAN KESBANGPOL

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal	BADAN KESBANGPOL
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		BADAN KESBANGPOL
MISI 4: Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA)				
Pilar 2 : Pemberdayaan Komunitas dan Pilar 7 : Kolaborasi				
Tujuan 4.1. Meningkatkan pemberdayaan komunitas yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing melalui penguatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, serta partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan guna menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan				
Sasaran 4.1.1. Meningkatnya pendapatan masyarakat, ketimpangan berkurang, dan kemiskinan menurun				
Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	1. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial 2. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan 3. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS 4. Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal	DINAS SOSIAL

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal	DINAS SOSIAL
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		DP3AP2KB
Sasaran 4.1.2. Meningkatnya ekosistem yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis potensi desa				
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal	DINAS KOPERASI DAN UMKM
Meningkatnya Promosi pelayanan modal	Persentase promosi penanaman modal	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		DPMPTSP
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi imvestasi sektor industi dan kawasan industri	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sasaran 4.1.3 Terwujudnya koperasi modern yang mandiri melalui transformasi digital, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi usaha				
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal	DINAS KOPERASI DAN UMKM
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		DINAS KOPERASI DAN UMKM
Meningkatnya Kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif dan berkinerja baik	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		DINAS KOPERASI DAN UMKM
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		DINAS KOPERASI DAN UMKM

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		DINAS KOPERASI DAN UMKM
Meningkatnya legalitas koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	2.17.09 PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI		DINAS KOPERASI DAN UMKM
Tujuan 4.2. Meningkatkan Kapasitas Perempuan dan Pemuda yang mandiri dan berdaya saing				
Sasaran 4.2.1 Meningkatnya partisipasi aktif seluruh masyarakat terutama perempuan dan kaum milenial dalam pengembangan ekonomi kreatif yang meningkatkan nilai tambah produk lokal				
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal	DP3AP2KB
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		DP3AP2KB
Sasaran 4.2.2.Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga NTT di Tingkat Nasional				
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Wirausaha Muda yang di Bina	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang di bina	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Misi 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)				
Pilar 1: Ekonomi Berkelanjutan, Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia dan Pilar 7: Kolaborasi				
Tujuan 5.1. Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan dan berbasis potensi daerah				
Sasaran 5.1.1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian				
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masvarakat	Skor Pola Pangan Harapan	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
Meningkatnya pengawasan mutu dan Keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		DINAS PETERNAKAN
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Peningkatan Produksi Hortikultura 3. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, M odern dan Aman	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Meningkatnya produksi Perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya Produksi perikanan budidava	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi lkan	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sasasan 5.1.2. Peningkatan daya saing dan keberlanjutan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan sebagai sektor unggulan yang berbasis potensi daerah				
Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	1. Kawasan Konservasi Daerah yang Operasional	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2. Jumlah Produksi Garam Rakyat			
Meningkatnya Produktivitas hasil hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		DLHK
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentasi sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan 2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	1. Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) 2. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		DLHK
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH		BAPPERIDA
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	1. Jumlah Kabupaten yang menetapkan LP2B.	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2. Persentase Peningkatan Jumlah Unit Pengolahan Hasil (UPH)			
Meningkatnya Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		DINAS PETERNAKAN
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian			

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Tujuan 5.2. Terwujudnya percepatan penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru serta peningkatan kapasitas wirausaha				
Sasaran 5.2.1. Meningkatnya kesempatan kerja yang merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat				
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kabupaten/ Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman	DINAS KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		DINAS KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
Sasaran 5.2.2. Meningkatnya wirausaha baru yang berdaya saing dan kapasitas usaha melalui penyediaan akses yang dapat dijangkau secara inklusif				
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 2. Pertumbuhan Wirausaha	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman	DINAS KOPERASI DAN UMKM
Meningkatnya Perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	2.18.03 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		DPMTSP
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya Kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Tujuan 5.3. Terwujudnya pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi lokal NTT				
Sasaran 5.3.1. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata NTT (detinasi, pemasaran, kelembagaan dan industri pariwisata) untuk berkontribusi pada peningkatan pendapatan dari Sektor Pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal				
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Meningkatnya Jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
Meningkatnya Kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Sasaran 5.3.2. Meningkatkan Kesejahteraan NTT melalui peningkatan usaha ekonomi kreatif				
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Meningkatnya Pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		DPMPTSP
Terkendalinya Pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		DPMPTSP
Meningkatnya efektivitas kerja sama penanaman modal	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL		DPMPTSP

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Tujuan 5.4. Terwujudnya Perlindungan Bagi Seluruh Tenaga Kerja NTT dalam BPJS Ketenagakerjaan				
Sasaran 5.4.1. Jaminan dan Perlindungan bagi tenaga kerja NTT, baik formal maupun non formal terutama tenaga kerja rentan.				
Meningkatanya Pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja Pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cita 4: Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk masyarakat	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya Realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Terlindunginya hak-hak pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		
Meningkatnya kualitas layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		DINAS SOSIAL
Tujuan 5.5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia				
Sasaran 5.5.1. Transformasi Pelayanan Publik menjadi lebih transparan, efisiensi, profesional, proaktif dan melayani				
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin	DINAS KOMINFO
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		DINAS KOMINFO
Sasaran 5.5.2. Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah				
Meningkatnya Kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin	DPMPTSP
Sasaran 5.5.3. Meningkatnya kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu pengerak ekonomi				
1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	1. Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan	BADAN KEPEGAWAIAN

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
2. Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	2. Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya		Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin	DAERAH
3. Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	3. Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya			
4. Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	4. Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik			
Sasaran 5.5.4. Meningkatnya perlindungan hak-hak masyarakat khususnya kelompok rentan dengan partisipasi aktif masyarakat dan kerja sama lintas sektor				
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin	BIRO KESRA
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		SATPOL PP
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat			
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya			
Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		DINAS SOSIAL
	3. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti			
	4. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti			
	5. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti 6. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti			

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kebijakan dan mencapai sasaran yang tertuang dalam RPJMD. Program pembangunan daerah disusun guna menggambarkan keterkaitan antar program perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang telah dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah;
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup;
5. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi; dan
6. Upaya untuk mendukung kegiatan prioritas utama yang menjadi prioritas nasional seperti tertuang di dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Rencana program perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode Tahun 2025 sampai dengan 2029 berjumlah 156 program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Sumber pendanaan program perangkat daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar daerah.

Dalam upaya mencapai pembangunan yang **holistik dan berkelanjutan**, setiap program perangkat daerah tidak dapat berdiri sendiri. Berbagai isu pembangunan bersifat ***cross-cutting***, artinya melintasi batas-batas sektor dan memerlukan pendekatan yang terkoordinasi serta terintegrasi antarperangkat daerah. Memahami dan mengimplementasikan narasi tematik cross-cutting isu menjadi krusial untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program, serta menghindari duplikasi dan fragmentasi kebijakan.

Pendekatan tematik ini mendorong perangkat daerah untuk **berpikir di luar kotak sektoral**. Ini berarti mengidentifikasi program dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan yang lebih luas, dan dapat berkolaborasi dengan perangkat daerah lain untuk mengatasi tantangan yang kompleks. Tanpa narasi tematik *cross-cutting*, perencanaan berisiko menciptakan program-program yang berjalan sendiri, dengan potensi konflik kepentingan, pemborosan sumber daya, dan dampak yang tidak optimal.

Berikut adalah beberapa isu *cross-cutting* dan keterkaitannya antarprogram perangkat daerah:

A. Isu GEDSI (*Gender Equality, Disability and Social Inclusion*)/Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial.

1) **Pendidikan:** Perangkat daerah pendidikan bertanggung jawab atas kurikulum, fasilitas, dan kualitas pengajaran.
2) **Kesehatan:** Perangkat daerah kesehatan memastikan gizi yang baik, imunisasi, dan akses layanan kesehatan untuk mendukung tumbuh kembang optimal.
3) **Tenaga Kerja:** Perangkat daerah tenaga kerja menghubungkan lulusan dengan pasar kerja dan memberikan pelatihan keterampilan yang relevan.
4) **Pemberdayaan Masyarakat:** Perangkat daerah terkait pemberdayaan dapat memfasilitasi program-program peningkatan kapasitas bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan.

B. Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat:

1) **Sosial:** Perangkat daerah sosial memberikan bantuan sosial, data kemiskinan, dan program jaring pengaman sosial.
2) **Koperasi dan UMKM**: Perangkat daerah terkait UMKM dan koperasi mengembangkan potensi ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja.
3) **Pertanian dan Ketahanan Pangan:** Perangkat daerah pertanian dan Ketahanan Pangan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian.
4) **Kelautan dan Perikanan:** Perangkat daerah Kelautan dan perikanan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil perikanan
5) **Infrastruktur:** Perangkat daerah pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat menyediakan akses dasar seperti air bersih, sanitasi, dan jalan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kesehatan.

C. Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim:

1) **Lingkungan Hidup:** Perangkat daerah lingkungan hidup merumuskan kebijakan perlindungan lingkungan, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam.
2) **Pertanian/Kehutanan:** Perangkat daerah terkait pertanian/kehutanan mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan dan pengelolaan hutan lestari.
3) **Pekerjaan Umum:** Perangkat daerah pekerjaan umum membangun infrastruktur yang tahan terhadap dampak perubahan iklim, seperti sistem drainase yang baik dan mitigasi bencana.
4) **Perencanaan Pembangunan**: Perangkat daerah perencanaan pembangunan mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dalam rencana tata ruang dan pembangunan daerah.

Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Provinsi NTT Tahun 2026-2030

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**1,709,254**		**1,709,254**		**1,709,254**		**1,709,254**		**1,709,254**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				**669,724**		**683,119**		**696,781**		**710,717**		**724,931**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1.1 Presentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	75.92	76.42		76.92		77.42		77.92		78.42		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.2 Presentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	54.35	54.85		55.35		55.85		56.35		56.85		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				**2,500**		**2,500**		**2,500**		**2,500**		**2,500**	
Outcomes: Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	50	53		60		65		70		80		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				**700**		**700**		**700**		**700**		**700**	
Outcomes: Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1.Indeks Pemerataan Guru	NA	0,440		0,500		0,525		0,610		0,700		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik - SMA - SMK	 22 21	 25 30		 30 40		 40 50		 50 60		 60 70		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				**450**		**450**		**450**		**450**		**450**	
Outcomes: Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**675.357.794.812**		**742.893.574.293**		**817.182.931.723**		**898.901.224.895**		**988.791.347.384**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Kesehatan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah													
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**326.053.340.726**		**358.658.674.799**		**394.524.542.278**		**433.976.996.506**		**442.656.536.436**	
Outcomes: Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	103.00	99.00		97.00		95.00		93.00		91.00		Dinas Kesehatan
	2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	37,9 (2023 SKI)	31,9		30,7		29,5		28,38		27,1		Dinas Kesehatan
	3. Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	35	40		43		45		48		50		Dinas Kesehatan
	4. Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	55	65		70		75		80		90		Dinas Kesehatan
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				**69.649.278.530**		**76.614.206.383**		**84.275.627.021**		**92.703.189.723**		**101.973.508.696**	
Outcomes: Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				**80.000.000**		**88.000.000**		**96.800.000**		**106.480.000**		**117.128.000.000**	
Outcomes: Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	50	50		50		50		50		50		Dinas Kesehatan
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				**69.320.000**		**76.252.000**		**83.877.200**		**92.264.920**		**101.491.412**	
Outcomes: Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	50	60		65		70		75		80		Dinas Kesehatan
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**53,202**		**53,202**		**53,202**		**53,202**		**53,202**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas PUPR

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				**15,596**		**15,596**		**15,596**		**15,596**		**15,596**	
Outcome 1.1: Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	50	60		65		70		75		80		Dinas PUPR
	2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	100	100		100		100		100		100		Dinas PUPR
	3. Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Dinas PUPR
Outcomes: Meningkatnya pemanfaatan Air baku dan meningkatnya dukungan terhadap pencapaian swasembada pangan	Persentase Peningkatan pemanfaatan air baku	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Dinas PUPR

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				**24,748**		**24,748**		**24,748**		**24,748**		**24,748**	
Outcome 2.1: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota	NA	20		100		100		100		100		Dinas PUPR
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				**1,416**		**1,416**		**1,416**		**1,416**		**1,416**	
Outcome 3.1: Meningkatnya Layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	100	100		100		100		100		100		Dinas PUPR
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				**1,752**		**1,752**		**1,752**		**1,752**		**1,752**	
Outcome 4.1: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	35	36		38		39		40		42		Dinas PUPR

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				**1,334**		**1,334**		**1,334**		**1,334**		**1,334**	
Outcome 5.1: Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	NA	45		45		45		45		45		Dinas PUPR
1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				**5,800**		**5,800**		**5,800**		**5,800**		**5,800**	
Outcome 6.1: Meningkatnya Kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	NA	85		85		85		85		85		Dinas PUPR
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				**552**		**552**		**552**		**552**		**552**	
Outcome 7.1: Meningkatnya Kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	NA	85		85		85		85		85		Dinas PUPR
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				**250**		**250**		**250**		**250**		**250**	
Outcome 8.1: Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	NA	40		40		40		40		40		Dinas PUPR

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				**42,883**		**43,741**		**44,616**		**45,508**		**46,418**	
Outcome 9.1: Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Kemantapan Jalan	70	73		78		83		88		93		Dinas PUPR
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				**1,375**		**1,375**		**1,375**		**1,375**		**1,375**	
Outcome 10.1: Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	NA	35		35		35		35		35		Dinas PUPR
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				**800**		**800**		**800**		**800**		**800**	
Outcome 11.1: Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	100	100		100		100		100		100		Dinas PUPR
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				**10,147**		**10,147**		**10,147**		**10,147**		**10,147**	
Outcome 1.1: Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga	1. Persentase Warga Negara Korban	100	100		100		100		100		100		Dinas PUPR

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni												
	2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumahyang Lavak Huni	100	100		100		100		100		100		Dinas PUPR
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				**4,306**		**4,306**		**4,306**		**4,306**		**4,306**	
Outcome 1.1: Meningkatnya Kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	NA	100		100		100		100		100		Dinas PUPR
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				**21,288**		**21,288**		**21,288**		**21,288**		**21,288**	
Outcome 1.1: Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi	100	100		100		100		100		100		Dinas PUPR

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)												
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**14,349**		**14,349**		**14,349**		**14,349**		**14,349**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		SatpolPP
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**812**		**812**		**812**		**812**		**812**	
Outcomes: 1.Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100	100		100		100		100		100		SatpolPP
2.Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100	100		100		100		100		100		SatpolPP
3.Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	25	30		35		40		45		50		SatpolPP

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**7,014**		**7,014**		**7,014**		**7,014**		**7,014**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		BPBD
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				**4,324**		**4,410**		**4,498**		**4,588**		**4,680**	BPBD
Outcomes: 1. Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100	100		100		100		100		100		BPBD
2. Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	100		100		100		100		100		BPBD
3. Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100	100		100		100		100		100		BPBD
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				**2,500**		**2,500**		**2,500**		**2,500**		**2,500**	
Outcomes: 1. Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100	100		100		100		100		100		SatpolPP

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	100		100		100		100		100		SatpolPP
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**26,042**		**26,042**		**26,042**		**26,042**		**26,042**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Sosial
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				**1,393**		**1,421**		**1,450**		**1,479**		**1,508**	
Outcomes: Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	1. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	NA	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	2. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan	NA	100		100		100		100		100		Dinas Sosial

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	3. Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	NA	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	4. Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	NA	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				**192**		**196**		**200**		**204**		**208**	
Outcomes: Meningkatnya kualitas layanan	Persentase Warga Negara Migran Korban	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Tindak Kekerasan yang Tertangani												
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				**17,759**		**18,114**		**18,476**		**18,846**		**19,223**	
Outcomes: Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				**5,174**		**5,277**		**5,383**		**5,491**		**5,600**	
Outcomes: Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA				**1,302**		**1,302**		**1,302**		**1,302**		**1,302**	
Outcomes: Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				**161**		**165**		**168**		**171**		**175**	
Outcomes: Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**19,121**		**19,121**		**19,121**		**19,121**		**19,121**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Ketenaga

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah													kerjaan dan Transmigrasi
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				**750**		**750**		**750**		**750**		**750**	
Outcome 1.1: Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	NA	10		20		30		40		50		Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				**650**		**650**		**650**		**650**		**650**	
Outcome 1.1: Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	NA	50		60		70		80		90		Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				**360**		**360**		**360**		**360**		**360**	
Outcome 1.1: Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan pencari kerja di pasar kerja	85,97	86		87		88		89		90		Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				**11,091**		**11,313**		**11,539**		**11,770**		**12,005**	
Outcome 1.1: Meningkatanya	Persentase perusahaan yang	20,79	21		22		23		24		25		Ketenaga kerjaan dan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pekerja Indonesia yang terlindungi	membentuk sarana hubungan industrial												Transmigrasi
2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				**150**		**150**		**150**		**150**		**150**	
Outcome 1.1: Terlindunginya hak-hak pekerja	Persentase perusahaan yang melaksanakan norma kerja	50	51		52		53		54		55		Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**14,236**		**14,236**		**14,236**		**14,236**		**14,236**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		DP3AP2KB
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				**520**		**572**		**630**		**692**		**762**	
Outcomes: Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1. Persentase Perangkat Darah yang melaksanakan strategi PUG	95	100		100		100		100		100		DP3AP2KB
	2. Persentase kelompok perempuan atau lembaga yang	N.A	18		45		68		82		100		DP3AP2KB

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	terfasilitasi pemberdayaan dalam bidang pembangunan yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, IPTEK, sosial budaya, politik, hukum dan lingkungan hidup												
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				**2.649**		**2.914**		**3.205**		**3.526**		**3.879**	
Outcomes: Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100		100		100		100		100		DP3AP2KB
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				**700**		**770**		**847**		**932**		**1.024**	
Outcomes: Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Kolaborasi stakeholder dalam pembentukan dan peningkatan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga	NA	18		36		54		77		100		DP3AP2KB

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(Puspaga) untuk wujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak												
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				**253**		**278**		**306**		**336**		**370**	
Outcomes: Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	100	100		100		100		100		100		DP3AP2KB
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				**1.002**		**1.102**		**1.213**		**1.334**		**1.467**	
Outcomes: Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	52,03	55		60		65		70		75		DP3AP2KB
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				**2.071**		**2.278**		**2.506**		**2.756**		**3.032**	
Outcomes: Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran,	1.Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan	100	100		100		100		100		100		DP3AP2KB

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Layanan Komperhensif												
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				**2,318**		**2,365**		**2,412**		**2,460**		**2,509**	
Outcome 1.1: Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masvarakat	Skor Pola Pangan Harapan	72,38	73,5		74		74,5		75		75,5		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				**800**		**800**		**800**		**800**		**800**	
Outcome 1.1: Meningkatnya penanganan kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	16,83	16,5		16		15,5		15		14,5		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				**400**		**400**		**400**		**400**		**400**	
Outcome 1.1: Meningkatnya pengawasan mutu dan Keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	42	78		78,5		79		79,5		80		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM				**185**		**185**		**185**		**185**		**185**	
Outcomes: Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	NA	100		100		100		100		100		Dinas PUPR
2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE													
Outcomes: Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek *Landreform* (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	...	...		...		...		...		...		Outcomes: Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT				**250**		**250**		**250**		**250**		**250**	
Outcomes: Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	35	40		45		50		55		60		Dinas PUPR
2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				**50**		**50**		**50**		**50**		**50**	
Outcomes: Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	10	50		60		70		85		100		Dinas PUPR
2.10.17 PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN													
Outcomes: Meningkatnya penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	N.A	...		...		...		...		...		Dinas PUPR
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**91,928**		**91,928**		**91,928**		**91,928**		**91,928**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				**250**		**250**		**250**		**250**		**250**	
Outcome 1.1: Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				**1,003**		**1,003**		**1,003**		**1,003**		**1,003**	
Outcome 1.1: Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air	56,59	71,30		71,50		71,70		71,90		72,10		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2. Indeks kualitas udara	92,3	89,23		89,43		89,63		89,83		90,03		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3. Indeks Kualitas Air Laut	84,08	84,20		84,25		84,30		84,35		84,40		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	59,63	70,82		70,89		70,96		71,03		71,10		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				**152**		**152**		**152**		**152**		**152**	
Outcome 1.1: Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				**500**		**500**		**500**		**500**		**500**	
Outcome 1.1: Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup	Persentase Pembinaan Izin lingkungan	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**9,020**		**9,020**		**9,020**		**9,020**		**9,020**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Dukcapil
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				**510**		**520**		**531**		**541**		**552**	
Outcomes: Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1.Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	N.A	25		50		65		85		95		Dinas Dukcapil
	2.Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	N.A	25		50		65		85		95		Dinas Dukcapil
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL				**1,029**		**1,050**		**1,071**		**1,092**		**1,114**	
Outcomes: Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100		100		100		100		100		Dinas Dukcapil
	2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100		100		100		100		100		Dinas Dukcapil

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100		100		100		100		100		Dinas Dukcapil
	4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100		100		100		100		100		Dinas Dukcapil
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				**600**		**600**		**600**		**600**		**600**	
Outcomes: Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100	100		100		100		100		100		Dinas Dukcapil
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				**500**		**500**		**500**		**500**		**500**	
Outcomes: Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100		100		100		100		100		Dinas Dukcapil
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**9,487**		**9,487**		**9,487**		**9,487**		**9,487**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kinerja Perangkat Daerah													dan Desa
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA				**1,136**		**1,136**		**1,136**		**1,136**		**1,136**	
Outcomes: Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				**500**		**500**		**500**		**500**		**500**	
Outcomes: Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				**425**		**425**		**425**		**425**		**425**	
Outcomes: Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1.Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N.A	35		36		37		39		40		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	N.A	35		36		37		39		40		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				**32,825**		**33,482**		**34,152**		**34,835**		**35,531**	
Outcomes: Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	1.Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	N.A	35		36		37		39		40		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	N.A	35		36		37		39		40		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				**212**		**233**		**256**		**282**		**314**	
Outcomes: Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	1.Angka Kelahiran Total (Total *Fertility Rate*/ TFR)	2,71	2.67		2.63		2.60		2.56		2.53		DP3AP2KB
	2.Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility* Rate/ASFR 15 19)	21,5	21,0		20,8		20,4		20,2		21,5		DP3AP2KB

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				**406**		**447**		**492**		**541**		**595**	
Outcomes: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.Proprosi Kebutuhan BerKB yang terpenuhi	62,6	64,6		65,6		66,6		67,3		68,7		DP3AP2KB
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				**402**		**442**		**487**		**535**		**589**	
Outcomes: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	N.A	50		50		50		50		50		DP3AP2KB
	2. Indeks Lansia Berdaya	58,8	59,6		59,9		60,3		60,7		61,0		DP3AP2KB
	3. Indeks Pengasuhan Remaja	80,6	83,6		84,7		85,8		86,9		87,9		DP3AP2KB
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**40,535**		**40,535**		**40,535**		**40,535**		**40,535**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Perhubungan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kinerja Perangkat Daerah													
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				**9,627**		**9,627**		**9,627**		**9,627**		**9,627**	
Outcome 1.1: Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	2,457	2,478		2,478		2,500		2,500		2,522		Dinas Perhubungan
	2. Rasio Konektivitas Kab/Kota	0,132	0,135		0,137		0,140		0,141		0,144		Dinas Perhubungan
	3. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang Terhadap Kondisi Ideal	0,58	0,68		0,78		0,88		0,98		1,08		Dinas Perhubungan
	4. V/C Rasio di Jalan Provinsi	0,406	0,404		0,403		0,402		0,401		0,400		Dinas Perhubungan
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				**17,021**		**17,021**		**17,021**		**17,021**		**17,021**	
Outcome 1.1: Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	1. Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	3,000	3,074		3,111		3,148		3,185		3,222		Dinas Perhubungan
	2. Rasio Konektivitas Kab/Kota	0,205	0,208		0,211		0,213		0,216		0,219		Dinas Perhubungan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	3. Konektivitas Laut	11,670	12,830		12,830		14,670		14,670		14,670		Dinas Perhubungan
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**9,745**		**9,745**		**9,745**		**9,745**		**9,745**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Kominfo
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				**1,743**		**1,778**		**1,814**		**1,850**		**1,887**	
Outcomes: Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	75	80		85		90		95		100		Dinas Kominfo
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				**5,888**		**6,006**		**6,126**		**6,248**		**6,373**	
Outcomes: Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE/ Indeks Pemerintahan Digital	3,87/	3,89/1,7		3.91/1,7		3.95/1,9		4,0/1,9		4,1/2		Dinas Kominfo

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**7,814**		**7,814**		**7,814**		**7,814**		**7,814**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Koperasi dan UMKM
2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
Outcome 1.1: Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	0,11	3.56		3.64		3.72		3.80		3.88		Dinas Koperasi dan UMKM
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				**3,009**		**3,069**		**3,131**		**3,193**		**3,257**	
Outcome 1.1: Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	50	65		70		75		80		90		Dinas Koperasi dan UMKM
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				**50**		**50**		**50**		**50**		**50**	
Outcome 1.1: Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif dan berkinerja baik	77,81	75.00		77.00		80.00		81.00		85.00		Dinas Koperasi dan UMKM

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				**400**		**400**		**400**		**400**		**400**	
Outcome 1.1: Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	77,81	75.00		77.00		80.00		81.00		85.00		Dinas Koperasi dan UMKM
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				**1,025**		**1,025**		**1,025**		**1,025**		**1,025**	
Outcome 1.1: Meningkatnya Produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	77,81	75.00		77.00		80.00		81.00		85.00		Dinas Koperasi dan UMKM
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				**286**		**292**		**298**		**304**		**310**	
Outcome 1.1: Meningkatnya kapasitas UMKM yangtangguh dan mandiri	1. Persentase usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	10	15		20		25		30		35		Dinas Koperasi dan UMKM
	2. Pertumbuhan Wira usaha	5,5	6,0		6,5		7,5		8		9		Dinas Koperasi dan UMKM
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				**1,025**		**1,025**		**1,025**		**1,025**		**1,025**	
Outcome 1.1: Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan	N.A	10		15		20		25		30		Dinas Koperasi dan UMKM

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.17.09 PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI				**50**		**50**		**50**		**50**		**50**	
Outcome 1.1: Meningkatnya legalitas koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	70	75.00		77.00		80.00		81.00		85.00		Dinas Koperasi dan UMKM
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**8,410**		**8,410**		**8,410**		**8,410**		**8,410**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				**266**		**271**		**277**		**282**		**288**	
Outcome 1.1: Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Jumlah Investor yang Berinvestasi mMeningkat	17,27	10		10		10		10		10		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				**250**		**255**		**260**		**265**		**270**	
Outcome 1.1: Meningkatnya Promosi pelayanan modal	Persentase promosi penanaman modal	N.A	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				**650**		**650**		**650**		**650**		**650**	
Outcome 1.1: Meningkatnya Perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase izin dan nonizin yang diterbitkan sesuai ketentuan (SOP)	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				**316**		**323**		**329**		**336**		**342**	
Outcome 1.1: Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Tingkat kepatuhan pelaku usaha menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal sesuai Ketentuan	59,86	75,86		83,86		91,86		99,86		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				**175**		**175**		**175**		**175**		**175**	
Outcome 1.1: Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	93,23	96		97		98		99		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL				**50**		**50**		**50**		**50**		**50**	
Outcome 1.1: Meningkatnya efektivitas kerja sama penanaman modal	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**12,886**		**12,886**		**12,886**		**12,886**		**12,886**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				**15,850**		**15,850**		**15,850**		**15,850**		**15,850**	
Outcomes: Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Wirausaha Muda yang di Bina	17	33		50		67		83		100		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				**26,461**		**26,461**		**41,461**		**24,061**		**24,061**	
Outcomes: Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang di bina	100	100		100		100		100		100		Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				**1,148**		**1,148**		**1,148**		**1,148**		**1,148**	
Outcomes: Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	100		100		100		100		100		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				**301**		**301**		**301**		**301**		**301**	
Outcomes: Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,1	2,4		2,8		3,1		3,5		4		Dinas Kominfo
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				**311**		**311**		**311**		**311**		**311**	
Outcomes: Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat 1	Tingkat 2		Tingkat 2		Tingkat 3		Tingkat 4		Tingkat 5		Dinas Kominfo

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**1,010**		**1,010**		**1,010**		**1,010**		**1,010**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				**2,701**		**2,701**		**2,701**		**2,701**		**2,701**	
Outcomes: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	50	55		65		70		75		80		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				**5,215**		**5,319**		**5,425**		**5,534**		**5,644**	
Outcomes: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	50	55		65		70		75		80		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				**500**		**500**		**500**		**500**		**500**	
Outcomes: Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	50	55		65		70		75		80		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				**646**		**659**		**672**		**686**		**699**	
Outcomes: Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	1.Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	50	55		65		70		75		80		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang	50	55		65		70		75		80		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				**3,440**		**3,508**		**3,579**		**3,650**		**3,723**	
Outcomes: Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	50	55		65		70		75		80		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**10,378**		**10,378**		**10,378**		**10,378**		**10,378**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				**3,938**		**4,017**		**4,097**		**4,179**		**4,263**	
Outcomes: Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	67,81	71,51		74,27		78,91		81,95		88,70		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Nasional Perpustakaan													
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				**150**		**150**		**150**		**150**		**150**	
Outcomes: Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	NA	10		10		10		10		10		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				**448**		**448**		**448**		**448**		**448**	
Outcomes: Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	50	55		60		65		70		80		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				**120**		**120**		**120**		**120**		**120**	
Outcomes: Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100	100		100		100		100		100		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**23,377**		**23,377**		**23,377**		**23,377**		**23,377**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Kelautan dan Perikanan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				**343**		**343**		**343**		**343**		**343**	
Outcome 1.1: Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Kawasan konservasi daerah yang operasional	4 KKPD	1		2		3		4		4		Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah Produksi Garam Rakyat (Ton)	15.794	9.000		11.000		13.000		15.000		17.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				**31,305**		**31,305**		**31,305**		**31,305**		**31,305**	
Outcome 1.1: Meningkatnya produksi Perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	95.149**	95.650		96.000		97.000		98.000		99.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				**151**		**151**		**151**		**151**		**151**	
Outcome 1.1: Meningkatnya Produksi perikanan Budidava	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.415.498**	1.450.000		1.482.000		1.485.000		1.490.000		1.493.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				**706**		**706**		**706**		**706**		**706**	
Outcome 1.1: Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman havati	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	87,30	89		92		95		98		100		Dinas Kelautan dan Perikanan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				**76**		**76**		**76**		**76**		**76**	
Outcome 1.1: Meningkatnya konsumsi ikan oleh rnasvarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/ Tahun)	51,08 **	53		55		56		57		58		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**11,871**		**11,871**		**11,871**		**11,871**		**11,871**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				**2,422**		**2,422**		**2,422**		**2,422**		**2,422**	
Outcome 1.1: Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	25	27		30		32		35		40		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				**1,494**		**1,524**		**1,554**		**1,585**		**1,617**	
Outcome 1.1: Meningkatnya Jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	50	55		60		65		70		75		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				**700**		**700**		**700**		**700**		**700**	
Outcome 1.1: Meningkatnya Kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	5	10		15		20		25		30		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				**4,029**		**4,110**		**4,192**		**4,276**		**4,361**	
Outcome 1.1: Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	30	50		60		75		80		95		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**32,941**		**32,941**		**32,941**		**32,941**		**32,941**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Peternakan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				**5,435**		**5,435**		**5,435**		**5,435**		**5,435**	
Outcome 1.1: Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	25	30		35		40		45		50		Dinas Peternakan
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**62,729**		**62,729**		**62,729**		**62,729**		**62,729**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				**3,857**		**3,857**		**3,857**		**3,857**		**3,857**	
Outcome 1.1: Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0,5	1,53		2,31		3,09		3,88		4,68		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2. Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	0,5	2,13		3,21		4,31		5,42		6,54		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3. Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	0,01	0,05		0,07		0,10		0,12		0,15		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				**3,474**		**3,474**		**3,474**		**3,474**		**3,474**	
Outcome 1.1: Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana peternakan	1. Persentase peningkatan prasarana ternak yang memenuhi standar	80	81		82		83		84		85		Dinas Peternakan
	2. Persentase peningkatan jumlah UPH yang termanfaatkan	N.A	1,50		2,00		2,50		3,00		3,50		Dinas Peternakan
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				**280**		**280**		**280**		**280**		**280**	
Outcome 1.1: Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	1. Jumlah Kabupaten yang Menetapkan LP2B	8	8		9		9		10		10		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2. Persentase Peningkatan Jumlah UPH yang termanfaatkan (%)	N.A	1,50		2,00		2,50		3,00		3,50		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				**846**		**846**		**846**		**846**		**846**	
Outcome 1.1: Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan	100	100		100		100		100		100		Dinas Peternakan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
dan kesehatan masyarakat veteriner	Menular Strategis (PHMS)												
	2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	50	60		65		70		75		100		Dinas Peternakan
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				**600**		**600**		**600**		**600**		**600**	
Outcome 1.1: Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian	75	75		75		75		75		75		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	75	75		75		75		75		75		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				**9,444**		**9,633**		**9,826**		**10,022**		**10,222**	
Outcome 1.1: Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	30	30		30		30		30		30		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**545**		**545**		**545**		**545**		**545**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				**3,558**		**3,558**		**3,558**		**3,558**		**3,558**	
Outcome 1.1: Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	0,87	0,88		0,89		0,90		0,92		0,95		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				**77**		**77**		**77**		**77**		**77**	
Outcome 1.1: Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati	0,3	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				**6,851**		**6,988**		**7,128**		**7,270**		**7,416**	
Outcome 1.1: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di	1. Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	35	40		40		40		40		40		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
bidang kehutanan	2. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	35	40		40		40		40		40		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)				**500**		**500**		**500**		**500**		**500**	
Outcome 1.1: Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai	Persentase Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dipulihkan (%)	NA	0,025		0,050		0,075		0,100		0,125		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL													
3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**15,113**		**15,113**		**15,113**		**15,113**		**15,113**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas ESDM
3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**				**536**		**536**		**536**		**536**		**536**	
Outcome 1.1: Meningkatnya tata kelola kegeologian	1. Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas kabupaten/ Kota	NA	NA		NA		NA		NA		NA		Dinas ESDM

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2. Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/ Kota	NA	NA		NA		NA		NA		NA		Dinas ESDM
3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**				**1,364**		**1,364**		**1,364**		**1,364**		**1,364**	
Outcomes 1.1. meningkatnya tata kelola mineral dan batubara	1. Luas WPR yang diusulkan Pemerintah Daerah 2. Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR	NA	NA		NA		NA		NA		NA		Dinas ESDM
3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN				**785**		**785**		**785**		**785**		**785**	
Outcome 1.1: Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi	19,05	25,19		28,26		31,33		34,4		37,47		Dinas ESDM
3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				**2,610**		**2,610**		**2,610**		**2,610**		**2,610**	
Outcome 1.1: Meningkatnya cakupan Pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi	96,35	97,81		98,54		99,27		100		100		Dinas ESDM

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**13,017**		**13,017**		**13,017**		**13,017**		**13,017**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Perindustrian dan perdagangan
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				**25**		**25**		**25**		**25**		**25**	
Outcome 1.1: Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100	100		100		100		100		100		Dinas Perindustrian dan perdagangan
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				**25**		**25**		**25**		**25**		**25**	
Outcome 1.1: Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang vang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100	100		100		100		100		100		Dinas Perindustrian dan perdagangan
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				**632**		**632**		**632**		**632**		**632**	
Outcome 1.1: Meningkatnya kelancaran	Persentase Stabilisasi Harga Barang	100	100		100		100		100		100		Dinas Perindustrian dan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting												perdagangan
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				**500**		**500**		**500**		**500**		**500**	
Outcome 1.1: Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi Ekspor	Nilai Ekspor Barang	NA	60		65		70		85		90		Dinas Perindustrian dan perdagangan
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				**526**		**536**		**547**		**558**		**569**	
Outcome 1.1: Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100	100		100		100		100		100		Dinas Perindustrian dan perdagangan
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				**60**		**60**		**60**		**60**		**60**	
Outcome 1.1: Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	100	100		100		100		100		100		Dinas Perindustrian dan perdagangan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				**2,033**		**2,073**		**2,115**		**2,157**		**2,200**	
Outcome 1.1: Meningkatnya Realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri	50	55		60		65		68		70		Dinas Perindustrian dan perdagangan
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				**50**		**50**		**50**		**50**		**50**	
Outcome 1.1: Meningkatnya Kualitas perizinan berusaha sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	100	100		100		100		100		100		Dinas Perindustrian dan perdagangan
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				**500**		**500**		**500**		**500**		**500**	
Outcome 1.1: Meningkatnya pemanfaatan informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	100	100		100		100		100		100		Dinas Perindustrian dan perdagangan
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													
3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				**500**		**500**		**500**		**500**		**500**	
Outcome 1.1: Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	100	90		93		95		97		100		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				**2,749**		**2,804**		**2,860**		**2,917**		**2,975**	
Outcome 1.1: Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Kawasan Transrnigrasi yang difasilitasi pembangunannya	100	90		93		95		97		100		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				**1,127**		**1,150**		**1,173**		**1,196**		**1,220**	
Meningkatnya Pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya	95,45	96		97		98		99		100		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4.01 SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM ADMINISTRASI UMUM				**105,536**		**105,536**		**105,536**		**105,536**		**105,536**	Sekretariat Daerah/Biro Umum
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Sekretariat Daerah/Biro Umum
Outcomes 1.2:	Persentase pelayanan terhadap KDH,	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah/Biro Umum

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	WKDH dan Sekretariat Daerah												
	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan dan sekretariat daerah	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah/Biro Umum
4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				**1,093**		**1,093**		**1,093**		**1,093**		**1,093**	Sekretariat Daerah/Biro Organisasi
Outcomes: Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Nilai)	30	34		38		42		46		50		
4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				**1,062**		**1,062**		**1,062**		**1,062**		**1,062**	Sekretariat Daerah/Biro Pemerintahan
Outcomes: Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	1. Efektivitas Kerja Sama Daerah 2.Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100		100		100		100		100		
4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				**11,988**		**12,228**		**12,472**		**12,722**		**12,976**	Sekretariat Daerah/Biro Pemerintahan
Outcomes: Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	100		100		100		100		100		

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				**1,015**		**1,015**		**1,015**		**1,015**		**1,015**	Sekretariat Daerah/Biro Hukum
Outcomes: Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	100	100		100		100		100		100		
4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				**854**		**854**		**854**		**854**		**854**	Sekretariat Daerah/Biro Ekonomi
Outcomes: Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	100	100		100		100		100		100		
4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				**5,527**		**5,638**		**5,751**		**5,866**		**5,983**	Sekretariat Daerah/Biro PBJ
Outcomes: Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	73.18	80		85		90		95		100		
4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				**249**		**249**		**249**		**249**		**249**	Sekretariat Daerah/Biro Ekonomi
Outcomes: Meningkatnya kualitas kebijakan administari pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	100	100		100		100		100		100		

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.02 SEKRETARIAT DPRD													
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				**88,678**		**88,678**		**88,678**		**88,678**		**88,678**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Sekretatiat DPRD
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				**88,503**		**88,503**		**88,503**		**88,503**		**88,503**	Sekretatiat DPRD
Outcomes: 1.Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang undangan	1.Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100	100		100		100		100		100		Sekretatiat DPRD
	2.Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100	100		100		100		100		100		Sekretatiat DPRD
2. Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100		100		100		100		100		Sekretatiat DPRD
5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5.01 PERENCANAAN													
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				**17,247**		**17,247**		**17,247**		**17,247**		**17,247**	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Bapperida

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				**3,519**		**3,519**		**3,519**		**3,519**		**3,519**	Bapperida
Outcomes: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1.Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	100		100		100		100		100		Bapperida
	2.Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100	100		100		100		100		100		Bapperida
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				**3,945**		**3,945**		**3,945**		**3,945**		**3,945**	Bapperida
Outcomes: 1.Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100		100		100		100		100		Bapperida
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100		100		100		100		100		Bapperida

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	100		100		100		100		100		Bapperida
5.02 KEUANGAN													
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				**21,843**		**21,843**		**21,843**		**21,843**		**21,843**	Badan Keuangan Daerah
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Badan Keuangan Daerah
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				**1,754,292**		**1,511,510**		**1,571,897**		**2,114,098**		**2,011,619**	Badan Keuangan Daerah
Outcomes: 1. Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan perundangan	100	100		100		100		100		100		Badan Keuangan Daerah
2. Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase pelayanan dokumen penatausahana keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	100		100		100		100		100		Badan Keuangan Daerah

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3. Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		Badan Keuangan Daerah
4. Meningkatnya pembinaan keuangan kabupaten/kota	Persentase fasilitasi penyediaan dokumen anggaran kabupaten/kota sesuai ketentuan perundangan	100	100		100		100		100		100		Badan Keuangan Daerah
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				**107,302**		**107,302**		**107,302**		**107,302**		**107,302**	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				**4,575**		**4,575**		**4,575**		**4,575**		**4,575**	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Outcomes: Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap												Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				**22,750**		**22,750**		**22,750**		**22,750**		**22,750**	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Outcomes: 1. Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	36,27	37		38		40		45		50		Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2. Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	100	100		100		100		100		100		Badan Pendapatan dan Aset Daerah
3. Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100	100		100		100		100		100		Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5.03 KEPEGAWAIAN													
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				**10,125**		**10,125**		**10,125**		**10,125**		**10,125**	Badan Kepegawaian Daerah
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Badan Kepegawaian Daerah
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				**3,685**		**3,685**		**3,685**		**3,685**		**3,685**	Badan Kepegawaian Daerah
Outcomes: 1.Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	100	100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian Daerah
2.Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	50	65		75		80		85		90		Badan Kepegawaian Daerah

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	50	65		75		80		85		90		Badan Kepegawaian Daerah
4.Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Meningkatkan Kualitas Penilaian Kinerja dan Disiplin ASN	85	90		100		100		100		100		Badan Kepegawaian Daerah
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				**16,205**		**16,205**		**16,205**		**16,205**		**16,205**	BPSDM
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		BPSDM
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				**13,888**		**13,888**		**13,888**		**13,888**		**13,888**	BPSDM
Outcomes: 1. Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	50	65		75		80		85		90		BPSDM
2.Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	100	100		100		100		100		100		BPSDM

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3. Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	50	65		75		80		85		90		BPSDM
4. Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	50	65		75		80		85		90		BPSDM
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				**1,815**		**1,815**		**1,815**		**1,815**		**1,815**	Bapperida
Outcomes: 1.Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	100	100		100		100		100		100		Bapperida
2. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	100	100		100		100		100		100		Bapperida

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	100	100		100		100		100		100		Bapperida
4. Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	100	100		100		100		100		100		Bapperida
5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				**200**		**200**		**200**		**200**		**200**	Bapperida
Outcomes: 1. Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	100	100		100		100		100		100		Bapperida
2. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	100	100		100		100		100		100		Bapperida

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	100	100		100		100		100		100		Bapperida
4. Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	100	100		100		100		100		100		Bapperida
5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN													
5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				**6,361**		**6,361**		**6,361**		**6,361**		**6,361**	Badan Pengelola Perbatasan
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Badan Pengelola Perbatasan
5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN				**1,200**		**1,200**		**1,200**		**1,200**		**1,200**	Badan Pengelola Perbatasan
Outcomes: 1.Meningkatnya Koordinasi Fasilitasi pemanfaatan kawasan perbatasan	1.Cakupan koordinasi, faslitasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	100	100		100		100		100		100		Badan Pengelola Perbatasan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2. Meningkatnya Pengamanan Batas Wilayah	1.Cakupan Layanan Batas Wilayah Negara	100	100		100		100		100		100		Badan Pengelola Perbatasan
5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG													
5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				**9,839**		**9,839**		**9,839**		**9,839**		**9,839**	Badan Penghubung
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Badan Penghubung
5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				**1,553**		**1,553**		**1,553**		**1,553**		**1,553**	Badan Penghubung
Outcomes:	1.Persentase peningkatan cakupan layanan pemerintah daerah dan KL	100	100		100		100		100		100		Badan Penghubung
	2.Persentase peningkatan pembinaan masyarakat	100	100		100		100		100		100		Badan Penghubung
	3.Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas promosi daerah	100	100		100		100		100		100		Badan Penghubung

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6.01 INSPEKTORAT DAERAH													
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				**14,977**		**14,977**		**14,977**		**14,977**		**14,977**	Inpektorat Daerah
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Inpektorat Daerah
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				**11,876**		**11,876**		**11,876**		**11,876**		**11,876**	Inpektorat Daerah
Outcomes: Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Objek Pemeriksaan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	100	100		100		100		100		100		Inpektorat Daerah
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				**5,500**		**5,500**		**5,500**		**5,500**		**5,500**	Inpektorat Daerah
Outcomes: Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi pada PD Provinsi	100	100		100		100		100		100		Inpektorat Daerah
	2.Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.09	3.17		3.22		3.25		3.27		3.30	3.09	Inpektorat Daerah

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				**6,053**		**6,053**		**6,053**		**6,053**		**6,053**	Badan Kesbangpol
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Badan Kesbangpol
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				**2,700**		**2,700**		**2,700**		**2,700**		**2,700**	Badan Kesbangpol
Outcomes: Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100		100		100		100		100		Badan Kesbangpol
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				**6,782**		**6,918**		**7,056**		**7,198**		**7,342**	Badan Kesbangpol
Outcomes: Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100	100		100		100		100		100		Badan Kesbangpol

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				**358**		**358**		**358**		**358**		**358**	Badan Kesbangpol
Outcomes: Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100	100		100		100		100		100		Badan Kesbangpol
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				**475**		**475**		**475**		**475**		**475**	Badan Kesbangpol
Outcomes: Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100	100		100		100		100		100		Badan Kesbangpol
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				**1,180**		**1,180**		**1,180**		**1,180**		**1,180**	Badan Kesbangpol
Outcomes: Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100	100		100		100		100		100		Badan Kesbangpol

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penentuan target keberhasilan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa visi dan misi kepala daerah dapat diterjemahkan secara operasional dan terukur. Untuk itu, digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai instrumen utama dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun dalam RPJMD ini merupakan hasil seleksi dari berbagai indikator yang tersedia dan dipilih secara cermat untuk merepresentasikan aspek kunci dari misi Gubernur. Pemilihan IKU tidak hanya mempertimbangkan dimensi strategis dan relevansinya terhadap program prioritas daerah, tetapi juga memperhatikan keterukuran, ketersediaan data, serta keselarasan dengan indikator Nasional (RPJMN) maupun Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Setiap IKU dikaitkan langsung dengan sasaran strategis yang tercantum dalam RPJMD dan memiliki target tahunan yang realistis selama periode perencanaan lima tahun. Dengan demikian, IKU menjadi alat ukur kinerja yang konkret dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam menjawab amanat pembangunan sebagaimana tertuang dalam visi: ***"NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan."***

Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) digunakan sebagai alat ukur utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. IKD mencerminkan capaian yang ingin diraih dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Penyusunan target IKD dilakukan secara sistematis dan berbasis data, dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya (*baseline*), sumber daya yang tersedia, serta tantangan dan potensi wilayah.

Target-target yang ditetapkan melalui IKD juga berfungsi sebagai ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan RPJMD dan menjadi dasar evaluasi kinerja Kepala Daerah setiap tahunnya, sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Oleh karena itu, indikator-indikator tersebut disusun agar selaras dengan arah kebijakan Nasional, target Pembangunan Daerah, serta prinsip akuntabilitas kinerja pemerintah.

Dengan penetapan IKD yang tepat dan terukur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki pijakan kuat untuk mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup Masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) berlaku untuk periode tahun 2025 hingga tahun 2030. Adapun tahun 2030 merupakan tahun transisi, yang pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode selanjutnya.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama

NO	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PDRB per kapita	(Rp Juta)	23,52	24,57-24,85	24,71-25,25	24,85–25,65	24,99-26,05	25,13-26,45	25,27-26,85
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Poin	N.A	60,41	69,05	77,69	86,33	94,97	103,61
3	Kontribusi PDRB Sektor Industri	%	2,46	1,31-1,34	1,36-1,41	1,40-1,48	1,45-1,55	1,50-1,62	1,55-1,70
4	Tingkat Kemiskinan	%	19,02	18,81 - 19,36	18,12-18,74	17,43 – 18,12	16,74 – 17,50	16,05 – 16,88	15,36 – 16,26
5	Rasio Gini	Indeks	0,316	0,309 - 0,315	0,302 - 0,308	0,295 - 0,301	0,288 - 0,295	0,281 - 0,287	0,274 - 0,280
6	Kontribusi PDRB Provinsi	%	N.A	0,62	0,6285	0,6370	0,6455	0,6540	0,6625
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,73	3,95-4,75	4,43-5,01	4,78-5,65	5,13-6,29	5,48-6,93	5,83-7,53
8	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,41	3,42	3,43	3,44	3,45	3,46	3,47
9	Indeks Modal Manusia	poin	0,48	0,487	0,493	0,500	0,506	0,513	0,519
10	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	53,27	61,82	63,19	64,57	69,07	70,26	71,45
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	75,00	80,02	80,19	80,36	80,52	80,69	80,86
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,02	2,49 - 2,99	2,39 – 2,94	2,30 – 2,89	2,20 – 2,84	2,10-2,79	2,00 – 2,74
13	Indeks Ekonomi Hijau	Poin	N.A	67,04	67,86	68,68	69,5	70,32	71,14
14	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	50,10	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	62,00

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
1	Indeks Ketahanan Pangan	skor	70,91	71,30	71,80	72,40	73,10	73,70	74,00
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	12,49	11,85	11,22	10,58	9,94	9,30	8,67
3	Cakupan Layanan Air Minum Layak	%	88,55	88,75	88,95	89,15	89,35	89,55	89,75
4	Cakupan Layanan Air Minum Aman	%	N.A	19.05	21.24	23.43	25.62	27.81	30.00
5	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	N.A	34,36	37,42	40,924	44,206	47,48	50,77
6	Rasio Elektrifikasi	%	96,35	97,08	97,81	98,54	99,00	99,27	99,50
7	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	%	NA	2,50	4,88	7,38	9,75	12,13	14,50
8	Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	NA	5,00	9,25	13,5	17,75	22,00	26,25
9	Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	NA	15,00	19,25	23,50	27,75	32,00	36,25
10	Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	%	34,27	34,27	38,38	39,01	40,67	41,12	41,77
11	Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	%	19,85	19,85	20,55	21,30	22,14	23,08	23,85
12	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Poin	131,85	186,87	185,48	184,09	182,70	181,32	179,93
13	Intensitas Energi Primer	SBM/ Rp.Miliar	80,32	79,51	78,70	77,89	77,08	76,27	75,45
14	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	NA	0,465	0,473	0,481	0,489	0,497	0,505
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	75,00	80,02	80,19	80,36	80,52	80,69	80,86

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
16	Indeks Kemahalan Konstruksi	Poin	93,58	92,78	92,22	91,67	91,11	90,56	89,99
17	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,41	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59
18	Konsumsi Listrik Per Kapita	kwh	211,22	216,02	220,82	225,62	230,42	235,22	240,02
19	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,46	1,44	1,43	1,41	1,39	1,37	1,36
20	Kepadatan Penduduk	jiwa/km2	122,00	124,00	126,00	128,00	130,00	132,00	134,00
21	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
22	Indeks Trantibum	Angka	N.A	100	100	100	100	100	100
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	PDRB Per Kapita	Rp, Juta	23,52	24,57-24,85	24,71-25,25	24,85–25,65	24,99-26,05	25,13-26,45	25,27-26,85
2	Kontribusi UMKM Terhadap PDRB	%	86,17	86,17	86,18	86,19	86,20	86,21	86,22
3	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	0,11	3,48	3,56	3,64	3,72	3,80	3,88
4	Tingkat Kemiskinan	%	19,02	18,81 - 19,36	18,12-18,74	17,43 – 18,12	16,74 – 17,50	16,05 – 16,88	15,36 – 16,26
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,73	3,95-4,75	4,43-5,01	4,78-5,65	5,13-6,29	5,48-6,93	5,83-7,53
6	Indeks Gini		0,316	0,3283 - 0,3218	0,324 - 0,3211	0,3211- 0,3204	0,3175 - 0,3197	0,3140 - 0,3190	0,3104 - 0,3183
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,02	2,49 - 2,99	2,39 – 2,94	2,30 – 2,89	2,20 – 2,84	2,10-2,79	2,00 – 2,74
8	Indeks Modal Manusia/IPM	Poin	67,39	0,47	0,463	0,456	0,449	0,51	0,52
9	Proporsi jumlah IKM (Industri Kecil Menengah) pada Level Provinsi	%	N,A	7,45	7,55	7,64	7,74	7,84	7,94
10	Inklusi Keuangan	%	N,A	92,07	92,41	92,76	93,11	93,45	93,80
11	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71,83	72,05	72,35	72,65	72,94	73,24	73,54
12	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,407 - 0,405	0,396	0,385	0,375	0,364	0,354	0,195 - 0,174
13	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	N,A	60,1 - 60,14	60,30	60,50	60,70	60,90	61,11
14	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	55,86	56,30	56,84	57,36	57,89	58,27	58,86

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
15	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	48,45	48,56	48,67	48,78	48,90	49,01	49,12
16	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Level provinsi	%	N.A	7,45	7,55	7,64	7,74	7,84	7,94
17	Proporsi jumlah UKM (Usaha Kecil dan Menengah) pada Level provinsi	%	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41
19	Rasio Koperasi Produktif Provinsi NTT	%	22,00	26,00	27,00	28,00	30,00	35,00	40,00
20	Tingkat Digitalisasi Koperasi	%	50,00	51,00	53,00	55,00	56,00	58,00	60,00
21	Persentase Koperasi Aktif dan Berkinerja Baik	%	77,81	77,63	75,00	77,00	80,00	81,00	85,00
23	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	99,60	100,00	100,20	100,30	100,70	100,80	101,00
25	Prevelensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	37	33,1	31,9	30,7	29,5	28,38	27,1
26	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	8,02	8,16	8,31	8,45	8,59	8,73	8,88
27	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	N,A	13,47-13,48	13,54	13,60	13,67	13,75	13,81
28	Skor Kemampuan Literasi	%							
	- SMA		63,34	63,94	64,54	65,14	65,74	66,34	66,94
	- SMK		58,53	59,83	61,13	62,43	63,73	65,03	66,33
	- SDLB		52,35	53,95	55,55	57,15	58,75	60,35	61,95
	- SMPLB		61,05	61,55	62,05	62,55	63,05	63,55	64,05
	- SMALB		57,22	57,72	58,22	58,72	59,22	59,72	60,22
29	Skor Kemampuan Numerasi	%							
	- SMA		53,89	55,49	57,09	58,69	60,29	61,89	63,49
	- SMK		50,88	53,08	55,28	57,48	59,68	61,88	64,08
	- SDLB		47,59	48,29	48,89	49,49	50,09	50,69	51,29
	- SMPLB		55,03	55,28	55,53	55,78	56,03	56,28	56,53

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	- SMALB		52,94	53,44	53,94	54,44	54,94	55,44	55,94
30	Indeks SPM Pendidikan	%	58,35%	100	100	100	100	100	100
31	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)	%	N.A	28,42	30,62	32,81	35,01	37,21	39,40
32	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	84,25	86,46-86,51	86,87-86,94	87,28-87,37	87,69-87,80	88,10-88,23	88,51-88,67
33	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	54,18-54,22	51,09-51,11	51,65-51,69	52,22-52,28	52,78-52,86	53,34-53,45	67,34-67,45
34	Angka Kematian Ibu	Per 100,000 KH	103,00	101,00	99,00	97,00	95,00	93,00	91,00
35	Angka Kematian Balita	(Per 1000 KH)	11	10	9	8	7	6	5
36	Angka Kematian Bayi	Per 1,000 KH	7,85	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,00
37	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*)	Rata-Rata Anak	2,71	2,70	2,67	2,63	2,60	2,56	2,53
38	Cakupan Penemuan Kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC)	%	56	59	68	72	77	81	85
39	Kapasitas air baku	M3/Detik	N.A	0,04	0,44	0,85	1,25	1,66	2,07
40	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	N.A	10,53	10,60	10,68	10,76	10,85	10,92
41	Persentase Kabupaten/ Kota dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	%	95	96	97	98	99	100	100
III	**ASPEK DAYA SAING**								
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	2,46	1,31	1,36 - 1,41	1,40 - 1,48	1,45 - 1,55	1,50 - 1,62	1,55 - 1,70
2	Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	8,49	8,52	8,60	8,70	8,80	8,90	9,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	N.A	1,35	1,48	1,61	1,74	1,87	2,01
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	77,50	78,60	79,70	80,80	81,90	83,00	84,10
5	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	N.A	73,63	74,45	75,27	76,09	76,91	77,73
6	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	50,10	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	62,00
7	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	N.A	67,04	67,86	68,68	69,50	70,32	71,14
8	Indeks Ekonomi Biru (IBEI)	Indeks	N.A	60,41	69,05	77,69	86,33	94,97	103,61
9	Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	19,05	22,12	25,19	28,26	31,33	34,4	37,47
10	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan	%	46,88	50,76	53,22	55,68	58,14	60,60	63,07
11	Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB	%	N.A	2,36	2,48	2,60	2,72	2,84	2,96
12	Indeks Pembangunan Teknologi dan Informasi dan Komunikasi (IPTIK)	Poin	N.A	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8
13	Indeks Masyarakat Digital	Poin	42,32	47,21	52,10	56,99	61,88	66,77	71,66
14	Koefisien variasi harga antarwilayah tingkat provinsi	%	N.A	11,49	11,21	10,93	10,65	10,37	10,09
15	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	N.A	46,09	46,111	46,132	46,153	46,174	46,195
16	Persentase desa mandiri	%	1,78	2,42	3,06	3,69	4,33	4,97	5,61
17	Return on Aset (ROA) BUMD	%	N.A	1,04	1,22	1,39	1,57	1,74	1,92
18	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	26,68	27*	28,4	29,8	31,2	32,6	34,0
19	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	-37,52	-34,56	-31,60	-28,64	-25,68	-22,72	-19,76
20	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	%	30,21	30,50	31,00	31,50	32,00	32,50	33,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
21	Tingkat Inflasi	%	N.A	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1
22	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	N.A	28,68	31,72	34,76	37,80	40,84	43,88
23	Aset Dana Pensiun/PDRB	Rp	N.A	0,72	1,04	1,36	1,68	2,00	2,32
24	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	%	N.A	562363,86	782933,43	1003503,00	1224072,57	1444642,14	1665211,71
25	Total Kredit/PDRB	%	N.A	36,3	38,3	40,4	42,4	44,5	46,5
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1	Indeks Reformasi Hukum	Poin	N.A	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	82,50
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	75,63	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	84,00
3	Persentase penegakan hukum peraturan daerah	%	N.A	70,00	71,50	73,00	74,50	76,00	77,50
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	3,87	4,40	4,43	4,46	4,49	4,52	4,10
5	Indeks Pemerintah Digital	Poin	N.A		1,70	1,70	1,90	1,90	2,00
6	Indeks Pelayanan Publik	Skor	3,56	3,66	3,73	3,80	3,87	3,94	4,00
7	Indeks kepatuhan Pelayanan Publik	Skor	77,85	79,89	82,08	85,39	89,79	95,25	98,5
8	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Level	94,30	94,39	94,47	94,56	94,64	94,73	94,82
9	Indeks Integritas Nasional	Poin	N.A	65,65	66,31	66,97	67,63	68,29	68,95
10	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	%	N.A	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00
11	Indeks Demokrasi Provinsi	Level	N.A	78,22 - 81,47	78,35 - 81,60	78,48 - 81,73	78,61 - 81,86	78,74 - 81,99	78,87 - 82,12
12	Proporsi Penduduk Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya	%	N.A	64,03	64,88	65,73	66,58	67,43	68,28
13	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,41	3,42	3,43	3,44	3,45	3,46	3,47
14	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	80	80	85	90	95	100	100
15	Indeks Kapabilitas APIP	Level	3,09	3,12	3,17	3,22	3,25	3,27	3,30
16	Opini BPK	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
17	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	82,91	83,41	83,91	84,41	84,91	85,41	85,91
18	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	N.A	15,00	16,5	18,00	19,5	21,00	22,5
19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	68,86	70,12	70,93	71,75	72,56	73,38	74,19
20	Rasio Konektivitas	Poin	0,66	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72	0,73
21	Indeks Pembangunan Olahraga	Poin	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,40
22	Indeks EPSS	Nilai	2,12	2,25	2,25	2,40	2,40	2,60	2,60
23	Indeks Keamanan Informasi	Level	479,00	479,00	480,00	482,00	483,00	485,00	487,00
24	Nilai Sakip Pemerintah Provinsi	Skor	63,68	65,00	68,00	71,00	74,00	77,00	80,05
INDIKATOR KINERJA KUNCI									
A	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR**								
I	**URUSAN PENDIDIKAN**								
1	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	N.A	13,47-13,48	13,54	13,60	13,67	13,75	13,81
2	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,02	8,61-8,62	8,49	8,38	8,27	8,15	8,04
3	Skor Kemampuan Literasi	%							
	- SMA		63,34	63,94	64,54	65,14	65,74	66,34	66,94
	- SMK		58,53	59,83	61,13	62,43	63,73	65,03	66,33
	- SDLB		52,35	53,95	55,55	57,15	58,75	60,35	61,95
	- SMPLB		61,05	61,55	62,05	62,55	63,05	63,55	64,05
	- SMALB		57,22	57,72	58,22	58,72	59,22	59,72	60,22
4	Skor Kemampuan Numerasi	%							
	- SMA		53,89	55,49	57,09	58,69	60,29	61,89	63,49
	- SMK		50,88	53,08	55,28	57,48	59,68	61,88	64,08
	- SDLB		47,59	48,29	48,89	49,49	50,09	50,69	51,29

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	- SMPLB		55,03	55,28	55,53	55,78	56,03	56,28	56,53
	- SMALB		52,94	53,44	53,94	54,44	54,94	55,44	55,94
5	Indeks SPM Pendidikan	Indeks	58,35	100	100	100	100	100	100
6	Iklim keamanan satuan pendidik	%							
	- SMA		71,31	71,81	72,31	72,81	73,31	73,81	74,31
	- SMK		69,38	69,78	70,28	70,78	71,28	71,78	72,28
	- SLB		69,01	69,51	70,01	70,51	71,01	71,51	72,01
7	Iklim kebhinekaan	%							
	- SMA		75,31	75,81	76,31	76,81	77,31	77,81	78,31
	- SMK		73,01	73,51	74,01	74,51	75,01	75,51	76,01
	- SLB		6781,00	68,31	68,81	69,31	69,81	70,31	70,81
8	Iklim Inklusivitas	%							
	- SMA		58,67	59,17	59,67	60,17	60,67	61,17	61,67
	- SMK		56,86	57,36	57,86	58,36	58,86	59,36	59,86
	- SLB		65,20	65,70	66,20	66,70	67,20	67,70	68,20
9	Kepuasan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan SMK	%	94,49	94,99	95,49	95,99	96,49	96,99	97,49
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18	%	75,92	76,42	76,92	77,42	77,92	78,42	78,92
11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4 - 18 Penyandang Disabilitas	%	54,35	54,85	55,35	55,85	56,35	56,85	57,35
II	**URUSAN KESEHATAN**								
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71,83	72,05	72,35	72,65	72,94	73,24	73,54
III	**URUSAN PEKERJAAN UMUM**								
1	Indeks Layanan Infrastruktur KePUan	Poin	7,65	17,65	27,65	37,65	47,65	57,65	67,65

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
IV	**URUSAN PERUMAHAN RAKYAT**								
1	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	46,88	50,76	53,22	55,68	58,14	60,60	63,07
V	**URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								
1	Persentase pencapaian SPM Ketenteraman,ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Penanganan pengaduan masyarakat yang terselesaikan dalam setahun	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase pencegahan daerah rawan kebakaran yang terpetakan dalam setahun	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,41	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59
VI	**URUSAN SOSIAL**								
1	Indeks Kesejahteraan Sosial								
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan sosialnya.	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dan berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	%	88,32	90	90	90	90	90	90
B	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR**								
I	**URUSAN TENAGA KERJA**								
1	Persentase Tenaga Kerja Terlatih yang di tempatkan secara prosedural	%	78,73	85,00	88,00	90,00	93,00	95,00	96,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Pembinaan Hubungan Industrial dan pengawasan Norma Kerja	%	50,00	51,28	54,49	57,69	60,90	64,10	67,31
II	**URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,407 - 0,405	0,396	0,385	0,375	0,364	0,354	0,195 - 0,174
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	93,77	94,03	94,29	94,55	94,82	95,09	95,36
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Poin	48,45	48,56	48,67	48,78	48,90	49,01	49,12
III	**URUSAN PANGAN**								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	70,91	71,30	71,80	72,40	73,10	73,70	74,00
IV	**URUSAN PERTANAHAN**								
1	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Kewenangan Provinsi	Poin	36,9	41,9	46,9	51,9	56,9	61,9	66,9
V	**URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	75,00	80,02	80,19	80,36	80,52	80,69	80,86
VI	**URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								
1	Jumlah Cakupan Kepemilikan Dokumen Identitas Kependudukan	Persen	97,42	98,1	98.35	98.50	98,55	98,60	98,65
2.	Jumlah Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	Persen	81,57	82%	83%	84%	85%	85.5	86%
3	Jumlah Perjanjian Kerjasama Penggunaan Data Kependudukan	Jumlah	0	2	4	5	7	8	10
VII	**URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								
1	Indeks Desa	Nilai	0,63	0,65	0,66	0,67	0,69	0,70	0,72
VIII	**URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	59,20	60,90	62,60	64,30	66,00	67,70	69,40
IX	**URUSAN PERHUBUNGAN**								
1	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	Rasio	2,658	2,671	2,699	2,712	2,740	2,753	2,781
2	Rasio Konektivitas Kab/kota	Rasio	0,337	0,341	0,343	0,348	0,353	0,358	0,363
X	**URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
1	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan di Publikasi	%	Indikator Baru	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
2	Persentase Badan Publik (PD Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang Informatif	%	53,66	57,00	62,00	67,00	72,00	77,00	77,00
3	Cakupan Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	%	Indikator Baru	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
4	Cakupan pengembangan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	%	Indikator Baru	60,00	62,00	65,00	68,00	70,00	70,00
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor/Nilai	3,87/N.A	3,87/N.A	3,89/1,7	3,91/1,7	3,95/1,9	4,0/1,9	4,1/2
6	Presentase OPD yang dilayani Akses Internet Terintegrasi oleh Dinas Kominfo	%	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Jumlah aplikasi layanan publik yang terintegrasi (SPLP)	Jumlah Aplikasi	Indikator Baru	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00
8	Jumlah PD yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)	Jumlah PD	0,00	0,00	12,00	24,00	31,00	41,00	41,00
9	Jumlah Aplikasi yang memanfaatkan pusat data Pemerintah Provinsi NTT	Jumlah Aplikasi	Indikator Baru	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00
10	Jumlah Area Blankspot yang telah diintervensi	Jumlah Desa	Indikator Baru	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bidang Kominfo Yang bertalenta Digital	Jumlah orang	Indikator Baru	0,00	200,00	210,00	220,00	230,00	860,00
12	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi	Jumlah Layanan	Indikator Baru	0,00	6,00	7,00	8,00	10,00	10,00
XI	**URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**								
1	Kontribusi UMKM Terhadap PDRB	%	75,48	75,49	75,50	75,51	75,52	75,53	75,54
XII	**URUSAN PENANAMAN MODAL**								
1	Persentase realisasi Investasi	%	67,36	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
XIII	**URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								
1	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Kreativitas Pemuda Milenial serta Pengembangan Wirausaha Muda dengan Data Terpilah Gender	% (1000 Wirausaha per Tahun/6000 Target Akhir)	2796	17%	33%	50%	67%	83%	100%
2	Persentase Peningkatan Perolehan Medali Olahraga Prestasi dan Paralympik	Medali (%)	101 (126%)	65 (81%)	68 (85%)	71 (89%)	74 (92%)	77 (96%)	80 (100%)
3	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga	Cabang Olahraga (%)	15 (54%)	16 (57%)	20 (71%)	28 (100%)	28 (100%)	28 (100%)	28 (100%)
4	Persentase Pembinaan Organisasi Kepramukaan	(%)	100	100	100	100	100	100	100
XIV	**URUSAN STATISTIK**								
1	Indeks EPSS	Nilai	2,12	2,25	2,25	2,40	2,40	2,60	2,60
2	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	%	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
3	Tingkat Pemenuhan data	%	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	sektoral								
XV	**URUSAN PERSANDIAN**								
1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKAMI)	%	23,00	38,00	40,00	43,00	46,00	50,00	50,00
2	Nilai *Cyber Security Maturity* (CSM)	Level	318,00	320,00	340,00	350,00	360,00	380,00	380,00
3	Presentase PD Yang memiliki keamanan Informasi	%	Indikator baru	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00
XVI	**URUSAN KEBUDAYAAN**								
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	53,69	54,89	56,09	57,29	58,49	59,69	60,89
XVII	**URUSAN PERPUSTAKAAN**								
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	62,62	63,00	63,50	64,00	64,50	65,00	65,50
XVIII	**URUSAN KEARSIPAN**								
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	Nilai	60,19	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00
C	**URUSAN PILIHAN**								
I	**URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**								
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	89	89	90	90	91	91	92
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan NTPi)	Indeks	100	100	101	101	102	102	103
II	**URUSAN PARIWISATA**								
1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	7,77	7,77	7,80	7,84	7,90	7,95	8,00
2	Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap PDRB (%)	%	0,72	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00
III	**URUSAN PERTANIAN**								
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	99,60	100,00	100,20	100,30	100,70	100,80	101,00
IV	**URUSAN KEHUTANAN**								

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Tutupan Lahan Kritis	%	1,49	1,49	1,51	1,52	1,54	1,56	1,58
2	Persentase Luasan Hutan Yang Dimanfaatkan Untuk Perhutanan Sosial	%	15,72	16,58	17,44	18,30	19,16	20,02	20,88
V	**URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**								
1	Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	19,05	22,12	25,19	28,26	31,33	34,4	37,47
2	Rasio Elektrifikasi	%	96,35	97,08	97,81	98,54	99,00	99,27	99,50
VI	**URUSAN PERDAGANGAN**								
1	Kontribusi Sektor Perdangan Terhadap PDRB	%	12,80	12,90	13,00	13,10	13,20	13,30	13,50
2	Persentase Nilai Ekspor Non Migas	%	95,27	96,00	96,25	96,50	96,75	97,00	97,25
VII	**URUSAN PERINDUSTRIAN**								
1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00
2	Persentase Pelaku IKM Yang Mendapatkan Fasilitas Sertifikasi	%	100,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
VIII	**URUSAN TRANSMIGRASI**								
1	Persentase Pengembangan Dan Pembinaan Kawasan Transmigrasi	%	29,41	35,29	41,18	47,06	52,94	58,82	64,71
D	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								
I	**UNSUR SEKRETARIAT DAERAH**								
1	Indeks Kematangan Organisasi	%	30	30	34	38	42	46	50
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	88,5	89,00	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00
3	Persentase penyusunan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik oleh Perangkat Daerah Pengampu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase Perangkat Daerah/Biro/RSD Provinsi dengan Nilai SAKIP minimal BB "SANGAT BAIK"	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Skor	73,18	75,00	78,00	82,00	85,00	90,00	95,00
6	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	%	36,92	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	97,00
7	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Area Pengadaan Barang/Jasa	Skor	56,7	78,00	78,00	80,00	80,00	85,00	90,00
8	Persentase Capaian Peraturan Perundang-Undangan	%	147,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase Capaian Penegakan Hukum dan Pengelolaan HAM	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
II	**UNSUR SEKRETARIAT DPRD**								
1	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	99,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
III	**UNSUR PERENCANAAN**								
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	82,91	83,41	83,91	84,41	84,91	85,41	85,91
IV	**UNSUR KEUANGAN**								
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	NA	65,518	68,279	71,040	73,801	76,562	79,325
3	Kontribusi PAD Terhadap Pendaptan Daerah	%	30,21	30,5	31	31,5	32	32,5	33
V	**UNSUR KEPEGAWAIAN**								
1	Indeks Profesionalitas ASN	%	81,19	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00
VI	**UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Pengembangan Kompetensi Dasar	%	88,33	90,08	91,83	93,58	95,33	97,08	98,83
2	Indeks Profesionalitas ASN	%	88,00	89,75	91,50	93,25	95,00	96,75	98,50

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Dimensi Pengembangan Kompetensi Manajerial								
3	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan	%	80,16	81,91	83,66	85,41	87,16	88,91	90,66
4	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural	%	85,00	86,75	88,50	90,25	92,00	93,75	95,50
5	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Pengembangan Kompetensi Teknis	%	85,00	86,75	88,50	90,25	92,00	93,75	95,50
6	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Pengembangan Kompetensi Fungsional	%	65,67	67,42	69,17	70,92	72,67	74,42	76,17
VII	**UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								
1	Proporsi Hasil Riset Dan Inovasi Sebagai Input Dalam Perumusan Kebijakan	%	N.A	77,36	83,01	88,68	94,33	100,00	100,00
VIII	**UNSUR PENGAWASAN**								
1	Indeks Kapabilitas APIP	Poin	3,09	3,09	3,12	3,17	3,22	3,25	3,27
IX	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**								
1	Indeks Demokrasi Provinsi	Poin	N.A	78,22 - 81,47	78,35 - 81,60	78,48 - 81,73	78,61 - 81,86	78,74 - 81,99	78,87 - 82,12

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dilakukan dengan dasar hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, sinkronisasi terkait akuntabilitas kinerja daerah, penyesuaian dengan RPJMN Tahun 2025 – 2029 dan berbagai kebijakan pusat maupun tertib administrasi yang diatur dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.

Dokumen RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 adalah penjabaran Visi, Misi, dan Program Gubernur/Wakil Gubernur yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan politis serta pendekatan atas-bawah *(top – down)* dan bawah-atas *(bottom – up).*

Pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 perlu memperhatikan beberapa kaidah, sehingga menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan turunan lainnya, untuk dapat dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur bagaimana perencanaan tahunan pada saat RPJMD akan berakhir periodenya.

5.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunN dan sebagai dokumen yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
2. Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.
3. Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten dan Kota, dunia usaha serta masyarakat.
4. Kepala Perangkat Daerah Provinsi NTT berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
5. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota pada wilayah Provinsi NTT berpedoman pada RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 sehingga terwujud sinergi dan kolaborasi pembangunan di Provinsi NTT.

6. Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi NTT pada Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 berpedoman pada RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi NTT mulai Tahun 2025 sampai dengan 2030.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029

5.2 PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Memperhatikan program/kegiatan yang mempunyai prioritas tinggi, namun Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dalam kemampuan penganggaran seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan:

1. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya serta kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta *(public-private partnership)* serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik serta pembangunan kapasitas yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.
2. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaaan (*Corporate Social and Environmental Responsibility/CSR and CER*) diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi.
3. Koordinasi dan kemitraan dengan lembaga non-pemerintah, baik lembaga dalam negeri maupun lembaga internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta perubahan perilaku yang lebih baik bagi masyarakat.
4. Kemitraan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, Swasta, Lembaga Agama, Perguruan Tinggi, TNI, Polri, Lembaga Internasional dan Pemerintah Desa dalam percepatan penurunan jumlah penduduk miskin, peningkatan IPM, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

5. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi NTT harus mempertimbangkan kondisi bauran geografi-biologi-ekonomi-politik-sosial-budaya (geobioekopolsosbud) sebagai daerah kepulauan dan daerah perbatasan dengan memanfaatkan semua mitra potensi untuk kepentingan nasional dan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
6. Indikator-Indikator Kinerja Utama Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025-2029 merupakan sebuah rancangan masa depan Nusa Tenggara Timur yang harus dicapai bersama dan sebagai tantangan besar bagi seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan masa depan masyarakat yang bermartabat.
7. Kunci pembangunan terletak pada inovasi yang berbasis pada iptek dengan langkah-langkah terobosan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan mengutamakan nilai-nilai moralitas, hukum, partisipasi, efektivitas, efisiensi, adil (inklusif), transparan, dan akuntabel.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001